

Dr. Nursalam, M.Si

Suardi, S.Pd., M.Pd

SOSIOLOGI ORGANISASI **(‘Aisyiyah)**



Dr. Nursalam, M.Si
Suardi, S.Pd., M.Pd

SOSIOLOGI ORGANISASI

('Aisyiyah')

PENERBIT MENTARI JAYA
2019

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. *Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat 2 dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).*
2. *Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta terkait bagaimana dimaksud pada ayat (1) pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).*

© Hak Cipta pada pengarang

Dilarang mengutip sebagian atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun tanpa seizin penerbit, kecuali untuk kepentingan penulisan artikel atau karangan ilmiah.

Judul Buku	: SOSIOLOGI ORGANISASI ('AISYIYAH)
Penulis	: Dr. Nursalam, M.Si Suardi, S.Pd., M.Pd
Halaman	: 206
ISBN	: 978-623-7200-62-8
Ukuran Buku	: 23x15 cm
Layout Oleh	: Sulaiman Sahabuddin Al Karawish

PENERBIT MENTARI JAYA

JALAN BLOK ANJUR NO. 32, KEC. KERTASEMAYA, KAB.

CIREBON, HP. 085298876618

EMAIL: mentarijaya211@gmail.com

Persembahan

Kedua Orang Tua Tercinta
Istri dan Anak Tersayang
Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar
Pembaca Buku dan Mahasiswa Program Studi Pendidikan
Sosiologi

Kata Penyemangat Penulisan Buku Referensi

**“Jangan Perna Bertanya Apa yang Telah
Diberikan Negara/Bangsa/Masyarakat atau
Universitas untuk Kita
Bertanyalah Apa yang Sudah Kita Berikan untuk
Negara/Bangsa/Masyarakat Atau Universitas”**

PRAKATA

Penulis mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas kemudahan yang diberikan dalam pembuatan atau penulisan buku ini dengan judul “Sosiologi Organisasi (‘Aisyiyah)” berjalan lancar. Buku ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis tentang organisasi dalam suatu masyarakat lebih khusus eksistensi organisasi ‘Aisyiyah. Buku buku ini bisa dijadikan referensi bagi guru, dosen, mahasiswa atau masyarakat umum untuk lebih memahami organisasi ‘Aisyiyah.

Buku ini terdiri dari lima pembahasan, yaitu BAB I, membahas tentang “Perkembangan ‘Aisyiyah”. BAB II, membahas tentang “Organisasi ‘Aisyiyah”. BAB III, membahas tentang “Dinamika Kemandirian Organisasi ‘Aisyiyah”. BAB IV membahas tentang “Keberlanjutan Organisasi ‘Aisyiyah”. BAB V, membahas tentang “Dinamika Kepatuhan Organisasi ‘Aisyiyah”. Selama penyusunan buku ini, penulis mendapatkan berbagai dukungan dari berbagai pihak seperti dari Sekretaris Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Dr. Muhammad Akhir, S.Pd., M.Pd, Ketua Program Studi Pendidikan Sosiologi Drs. H. Nurdin, M.Pd, Dekan Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan Erwin Akib, M.Pd, Ph.D, dan dari bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Prof. Dr. Rahman Rahim, M.M, dan dosen-dosen se-Universitas Muhammadiyah Makassar, terkhusus pada Program Studi Pendidikan Sosiologi.

Penulis menyadari bahan ajar ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis senantiasa menerima kritik dan saran yang sifatnya konstruktif dari rekan dosen dan pimpinan sebagai validator buku referensi ini demi kemajuan lembaga dan organisasi Muhammadiyah.

Makassar, April 2019

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA PENULIS_iv

DAFTAR ISI_v

BAB I PERKEMBANGAN 'AISYIYAH

- A. Sejarah 'Aisyiyah_1
- B. Penelitian 'Aisyiyah_2
- C. Gerakan Dakwah 'Aisyiyah_2
- D. Gerakan Dakwah 'Aisyiyah dalam Kajian
Sosiologi_9

BAB II ORGANISASI 'AISYIYAH

- A. Kemandirian dan Keberlanjutan Organisasi_11
- B. Kepatuhan dalam Organisasi_24.
- C. Hubungan 'Aisyiyah dengan Muhammadiyah_35
 - 1. Hubungan yang Bersifat Koordinasi_35
 - 2. Hubungan yang Bersifat Struktural_36
 - 3. Hubungan yang Bersifat Fungsional_37
 - 4. Hubungan yang Bersifat Kultural_38

BAB III DINAMIKA KEMANDIRIAN ORGANISASI 'AISYIYAH

- A. Medan Visional 'Aisyiyah_51
- B. Paradoks Independensi 'Aisyiyah_74
- C. Autopoiesis 'Aisyiyah_82
- D. Keberlanjutan Organisasi 'Aisyiyah dalam
Merespons Dinamika Lingkungan Eksternal_89

BAB IV KEBERLANJUTAN ORGANISASI

'AISYIYAH

- A. Fase Pra Kemerdekaan_133
- B. Fase Kemerdekaan_135
- C. Fase Reformasi-137

BAB V DINAMIKA KEPATUHAN ORGANISASI

'AISYIYAH

- A. Prinsip Organisasi 'Aisyiyah_159
- B. Kepatuhan Organisasi 'Aisyiyah_160

BAB I

PERKEMBANGAN ‘AISYIYAH

A. Sejarah ‘Aisyiyah

Lahirnya ‘Aisyiyah sebagai komponen Perempuan Muhammadiyah yang bergerak di bidang sosial keagamaan sudah menjelang satu abad (96 tahun) telah menunjukkan kiprahnya untuk pencerahan, pemberdayaan, dan kemajuan terhadap kemaslahatan bagi kehidupan umat, masyarakat, bangsa, dan negara (dunia kemanusiaan). Keberhasilan dan peran positif ‘Aisyiyah merupakan karunia Allah yang diraih karena kekuatan keihlasan, komitmen, dan partisipasi ‘Aisyiyah sebagai gerakan dakwah amar makruf nahi munkar serta tajdid, sehingga selalu menunjukkan semangat yang tinggi untuk berkiprah konstruktif dalam kehidupan. Keberhasilan itu juga diraih karena kepercayaan dan dukungan berbagai pihak yang memiliki semangat yang sama untuk memajukan kehidupan masyarakat.

‘Aisyiyah lahir pada tahun 1917 saat situasi dan kondisi masyarakat Indonesia dalam keterbelakangan, kemiskinan, tidak terdidik, awam dalam pemahaman keagamaan, dan berada dalam zaman penjajahan belanda. Kondisi perempuan semakin memprihatinkan ketika pada saat yang sama dibalut dengan budaya masyarakat yang bersifat patriarki, menempatkan perempuan tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam yang memuliakan dan menjunjung tinggi martabat kaum perempuan. KH. Ahmad Dahlan bersama Nyai Siti Walidah menaruh perhatian besar dan memberikan jalan keluar yang berjangka panjang dalam bentuk usaha terobosan atas kondisi kaum perempuan yang tidak beruntung dari berbagai aspek kehidupan tersebut. Dengan spirit dan pandangan agama berwawasan tajdid (pembaruan), menjadi keyakinan dan pandangan Kyai

Dahlan terhadap kaum perempuan dan umat Islam umumnya, maka diadakan kegiatan-kegiatan pencerahan bagi kaum perempuan muda yang disebut *Sopo Tresno* dan selanjutnya disebut *gerakan 'Aisyiyah*.

Kyai Dahlan berpandangan bahwa perempuan tidak sepatutnya hanya mengurus rumah tangga, namun perempuan memiliki tanggung jawab yang sama dengan pria dalam tugas-tugas sosial untuk pencerahan dan kesejahteraan masyarakat. Sejak itulah hadir perubahan baru dalam pandangan perempuan muslim dari ranah domestik ke ranah publik sejalan dengan prinsip dan misi Islam sebagai agama yang membawa rahmatan lil-'alamin. Dengan demikian kelahiran 'Aisyiyah adalah bentuk pembaruan yang menjunjung tinggi dan memuliakan kaum perempuan serta mendorong untuk berkiprah di ruang publik guna membawa misi dakwah dan tajdid bagi kemajuan dan perkembangan hidup umat manusia.

B. Penelitian 'Aisyiyah

Beberapa hasil penelitian tentang 'Aisyiyah Kota Makassar, antara lain: (1) Ismah Salman (2005), meneliti tentang Keluarga Sakinah dalam "Diskursus Gender" di Organisasi Perempuan Muhammadiyah. Kesimpulan yang ditarik dari penelitian antara lain, "Kehidupan keluarga yang agamais dapat diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan 'Aisyiyah". (2) Hidayah Quraisy (2005), meneliti tentang "Analisis Kinerja 'Aisyiyah di Desa Binaan (Qoryah Thoyyibah) di Labakkang". Kesimpulan yang diperoleh dari studi ini adalah, "Pembinaan dan kaderisasi warga 'Aisyiyah melalui Desa Binaan adalah sangat efektif demi kelangsungan dan keberlanjutan amal usaha Muhammadiyah". (3) Rosmaniah Hamid (2008), meneliti tentang "Implementasi Hadis-Hadis dalam konsep keluarga sakinah Kota

Makasar”. Studi ini menyimpulkan bahwa, “Keluarga sakinah merupakan harapan dari setiap keluarga Muslim, karena itu ‘Aisyiyah sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah telah memberi contoh melalui kegiatan pengajian secara rutin dan kegiatan keagamaan lainnya”. Mencermati garis besar simpulan dari hasil penelitian di atas, telah memberi inspirasi kepada peneliti untuk melakukan kajian dalam perjalanan sejarah, khususnya peran dan kiprah ‘Aisyiyah sebagai ortom Muhammadiyah yang bergerak di bidang sosial keagamaan dan pendidikan di Indonesia bisa mandiri dan berlanjut.

C. Gerakan Dakwah ‘Aisyiyah

Realitas gerakan serta manfaat ‘Aisyiyah selama ini telah dapat dirasakan oleh masyarakat luas terlihat dari banyaknya amal usaha yang dilakukan. Sebuah cita-cita yang didambakan oleh Nyi Ahmad Dahlan selangkah demi selangkah, setahap demi setahap mulai diwujudkan. Satu abad bukanlah waktu yang singkat untuk suatu organisasi yang masih tetap eksis. Hal ini mengindikasikan sejauh mana estafet gerakan ‘Aisyiyah telah berjalan diiringi dengan sistem organisasi yang solid dan mekanisme kerja yang terstruktur.

Eksistensi ‘Aisyiyah sebagai sebuah organisasi serta langkah yang ditempuhnya dalam upaya mewujudkan masyarakat madani merupakan salah satu indikator sebagai identitas yang dimiliki untuk mengidentifikasi ada tidaknya perkembangan masyarakat madani. Relevansi indikatornya yaitu termanifestasi dalam organisasi yang dipenuhi oleh gerakan ‘Aisyiyah. Hal ini ditinjau dari prinsip-prinsip organisasi dipegang oleh masyarakat madani sebagai perwujudan identitasnya secara material. Hal ini berarti masyarakat madani bukan merupakan individu-individu yang partisipatif dan otonom saja, tetapi

terdiri dari sekumpulan individu warga yang tergabung dalam asosiasi-asosiasi yang memiliki tatanan yang menjamin anggotanya mampu mengekspresikan diri, mengembangkan minat, saling menukar informasi, memediasi perbedaan-perbedaan dan menciptakan pola-pola hubungan yang stabil. Di samping itu, mereka juga tertata dalam organisasi modern yang mengembangkan nilai-nilainya sendiri secara konsisten.

Cita-cita menuju masyarakat madani adalah juga sejalan dengan visi pengembangan 'Aisyiyah, yaitu "tercapainya usaha-usaha 'Aisyiyah yang mengarah pada penguatan dan pengembangan dakwah secara berkualitas, yakni masyarakat Islam yang sebenar-benarnya" merupakan penjabaran berkesinambungan dari visi idealnya untuk tegaknya agama Islam dan terwujudnya masyarakat Islam yang dicita-citakan.

Gerakan dakwah yang dimaksud adalah Dakwah Islam Amar Makruf Nahi Munkar. Dakwah Islam; artinya mengajak, menyeru dan memanggil umat manusia untuk memeluk dan melaksanakan serta menegakkan ajaran Islam. Amar makruf; artinya mengajak dan menunjukkan pada hal-hal yang baik, bermanfaat dan terpuji. Nahi Munkar; artinya mencegah, melarang, menolak, menjauhkan dan mengikis hal-hal yang buruk, kotor dan keji.

'Aisyiyah bukan sekadar nama besar sebagai salah satu organisasi perempuan terbesar di Indonesia. 'Aisyiyah memiliki jaringan struktural yang cukup kuat dan luas di seluruh wilayah Nusantara yang sangat menunjang gerak dakwah yang dilakukannya. Jaringan struktural 'Aisyiyah tersebar dan berjenjang dalam beberapa level yang mempunyai kewenangan dan wilayah kerja masing-masing. Jaringan yang tersebar di seluruh daerah ini merupakan potensi yang sangat besar untuk membangun umat dan bangsa ini menuju masyarakat utama dalam bentuk sinergi dan jaringan yang kuat di beberapa bidang.

Jaringan struktural merupakan kontribusi 'Aisyiyah terbesar dalam mengakomodasikan warga dalam menyalurkan aspirasinya, sekaligus juga mengkoordinasikan gerakan dakwah Islamiyah di seluruh daerah melalui berbagai aktivitas keagamaan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, sosial, dan sebagainya. Pengembangan dakwah Islam melalui dakwah jamaah dan dakwah kultural merupakan strategi dakwah masa kini. Strategi ini mengingat tantangan global, perkembangan teknologi, dan pola pikir umat yang semakin berkembang. Konsep tersebut kemudian diwujudkan melalui gerakan Tajdidiyah, Islahiyah, dan Tabsyiriyah (TIT) menggunakan pendekatan sumber daya manusia, ekonomi, kesejahteraan, struktural dan pendekatan global.

Pendekatan sumber daya manusia merupakan upaya mencerdaskan kehidupan umat. Pendekatan ekonomi dan kesejahteraan dilaksanakan dengan mengajarkan etos kerja yang tinggi. Pendekatan struktural tetap ditingkatkan dengan mewujudkan kegiatan politik dan birokrasi sebagai pendukung dan pelindung dakwah. Pendekatan global juga perlu dilakukan dengan tetap berpikir makro dan mikro secara seimbang, beraktivitas lintas sektoral, membangun kolektivitas dan individual, umum maupun khusus, untuk kemaslahatan umat manusia.

Perkembangan organisasi 'Aisyiyah sejak awal berdirinya dilakukan melalui gerakan Tajdidiyah, Islahiyah, dan Tabsyiriyah, atau disingkat 'TIT'. Tajdidiyah; artinya pembaharuan, peningkatan dalam pemahaman agama atau mengembalikan ajaran agama sesuai tuntunan Qur'an dan Sunnah. Islahiyah; artinya perdamaian, kerukunan dan/atau persaudaraan dalam kemasyarakatan. Tabsyiriyah; artinya penggembiraan, pembimbingan serta pemberian dorongan dalam beribadah dan beramal saleh.

Gerakan dakwah melalui TIT yaitu Ibadah, Akhlaq, Tauhid, Tabligh, Kegiatan Jihad, Persatuan dan Syi'ar Islam, Pendidikan, Seni dan Budaya, Kesehatan, Ekonomi, serta amalan-amalan Islam lainnya dengan tujuan utama untuk mewujudkan pribadi muslim, mukmin dan mukhsin. Demikian Misi Gerakan TIT 'Aisyiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program dan kegiatan meliputi: (1) menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman, meningkatkan pengalaman, menyebarkan ajaran agama Islam dalam segala aspek kehidupan; (2) meningkatkan kualitas dan kuantitas pengkajian agama Islam; (3) memperteguh iman, memperkuat dan menggembirakan ibadah, mempertinggi akhlak; (4) meningkatkan semangat ibadah, jihad, zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, membangun dan memelihara tempat ibadah, serta amal usaha yang lain; (5) meningkatkan pendidikan, membangun kebudayaan, memperluas ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menggairahkan penelitian; (6) memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang berkualitas; (7) meningkatkan dan mengembangkan kegiatan dalam bidang-bidang sosial, kesejahteraan masyarakat, kesehatan, lingkungan hidup; (8) meningkatkan dan mengupayakan penegakan hukum, keadilan dan kebenaran serta memupuk semangat kesatuan dan persatuan bangsa; (9) meningkatkan komunikasi, ukhuwah, kerjasama di berbagai bidang dan kalangan masyarakat dalam dan luar negeri serta usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi.

Seluruh aktivitas tersebut dilakukan secara mandiri dan mendorong partisipasi dalam kebersamaan. Bentuk-bentuk masyarakat partisipatif yang demikian inilah yang dikembangkan agar kehidupan yang demokratis dapat ditopang oleh masyarakat madani. Dalam hal ini 'Aisyiyah ikut memberikan jawaban atas berbagai permasalahan, baik

problematika daerah, wilayah, nasional maupun global yang dari waktu ke waktu senantiasa mengalami pengembangan. Peran, komitmen serta tanggung jawab ‘Aisyiyah semakin besar dan terbuka. Kehadiran dan keterpanggilan ‘Aisyiyah di setiap jengkal lahan amal usaha pada setiap kondisi merupakan wujud ‘Aisyiyah sebagai gerakan rahmatan lil ‘alamin.

Kunci keberhasilan organisasi (semisal ‘Aisyiyah) tidak dapat diukur dengan melimpahnya materi, atau bisa memimpin organisasi besar. Banyak pemimpin organisasi besar yang mengecewakan anggotanya, karena tidak adanya komunikasi yang baik antara pemimpin dengan anggotanya. Hal ini terkadang seorang pemimpin lebih mengedepankan sikap otoriter dan mengabaikan aspirasi anggota. Perlu dipahami bahwa organisasi bukan milik individu maka sikap individual harus dihindari. Setiap orang memiliki kepentingan yang harus dipahami oleh pemimpin organisasi, tetapi bukan berarti pemimpin harus tunduk dan terkontaminasi oleh banyak kepentingan individu-individu anggota organisasi.

Menurut Amien (2005:220), menemukan format organisasi yang sesuai dengan spirit milenium baru yang senantiasa berubah dengan cepat serta penuh ketidakpastian dijelaskan dengan konsep “Kemandirian Lokal” sebagai acuan utama. Dengan demikian organisasi dapat dilihat sebagai suatu tatanan menjaga atau untuk meningkatkan kualitas kemandirian dari semua komponen tatanan diposisikan sebagai kata kunci. Ini berarti bahwa selain melaksanakan misinya, suatu organisasi seyogyanya berfungsi sebagai pendorong dan fasilitator upaya-upaya para anggotanya untuk meningkatkan kualitas kemandirian mereka (anggota organisasi) dalam mengartikulasikan kepentingan masing-masing.

Fungsi-fungsi dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari misi organisasi. Demikian halnya dalam organisasi ‘Aisyiyah misi tersebut dapat diimplementasikan pengurus dan anggota ‘Aisyiyah baik di tingkat cabang maupun ranting, berdasarkan jumlah dan jenis amal usaha yang dimiliki. ‘Aisyiyah sebagai gerakan Perempuan Muhammadiyah yang semula bernama *Sopo Tresno* (Perkumpulan kaum perempuan), kemudian berubah menjadi ‘Aisyiyah tanggal 22 April 1917. Dalam perkembangannya menjelang satu abad, ‘Aisyiyah tetap konsisten sesuai dengan tatanan (khittah) perjuangan atau gerakan, yaitu “Amar ma’ruf nahi munkar”.

‘Aisyiyah adalah sebuah gerakan perempuan Muhammadiyah yang memiliki 33 Pimpinan Wilayah (setingkat Propinsi), 370 Pimpinan Daerah (setingkat kabupaten/kota), 2.332 Pimpinan Cabang (setingkat Kecamatan), dan 6.924 Pimpinan Ranting (setingkat Kelurahan/Desa). Selain itu, ‘Aisyiyah memiliki amal usaha yang bergerak di berbagai bidang (pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat). Amal Usaha di bidang pendidikan saat ini berjumlah 4.560 yang terdiri dari Kelompok Bermain, Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-Kanak (TK), Tempat Penitipan Anak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan lain-lain. Amal usaha di bidang Kesehatan, terdiri dari Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Badan Kesehatan Ibu dan Anak, Balai Pengobatan dan Posyandu berjumlah 280 tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai gerakan yang peduli dengan kesejahteraan sosial kemasyarakatan, ‘Aisyiyah hingga kini memiliki sekitar 459 amal usaha yang bergerak di bidang ini meliputi : Rumah Singgah Anak Jalanan, Panti Asuhan, Dana Santunan Sosial, Tim Pengrukti Jenazah dan Posyandu.

Menyadari hal tersebut, bahwa harkat dan martabat perempuan tidak akan meningkat tanpa diikuti peningkatan kemampuan di bidang ekonomi. Karena itu, 'Aisyiyah dalam mengelola berbagai amal usaha dapat ditunjang oleh bidang ekonomi, antara lain koperasi, Toko dan/atau kios, Badan Usaha Ekonomi Keluarga (BUEKA), Simpan Pinjam, Home Industri, kursus, dan Arisan. Selain itu, 'Aisyiyah memiliki kegiatan yang berbasis pemberdayaan masyarakat untuk penyadaran terhadap kehidupan bermasyarakat (muslim), berbagai dan bernegara. Terkait dengan kegiatan ekonomi dalam mengelola amal usaha termasuk pengajian, Qoryah Thayyibah, Kelompok Bimbingan Haji (KBIH), Badan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (BAZIS).

Sejalan dengan latar belakang berdirinya 'Aisyiyah yang diasumsikan sebagai wadah (gerakan) tentang kesejahteraan sosial yang diperjuangkan 'Aisyiyah ialah terciptanya suatu kondisi ideal dari tata kehidupan masyarakat "*baldatun thayyibatun wa rabbun ghaffur*", yaitu suatu kehidupan bahagia, sejahtera, penuh limpahan rahmat, dan nikmat Allah saw, di dunia dan di akhirat (tercipta suatu titik keseimbangan aspek jasmaniah dan rohaniah ataupun aspek material dan spiritual. Kelahiran organisasi perempuan sering dipandang sebagai masalah pada masa penjajahan. Hal ini karena gerakan dapat dinilai sebagai batu loncatan untuk menjadikan gerakan perempuan telah mengalami liberalisasi atau emansipasi yang kebablasan di satu pihak, dan di lain pihak lain, gerakan perempuan dilihat dari kondisi strukturalnya apakah benar-benar otonom atau tidak.

Sehubungan dengan itu, perkembangan organisasi 'Aisyiyah Kota Makassar menuju kemandirian melalui pemberdayaan ekonomi, politik, dan sosial budaya dalam masyarakat oleh pengurus dan anggota bersama-sama membuat perencanaan kerja sesuai dengan biaya

kegiatannya. Beberapa item yang menjadi titik sorot dalam perencanaan kerja ini ialah, kegiatan pendidikan dan penyadaran yang berpihak kepada lingkungan dan rakyat terpinggir (*grassroot*), pemberdayaan pada petani, memperkuat tim (*capacity building*) dan jejaring (*net work*) serta kegiatan yang bersifat mendesak dan karitatif (*emergency and caritatif*).

Kegiatan yang direncanakan dalam jangka waktu lima tahun memiliki kerangka acuan yang sistematis, terinci, dan detail. Selain itu, para anggota organisasi (pengelola amal usaha) dengan mempertajam kegiatan-kegiatan tersebut, kurun waktu satu tahun sebagai langkah terobosan. Walaupun demikian disadari bahwa setiap perencanaan mesti dibarengi dengan usaha dan kerja keras secara bersama-sama, saling mengisi dan melengkapi satu sama lain. Jika ditinjau dari konteks sosiologi organisasi, tipologi organisasi merupakan cara untuk membandingkan satu organisasi dengan organisasi lain. Misalnya, organisasi 'Aisyiyah senantiasa menampilkan suatu susunan tugas dan fungsi, peranan, status serta jabatan-jabatan tertentu. Namun, dari kesamaan-kesamaan itu muncul karakteristik tertentu yang membedakan 'Aisyiyah sebagai organisasi otonom dengan organisasi lainnya.

Mencermati pertanyaan yang sangat mendasar adalah, bagaimana memperkembangkan organisasi perempuan Islam dalam memainkan peran sebagai perilaku perubahan sosial. Di sisi lain, fenomena yang ada tentang partai politik menunjukkan kecenderungan mulai dari tingkat pusat, wilayah, cabang, anak cabang, sampai ranting aspirasi mengarah pada partai politik tertentu dan mengusung salah satu pengurusnya menjadi calon anggota DPD, namun hasil yang dicapai tidak signifikan bila dibandingkan dengan jumlah anggota beserta keluarganya yang ada di kota Makassar.

Kenyataan menunjukkan bahwa banyak daerah, wilayah, ranting dan cabang ‘Aisyiyah mengalami permasalahan kader; tidak hanya di Daerah, Wilayah, Cabang dan Ranting di tingkat pusat juga kesulitan mencari kader yang mau dan mampu untuk aktif di ‘Aisyiyah. Yang mampu tapi tidak mau banyak, yang mau dan mampu tapi tidak ada waktu juga sangat banyak. Kekurangan kader di ‘Aisyiyah bukan berarti ‘Aisyiyah tidak diminati oleh kaum perempuan. Namun, pada kenyataannya setiap pengajian dan aneka kegiatan ‘Aisyiyah, selalu diminati banyak peserta dan yang datang itu juga mengakui dirinya sebagai anggota ‘Aisyiyah dan selalu mendukung setiap kegiatan (program kerja) ‘Aisyiyah.

D. Gerakan Dakwah ‘Aisyiyah dalam Kajian Sosiologi

Kajian Sosiologi tentang fenomena yang dihadapi ‘Aisyiyah adalah yang mau bergabung dengan ‘Aisyiyah secara organisasi cukup banyak, tapi yang mau bergabung dan bertanggung jawab (aktif dalam organisasi) itu yang tidak ada. Ibu-ibu ‘Aisyiyah dan kaum perempuan Muhammadiyah, hanya mau jadi anggota, ikut pengajian dan kegiatan lain tetapi jika disertai tanggung jawab mengurus organisasi (pengurus harian), memikirkan agar ‘Aisyiyah lebih maju banyak tidak bersedia. Dengan demikian, fenomena yang dihadapi ‘Aisyiyah adalah kurangnya kader (krisis kader) yang selalu siap menggerakkan roda organisasi. Meskipun demikian, ‘Aisyiyah sebagai ortom Muhammadiyah di mana eksistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) tidak diragukan sejak kelahirannya hingga sekarang.

Menyadari hal tersebut (krisis ideology), maka oleh Pengurus Pusat ‘Aisyiyah menempuh beberapa strategi, antara lain: dengan mengadakan sekolah kader Muallimat dan Stikes serta mendirikan

Pondok Nyi Ahmad Dahlan, kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Di sekolah-sekolah kader itu para remaja putri dibekali aneka kegiatan yang terkait dengan dakwah, serta ditanamkan nilai dan norma-norma kesadaran bahwa, mereka adalah kader-kader penerus 'Aisyiyah di masa datang dan harus menjadi penggerak 'Aiyiyah di manapun mereka berada.

Fenomena tersebut mengungkapkan betapa organisasi perempuan sebesar 'Aisyiyah masih tetap memerlukan bantuan dana atau finansial dari sumber lain. Sekalipun amal usaha seperti Rumah Sakit, Sekolah dan amal usaha lainnya sudah merata di setiap daerah. Kemandirian semestinya terlihat pada moment-moment seperti muktamar atau muswil. Jika hal ini tidak dapat dijawab sebagai tantangan berorganisasi maka 'Asiyah akan mengalami persoalan manajemen keuangan. Dari berbagai persoalan tersebut, Peneliti memfokuskan perhatian pada masalah kemandirian dan keberlanjutan organisasi ''Aisyiyah Kota Makassar, dengan asumsi bahwa Kota Makassar adalah Kota Metropolitan tumbuh dan berkembang dengan pesatnya komunitas perempuan ada yang bersifat institusional, profesional dan mandiri, yang mempertegas Kota Makassar sebagai basis organisasi perempuan di Kawasan Timur Indonesia.

Mencermati latar belakang di atas tentang fenomena sosial terkait dengan kemandirian dan keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah, terutama di era reformasi sebagai organisasi perempuan pertama di Indonesia yang terus berkembang dan tetap eksis dalam kurun waktu yang relatif lama (sudah menjelang satu abad). Sehubungan dengan itu, dalam disertasi ini konsep kemndirian dibatasi pada tiga aspek yang akan dikaji, yaitu medan visional organisasi 'Aisyiyah; paradoks independensi dalam mengelola amal usaha 'Aisyiyah; dan autopoiesis organisasi, yakni

bagaimana ‘Aisyiyah melakukan reproduksi diri sendiri terhadap unit-unit organisasi (meperbaharui dirinya) dan menghasilkan unit-unitnya sendiri sebagai sistem yang otonom dalam mengantisipasi perkembangan serta perubahan organisasi dari fase ke fase, dari periode ke periode sehingga ‘Aisyiyah Kota Makassar dapat bertahan dan berkembang sejak didirikan (1926) sampai sekarang.

Selain itu, tentang keberlanjutan organisasi dalam penelitian ini juga dibatasi pada tiga aspek yang saling terkait, yaitu sistem yang otonom, daya kontigensi, dan lingkungan strategis. Dalam hal ini, ‘Aisyiyah sebagai sistem yang otonom dalam mengelola unit-unit organisasi mampu mengembangkan daya kontigensi dalam merespon lingkungan strategis melalui program kerja yang disusun secara terarah, sistematis, dan terencana. Kemudian tentang kepatuhan organisasi dalam penelitian ini akan ditelusuri bagaimana bentuk kepatuhan yang dikembangkan anggota kepada ‘Aisyiyah dan kepatuhan ‘Aisyiyah kepada Muhammadiyah dibalik kemandiridan dan keberlanjutan organisasi tersebut.

BAB II

ORGANISASI 'AISYIYAH

A. Kemandirian dan Keberlanjutan Organisasi

Pengertian organisasi menurut Sains Lama, Etzioni dalam Liliweri (1997), bahwa sebuah organisasi dibandingkan organisasi lainnya bisa saja lebih otoritarian atau demokratis; sangat terikat peraturan (informal); inovatif atau menolak perubahan; bisa menerima keragaman atau anti-keragaman; bisa membawa atmosfer yang bersahabat atau tidak bersahabat. Menurut Taylor dalam Liliweri (1997), untuk memaksimalkan tugas dan fungsi organisasi maka harus ada gerakan dan tugas yang dialokasikan ke dalam bagian-bagian tertentu. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka organisasi bisa ditata secara ilmiah dan rasional. Oleh karena itu, setiap orang dapat dilatih untuk tampil secara maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang merupakan tanggung jawabnya.

Karakteristik yang menarik dari pandangan Sains Lama, terhadap organisasi adalah mirip dengan model mesin. Manusia dianggap sebagai perlengkapan mesin, untuk mendapatkan produktivitas sebesar-besarnya. Setiap organisasi harus memanfaatkan tenaga manusia seperti mesin. Bahkan gerakan-gerakan mereka atau tenaga kerja dapat diatur supaya dapat memproduksi lebih banyak. Konsep Taylor tentang manusia sebagai pelengkap banyak mendapat tantangan para ahli. Dalam hal ini, Taylor dianggap melakukan dehumanisasi terhadap nilai-nilai dan moral manusia di zaman itu. Meskipun pandangan Taylor mendapat tantangan dari banyak ahli, namun Taylor tetap dianggap berjasa karena telah meneliti organisasi secara ilmiah, khususnya tentang bagaimana efisiensi

penggunaan waktu kerja manusia dapat meningkatkan produksi. Dalam dunia ilmu administrasi Taylor dikenal sebagai bapak ilmu organisasi dan manajemen.

Pengertian organisasi dalam perspektif Sains Baru, adalah sangat kompleks dan beragam. Dalam hal ini organisasi akan dilihat sebagai suatu tatanan dan menjaga atau bahkan meningkatkan kualitas kemandirian dari semua komponen tatanan diposisikan sebagai kata kunci. Ini berarti bahwa selain melaksanakan misinya, suatu organisasi seyogyanya berfungsi juga sebagai pendorong dan fasilitator upaya-upaya para anggotanya untuk meningkatkan kualitas kemandirian dalam mengartikulasikan kepentingan masing-masing. Dengan demikian, organisasi menurut Sains Baru adalah “suatu tatanan” yang pembahasannya mesti melibatkan berbagai wawasan atau pengertian baru yang dihasilkan akibat pergeseran paradigma ilmu pengetahuan, Amien (2005:220).

Organisasi dilihat dari perspektif Sains Baru adalah lebih menyerupai organisme ketimbang sebagai suatu mesin. Namun, harus digarisbawahi adanya perbedaan mendasar antara organisasi dan organisme. Perbedaan itu terletak pada fungsi komponen-komponennya. Komponen organisme berfungsi untuk menunjang keberlangsungan keberadaan organisme, sedangkan pada organisasi justru keberadaan organisasi diperlukan untuk menunjang kepentingan komponen-komponennya, (Amien, 2005:221).

Berdasarkan penjelasan di atas tentang pengertian organisasi, baik menurut pendekatan Sains Lama maupun Sains Baru, maka penelitian ini cenderung menggunakan pendekatan organisasi dalam perspektif Sains Baru yang lebih relevan. Hal ini mengingat ‘Aisyiyah merupakan organisasi kemasyarakatan dan social yang mengemban misi

dakwah amar ma'ruf nahi munkar (mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran), sehingga pendekatan yang digunakan harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan harkat dan martabat manusia khususnya perempuan.

Organisasi sebagai suatu tatanan dapat mengacu pada Teori Sistem Hidup (*living system*), sebagaimana direkomendasikan Capra (1996) yang telah dimodifikasi sesuai dengan lingkup pembahasan. Dengan demikian, bahasan tentang tatanan organisasi dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) aspek utama dari Sistem Hidup, yaitu pola pengaturan, struktur pengaturan, dan proses pengaturan, (Capra dalam Amien, 2005:222). Pola pengaturan mengacu kepada konsep *autopoiesis* yang dikembangkan oleh Maturana dan Varela (1987), struktur pengaturan pada konsep disipatif struktur yang dikembangkan oleh Prigogine (1991), dan proses pengaturan mengacu kepada konsep yang diperkenalkan oleh Bateson (1980) yang kemudian disempurnakan oleh Maturana dan Varela (1987).

Pola pengaturan merupakan esensi dari setiap tatanan, karena sebagai penjabaran konsep yang melatarbelakangi pembentukan tatanan. Pola tatanan organisasi, meliputi : (1) misi, merupakan penjabaran alasan pembentukan (*raison d'etre*) organisasi, biasanya berupa uraian tugas dan lingkup tugas yang akan diemban organisasi; (2) visi, gambaran kondisi ideal yang ingin dicapai organisasi; dan (3) nilai atau etika organisasi yang merupakan acuan organisasi dalam bertindak dan mengemban misinya. Umumnya rumusan ketiga elemen pola pengaturan ini bersifat sangat spesifik, sehingga membuat setiap organisasi berbeda dengan organisasi lainnya. Itulah sebabnya, pola pengaturan sering pula diposisikan sebagai *identitas organisasi*, (Amien, 2005:222).

Istilah “pengaturan diri” atau *swatata*, pertama kali diperkenalkan oleh Kant (1970), bahwa organisme berbeda dari mesin, karena organisme memproduksi dan mengatur dirinya sendiri. Dalam sebuah mesin, setiap bagian mendukung bagian lainnya untuk menghasilkan fungsi tertentu (dari mesin itu), sedangkan pada organisme, setiap bagian memakai bagian lain, dalam arti saling menghasilkan satu sama lain. Karena itu, organisme akan mewujudkan dalam bentuk yang teratur dan mengatur dirinya. Pola pengaturan merupakan konfigurasi interkoneksi yang melahirkan karakteristik-karakteristik utama yang spesifik dari sistem. Pola pengaturan merupakan deskripsi abstrak tentang hubungan-hubungan dan tidak atau bukan mengidentifikasi komponen-komponennya. Maturana dan Varela (1980), berasumsi bahwa *autopoiesis* adalah pola umum pengaturan yang lazim bagi semua sistem hidup, apa pun hakikat komponen-komponennya.

Prinsip dasar organisasi mengandung beberapa elemen penting yang memberikan gambaran tentang hakikat organisasi, yaitu: (1) bahwa organisasi merupakan suatu kerangka sosial, yaitu suatu kerangka yang menunjukkan hubungan antara individu dalam organisasi; (2) bahwa dalam organisasi terdapat koordinasi yang dirancang untuk mengatur kegiatan orang; (3) bahwa dalam organisasi terdapat pembagian kerja yang diatur dengan tingkatan otoritas seluruh kegiatan ditujukan untuk kegiatan pencapaian tujuan bersama, (Juwono, 2009).

Selain prinsip dasar organisasi yang dimaksud, terdapat beberapa azas yang memiliki pengertian sebagai “penyebab dasar pikiran daripada terciptanya sesuatu”. Dasar pikiran tersebut antara lain: (a) suatu pangkal tolak pikiran untuk sesuatu kasus, dan (b) suatu jalan dan sarana untuk menciptakan sesuatu tata hubungan atau kondisi yang dikehendaki. Lebih lanjut untuk memahami konsep kemandirian dengan meminjam ungkapan

Toffler dalam Amien (2005: 220), bahwa semua realitas kemanusiaan dan sosial senantiasa tidak berada dalam keadaan stabil dan setimbang.

Organisasi yang menggunakan strategi pendekatan kontrol normatif atau berdasarkan norma-norma akan mendapatkan komitmen anggotanya lebih besar dibanding organisasi yang menggunakan metoda utilitarian dan organisasi dengan strategi pemaksaan paling kecil komitmen anggotanya. William Ouchi belajar dari pengalaman Jepang menyimpulkan lebih mudah mengontrol orang melalui pergaulan dan norma-norma daripada insentif materi atau peraturan ketat birokratis. Tetapi budaya bisa diinterpretasikan berbeda-beda. Joanne Martin dalam Amien (2005: 221), menjelaskan tiga pendekatan dalam mempelajari organisasi yaitu: integrasi (*integration*), perbedaan (*differentiation*), dan fragmentasi (*fragmentation*). Berdasarkan perspektif integrasi anggota organisasi tahu persis prinsip dasar yang harus dilakukan dalam organisasi, sehingga mereka harus berperilaku. Jika saya rajin atau berprestasi maka gaji saya akan naik atau mendapat bonus.

Struktur adalah perwujudan pola pengaturan. Jika pola pengaturan bersifat abstrak, maka struktur pengaturan merupakan materialisasi atau perwujudan pola itu dalam bentuk struktur organisasi sebagaimana yang dipahami selama ini. Berbeda dengan organisasi klasik yang cenderung mempertahankan strukturnya, pada organisasi kuantum struktur tidaklah bersifat kaku tetapi senantiasa berubah akibat dua hal. *Pertama*, untuk mengikuti aktualisasi identitas dan aturan-aturan dasar organisasi. *Kedua*, untuk beradaptasi dengan dinamika lingkungan eksternal, yang umumnya bersifat probabilistic atau bahkan chaostik. Penyesuaian dimaksud adalah penting, karena struktur merupakan antarmuka (*interface*) organisasi dengan lingkungannya yang menentukan pertukaran materi, energi dan informasi. Pertukaran

dimaksud merupakan syarat dan suatu keharusan, karena pada dasarnya organisasi adalah struktur disipatif yang membutuhkan pasokan energy dari luar untuk mempertahankan keberadaannya.

Reformasi struktur merupakan titik kritis dalam perjalanan sejarah keberadaan suatu tatanan organisasi, karena hasil taris menarik antara tuntutan dinamika lingkungan dan identitas organisasi menentukan corak masa depan organisasi. Pada umumnya organisasi, yang memiliki identitas yang kuat akan mampu bertahan, karena proses reformasi dapat dilakukan pada tataran struktur tanpa harus diikuti dengan perubahan identitas organisasi. Hal ini disebabkan pada dasarnya identitas dapat mewujud dalam berbagai format struktur organisasi, (Amien, 2005: 232).

Beberapa dekade terakhir tampak bahwa lingkungan global terus berubah dengan laju yang semakin tinggi dan dengan pola yang terlihat chaostik. Artinya, jika ingin memiliki struktur organisasi yang sesuai dengan tuntutan lingkungan organisasi, maka reformasi struktur sering dilakukan dengan pola yang chaostik pula. Misalnya, reformasi sulit dilakukan setiap saat karena membutuhkan sumber daya yang tidak kecil dan mengandung resiko yang cukup besar bagi keberlangsungan organisasi. Oleh karena itu, solusi yang harus ditempuh adalah mendesain struktur organisasi dengan mengacu kepada spirit zaman (*zeitgeist*). Hal ini dimungkinkan krena spirit zaman merupakan *strange attractor* yang banyak menentukan arah kecen-derungan dari dinamika lingkungan strategis. Dengan strategi ini, reformasi struktur organisasi tidak perlu terlalu sering dilakukan karena spirit zaman cenderung tidak berubah banyak dalam kurun waktu yang relatif lama.

Proses pengaturan adalah aktivitas yang berlangsung secara kontinu untuk mewujudkan pola pengaturan menjadi struktur organisasi. Dalam sistem hidup (*living system*), proses ini berupa pertukaran energi

dan materi antara tatanan dengan lingkungannya agar tatanan bersangkutan dapat mempertahankan atau bahkan mengembangkan dirinya sesuai dengan pola pengaturannya. Proses ini identik dengan proses metabolisme yang dikenal dalam biologi dan proses adaptasi kreatif pada tatanan organisasi, (Amien, 2005: 236).

Setidaknya ada dua gaya pendorong terjadinya proses pengaturan. *Pertama*, dinamika lingkungan eksternal yang menuntut penyesuaian struktur agar tetap menjamin adanya pertukaran energi, materi dan informasi antara tatanan dengan lingkungannya. *Kedua*, dinamika internal antara komponen-komponen pembentuk tatanan. Dinamika ini terjadi karena setiap komponen tatanan pada dasarnya juga merupakan tatanan yang memiliki kreativitas, dalam arti senantiasa ingin melakukan pembaharuan terhadap dirinya, termasuk pembaharuan terhadap format interkoneksi-sitasnya dengan komponen lainnya. Proses pembaharuan ini merupakan proses yang sangat dinamis, karena setiap komponen akan aktif melakukan semua upaya agar tetap mampu mempertahankan identitas dan kualitas keberadaannya di dalam tatanan yang melingkupinya.

Adanya pola pengaturan yang jelas dan diterima serta dimengerti oleh semua komponen organisasi akan membuat tatanan organisasi mampu melakukan proses pengaturan secara otomatis. Hal ini berarti, tuntutan untuk berubah akibat dinamika lingkungan eksternal dan internal akan ditanggapi secara otomatis oleh setiap komponen organisasi sesuai dengan otonomi yang dimiliki, dengan tetap mengacu kepada identitas organisasi. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa organisasi yang memberi otonomi yang besar kepada komponennya pada umumnya memiliki kapasitas swatata yang besar. Pengaruh fluktuasi dari lingkungan eksternal didistribusikan kepada seluruh komponen

organisasi, selanjutnya akan melakukan penyesuaian yang dibutuhkan. Dengan demikian, sampai pada batas tertentu, dinamika lingkungan eksternal tidak akan mengubah struktur tatanan secara keseluruhan.

Mencermati penjelasan di atas, harus diakui bahwa ada perbedaan interpretasi dalam organisasi atau bahkan bervariasi pandangan di dalam organisasi yang mencerminkan kelompok interes (kepentingan) berbeda. Atasan bisa saja memiliki pemahaman yang berbeda dengan bawahan atas sikap tidak berat sebelah (*fairness*) dan tanggung jawab. Perspektif ini melihat tidak ada konsensus di tingkat organisasi, tetapi yang ada hanya konsensus di tingkat sub-unit dan pandangan ini cenderung menekankan bagaimana kelompok bawahan melihat organisasi untuk membedakan dengan pandangan integrasi. Perspektif ini sering digunakan untuk meneliti konflik dan keengganan yang tidak muncul dalam retorika manajemen atau organisasi yang menekankan kerja tim, harmoni, dan kerjasama.

Terkait dengan kemandirian organisasi sebagaimana dijelaskan oleh Amien (2005:171), bahwa kemandirian diperlukan untuk menjaga identitas organisasi, agar diversitas keseluruhan yang merupakan syarat untuk mempertahankan kesinambungan organisasi. Kemandirian organisasi yang merekomendasikan terhadap pelaksanaan semua tahapan kegiatan atau program kerja organisasi, dengan memanfaatkan sumber daya internal dan mengacu kepada karakteristik spesifik yang dimiliki. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas tatanan yang indikator utamanya adalah tetap terjaganya keadilan berpartisipasi bagi semua komponen organisasi, serta meningkatnya kapasitas swatata tatanan. Tatanan yang dimaksud adalah perwujudan konsep interkoneksi sebagai tulang punggung Sains Baru, artinya, meninggalkan reduksionisme. Tidak kalah pentingnya ialah konsep ini menggeser

paham materialisme dan menggantinya dengan pendekatan yang berbasis organik.

Menurut Bateson dalam Amien (2005:172), bahwa entitas yang selama ini didefinisikan sebagai obyek tidak memadai lagi digunakan untuk merepresentasikan semesta (realitas). Oleh karena itu, mengubah semua definisi yang berbasis obyek ke berbasis interkoneksi, maka entitas organisasi juga dilihat sebagai interkoneksi. Masyarakat yang mendiami suatu ruang tertentu dengan kelembagaan dan sistem kepercayaan yang beragam, serta sumber daya alam dan kondisi lingkungan hidup, harus dilihat sebagai satu kesatuan, tepatnya suatu jejaring interkoneksi yang kuat, tetapi tetap terbuka yang merupakan “bagian” dari entitas lain yang memiliki dimensi ruang maupun dimensi fungsional yang lebih luas.

Istilah “komponen” atau “bagian” yang dimaksud adalah seluruh pembahasan atau perwujudan seperangkat interkoneksi, tetapi dengan intensitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di sekelilingnya. Dengan kata lain, tatanan merupakan sistem tanpa batas yang berbeda dengan pengertian sistem tradisional yang didefinisikan dengan batas yang jelas. Pemilihan model tatanan seperti ini lebih mencerminkan realitas yang sebenarnya, karena pada hakikatnya entitas pembangunan (organisasi) tidak memiliki batas yang kaku. Organisasi ‘Aisyiyah misalnya, memiliki kelompok masyarakat (sebagai anggota) yang terikat dengan komponen masyarakat lainnya dalam wilayah yang sama (Kota Makassar) di satu sisi, dan di sisi lain memiliki keterkaitan fungsional dengan kelompok lainnya (Muhammadiyah dan Pemerintah) yang berdomisili di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, tatanan juga memiliki keterkaitan fisik/ekologi yang sulit dibatasi, terutama menggunakan batas administrasi sebagai batas sistem. Sistem pelayanan,

pembinaan dan pengkaderan terkait dengan kemandirian dan keberlanjutan organisasi memiliki keterkaitan administrasi dengan entitas lain yang berada di wilayahnya.

Perwujudan interkoneksi, perhatian tidak pada komponennya tetapi pada interkoneksi yang terjadi. Dalam hal ini tidak akan banyak mempersoalkan ketersediaan sumber daya dalam suatu tatanan, tetapi pada interkoneksi sumber daya itu dengan masyarakat di sekitarnya. Dengan kata lain, lebih memperhatikan pola pengelolaan sumber daya, antara lain berupa tekno struktur masyarakat ketimbang sumber dayanya sendiri. Dalam konteks ini, tidak akan banyak memperhatikan keberadaan kelompok-kelompok masyarakat, tetapi pada interkoneksi yang tercipta antara kelompok-kelompok itu yang antara lain diukur apakah ada sumber daya dan atau fitur baru yang tercipta akibat keterhubungan itu. Misalnya, dalam bentuk pengembangan dan peningkatan kualitas modal sosial (*social capital*). Interkoneksi tatanan dengan lingkungannya juga menjadi fokus perhatian, yaitu apakah interkoneksi yang dimaksud memberikan sesuatu kepada tatanan, baik dalam arti positif maupun negatif.

Komponen tatanan, baik yang berupa komponen “lunak” seperti manusia dengan sistem nilai, kelembagaan, dan tekno strukturalnya, maupun yang berupa komponen “keras” seperti lingkungan alam dan sumber dayanya, merupakan entitas yang dinamis yang senantiasa tumbuh dan berkembang. Demikian pula wujud interkoneksitasnya. Oleh karena itu, tatanan seyogyanya dipandang sebagai suatu organisme yang memiliki kecenderungan dan kemampuan untuk berkembang secara mandiri serta melaksanakan asosiasi atau fusi dengan tatanan lainnya. Asosiasi adalah wujud interkoneksi di mana setiap tatanan masih mempertahankannya, sedangkan fusi menghasilkan tatanan baru dengan

karakteristik yang baru pula karena setiap tatanan yang bergabung lebur ke dalam tatanan baru tersebut. Dalam kondisi semacam ini, biasanya terbentuk sumber daya yang bukan merupakan hasil penggabungan sumber daya tatanan yang bergabung (*emergency resources*). Demikianlah hakikat sebenarnya dari interkoneksi, karena dengan terciptanya sumber daya baru, maka keberlangsungan keberadaan tatanan akan terjamin. Dengan kata lain, sustainability akan tercapai (Amien, 2005:175).

Di samping ketiga elemen yang disebutkan di atas, terkait dengan kemandirian dan keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah, pola pengaturan juga dilengkapi dengan seperangkat aturan-aturan dasar yang menjabarkan fungsi dan pola keterkaitan antarkomponen organisasi. Aturan dimaksud selain dirumuskan dengan mengacu kepada identitas organisasi, juga disesuaikan dengan konsep-konsep tatanan organisasi sehingga hasilnya adalah rumusan aturan dasar yang spesifik yang membuat organisasi kuantum berbeda dari organisasi tradisional. Setidaknya terdapat tiga konsep dasar yang saling terkait dan saling melengkapi yang membentuk konsep yang utuh tentang tatanan organisasi, yaitu: (a) *autopoiesis*; (b) padadoks interdependensi; dan (c) medan visional (Amien, 2005).

Autopoiesis merupakan konsep yang digunakan untuk menjelaskan proses pembentukan dan proses aktualisasi identitas organisasi. Terdapat beberapa teori tentang tatanan, khusus yang terkait dengan organisasi seperti yang dikembangkan oleh Arthur Koestler dalam Amien (2005: 223), menjelaskan bahwa kata *bolon* berasal dari bahasa Yunani *bolos* yang berarti *ubole* (keseluruhan) dan *on* yang berarti *part* (bagian). Hal tersebut sengaja dipilih Koestler untuk mencerminkan karakter dasar dari setiap entitas yang disebut efek Junus (Junus Effect),

yaitu berupa kemampuan berinteraksi dengan entitas lainnya, baik dalam peran yang menekankan kebebasan maupun dalam peran ketergantungan.

Koestler menganalogikan *bolon* dengan Dewa Junus yang di dalam mitologi Rumawi digambarkan memiliki dua muka. Satu muka menghadap ke dalam, ke arah *bolon-bolon* kecil yang merupakan bagiannya, merepresentasikan kebebasan yang dimiliki oleh keseluruhan, sedangkan muka lain menghadap keluar, kepada *bolon* lebih besar yang mengandungnya merepresentasikan sifat ketergantungan yang dimiliki oleh bagian. Di dalam tatanan, efek Junus mewujudkan dalam bentuk dua kecenderungan. *Pertama*, adalah tendensi integratif yang berfungsi untuk mempertahankan posisinya sebagai bagian dari keseluruhan. *Kedua*, adalah tendensi penonjolan diri sebagai refleksi dari fungsi untuk melestarikan identitas dan otonomi individu. Otonomi yang dimaksud disini mengandung arti bahwa setiap *bolon* memiliki pola irama dan fungsi yang spesifik didukung oleh kemampuan untuk mengatur diri (*swatata*) dan mempertahankan pola tersebut.

Kedua kecenderungan ini termanifestasi pada setiap tatanan, dari sel ke individu dan sampai pada kelompok masyarakat. Setiap *bolon* harus menegaskan individualitas atau jatidirinya untuk mempertahankan struktur bertingkat sistem, tetapi pada sisi lain ia (individu) harus patuh pada tuntutan-tuntutan keseluruhannya agar sistem dapat terus berjalan. Selain itu, kedua tendensi ini saling berlawanan tetapi saling melengkapi, karena itu dinamakan paradoks interdependensi (*paradox of interdependence*). Jika dicermati lebih jauh, paradoks ini merupakan perwujudan dari prinsip komplementaris dan kemenduaan semesta yang merupakan basis dari pengaturan semesta, yaitu diferensiasi dan integrasi.

Terkait dengan pola tatanan yang sehat, baik individu, masyarakat maupun ekosistem terdapat keseimbangan yang dinamis

antara kedua kecenderungan di atas. Kemampuan tatanan mempertahankan keberadaannya sangat tergantung kepada keseimbangan dimaksud. Kecenderungan menonjol diri yang mendominasi menyebabkan kecenderungan integrasi menipis, akan bermuara pada rusaknya tatanan, sebaliknya kecenderungan integrasi yang membesar akan membuat identitas tatanan pembentuk mengecil atau hilang yang pada gilirannya bermuara kepatuhan terhadap tatanan (organisasi) sebagaimana yang diharapkan.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa sebagai suatu tatanan, atau di dalam organisasi 'Aisyiyah dan Muhammadiyah disebut "Khittah", yaitu perilaku organisasi sesuai dengan perilaku umum tatanan (khittah). Dalam hal ini, 'Aisyiyah ikut memberikan jawaban atas berbagai permasalahan, baik di tingkat daerah, wilayah maupun pusat yang dari waktu ke waktu senantiasa mengalami pengembangan. Peran dan komitmen serta tanggung jawab 'Aisyiyah semakin besar dan terbuka. Kehadiran dan keterpanggilan ortom 'Aisyiyah di setiap jengkal lahan amal di setiap kondisi merupakan wujud 'Aisyiyah sebagai gerakan rahmatan lil 'alamin.

Terkait dengan keberlanjutan organisasi/lembaga (*theory scopt*), di bawah ini akan dijelaskan padangan Brinkerhoff dan Goldsmith (1990: 19), menjelaskan bahwa keberlanjutan lembaga/organisasi para analis sering kali mengungkap alasan tertentu, dengan faktor-faktor penekanannya termasuk pada tingkatan komitmen, khususnya pada sebuah keinginan untuk menyiapkan biaya yang berkali-kali. Penggabungan lembaga atau pemerintah dan swasta secara tepat; pada sektor pemerintah, keputusan yang tepat dari berbagai tingkatan dalam pemerintahan; kepekaan terhadap suatu isu penurunan ekologi dan produktivitas pertanian jangka panjang; dan adopsi dari sistem

manajemen yang mengenalkan pembangunan kapasitas. Dalam hal ini, penggambaran formalnya adalah teori sistem, teori kemungkinan dan politik ekonomi.

Kemudian dijelaskan bahwa, lembaga adalah sistem yang dibangun dari sebuah ide. Ada beberapa alasan untuk memulai dasar ini, antara lain: (1) bahwa teori sistem merupakan hal yang cukup umum untuk menutupi keberlanjutan permasalahan dalam lembaga pada semua jenis, mulai dari tanda/kode yang formal sampai kepada yang tidak formal untuk dilakukan; (2) bahwa teori sistem secara simultan ditentukan oleh proses internal dan hubungan diantara sistem dan lingkungannya sendiri. Hal ini kemudian mendorong untuk memandang secara luas berbagai faktor sosial, ekonomi, politik, teknis dan lainnya yang mempengaruhi keberlanjutan; (3) bahwa teori sistem menekankan pada hubungan diantara unsur yang terpisahkan, dan memungkinkan untuk memunculkan aspek-aspek agro lingkungan, ekonomi dan aspek manajerial dari keberlanjutan tersebut.

Selanjutnya Brinkerhoff & Goldsmith (1990: 20), bahwa teori sistem menyajikan pedoman tentang bagaimana menggambarkan hubungan antara proses sistem internal dan eksternal. Teori kemungkinan menjadi pengganti kesenjangan ini. Penyajian teori ini agar lembaga-lembaga dapat mencapai hubungan yang lebih baik. Selain itu, alasan penggunaan teori kemungkinan adalah untuk menghindari tendensi, perluasan referensi pada keberlanjutan lembaga yang direkomendasikan secara luas.

Menurut pandangan ilmu sosial, teori sistem yang paling bermanfaat dalam menganalisis lembaga atau organisasi formal, seperti lembaga atau organisasi pemerintahan, perusahaan bisnis, dan universitas. Sebagaimana pandangan Hage dan Aiken dalam Brinkerhoff

dan Goldsmith (1990: 21), bahwa : (1) Sistem teori diciptakan dan berlanjut untuk mencapai tujuan umum yang lebih baik daripada tindakan individu; (2) Sistem teori dapat mengembangkan sub sistem untuk tujuan sub devisi dan peningkatan efisiensi; (3) Sistem teori menggunakan pola otoritas dan hubungan komunikasi untuk terhubung dan terintegrasi secara khusus dari kegiatan sub sistem; dan (4) Sistem teori tergantung pada transaksi dengan unsur luar dan penyedia untuk menyiapkan input atau memahami output yang diperlukan untuk mempertahankan dan mengembangkan sistem.

Sehubungan dengan penjelasan di atas terkait dengan keberlanjutan organisasi sebagai sistem, ada beberapa definisi kunci yang perlu dipahami sebagai berikut: (a) Input (sumberdaya), bahan mentah, uang, manusia, informasi dan pengetahuan yang dimiliki organisasi dan lingkungannya, serta kontribusi untuk menciptakan output; (b) Output berupa produk, layanan, program, dan ide yang dihasilkan dari tindakan organisasi; (c) Teknologi (metode dan proses), meliputi mental, fisik dan mekanis untuk mentransformasikan sumberdaya ke dalam output; (d) Lingkungan, terdiri dari lingkungan pekerjaan yang meliputi organisasi eksternal dan kondisi yang mempengaruhi suatu operasi utama dari organisasi dan teknologi, seperti klien, pesaing, pasar dan lingkungan umum meliputi lembaga dan kondisi yang mempengaruhi keberlanjutan organisasi; (e) Maksud-strategi, yakni tujuan, rencana dari pembuat keputusan untuk dominasi organisasi; (f) Sikap dan proses-pola sikap, yaitu hubungan antara individu dan kelompok; (g) Budaya-norma, kepercayaan, nilai kehidupan berorganisasi; dan (h) Struktur-hubungan diantara individu, kelompok, dan unit yang lebih besar.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa postulat dasar dari teori kemungkinan yang kontras dengan asumsi yang sering

membuat teori secara implisit dalam teori sosial dan ekonomi, yang merupakan pilihan untuk melegalkan kegiatan secara bersama. Persoalan mendasar yang diperoleh dari bagian analisis ini adalah: (1) tidak ada lembaga atau organisasi yang secara prinsip adalah benar untuk semua situasi; (2) kesuksesan organisasi bergantung pada kemampuan dalam penyesuaian lingkungannya; (3) untuk mencapai ketepatan ini, sebuah organisasi harus memiliki struktur, strategi, budaya dan sebagainya. Demikian yang penting adalah, sebuah organisasi harus bisa beradaptasi dengan lingkungannya (mendapatkan seseorang yang lebih cocok) untuk menjalankan organisasi tersebut, (Katz dan Kahn dalam Brinkerhoff & Goldsmith, 1990: 22).

Mencermati uraian di atas terkait dengan *Medan Visional* menurut Wheatley dalam Amien (2005:227), menjelaskan bahwa visi organisasi yang jelas dan diterima oleh semua komponen organisasi akan menimbulkan medan visional di lingkungan organisasi bersangkutan. Medan inilah yang memicu terjadinya sinergi dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh setiap komponen organisasi. Keberadaan medan visional menyebabkan tidak diperlukannya upaya pengendalian yang berlebihan yang menjadi ciri khas organisasi *a la* Newtonian, karena walaupun memiliki otonomi, setiap komponen tetap akan memilih secara sukarela untuk bertindak sinergis dengan komponen lainnya. Hal ini merupakan bukti bahwa otonomi individu tidak berarti harus dikendalikan secara ketat karena memiliki potensi untuk memecah belah kesatuan organisasi. Upaya pengendalian dapat digantikan dengan visi yang jelas yang akan membangkitkan medan visional sekaligus berfungsi untuk mengarahkan kebebasan individu untuk mencapai cita-cita bersama.

Konsep medan visional Wheatley tersebut sangat relevan dengan prinsip dasar (khittah) dan konsep keberlanjutan organisasi ‘Aisyiyah

yang telah diuraikan terdahulu. Konsep yang serupa dikembangkan Sheldrake tentang medan morfogenesis yang mengatur perilaku makhluk hidup. Hal ini seperti dijelaskan bahwa keberadaan medan ini akan membuat anggota organisasi berikutnya (kaderisasi) lebih mudah menerima dan melanjutkan visi organisasi dari waktu ke waktu sesuai dengan pendahulunya.

Sejalan dengan penjelasan di atas, khususnya yang terkait dengan konsep *outopoesis*, paradoks interdependensi, dan medan visional dalam hubungannya dengan berdirinya organisasi Nasyyiatul 'Aisyiyah (NA) juga tidak bisa dilepaskan dengan rentang sejarah Muhammadiyah yang sangat memperhatikan keberlangsungan kader penerus perjuangan organisasi. Muhammadiyah dalam membangun ummat memerlukan kader-kader yang tangguh yang akan meneruskan estafet perjuangan dari para pendahulu di lingkungan Muhammadiyah.

Gagasan mendirikan NA sebenarnya bermula dari ide Somodirdjo, seorang guru *Standart School Muhammadiyah*. Gagasan Somodirdjo ini digulirkan dalam bentuk menambah pelajaran praktek kepada para muridnya, dan diwadahi dalam kegiatan bersama. Dengan bantuan Hadjid, seorang kepala guru agama di *Standart School Muhammadiyah*, maka pada tahun 1919 berhasil mendirikan perkumpulan yang anggotanya terdiri dari para remaja putra siswa *Standart School Muhammadiyah*.

Kegiatan SP Wanita adalah pengajian, berpidato, jama'ah subuh, membunyikan kentongan untuk membangunkan umat Islam Kauman agar menjalankan kewajibannya yaitu shalat shubuh, mengadakan peringatan hari-hari besar Islam, dan kegiatan keputrian. Perkembangan SP Wanita cukup pesat. Kegiatan-kegiatan yang dilakukannya mulai segmented dan terklasifikasi dengan baik. Kegiatan *Thalabus Sa'adah* diselenggarakan

untuk anak-anak di atas umur 15 tahun. Aktivitas Tajmilul Akhlak diadakan untuk anak-anak berumur 10-15 tahun. Jam'iatul Athfal dilaksanakan seminggu dua kali untuk anak-anak yang berumur 7-10 tahun.

Kegiatan SP Wanita merupakan terobosan yang inovatif dalam melakukan emansipasi wanita di tengah kultur masyarakat feodal saat itu. Kultur patriarkhis saat itu benar-benar mendomestifikasi wanita dalam kegiatan-kegiatan rumah tangga. Para orang tua seringkali melarang anak perempuannya keluar rumah untuk aktivitas-aktivitas yang emansipatif. Namun dengan munculnya SP Wanita, kultur patriarkhis dan feodal tersebut bisa didobrak. Hadirnya SP Wanita sangat dirasakan manfaatnya, karena SP Wanita membekali wanita dan putri-putri Muhammadiyah dengan berbagai pengetahuan dan ketrampilan.

B. Kepatuhan Dalam Organisasi

Menurut Etzioni dalam Liliweri (1997: 66), sebuah organisasi dapat berjalan karena di dalamnya ada kepatuhan, baik pada level pengurus maupun pada level anggota. Kepatuhan dimaksud melibatkan variabel power dan variabel keterlibatan, dalam hal ini power pada pengurus dan keterlibatan pada anggota organisasi. Etzioni, menyusun skema klasifikasi organisasi berdasarkan sifat-sifat perilaku "*compliance*" (perilaku prososial). Etzioni memasukkan sikap "*compliance*" merupakan sikap yang umumnya dimiliki oleh bagian terbesar semua unit-unit sosial bahkan masyarakat. Menurutnya, perilaku "*compliance*" adalah unsure utama yang menata hubungan antara mereka yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan dengan pihak yang dikuasai dan diwenangi.

Power terdiri dari power berdasarkan koersif, power berdasarkan remuneratif, dan power berdasarkan normatif. Sementara keterlibatan

meliputi; keterlibatan berdasarkan prinsip alienatif, keterlibatan berdasarkan kalkulatif, dan keterlibatan berdasarkan moral. Lebih jauh dijelaskan Etzioni bahwa, dalam semua organisasi, para anggota selalu dihubungkan dengan anggota lain melalui hubungan hierarki yang menyebabkan para anggota mempunyai kedudukan lebih tinggi diberi kekuasaan dan kewenangan yang lebih besar, kekuasaan dan kewenangan tersebut diatur dan dilegitimasi. Kedudukan selalu memiliki kuasa dan wewenang dalam menata hubungan atasan dengan bawahan. Karena itu, pimpinan suatu hierarki cenderung bertindak kepada bawahan. Tindakan itu untuk memperlihatkan kekuasaan, kekerasan, ganjaran bahkan membuat perhitungan, akibatnya kedudukan bawahan dianggap sebagai partisipan tingkat rendah (Liliweri, 1997: 67).

Apabila para anggota (bawahan) tetap bertindak sebagai partisipan yang rendah, maka anggota tersebut akan merasa terasing atau seolah-olah diasingkan organisasi. Sebaliknya, jika para anggota tidak diasingkan maka akan merasa dilibatkan dalam organisasi, dan akan merasa memiliki organisasi. Berdasarkan kondisi tersebut, maka tidak mengherankan jika setiap bawahan selalu memperhitungkan keuntungan dan kerugian yang dapat diperoleh melalui hubungan yang tercipta dalam organisasi.

Lebih jelasnya dapat disimak tabel berikut tentang tipologi hubungan *compliance* dari Etzioni, bahwa dalam setiap organisasi pihak ordinasasi (atasan) mempunyai 3 (tiga) jenis kekuasaan, yaitu koersif, remunerative, dan normative. Sedangkan subordinasi (bawahan) mempunyai 3 (tiga) jenis keterlibatan, yaitu alienatif, kalkulatif, dan moral, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Tipologi Hubungan Compliance dari Etzioni.

Jenis Kekuasaan	Jenis Keterlibatan		
	Alienatif	Kalkulatif	Moral
Koersif	1	2	3
Remuneratif	4	5	6
Normatif	7	8	9

Sumber : Etzioni dalam Liliweri (1997: 67).

Tabel di atas menjelaskan bahwa di dalam organisasi, kekuasaan atasan merupakan bentuk kekuasaan untuk menekan, memerintah, dan memaksa (*koersif*), kekuasaan memberikan ganjaran/balas jasa (*reward, remunerative*) dan terakhir kekuasaan menetapkan aturan atau norma-norma dalam organisasi. Sedangkan dari pihak bawahan memiliki jenis keterlibatan, yaitu alienatif (keterlibatan rendah), kalkulatif (keterlibatan dengan perhitungan), dan moral (keterlibatan tinggi).

Klasifikasi tipologi *compliance* dari Etzioni pada table di atas memiliki 9 (Sembilan) bentuk hubungan yang bersifat *compliance*, yaitu :

- a. Hubungan yang bersifat *koersif-alienatif*, para bawahan yang merasa diri terasing karena ada tekanan dari atasan.
- b. Hubungan yang bersifat *koersif-kalkulatif*, yaitu para bawahan yang memperhitungkan tekanan dari atasan.
- c. Hubungan yang bersifat *koersif-moral*, adalah bawahan terlibat secara moral karena ada tekanan dari atasan.
- d. Hubungan yang bersifat *remuneratif-alienatif*, bawahan yang merasa diri terasing karena ada tekanan dari atasan.
- e. Hubungan yang bersifat *remuneratif-kalkulatif*, jenis keterlibatan bawahan yang memperhitungkan ganjaran dari atasan.
- f. Hubungan yang bersifat *remuneratif-moral*, bawahan yang secara moral menerima ganjaran dari atasan.

- g. Hubungan yang bersifat *normatif-alienatif*, bawahan merasa diri terasing karena ada norma-norma yang berlaku dari atasan.
- h. Hubungan yang bersifat *normatif-kalkulatif*, yaitu keterlibatan bawahan yang memperhitungkan norma-norma dari atasan.
- i. Hubungan yang bersifat *normatif-moral*, bawahan yang secara moral mengikuti norma-norma yang berlaku dari atasan.

Menurut Etzioni, tipe 1, 5 dan 9 menggambarkan tipe hubungan yang bersifat *kongruen*, hubungan yang demikian dipandang lebih efektif untuk diterapkan dalam setiap organisasi (termasuk 'Aisyiyah). Hubungan yang kongruen akan mengakibatkan organisasi sebagai unit sosial (amal usaha) dapat mempertahankan diri dari tekanan "dalam" maupun "luar", termasuk dalam hal ini adalah Muhammadiyah dan Pemerintah. Kondisi demikian dapat dianalogikan seperti yang dialami seorang bawahan atau anggota organisasi meskipun merasa terasing karena ada ancaman atau tekanan dari atasan (pimpinan organisasi), tetapi secara moral tetap taat (patuh kepada norma-norma yang mengatur hubungan tersebut. Sebagai contoh, organisasi militer; seseorang yang menjadi anggota harus mampu atau dapat memperhitungkan untung rugi menolak disiplin. Moralitas anggota korps sangat ditentukan oleh norma-norma organisasi tersebut. Kemudian Etzioni menjelaskan bahwa, kebalikan dari tipe kongruen ialah *inkongruen*, yaitu (3 dan (7) yang tidak selalu bertahan terhadap tekanan eksternal. Karena itu, langkah yang perlu diantisipasi organisasi adalah mengurangi kekuasaan atau perasaan superioritas.

Lebih jauh Etzioni menjelaskan bahwa, hubungan *normatif-alienasi inkongruen* (7) terjadi ketika seorang pastor, pendeta atau pejabat gereja merasa yakin bahwa anggota jemaat yang melakukan tindakan melawan perkawinan (contoh: "kumpul kebo") adalah tindakan salah. Anggota jemaat itu harus diasingkan karena telah melawan norma;

hubungan itu dapat berubah apabila anggota jemaat mau mengikuti kegiatan gereja sesuai dengan norma yang berlaku.

Bentuk inkongruen berikut ialah koersif-kalkulatif (2), yang ditujukan pada jenis hubungan antara bawahan yang penuh perhitungan terhadap tekanan atasan. Sebagai contoh, hubungan ketaatan para anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) terhadap tekanan dari atasan (pimpinan parpol). Bentuk inkongruen remuneratif-alienatif (4) dapat diilustrasikan dengan keuntungan yang diperoleh seorang prajurit upahan berjuang membela Negara karena mendapat uang. Dengan demikian sedikit bahkan tidak ada idealisme terhadap bangsanya, tetapi hanya membutuhkan upahan.

Tipe inkongruen remuneratif-moral (6) dapat terlihat pada seorang direktur lembaga pemakaman jenazah yang mendapat keuntungan dari bisnis tersebut, namun seringkali harus bersikap prososial membantu keluarga yang berduka. Tipe terakhir adalah hubungan inkongruen normatif kalkulatif (8), sebagai contoh seorang guru besar yang merasa yakin bahwa pendapatan dari pekerjaan atau spesialisasinya merupakan sumber utama untuk menhidupi keluarga. Namun, kadang-kadang harus berusaha untuk mencari penghasilan tambahan di luar tugas pokok seperti memberi kuliah tambahan, seminar, dan sebagainya.

Secara umum Etzioni dalam Liliweri (1997), menawarkan sintesis sistem bahwa organisasi mengadopsi untuk mengamankan kepatuhan anggota. Dalam hal ini adalah cara orang dalam organisasi sesuai dengan persyaratan dan mengikuti standar perilaku yang ditetapkan, berorientasi pada tujuan, organisasi diarahkan kinerja memerlukan kepatuhan anggota. Masalahnya adalah bahwa penyimpangan dari standar ini terjadi karena kelemahan dalam komitmen

anggota. Sistem kontrol yang diberikan oleh anggota organisasi lainnya, baik oleh manajer maupun anggota lain. Dalam kepatuhan dipastikan dengan struktur kontrol dan wewenang organisasi, hierarki formal otoritas, pengawasan, definisi pekerjaan, dan prosedur kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan model birokrasi Weber membuat organisasi kurang tergantung pada variabilitas individu dan olahan. Ada elemen motivasi untuk ini karena struktur keterlibatan individu dalam organisation. Proposisi sederhana adalah bahwa, semakin besar individu berkomitmen, kontrol formal kurang diperlukan. Dengan demikian, organisasi atau bagian organisasi seperti misalnya mengadopsi sistem sebagai budaya yang berlaku.

Sistem koersif, ialah mencerminkan kemampuan organisasi untuk menerapkan fisik, kekuatan menghambat dan sakit untuk non-compliance. Misalnya organisasi kustodian, sistem kontrol memungkinkan penarikan anggota dan hak kebebasan. Keterlibatan dengan organisasi yang berasal dari sistem kontrol koersif mungkin terasing, paling pasif dengan perasaan negatif dan disassociation. Sistem organisasi ini menawarkan berbagai macam imbalan material atau non-materi untuk mengamankan kepatuhan anggota. Keanggotaan didasarkan pada kontrak dengan organisasi dan tawar-menawar atas hadiah yang diinginkan dengan imbalan kepatuhan, kehandalan loyalitas, kinerja. Anggota menghitung, Apa untungnya bagi saya?. Lembur, kenaikan gaji, promosi, penghasilan tetap, masa depan jangka panjang. Sistem normatif (Keterlibatan Moral), sistem organisasi kontrol tergantung pada nilai-nilai bersama yang dipromosikan dan yang anggota berlangganan. Organisasi sadar gnerates dan mempertahankan nilai-nilai yang diwakili dalam tanda-tanda dan sybms - visual, verbal, perilaku dan konseptual. Komitmen terhadap ideologi organisasi membawa kekuatan persuasif,

anggota menginternalisasikan nilai-nilai organisasi yang menjadi panduan dan perilaku yang mereka alami.

Istilah *Compliance* yang di-Indonesiakan dalam penelitian ini dengan “Kepatuhan”, hingga sekarang belum ditemukan makna yang lebih tepat (bervariasi). Istilah kepatuhan sering diasumsikan dengan perawatan yang direkomendasikan dan diresepkan seorang dokter kepada pasien, untuk selalu taat dan patuh terhadap nasehat dokter. Dengan kata lain, konsep kepatuhan lebih mungkin ketika ada kesepakatan dan kepercayaan diri mengenai diagnosa dan prognosis (Liliweri, 1997).

Penelitian di psikiatri, psikologi, dan sosiologi menyediakan banyak penjelasan untuk variasi yang sesuai. Dalam psikiatri, masalah klinis seperti penyalahgunaan obat-obatan atau alkohol kadang-kadang digunakan untuk menjelaskan ketidakpatuhan. Pasien juga dapat menghentikan minum obat karena efek samping yang tidak diinginkan. Dalam psikologi dan sosiologi, kesehatan kepercayaan dan perilaku (dalam konteks keluarga, pekerjaan, dll) dapat meningkatkan atau membatasi kepatuhan. Jika anggota keluarga individu mendukung kepatuhan pengobatan, dan individu percaya manfaat obat itu, kepatuhan dapat ditingkatkan. Jika seseorang tidak melanjutkan pengobatan maka akan membuat dia mengantuk dan mempengaruhi karya, kepatuhan dapat dikurangi. Orang-orang yang memiliki akses terbatas atau kepercayaan pada dokter, ilmu kedokteran, dan orang-orang yang imannya menghalangi mereka dari beberapa jenis perawatan medis, cenderung untuk mematuhi rekomendasi pengobatan.

Sejumlah teori yang mencoba untuk menangkap jenis atau sumber motivasi mempengaruhi anggota organisasi. Misalnya, dalam membahas penyebab internal dan eksternal perilaku, deCharms (1968) menyarankan dikotomi ekstrinsik motivasi intrinsik dibandingkan untuk

mengkarakterisasi lokus yang berbeda dari kausalitas. Perilaku intrinsik termotivasi (perilaku yang terjadi tanpa adanya kontrol eksternal), dikatakan mewakili kausalitas internal, sedangkan perilaku yang disebabkan kekuatan eksternal dikatakan untuk mewakili kausalitas eksternal (Liliweri, 1997). Kemudian dijelaskan efek imbalan ekstrinsik pada motivasi intrinsik dan dalam melakukannya, mencoba untuk menumpahkan beberapa lampu pada arti motivasi intrinsik. Perilaku intrinsik termotivasi jatuh ke dalam dua kategori, yaitu: a) meliputi perilaku yang individu terlibat dalam mencari situasi yang menantang. Tantangan-tantangan ini merupakan keganjilan antara stimuli dan standar perbandingan; b) mencakup perilaku yang bertujuan mengurangi keganjilan ini, yaitu mengatasi tantangan.

Selain itu, pemahaman motivasi intrinsik yang ditawarkan oleh Katz dan Kahn dalam Liliweri (1997), mereka berpendapat bahwa dasar motivasi dapat dikategorikan dalam hal kepatuhan hukum, penghargaan eksternal, yaitu, kepuasan instrumental dan motivasi diinternalisasi. Dalam hal ini, motivasi diinternalisasikan lebih lanjut dipecah menjadi ekspresi diri, yang berasal langsung dari peran kinerja dan nilai-nilai diinternalisasi, sehingga ketika organisasi menjadi tujuan dimasukkan ke dalam sistem nilai individu. Etzioni (1975), menjelaskan bahwa organisasi mendorong keterlibatan dari anggota mereka oleh salah satu dari tiga cara: alienatif, kalkulatif, atau moral. Ada dua macam keterlibatan moral murni dan sosial. Keterlibatan moral yang murni adalah hasil internalisasi norma-norma, sedangkan hasil keterlibatan sosial dari kepekaan terhadap tekanan kelompok-kelompok primer dan anggota organisasi. Keterlibatan moral tidak didasarkan pada kepuasan yang diharapkan dari kebutuhan dan bahkan dapat menuntut penolakan kepuasan kebutuhan dan pengorbanan kesenangan pribadi. Konsekuensi

bertindak sejalan dengan nilai-nilai diinternalisasi seseorang bukanlah rasa kesenangan atau pemenuhan kebutuhan, melainkan rasa penegasan dicapai ketika orang mematuhi dengan komitmen moralnya.

Dalam penelitian ini kemandirian dan keberlanjutan organisasi dapat dilihat dari perspektif scopt, yaitu 'Aisyiyah dilihat sudut sistem, terdiri dari unit-unit (amal usaha) yang meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, sosial budaya, dan kemasyarakatan. 'Aisyiyah ditinjau dari aspek kontigensinya, yaitu hubungan 'Aisyiyah dengan Muhammadiyah di satu sisi, dan hubungan 'Aisyiyah dengan pengurus dan anggota di sisi lain. Di samping itu, bagaimana model pembinaan dan pengkaderan para anggota organisasi seiring dengan perubahan dan perkembangan organisasi yang semakin kompleks dan beragam.

Munculnya istilah baru yaitu "Filantropi", yang secara garis besar telah dijelaskan terdahulu mengingatkan kembali nilai-nilai sosial dalam pembangunan, yaitu nilai-nilai kedermawanan dan kesetiakawanan yang dirangkai dalam istilah asing yang lebih familiar. Kata *philanthropy* yang berasal dari bahasa Yunani dengan makna *phillen* yang berarti mencintai (*to love*) dan *anthropos* (manusia, *human kind*), sehingga *philanthropy* dapat diartikan sebagai ungkapan cinta kasih kepada sesama manusia. Karena itu kata kedermawanan, kesetiakawanan dan Filantropi memiliki esensi yang sama.

Philanthropy didefinisikan sebagai cara membantu sesama dimana "saling memberi perhatian dan saling membagi" adalah esensi utamanya (Seregar dalam Irdam, 2006). Tujuan itu dicapai melalui pengembangan perhatian dan kepekaan pada orang lain, membuat orang peduli pada kebutuhan sesamanya di dalam suatu komunitas, mewujudkan perhatian dan kepedulian melalui tindakan berusaha menjawab kebutuhan mereka. *Philanthropy* dapat ditempatkan sebagai

sebuah proses, di mana ada tindakan (*action*) memberi bantuan uang berupa atau bentuk lain kepada seseorang secara sukarela tanpa unsur paksaan, tekanan (*volunteerism*). Kesukarelaan dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan yang memberi manfaat bagi orang lain. Kepedulian dan kemauman masyarakat yang memiliki kemampuan untuk berderma kepada lembaga nir laba akan memberi banyak manfaat keberlanjutan misi dan program organisasi.

Keinginan seseorang atau masyarakat berderma, bermurah hati untuk berbagi pada seseorang, kelompok dan organisasi (masyarakat) sangat dipengaruhi oleh citra atau pandangan yang melekat di dalam lembaga tersebut. Orang tidak akan mau berderma apabila melihat bahwa dana yang diberikannya tidak sampai pada apa yang telah diniatkan. Selain itu, bantuan yang diberikan harus dikelola *se arif* mungkin berdaya guna terhadap sasaran yang diinginkan si penderma. Sebenarnya potensi masyarakat Indonesia untuk berderma cukup besar seperti halnya umat Islam, potensi umat Islam untuk zakat, infak dan sedekah (ZIS) mencapai 3 (tiga) trilyun setiap tahunya (Mustafa E Nasution, 2001).

Mencermati uraian di atas dapat dijelaskan bahwa, dana tersebut cukup mengatasi persoalan kemiskinan di Indonesia. Tetapi pengelolaan ZIS tersebut jauh dari harapan. Persoalan yang mengemuka seputar pengelolaan dana kedermawanan sosial (Filantropi) tersebut, adalah image masyarakat yang muncul bahwa lembaga pengelolaannya belum profesional, kredible dan transparan. Akhir-akhir ini keberadaan lembaga nir laba (ORNOP) mendapat sorotan dan penilaian oleh berbagai komponen masyarakat terhadap aktivitas yang dikerjakan. Pada awalnya masyarakat dan pelaku pembangunan memandang bahwa lembaga nir laba memiliki idelisme, integritas dan dedikasi yang tinggi di dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Namun citra baik tersebut

dirusak dan diganggu oleh tindakan para aktivis dan pegiat lembaga nirlaba yang hanya ingin mendapatkan keuntungan sesaat (*intans*) dengan mengorbankan prinsip *kepatutan sosial* dan *hukum* (Budiyanto, 2007).

Belajar dari beberapa kasus penyimpangan pengelolaan dana yang melibatkan anggota KPU (Muliana W Kusuma) dan pengelolaan bantuan kemanusiaan Tsunami oleh ORNOP GOA (Fariq Faqih), telah mencoreng lembaga nirlaba lainnya. Sedangkan di tingkat daerah (lokal) juga terjadi hal serupa dan konflik internal yang membuat citra dan kesungguhan hati lembaga nirlaba dalam memperjuangkan kepentingan kaum marjinal dipertanyakan oleh masyarakat. Kondisi di atas jelas akan menyulitkan para pegiat ORNOP, yang memiliki niat kesungguhan hati memperjuangkan dan mengangkat harkat martabat kaum marjinal sulit masuk karena *image (Streo type)* terhadap tindakan-tindakan tabu yang semestinya tidak perlu terjadi. Apabila kondisi ini tidak segera diperbaiki para pegiat ORNOP, mustahil akan dapat menggalang dana kedermawanan sosial (Filantropi) masyarakat yang sesungguhnya memiliki tradisi berderma yang kuat.

Keberlanjutan sebuah lembaga sangat dipengaruhi oleh tersedia sumber dana yang cukup untuk membiayai kebutuhan operasional dan program yang dirancang. Fakta menunjukkan bahwa tidak ada satupun lembaga yang dapat bertahan menjalankan aktifitas dan programnya bila tidak didukung oleh sumber dana yang kuat. Disadari bahwa masalah yang amat pelik bagi sebagian besar ORNOP, adalah ketersediaan dana dalam menjalankan programnya. Seringterjadi ORNOP hilang begitu saja (*mati suri*) ketika lembaga donor luar negeri menghentikan bantuan.

Penggalangan dana (*fundraising*) melalui filantropi masyarakat merupakan solusi dalam mengatasi krisis keuangan di lembaga nirlaba ORNOP selain mengaktifkan *fundraising* unit-unit usaha yang dimiliki.

Karena itu, para pegiat ORNOP perlu mensiasati upaya menggaling dana melalui filantropi masyarakat, sehingga ketergantungan pada lembaga donor luar negeri menjadi berkurang. Paling ada 4 strategi menggaling dana filantropi masyarakat yang dapat di terapkan pada lembag nir-laba:

1. Membangun *community Awareness* melalui media komunikasi dengan memberikan beberapa contoh, yaitu *best practice* filantropy yang telah mengubah kehidupan seseorang atau kelompok masyarakat dari kondisi yang memprihatinkan (sengsara) kearah hidup yang lebih baik (lebih manusiawi). Cara ini dipandang cukup efektif dalam mengugah dan menyadarkan masyarakat yang memiliki kemampuan berderma.
2. Membangun citra lembaga melalui peningkatan sumber daya manusia dan pengelolaan dana yang dapat dipertanggungjawaban, trasparan, *accountable* serta dana filantropi berdaya guna bagi penerima manfaat (*beneficiaries*). Masyarakat yang sudah berderma akan merasa puas dan berkesan bahwa niat untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung sudah tercapai.
3. Membangun konsistensi sebagai lembaga yang indenpenden, objektif, netralitas, serta profesional dalam menjalankan program-programnya. Biasanya sipenderma (masyarakat) akan melihat lembaga konsistensi dalam menjalankan visi dan misi, lembaga yang latah dengan berbagai kegiatan akan ditinggalkan masyarakat karena dianggap *opportunities*.

Keberlanjutan organisasi sosial masyarakat sipil ORNOP sangat bergantung dengan sumber dana yang dimiliki dalam menjalan visi dan misinya. Salah satu sumber domestik tersebut ialah dana kedermawanan sosial (filanmtropi) masyarakat, karena pada prinsipnya tradisi berderma amat kental dalam praktek setiap agama yang ada di Indonesia. Namun,

upaya untuk mencapai sasaran perlu ditempuh dengan strategi yang telah dijelaskan di atas. Ada 2 (dua) tipe atau jenis manusia, yaitu :

- a. Idealis ideologis, adalah para kader dan anggota yang senantiasa memegang teguh cita-cita ideal awal gerakan. Pikiran dan tindakannya mengarah pada bagaimana cara terwujudnya cita-cita gerakan.
- b. Pragmatis oportunistis, mereka adalah para kader dan anggota yang memanfaatkan potensi organisasi hanya untuk memenuhi kemauan pribadinya (hawa nafsunya sendiri). Segala pikiran dan tindakan tertuju pada hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kehendak dan hawa nafsunya sendiri.

Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) adalah organisasi pergerakan dakwah amal makruf nahi munkar, di basis inipun tidak lepas dari kedua hal tersebut. Pelajar sebagai basis masanya tentu memiliki potensi yang sangat besar bagi kedua tipe orang di atas. Bagi orang tipe pertama basis masa yang besar tersebut memiliki potensi bagi keberlanjutan eksistensi gerakan dan penerus cita-cita ideal sang pendiri induk gerakan yang kini tengah difilmkan oleh Hanung Bramantyo dengan judul Sang Pencerah. Bagi orang tipe kedua basis masa yang besar tersebut bisa ia jadikan sebagai basis masa mengambang dalam meraih kehendak pribadinya. Ada kalanya basis masa tersebut, hanyalah ia jadikan sebagai pasar potensial bagi bisnisnya dengan melupakan proses internalisasi nilai-nilai dan cita-cita gerakan.

Setiap kader dan anggota tentunya mendambakan terwujudnya cita-cita gerakan, yaitu terwujudnya pelajar yang berakhlak mulia, terampil, dan berilmu sebagai manifestasi cita-cita terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya di kalangan pelajar. Hal ini belaku juga bagi Muhammadiyah sebagai induk gerakan yang bercita-cita

terwujudnya masyarakat islam yang sebenar-benarnya. Adanya mereka-meraka yang bertipa pragmatis oportunis tanpa sada mereka telah mendekonstruksni makna dan nilai-nilai tujuan atau cita-cita pergerakan dan persyarikatan. Akibatnya dari masa ke masa yang terjadi hanya ada penurunan substansi cita-cita pergerakan meskipun secara simbolis (yang terwujud dalam redaksi kata-kata cita-cita gerakan sebagaimana awal berdirinya gerakan) tetap sama sebagaimana awal berdirinya gerakan.

Pembaca tentunya paham kader yang manakah dibutuhkan untuk menunjang terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya atau masyarakat utama sebagaimana dicita-citakan oleh KH Ahmad Dahlan sang pendiri Muhammadiyah. Sebagai gerakan yang memberdayakan perempuan, NA jangan bersifat sporadis. Kelompok perempuan, biasanya persoalan atau isu yang muncul selama ini masih dilihat sebagai bisul yang muncul kadangkala. Padahal sesungguhnya kiprah warga NA harus dibuat secara berkelanjutan sebagai sebuah gerakan.

Menjadi sebuah organisasi gerakan yang peduli dengan persoalan perempuan dan lingkungannya, warga apalagi pimpinan NA harus melihat isu tidak sekadar sebagai bisul atau luka yang nanti akan hilang meski kapan muncul lagi. Namun isu itu harus dilihat lebih mendasar hingga akar permasalahan sesungguhnya. Hal tersebut dilakukan dalam sosialisasi menjelang Muktamar NA di Makassar, November 2010. Dikatakan bahwa, sebagai perempuan muda Muhammadiyah kader NA hendaknya memiliki bingkai wawasan yang kuat untuk menganalisis persoalan yang dihadapi. Karena dengan bingkai itu akar persoalan dari sebuah permasalahan bisa diurai untuk kemudian dicari solusi atau kebijakannya.

Kehidupan dan pergaulan dunia yang semakin kompleks, pelbagai persoalan yang dihadapi umat khususnya perempuan, menjadi

sebuah tantangan tersendiri dalam kiprah dan gerak dakwah. Fakta di masyarakat ini menuntut dinamika organisasi yang makin cepat, mengingat tantangan yang dihadapi juga semakin kompleks. Banyak persoalan yang dihadapi perempuan dewasa ini. Menurut penulis yang membuat kiprah 'Aisyiyah lebih di-break-down sehingga dirasakan membela dan memberdayakan masyarakat bawah.

A. Hubungan 'Aisyiyah dengan Muhammadiyah

Sebelum menjelaskan hubungan Muhammadiyah dengan 'Aisyiyah secara organisasi, terlebih dahulu dikemukakan perbedaan istilah, fungsi dan kedudukan organisasi 'Aisyiyah dan Nasyiatul 'Aisyiyah (NA) sebagai organisasi otonom yang bergerak di bidang keagamaan, kemasyarakatan, dan keputrian dengan tetap mengedepankan gerakan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*, yang diamanatkan Persyarikatan Muhammadiyah. Tugas ini dilakukan baik secara kolektif organisasional maupun secara individu oleh personil-personil NA. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa, hubungan Muhammadiyah, 'Aisyiyah dengan Nasyiatul 'Aisyiyah baik dilihat dari garis komando, fungsional, struktural dan kultural merupakan satu sistem yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

1. Hubungan yang bersifat Koordinasi.

'Aisyiyah dan NA hadir di kalangan Muhammadiyah berkat adanya kesadaran religius yang positif tentang masa depan dan kelangsungan cita-cita Muhammadiyah. Kesadaran ini menjadi wacana organisasi untuk membangun generasi muda Islam untuk tetap eksis dan memegang peran penting dalam perjuangan bangsa. Upaya ini sangat

bermanfaat bagi bangsa Indonesia yang sedang menapaki tahap kebangkitan bangsa di awal abad ke-20.

Kondisi awal abad ke-20 bangsa Indonesia dihadapkan adanya upaya mempersatukan visi anak bangsa. Kondisi ini telah dibaca para pemuka Muhammadiyah. Siswa Praja Wanita yang merupakan embrio NA merupakan wadah dan wahana untuk menjalin persatuan di antara anak bangsa. Nilai-nilai kejuangan dan kebersamaan selalu ditanamkan kepada mereka sejak dini. Ukhuwah Islamiyah diimplentasikan dalam kehidupan berbangsa agar jalinan persatuan lebih erat, di samping kesamaan dalam penderitaan yang juga menjadi tali pemersatu. Dengan demikian hubungan Muhammadiyah dengan ‘Aisyiyah serta hubungan ‘Aisyiyah dengan NA, merupakan hubungan komando atau koordinasi, karena melalui kedua ortom ini Muhammadiyah berusaha menanamkan dan mensosialisasikan gerakan amar ma'ruf dan nahi munkar; memberantas Tahayul, Bid'ah, dan Churafat (TBC); dan membangun akhlakul karimah di kalangan perempuan (kaum ibu-ibu Muhammadiyah) dan generasi muda putri Islam.

2. Hubungan yang bersifat Struktural.

Perkembangan yang lebih positif terjadi tahun 1966, ketika posisi organisasi NA ditingkatkan lagi menjadi organisasi otonom yang struktur organisasinya berjenjang mulai dari Pusat, Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting melalui Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 1/1966 (PP ‘Aisyiyah: 48). Pokok-pokok kedudukan organisasi NA sebagai organisasi otonom dalam Muhammadiyah, adalah: (1) Mempunyai wewenang penuh mengelola, membina, dan mengembangkan organisasi; (2) Pimpinan Pusat (PP) ‘Aisyiyah di bawah PP Muhammadiyah; (3) Setiap jenjang organisasi terdapat hubungan konsultatif dengan pimpinan

organisasi yang setingkat, dalam hal pendirian organisasi, pemilihan pimpinan, dan keputusan musyawarah; (4) Organisasi 'Aisyiyah berwenang mengadakan hubungan/ kerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga swasta, dan organisasi luar. Bentuk hubungan dengan instansi/lembaga dari luar negeri atas persetujuan persyarikatan (PP Muhammadiyah); (5) Dalam bidang hukum yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah (PP 'Aisyiyah : 51).

Fakta menunjukkan bahwa NA merupakan kader utama "Aisyiyah. "Aisyiyah sebagai ibu kandung NA turut bertanggung jawab membina dan membimbing NA (SK Muhammadiyah No. 3/1987 dan Keputusan Munas NA II, 1995), melalui dari tingkat pusat, wilayah, daerah, cabang, dan ranting. Sedang bagi Muhammadiyah, NA merupakan kader yang akan meneruskan dan mengembangkan gerakan Islam dan gerakan dakwah. Karena itu, Muhammadiyah berkewajiban untuk memberikan bekal agama yang cukup kepada kader NA, menentukan arah pembinaan, membekali kemuhammadiyahannya, ilmu dan ketrampilan.

Hubungan 'Aisyiyah dengan NA dalam Muhammadiyah mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sebagai ortom Muhammadiyah. Artinya "Aisyiyah dan NA mempunyai tugas yang sama, yaitu berusaha mengembangkan serta menghidupkan cita-cita Muhammadiyah, hanya bidang garapannya yang berbeda. NA mempunyai bidang sasaran pada generasi muda wanita untuk dibina agar menjadi pelopor, pelangsong, penyempurna, pembaharu usaha dan cita-cita Muhammadiyah. Meskipun antara "Aisyiyah dan NA memiliki status yang sama di Muhammadiyah, namun secara informal "Aisyiyah mempunyai posisi lebih tinggi ketimbang NA. secara struktural 'Aisyiyah

di bawah koordinasi Muhammadiyah, serta NA di bawah koordinasi 'Aisyiyah.

Sebagai organisasi otonom Muhammadiyah yang bergerak di bidang pembinaan generasi muda wanita Islam, NA mempunyai struktur organisasi yang sama dengan Muhammadiyah, yaitu mulai dari ranting bertempat di kalurahan/desa, cabang pada tingkat kecamatan, daerah yang bertempat di kabupaten/kota, wilayah untuk tingkat propinsi, dan tingkat pusat (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nasyyiatul "Aisyiyah, 1996). Struktur ini telah mengacu pada susunan dan struktur Persyarikatan Muhammadiyah, seperti yang tertuang pada Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 15 ayat 2, dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 18 ayat 6. Untuk struktur organisasi Nasyyiatul "Aisyiyah, menurut Anggaran Dasar Nasyyiatul "Aisyiyah pasal 14 dinyatakan bahwa Pimpinan Pusat/Pimpinan Wilayah/ Pimpinan Daerah NA membentuk Departemen sebagai badan pembantu pimpinan (ayat 1). Dan Pimpinan Cabang/Pimpinan Ranting membentuk Seksi-seksi sebagai pembantu untuk melaksanakan dan memelihara usaha-usaha organisasi (ayat 2).

3. Hubungan yang bersifat Fungsional.

Secara fungsional kebangkitan bangsa Indonesia merupakan modal utama untuk lebih mengefektifkan perjuangan secara organisasional dan menyeluruh. Demi kepentingan bangsa, segala atribut kepentingan pribadi dan golongan dikorbankan untuk membangun kebersamaan dan kejuangan yang bersatu untuk mengusir kemunkaran. Keberadaan 'Aisyiyah dan NA yang dimulai dari proses perintisan hingga menjadi ortom Muhammadiyah tidak terlepas dari peran aktif tokoh 'Aisyiyah. Berjuang untuk mengangkat NA sebagai ortom yang membina

generasi muda putri Muhammadiyah (Islam) melalui proses panjang. Proses pendewasaan NA hingga dipercaya untuk mengelola rumah tangganya sendiri mengalami tiga tahap, yaitu: tahap perintisan, pembinaan, tahap otonomi. Masing-masing tahap memiliki jati diri yang berbeda-beda, sesuai dengan usia, tingkat kedewasaan, dan tantangan zaman.

Atas dasar realitas seperti itu, anggota siswa praja wanita semakin banyak, anggotanya berasal dari berbagai daerah. Kedatangan siswa praja wanita dari berbagai daerah sangat membantu penyebaran (*publication effect*) dari keberadaan perkumpulan ini. Setiap anggota siswa sraja wanita yang pulang ke daerahnya, diwajibkan kepada mereka untuk mengamalkan dan menyebarkan kemampuan dan ketrampilan teknis yang dimiliki kepada remaja putri di kampungnya.

Pada masa kepemimpinan Siti Buchainah, telah dilakukan kegiatan-kegiatan: shalat Jum,at secara jamaah, peningkatan dakwah melalui kampung-kampung, dakwah luar kota, kursus administrasi. Setiap dakwah ke kampung-kampung dan ke luar kota, NA senantiasa membawa induk organisasinya, yaitu Muhammadiyah untuk mengenalkan Muhammadiyah kepada masyarakat luas, dan untuk mengenalkan posisi Nasyiatul "Aisyiyah dalam Muhammadiyah yang turut bertanggung jawab mengemban misi Muhammadiyah di bidang keputrian generasi muda.

4. Hubungan yang bersifat Kultural.

Kesadaran sosio-kultural para pemuka Muhammadiyah ini disadari sebagai fenomena masyarakat Indonesia, terutama di Jawa cenderung memelihara TBC. Marginalisasi ajaran Islam ini dikarenakan oleh proses akulturasi Islam dengan budaya setempat yang tidak segera

direformasi. Akibatnya tata kehidupan dan sendi-sendi religius masyarakat tidak menampakkan ciri kehidupan yang Islami. Amar ma'ruf nahi munkar dan ukhuwah Islmiyah telah menjadi senjata yang ampuh untuk membangun emosi kesatuan anak bangsa dalam rangka mengusir penjajah.

Sejak tahun 1924 segala macam urusan dan keorganisasian siswa praja wanita menjadi tanggung jawab "Aisyiyah. Untuk mengaktifkannya, "Aisyiyah melakukan beberapa terobosan, misalnya pada tahun 1925 Siswa Praja Wanita dibelikan sebuah rumah sebagai pusat kegiatan; pada tahun 1926 aktivitas Siswa Praja Wanita dimuat di Suara "Aisyiyah. Terobosan ini merupakan upaya mengangkat eksistensi Siswa Praja Wanita mendapat sambutan positif. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyak Siswa Praja Wanita, dan dibuka cabang-cabang baru di beberapa daerah.

Sehubungan telah semakin melebarnya sayap Siswa Praja Wanita, maka pada kongres ke-18 telah disepakati bahwa setiap cabang "Aisyiyah harus mendirikan Siswa Praja Wanita. Hal ini merupakan upaya untuk meligitimasi posisi dan peran Siswa Praja Wanita di dalam wadah "Aisyiyah. Sesuai hasil kongres Muhammadiyah ke-20 tahun 1929 di Yogyakarta diputuskan bahwa semua gerakan di dalam tubuh Muhammadiyah harus memakai istilah dalam bahasan Arab, maka Siswa Praja Wanita mengubah diri menjadi NA. Nama baru yang disandang NA tidaklah mengubah visi dan misi gerakannya, karena yang berubah hanyalah baju, sedang wadah dan isinya tetap sama.

Proses otonomi NA dimulai pada Mukhtamar "Aisyiyah di Palembang tahun 1956, dimana NA dimunculkan suatu pemikiran bahwa NA sebaiknya diberi hak otonom untuk mengelola, memenej, dan membentuk jati dirinya. Prasaran dari Dra. Baroroh Baried ini belum

mendapat respon yang serius. Kemudian Mukhtamar "Aisyiyah pada tahun 1959 di Yogyakarta, Bagian NA yang dipegang oleh Zuhra Daris belum juga diberi hak otonom. Ketika itu NA hanya diberi keleluasaan oleh PP. "Aisyiyah untuk mengembangkan kegiatannya. Kesempatan ini dimanfaatkan NA mengembangkan diri guna menuju kedewasaannya. Iktikad ini disambut baik oleh PP."Aisyiyah dengan dibuktikan oleh diberinya kesempatan bermusyawaran sendiri.

Program pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan setiap Mukhtamar jika terdapat kekurangan dalam periode yang satu, maka akan mewarnai pada periode selanjutnya. Pelaksanaan program jangka panjang ini bersifat akumulatif (menumpuk), namun frekunsinya akan semakin berkurang. Dan yang menjadi stressing program adalah prioritas program pada masing-masing periode. Adapun yang dimaksud program jangka pendek NA yaitu program yang dilaksanakan untuk satu periode dengan memprioritaskan program-program yang dicanangkan dalam program jangka panjang.

Perkembangan IPTEK dan perubahan yang semakin pesat, di satu sisi telah mempermudah kiprah manusia dalam memahami dan menguasai dunia. Namun di sisi lain, perkembangan itu telah merusak sendi-sendi peradaban manusia dan tatanan moral bangsa. Budaya primordial dan hedonistis seakan menjadi idola kehidupan. Batas ruang dan waktu tidak lagi menjadi penghalang. Pada saat yang sama, berbagai macam bentuk budaya menyebar ke segala penjuru dunia.

Kondisi ini perlu adanya kendali moral agar bangsa Indonesia tetap pada bingkai budayanya. Upaya ini hanya bisa dilakukan melalui moral dan akhlak agama dalam kehidupan sehari-hari dengan pembentukan sikap dan perilaku yang baik. Inilah dasar pijakan NA menyusun Matan Kepribadian. Perjuangan ini memerlukan waktu yang

panjang, tidak dibatasi oleh umur manusia. Untuk itu diperlukan generasi penerus yang memahami cita-cita NA. Penyempurnaan matan Kepribadian NA mutlak diperlukan.

Kepribadian NA merupakan cermin akhlakul karimah yang didasari AD/ART NA. Kepribadian yang dimilikinya tidak sekedar ruh organisasi, tetapi kepribadian itu juga melekat pada segenap anggotanya. Karena itu, kepribadian NA merupakan keseluruhan jiwa raga yang dimiliki oleh setiap anggota NA, baik sebagai kader umat, kader organisasi, dan kader bangsa, yang dimanifestasikan dalam sikap dan perilakunya. Demikian sikap dan perilaku anggota NA tidak sekedar membangun citra dan cita-cita saja, tapi harus mampu membangun moralitas bangsa. Upaya NA ini sangat berarti bagi bangsa Indonesia untuk membangun moralitas bangsa ini.

Kemajuan IPTEK harus dimanfaatkan untuk kemajuan NA di dalam bermain dakwah. Artinya, NA secara bijak harus bersatu dengan IPTEK, dan IPTEK dimanfaatkan untuk sarana dakwah secara ilmiah. Globalisasi informasi sangat membantu penyebaran informasi keagamaan (dakwah bil-lisan) lewat media masa. Derasnya informasi dapat menambah khasanah pemberdayaan sumber daya putri Islam. Di pihak lain, NA dituntut untuk melakukan dakwah interaktiv - dialogis di dalam mensikapi proses pergeseran nilai. Menurut Amin Abdullah pada Mukhtar NA 1995 di Aceh, "NA perlu terlibat dalam mengenal seluk beluk dan memahami berbagai persoalan moralitas kontemporer.

Persoalan KDRT, tidak mudah membongkar pemahaman karena masih banyak yang menggunakan dalil-dalil agama yang tekstual, tidak kontekstual. 'Aisyiyah selama ini sudah memberikan banyak penyuluhan, jika kemudian laporan bahwa dari waktu ke waktu angka KDRT meningkat, berarti memang ada pemahaman masyarakat bahwa

kekerasan itu ada dan kini disadari sebagai sebuah “KDRT”. Fakta tersebut merupakan 'PR' besar bagi organisasi perempuan termasuk 'Aisyiyah. Oleh karena itu, masalah ini harus menjadi prioritas perjuangan pergerakan, dan harus diakui bukan hanya menjadi persoalan masyarakat kelas bawah namun juga elite yang ada terutama elite politik.

Sidang Tanwir 'Aisyiyah, sesuai dengan regulasi Organisasi yang berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, merupakan permusyawaratan tertinggi di bawah Mukhtar dan menjadi forum permusyawaratan dari Pimpinan Teras Organisasi yang bersifat nasional. Dalam periode 2005 – 2010. Sidang Tanwir kali ini adalah Sidang Tanwir yang ketiga, Sidang Tanwir yang mempersiapkan persidangan Mukhtar 'Aisyiyah yang ke-46 yang telah berlangsung di Yogyakarta, tanggal 3 – 8 Juli 2010. Sidang Tanwir ini menjadi forum yang fungsional dan potensial bagi materi dan pembicaraan dalam Sidang Mukhtar tersebut.

Mukhtar merupakan ajang tertinggi untuk menentukan kebijakan, strategi, dan langkah konkret gerakan 'Aisyiyah pada periode kerja lima tahun. Mencermati situasi umat, masyarakat, dan bangsa seperti yang terungkap di atas, situasi dengan krisis kehidupan yang multikompleks, permusyawaratan organisasi yang tertinggi ini menjadi penting. Materi persoalan sebagai bahan mencetak program organisasi perlu mendapat perhatian, penyiapan dan pencerminan untuk merencanakan program yang kondusif dan aplikatif. Perhatian, pencerminan, dan penyiapan dilakukan dengan berbagai cara yang efektif.

Mengingat pentingnya Sidang Tanwir sebagai forum persiapan Sidang Mukhtar ke-46, materi pembicaraan dipersiapkan lebih dahulu melalui berbagai kegiatan, antara lain kegiatan yang berupa *Round Table Discussion-Round Table Discussion* dan menghadirkan para narasumber

dalam berbagai bidang yang terkait, sesuai dengan bidang kegiatan 'Aisyiyah. Alhamdullillah *Round Tabel Discussion* tersebut telah berhasil menampung isu, pandangan, saran, dan menyiapkan strategi pemecahan serta langkah konkretnya, yang semuanya akan disajikan dalam Sidang Tanwir ini. Selain pembicaraan tentang topik-topik yang ditunjuk oleh regulasi Organisasi, seperti, laporan, peninjauan Anggaran Dasar, dan pemilihan dan penetapan Anggota dan Ketua Umum Pimpinan Pusatnya, persoalan yang terkait dengan fenomena dalam masyarakat bangsa kita menjadi perhatian utama.

Selain *Round Tabel Discussion*, sejumlah rangkaian kegiatan pun dilaksanakan dengan tema kegiatan yang mendukung, yaitu **Rapat Akbar** dengan mengambil tema yang diangkat dari situasi masyarakat bangsa yang marak dengan kekerasan, kekerasan yang mendera para warga masyarakat, terutama kaum perempuan dan anak. Meskipun Undang-undang yang terkait telah diterbitkan tampaknya, regulasi itu belum mampu menyaingi kekerasan yang tetap berlangsung, bahkan mengalami eskalasi.

Menghadapi fenomena tersebut 'Aisyiyah memandang perlu untuk 'menyaingi'nya dengan mengangkatnya dalam Rapat Akbar, forum yang dengan citra ke'akbar'annya dan dengan besarnya jumlah partisipannya, adanya dan berkembangnya bencana masyarakat ini dapat dihilangkan, sekurang-kurangnya dieliminasi. Demikianlah Rapat Akbar mengambil tema 'nirkekerasan', kehidupan masyarakat tanpa kekerasan. Rangkaian kegiatan yang mengiringi Muktamar 'Aisyiyah ke-46 ini dilahirkan oleh kepentingan bangsa dalam tataran global yang digariskan dalam rancangan menciptakan masyarakat baha-gia dalam lingkup global yang dikenal dengan MDGs.

Menghadapi program di atas, ‘Aisyiyah menyelenggarakan **seminar internasional** yang diikuti oleh para peserta dan pengamat baik dari dalam maupun dari luar negeri. Topik utama seminar diangkat dari fenomena kunci MDGs, yaitu bidang ekonomi. Hakikatnya, ekonomi yang dipandang mampu untuk mencapai MDGs. Program dunia yang diharapkan dapat tercapai tahun 2015 itu, dievaluasinya bulan September 2010. Seminar mengajak para pemerhati baik dari dalam maupun luar negeri untuk mendiskusikan, membahas strateginya, dan merancang langkahnya, bagi pencapaian MDGs khususnya, di Indonesia dapat sesuai dengan jadwal yang telah digariskan. Seminar itu menampilkan pembicara baik tingkat nasional maupun internasional.

Rangkaian kegiatan yang lain berupa bazar dan pameran yang menampilkan produk dari kegiatan Organisasi, produk amal usahanya, hasil kerjanya, bahkan proses kerja yang dapat diikuti dengan teknologi yang relatif canggih. Hal itu sejalan dengan program Organisasi yang memotivasi, menggerakkan jiwa dan semangat independensi para warga masyarakat dalam menjalani kehidupan. Kemandirian menjadi topik utama bagi penyelamatan bangsa. Mencermati isu-isu tersebut, ‘Aisyiyah terus meningkatkan daya tampilnya dalam peran kebangsaan. Di samping itu, *yang* menjadi dasar gerakan persoalan sosiologis, ekonomis, pendidikan, kesehatan, keadilan, hukum, dan lingkungan seperti dikemukakan di atas dihadapi oleh ‘Aisyiyah dengan semangat iman yang diperoleh melalui cinta tanah air. Sebagai pelaku perempuan gerakan Muhammadiyah, sikap, semangat, dan gerak langkah ‘Aisyiyah diarahkan oleh ideologi yang digariskan Muhammadiyah, yaitu ideologi yang dijiwai oleh Islam yang *rachmatan li'l-‘alamin* dan yang bersemangat *tajdid*.

Rancangan pemikiran yang dibawakan dalam Sidang Tanwir ialah langkah konkret telah digariskan, yaitu mengefektifkan gerak langkah dengan menjalin kemitraan, baik dengan instansi pemerintah maupun institusi non pemerintah. Dalam Mukhtamar ‘Aisyiyah ke-46, telah diadakan peresmian kerjasama dengan pihak pemerintah dalam bentuk penanda tangan nota kesepahaman (MOU) yang menggariskan langkah konkret program. Terkait dengan kemitraan dengan pemerintah, kerjasama dalam bidang hukum dan HAM perlu dilakukan dan dikongkretkan dalam bentuk kegiatan yang konkret pula.

Situasi masyarakat yang memperlihatkan gejala kriminalitas yang makin tinggi yang berakibat pada berjejalnya penghuni lapas. Situasi ini membuka suatu kebutuhan bagi kehidupan mental spiritual dan perhatian terhadap kondisi kesehatannya. ‘Aisyiyah memandang bahwa kehidupan sebagai orang yang sedang dalam konsinyasi lapas memerlukan siraman rohani bagi kehidupan mental spiritualnya, dan pelayanan kesehatan bagi kondisi fisiknya. Dua kepentingan tersebut diharapkan menghindarkan lapas sebagai ajang peningkatan ketrampilan kriminalitas, ajar penyubur penyakit. Penanganan kedua hal tersebut, akan menghilangkan sekurangnya mengurangi dampak yang berakibat pada bencana masyarakat luas. Untuk itulah MOU ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM dengan Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah.

Bencana nasional berupa rusaknya lingkungan yang selama ini menjarah wilayah tanah air, telah menjadi program ‘Aisyiyah untuk tetap menjadi perhatian. Pada tanggal 5 Juli 2007, ‘Aisyiyah seluu Indonesia telah melakukan gerakan nasional penanaman pohon dengan tekad HIJAU BUMIKU LESTARI ALAMKU, maka dalam event Mukhtamar, tekad tersebut lebih dikongkretkan dengan gerakan massal nasional penanaman pohon. Gerakan massal nasional penanaman pohon di event

Muktamar merupakan peningkatan perhatian atas meluasnya kepedulian lingkungan. Peningkatan ini sejalan dengan jumlah pohon yang diprogramkan oleh pemerintah, yaitu apabila program semula ‘satu juta pohon’ pada periode ini ditingkatkan menjadi ‘satu miliar pohon’.

Muktamar ‘Aisyiyah selama ini diselenggarakan bersamaan dengan Muktamar Muhammadiyah, baik waktu maupun tempat berlangsungnya Muktamar. Tentu penyelenggaraan yang demikian mengandung untung dan rugi bagi perjuangan perempuan Muhammadiyah. Di pandang dari segi penyelenggaraan, sangat menguntungkan karena ‘Aisyiyah tinggal mempersiapkan materi yang akan dibahas dalam Muktamar sedangkan mengenai tempat penyelenggaraan dan fasilitas lain cukup diurus oleh panitia bentukan Muhammadiyah. Dari segi kepentingan perempuan Muhammadiyah, ‘Aisyiyah kurang bisa memperjuangkan kepentingan tersebut dalam Muktamar Persyarikatan.

Timbul pemikiran untuk menyelenggarakan Muktamar tersendiri secara terpisah di kemudian hari. Paling tidak lontaran pemikiran ini timbul dari pucuk pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa, pemisahan penyelenggaraan Muktamar tersebut selain akan menambah kemandirian ‘Aisyiyah, juga maksimal dalam memperjuangkan kepentingan perempuan Muhammadiyah.

Perjuangan Persyarikatan Muhammadiyah dari aspek perempuan yang tertuang dalam keputusan Muktamar kurang optimal, karena ketetapan organisasi yang dilakukan ‘Aisyiyah dimusyawarahkan dalam waktu yang bersamaan dengan waktu memusyawaratkan garis-garis perjuangan yang menjadi dasar, dan strategi Muhammadiyah.

Akibatnya, keputusan berupa hasil musyawarah Persyarikatan Muhammadiyah dari segi keperempuan tersebut diambil tidak dari garis-garis kebijaksanaan yang dilahirkan permusyawaratan yang dilakukan Aisyiah Keberadaan wakil ‘Aisyiyah di Muktamar Muhammadiyah yang diselenggarakan dalam waktu bersamaan dengan Muktamar ‘Aisyiyah juga tidak akan mengakomodasi keberhasilan penyelenggaraan perjuangan Persyarikatan Muhammadiyah oleh ‘Aisyiyah. Beberapa pertimbangan lain tentang Muktamar yang terpisah ini adalah sebagai berikut:

- a. ‘Aisyiyah merupakan komponen Persyarikatan Muhammadiyah dan berfungsi menyelenggarakan perjuangan Persyarikatan dalam aspek kewanitaannya.
- b. Persyarikatan Muhammadiyah sebagai pergerakan yang berjuang menciptakan masyarakat utama juga memerlukan ‘Aisyiyah. Ini karena jumlah sasaran perjuangan Persyarikatan Muhammadiyah berupa masyarakat perempuan lebih dari 50 persen.
- c. Perkembangan dan kemajuan yang dicapai pada sasaran perjuangan Persyarikatan Muhammadiyah yang berupa perempuan menuntut perkembangan, kemajuan, perhatian dan penanganan terhadap program Persyarikatan Muhammadiyah dari sisi kiprah sasaran perjuangan wanita.
- d. Muktamar Muhammadiyah merupakan forum tertinggi Organisasi di dalam Persyarikatan Muhammadiyah, termasuk organisasi otonom, yang memusyawarahkan garis-garis kebijaksanaan perjuangan yang menjadi dasar perjuangan komponen yang lain, termasuk ‘Aisyiyah.
- e. Gerakan ‘Aisyiyah sebagai pelaksana kebijakan di lapangan perlu menyesuaikan gerakan dengan garis-garis perjuangan. Persyarikatan Muhammadiyah, adalah forum yang memusyawarahkan perjuangan

‘Aisyiyah. Hal ini berarti bahwa forum yang membicarakan perjuangan ‘Aisyiyah perlu diatur dengan memperhatikan waktu penyelenggaraan. Dengan demikian, Mukhtamar Muhammadiyah dan Mukhtamar ‘Aisyiyah merupakan forum yang memusyawarahkan kegiatan yang memiliki porsi yang besar bagi keberhasilan perjuangan.

Pembahasan sebelumnya disebutkan bahwa, timbulnya kesadaran sosio-kultural para pemuka Muhammadiyah ini didasari oleh fenomena masyarakat Indonesia, terutama di Jawa, yang cenderung memelihara TBC. Marginalisasi ajaran Islam ini dikarenakan oleh proses akulturasi Islam dengan budaya setempat yang tidak segera direformasi. Akibatnya tata kehidupan dan sendi-sendi religius masyarakat tidak menampilkan ciri kehidupan yang Islami. Amar ma'ruf nahi munkar dan ukhuwah Islmiyah telah menjadi senjata yang ampuh untuk membangun emosi kesatuan anak bangsa dalam rangka mengusir penjajah. Kebangkitan bangsa Indonesia merupakan modal utama untuk lebih mengefektifkan perjuangan secara organisasional dan menyeluruh. Demi kepentingan bangsa, segala atribut kepentingan pribadi dan golongan dikorbankan untuk membangun kebersamaan dan kejuangan yang bersatu untuk mengusir kemunkaran.

Keberadaan NA yang dimulai dari proses perintisan hingga menjadi organisasi otonom Muhammadiyah tidak terlepas dari peran tokoh NA. Mereka berjuang untuk mengangkat NA sebagai salah satu organisasi yang membina generasi muda putri Islam. Proses pendewasaan NA hingga dipercaya untuk mengelola rumah tangganya sendiri mengalami proses tiga tahap, yaitu: tahap perintisan, tahap pembinaan, dan tahap otonomi.

1. Tahap Perintisan

Embrio NA bermula dari idealisme Somodirdjo yang memikirkan kelangsungan dan masa depan Muhammadiyah. Bahwa kelangsung dan masa depan Muhammadiyah sangatlah bergantung pada upaya pengkaderan yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Untuk itu, Riwayat Singkat Nasyiatul 'Aisyiyah dan Khittah Perjuangannya, bermula dari pemikiran ini yang kemudian mendapat bantuan dari R.H. Hadjid, kepala guru agama di Standart School Muhammadiyah, idealisime Somodirdjo ini kemudian dituangkan ke dalam wadah/diorganisasi yang dinamakan Siswa Praja pada tahun 1919. Wadah ini merupakan organisasi yang menampung remaja putra dan putri Standart School Muhammadiyah.

Mengingat urgensitas perkumpulan ini, maka wadah ini kemudian disebarluaskan ke perbagai cabang dan ranting Muhammadiyah. Perkembangan selanjutnya, tahun 1919 telah diadakan pemisahan antara Siswa Praja Putra dan Siswa Praja Putri. Setelah lima bulan dari pemisahan ini, Siswa Praja Putri diserahkan kepada Siti Wasilah sebagai Ketua, Umayah sebagai Wakil Ketua, Penulis dan Bendahari dipegang oleh Siti Juhainah dan Siti Zuhriyah. Dengan menggunakan fasilitas tempat Haji Irsjad (Mushola 'Aisyiyah Kauman Yogyakarta sekarang) Siswa Praja Wanita melaksanakan kegiatan-kegiatannya, seperti pengajian, berpidato, jama'ah sholat, mengadakan peringatan hari besar Islam, kegiatan jaian keputrian, dan lain-lain.

Awalnya kegiatan yang dilakukan Siswa Praja Wanita mengalami hambatan yang cukup serius. Para orang tua siswa pada umumnya merasa keberatan untuk melepas putrinya guna mengikuti tambahan pelajaran dan kegiatan keputrian yang diadakan oleh Siswa Praja Wanita. Berkat kesabaran, ketekunan, dan kerja keras pengurus untuk memberikan pengarahan kepada para orang tua, maka akhirnya mereka sadar dan

mengerti arti dan manfaat pelajaran tambahan dan kegiatan keputrian. Ini dibuktikan dengan semakin bertambahnya ketrampilan praktis wanita, wawasan pengetahuann dan keagamaan para Siswa Praja Wanita. Atas dasar realitas itu, anggota Siswa Praja Wanita semakin hari semakin banyak. Bahkan anggotanya berasal dari berbagai daerah. Kedatangan anggota Siswa Praja Wanita dari berbagai daerah sangat membantu atas penyebarluasan (*publication effect*) dari keberadaan perkumpulan ini. Setiap anggota Siswa Praja Wanita yang pulang ke daerahnya, diwajibkan kepada mereka untuk mengamalkan dan menyebarluaskan kemampuan dan ketrampilan teknisnya kepada remaja putri di kampungnya, merupakan ibadah, penyebaran ini sangat membantu eksistensi dan pengembangan Siswa Praja Wanita di masa datang.

Pada tahun 1924 segala macam urusan dan keorganisasian Siswa Praja Wanita menjadi tanggung jawab "Aisyiyah. Untuk mengefektifkan Siswa Praja Wanita, "Aisyiyah melakukan beberapa terobosan, antara lai pada tahun 1925 Siswa Praja Wanita dibelikan sebuah rumah sebagai pusat kegiatan; pada tahun 1926 aktivitas Siswa Praja Wanita dimuat di Suara "Aisyiyah. Hal ini merupakan upaya mengangkat eksistensi Siswa Praja Wanita yang mendapat sambutan banyak. Ini dibuktikan dengan semakin suburnya anggota Siswa Praja Wanita, dan tumbuhnya cabang-cabang baru di beberapa daerah.

2. Tahap Pembinaan

Sehubungan dengan semakin melebarnya sayap Siswa Praja Wanita, maka pada konggresnya ke-18 telah disepakati bahwa setiap cabang "Aisyiyah harus mendirikan Siswa Praja Wanita. Ini merupakan upaya untuk meligitimasi posisi dan peran Siswa Praja Wanita di dalam wadah "Aisyiyah. Sesuai hasil konggres Muhammadiyah ke-20 pada

tahun 1929 di Yogyakarta diputuskan bahwa semua gerakan di dalam tubuh Muhammadiyah harus memakai istilah dalam bahasan Arab, maka Siswa Praja Wanita mengubah diri menjadi NA. Nama baru yang disandang NA tidaklah mengubah visi dan misi gerakannya, karena yang berubah hanyalah baju, sedang wadah dan isinya tetap sama. NA baru semakin hari semakin menampakkan kegiatannya. Pada masa era kepemimpinan Siti Buchainah, dilakukan kegiatan-kegiatan shalat Jum'at secara jamaah, peningkatan dakwah melalui kampung-kampung, dakwah luar kota, kursus administrasi.

Setiap dakwah ke kampung-kampung dan ke luar kota, 'Aisyiyah senantiasa membawa induk organisasinya, yaitu Muhammadiyah. Hal ini bertujuan: (1) Mengenalkan Muhammadiyah kepada masyarakat luas; (2) Mengenalkan posisi Nasyiatul 'Aisyiyah dalam organisasi Muhammadiyah yang turut bertanggung jawab mengemban misi Muhammadiyah di bidang keputrian generasi muda.

Kongres Muhammadiyah ke-26 di Yogyakarta pada tahun 1938 telah diambil keputusan tentang simbol padi sebagai simbol NA. Pada tahun ini, Achyar Anies mengarang lagu simbol padi dan kemudian dijadikan mars NA. Masa pendudukan Jepang sampai masa revolusi kemerdekaan, organisasi Muhammadiyah dan ortomnya mengalami stagnasi. Baru pada tahun 1950, suhu politik Indonesia sudah agak menurun, Muhammadiyah mengadakan muktamar di Yogyakarta. Muktamar ini bertujuan untuk mempercepat laju pertumbuhan dan langkah Muhammadiyah. Muktamar ini ada beberapa perubahan yang fundamental, yaitu 'Aisyiyah diangkat menjadi organisasi otonom Muhammadiyah. Kemudian NA dijadikan bagian yang diistimewakan oleh Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, sehingga NA diberi wewenang untuk mengelola dan memenej organisasinya di seluruh nusantara. Bahkan

keisitimewaan NA sampai pada diberi wewenang oleh "Aisyiyah untuk mengadakan konferensi sendiri. Sejak saat itu penampilan NA lebih mandiri dan meyakinkan.

3. Tahap Otonomi

Proses otonomi NA dimulai pada Mukhtamar "Aisyiyah tahun 1956 di Palembang, dimana NA dimunculkan suatu pemikiran bahwa NA sebaiknya diberi hak otonom untuk mengelola, dan membentuk jati dirinya. Prasaran dari Dra. Baroroh Baried ini belum mendapat respon yang serius. Kemudian pada Mukhtamar "Aisyiyah pada tahun 1959 di Yogyakarta, Bagian NA yang dipegang oleh Zuhra Daris belum juga diberi hak otonom. Ketika itu NA hanya diberi keleluasaan oleh PP. "Aisyiyah untuk mengembangkan kegiatannya.

Kesempatan ini dimanfaatkan oleh NA mengembangkan diri guna menuju kedewasaannya. Iktikad ini disambut baik oleh PP."Aisyiyah dengan dibuktikan oleh diberinya kesempatan bermusyawaran tersendiri. Pada Mukhtamar "Aisyiyah di Jakarta tahun 1962 merupakan sinyalemen bahwa NA harus dituntut untuk mulai memikirkan kebutuhan dan pengembangan dirinya. Untuk itu pada kesempatan ini Bagian NA di bawah kepemimpinan Siti Karimah membuat rencana kerja baru yang meliputi : kaderisasi, popularisasi NA, pembinaan, dll. Semangat Jakarta ini betul-betul menjadi motivasi bagi NA untuk membenahi diri dan membina rumah tangganya.

Semangat Jakarta ini betul-betul telah menjadi Nasyyiatul "Aisyiyah dewasa. Pada sidang tanwir 1963 telah disepakat bahwa NA diberi status otonom. Siti Karimah dan kawan-kawan mulai mengadakan persiapan-periapan untuk mengadakan musyawarah pertamanya di Bandung. Persiapan ini mendapat bimbingan dari majlis bimbingan

pemuda. Sebelum muktamar, terlebih dahulu diadakan konferensi NA di Solo. Konferensi ini bertujuan untuk menyamakan visi dan misi NA; mempersiapkan program-program kerja, penyusunan AD, berbagai hal yang berkaitan dengan keorganisasian, dan lain-lain.

DINAMIKA KEMANDIRIAN ORGANISASI ‘Aisyiyah

Mengawali pokok bahasan tentang dinamika kemandirian organisasi ‘Aisyiyah dalam berbagai fase perkembangan, dengan mengutip pandangan H.M Amin Rais, mantan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, dalam Tanwir II ‘Aisyiyah beliau mengatakan bahwa, “Bangsa Indonesia saat ini masih memprihatinkan kondisinya dibandingkan dengan berbagai Negara, dilihat dari berbagai aspek, yaitu sumber daya manusia, lemahnya memanfaatkan potensi yang dimiliki, daya saing yang lemah, dan karakter bangsa yang belum kuat”. Karena itu, diperlukan strategi untuk membangun bangsa yang bermartabat di tengah percaturan dunia. Lebih lanjut Amien Rais mengajak ‘Aisyiyah untuk melakukan tiga hal yaitu: memperkuat aqidah, memperkuat kemampuan bersaing, dan meningkatkan kekuatan multi dimensional antara lain peningkatan kualitas pendidikan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Telaah Dokumen PP ‘Aisyiyah, Yogyakarta, 2012).

Berdasarkan ilustrasi di atas sebagai landasan berpikir mengantarkan peneliti untuk menjelaskan dinamika kemandirian organisasi ‘Aisyiyah Kota Makassar dalam berbagai fase perkembangan, yang ditelusuri melalui tiga aspek kemandirian, yaitu “Medan Visional”, “Paradoks Independensi”, dan “Autopoiesis”. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa, ‘Aisyiyah Kota Makassar berdiri sejak Tahun 1926. Seperti halnya struktur organisasi ‘Aisyiyah Pusat dimana ‘Aisyiyah Kota Makassar terdiri atas 7 (tujuh) majelis, yaitu: (1) Majelis Tabligh; (2) Majelis Dikdasmen (Pendidikan Dasar dan Menengah); (3) Majelis Kesejahteraan Sosial; (4) Majelis Kesehatan; (5) Majelis

Ekonomi dan Ketenagakerjaan; (6) Majelis Pembinaan Kader, dan (7) Majelis Hukum dan HAM (Hak Azasi Manusia), sedangkan 2 lembaga, yaitu: (1) Lembaga Penelitian dan Pengembangan, dan (2) Lembaga Kebudayaan. Secara garis besar ketujuh bidang (majelis) tersebut merealisasikan program kerja atau bidang-bidang kegiatan yang telah direncanakan dalam 5 (lima) tahun terakhir (2010 – 2015), dapat ditelusuri berdasarkan data dan fakta yang diperoleh sebagai berikut :

A. Medan Visional ‘Aisyiyah Kota Makassar

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa visi organisasi ‘Aisyiyah Kota Makassar sama dengan visi ‘Aisyiyah Pusat sekaligus visi Muhammadiyah, yaitu *“Tegaknya Agama Islam dan Terwujudnya Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya”*. Visi tersebut menjadi medan magnet yang mengikat dan menggerakkan semua warga ‘Aisyiyah dalam merumuskan, mengarahkan, dan memberi semangat terhadap semua pengurus untuk bergerak bersama serta melakukan tindakan berdasarkan visi organisasi. Dengan demikian, medan visional yang dimaksud dalam penelitian ini, adalah lingkup kegiatan atau program kerja yang menjadi pegangan semua unsur dalam organisasi untuk bergerak bersama mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menyadari bahwa ‘Aisyiyah merupakan organisasi yang bergerak di bidang dakwah keagamaan, kegiatan sosial dan kemasyarakatan dengan perinsip dasar *“amar makruf nahi munkar”*. Berdasarkan perinsip dasar dan visi utama di atas, maka dirumuskan visi pengembangan organisasi, yaitu: *“Tercapainya usaha-usaha ‘Aisyiyah yang mengarah pada penguatan dan pengembangan dakwah amar makruf nahi munkar secara lebih berkualitas menuju masyarakat madani (civil society), yakni masyarakat utama yang diridhoi oleh Allah swt. Selanjutnya dalam upaya*

mewujudkan perinsip dasar dan visi ‘Aisyiyah di atas, maka dirumuskan misi organisasi ‘Aisyiyah dalam bentuk amal usaha, program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman, meningkatkan pengamalan serta menyebarkan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan.
2. Meningkatkan harkat dan martabat kaum wanita sesuai dengan ajaran Islam.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengkajian terhadap ajaran Islam.
4. Memperteguh iman, memperkuat dan menggembirakan ibadah, serta mempertinggi akhlak.
5. Meningkatkan semangat ibadah, jihad zakat, infaq, shodaqoh, wakaf, hibah, serta membangun dan memelihara tempat ibadah, dan amal usaha yang lain.
6. Membina Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Puteri untuk menjadi pelopor, pelangsup, dan penyempurna gerakan ‘Aisyiyah.
7. Meningkatkan pendidikan, mengembangkan kebudayaan, memperluas ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menggairahkan penelitian.
8. Memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang berkualitas.
9. Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan dalam bidang-bidang sosial, kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan lingkungan hidup.
10. Meningkatkan dan mengupayakan penegakan hukum, keadilan, dan kebenaran serta memupuk semangat kesatuan dan persatuan bangsa.
11. Meningkatkan komunikasi, ukhuwah, kerjasama di berbagai bidang dan kalangan masyarakat dalam dan luar negeri.

12. Usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi.

Selanjutnya program kerja ‘Aisyiyah Kota Makassar Periode 2010 – 2015, meliputi:

1. Bidang Dakwah, yaitu: (1) mengintensifkan pembinaan aqidah, ahklak, ibadah, di kalangan ‘Aisyiyah dan masyarakat melalui pengajian dan kajian-lajian; (2) mengintensifkan kajian tafsir al-Qur’an dan al-Hadist bagi anggota, kader, dan pimpinan; (3) memasyarakatkan pelaksanaan kehidupan sehari-hari berdasarkan pedoman kehidupan Islami sesuai tuntutan tarjih Muhammadiyah; (4) meningkatkan dan mengembangkan kemampuan muballighat dalam berbagai aspek seperti: penguasaan metode, materi serta strategi dakwah; (5) meningkatkan fungsi masjid, mushallah, dan sarana dakwah lainnya sebagai pusat kegiatan Tabligh atau penyiaran Islam secara terprogram; (6) mengintensifkan program pembelajaran al-Qur’an bagi anggota ‘Aisyiyah. Program kerja ‘Aisyiyah di bidang dakwah di atas, dilaksanakan oleh Majelis Tabligh berdasarkan visi organisasi sebagai medan pergerakan dalam melaksanakan program kerja yang telah ditentukan, yaitu untuk: menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman, meningkatkan pengamalan serta menyebarkan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan, serta meningkatkan harkat dan martabat kaum wanita sesuai dengan ajaran Islam.
2. Bidang Pendidikan, yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kreatifitas dalam penyelenggaraan pendidikan dasar tingkat PAUD dan TK ‘Aisyiyah; (2) menjadikan lembaga pendidikan ‘Aisyiyah sebagai basis kaderisasi ‘yang dilakukan secara sistematis; (3) meningkatkan kualitas pendidikan melalui jenajng pendidikan, forum diskusi dan berbagai cara yang lain; (4) meningkatkan kesejahteraan pendidikan

dan tenaga kependidikan sesuai kemampuan organisasi berdasarkan kinerja, komitmen dan pengabdian terhadap ‘Aisyiyah; (5) membuat data base sebagai pusat informasi dan basis pengembangan pendidikan ‘Aisyiyah; (6) penggunaan administrasi anak didik dari organisasi; (7) penggunaan RAPBO/RAPBS; (8) iuran anak didik, dan (9) infaq guru. Kesembilan program kerja bidang pendidikan di atas direalisasikan oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen).

3. Bidang Kesejahteraan Sosial, meliputi: (1) pendataan amal usaha; (2) konsolidasi dan penguatan organisasi; (3) meningkatkan usaha-usaha dan kualitas penanggulangan bencana antara lain pada tanggap darurat, kesiapan SDM dan sinergi dengan amal usaha; (4) pelatihan perawatan jenazah; (5) membantu masyarakat dhuafa/fakir miskin; (6) meningkatkan sosialisasi penghapusan berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Keenam program kerja dan kegiatan tersebut direalisasikan oleh Majelis Kesejahteraan Sosial.
4. Bidang Kesehatan, meliputi: (1) meningkatkan kualitas sumber daya di bidang kesehatan melalui peningkatan pendidikan, pelatihan, dan seminar-seminar; (2) meningkatkan upaya penurunan angka kematian bayi dan balita melalui imunisasi ASI eksklusif dan pemberian gizi seimbang; (3) meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di lingkungan keluarga, amal usaha, tempat umum, dan tempat ibadah; (4) meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit menular seperti HIV/AIDS, malaria, TB, dan penyakit lainnya; (5) meningkatkan sinergi kerjasama dengan pemerintah dan berbagai pihak lain dalam rangka meningkatkan peran ‘Aisyiyah dalam peningkatan kualitas

kesehatan masyarakat. Kelima program kerja bidang kesehatan tersebut, dilaksanakan oleh Majelis Kesehatan.

5. Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan, yaitu: (1) kewirausahaan melalui penguatan dan pengembangan usaha makro, menengah yang dikelola oleh perempuan agar mampu memperjuangkan hak dan kepentingannya; (2) optimalisasi pembinaan ekonomi melalui Badan Usaha Ekonomi Keluarga 'Aisyiyah (BUEKA); (3) mengadakan berbagai macam pelatihan dan keterampilan, dan (4) mengadakan bazaar. Keempat program kerja tersebut dilaksanakan oleh Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan.
6. Bidang Pengkaderan, meliputi: (1) mengembangkan dan mengoptimalkan pelaksanaan pengkaderan di tingkat daerah sampai di tingkat ranting secara terencana, periodic, dan berkelanjutan; (2) optimalisasi fungsi dalam peran amal usaha sebagai pendidikan dan pembinaan kader; (3) mengoptimalkan pembinaan kader, melalui keluarga, amal usaha, AMM, untuk menjadi pelopor dan pelangsung gerakan. Ketiga program kerja di bidang pengkaderan ini dilaksanakan oleh Majelis Pembinaan Kader.
7. Bidang Hukum dan HAM, yaitu: (1) berpartisipasi aktif dalam upaya penegakan hukum dan HAM di Indonesia, sehingga terwujud rasa keadilan bagi setiap warga negara; (2) meningkatkan pemahaman tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan upaya pencegahannya; (3) meningkatkan pengawasan dan pencegahan perdagangan manusia. Ketiga program kerja tersebut, dilaksanakan oleh Majelis Hukum dan HAM.

Selain program kerja ketujuh majelis yang telah disebutkan di atas, juga program kerja lembaga, yaitu: Lembaga Penelitian dan Pengembangan adalah: (1) mengembangkan penelitian dan pengkajian

masalah-masalah keorganisasian untuk mendukung kebijakan dan pengembangan organisasi; (2) meningkatkan dan mengembangkan fungsi data dan informasi sebagai salah satu sumber penting dalam pengambilan kebijakan organisasi dan pengembangan gerakan, dan (3) mengembangkan publikasi hasil kajian dan penelitian secara luas melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Sementara program kerja Lembaga Kebudayaan, meliputi: (1) meningkatkan perhatian terhadap masalah-masalah social budaya, seperti: kesenian, perubahan budaya masyarakat, termasuk gaya hidup, kepariwisataan, serta aspek social lainnya, dan (2) mengembangkan apresiasi seni budaya masyarakat religious yang membawa pada pencerahan akal budi atau akhlak dalam kerangka dakwah Islam.

Selanjutnya dalam merealisasikan program kerja ketujuh majelis dan dua lembaga 'Aisyiyah Kota Makassar, secara garis besar berpedoman pada visi organisasi sebagai medan yang mengikat semua anggota, yaitu:

- a) Majelis Tabligh, bahwa 'Aisyiyah sebagai organisasi dakwah keagamaan, sosial, dan kemasyarakatan melaksanakan aktivitas penanggulangan masalah kemiskinan dengan prinsip bahwa masalah kemiskinan telah menjadi permasalahan sosial yang sangat memprihatinkan dan menuntut perhatian serius semua pihak, termasuk 'Aisyiyah. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia (sandang, pangan, dan papan atau perumahan, pendidikan, kesehatan, dan interaksi sosial). Salah satu penyebab kemiskinan adalah semakin menipiskannya keberpihakan kebijakan publik terhadap kelompok masyarakat miskin akibat adopsi terhadap paham ekonomi pasar yang berlebihan. Karena itu, ''Aisyiyah tetap menjadikan masalah

kemiskinan sebagai salah satu kegiatan dengan berpedoman pada visi organisasi. Salah satu tujuan organisasi ''Aisyiyah adalah membantu kelompok masyarakat yang kurang beruntung (penyandang masalah sosial). Dalam menangani masalah kemiskinan dengan mekanisme pasar dianggap sebagai satu-satunya cara yang paling tepat untuk menyediakan berbagai kebutuhan dan pelayanan dasar bagi masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan bahwa, air dan listrik yang merupakan pelayanan dasar, lebih baik bila diserahkan kepada pasar karena dianggap pasarlah yang dapat melayani dengan efisien. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa, ''Aisyiyah sebagai organisasi perempuan yang peduli terhadap berbagai persoalan yang dihadapi ibu-ibu rumah tangga terutama pelayanan dasar (air dan listrik). Banyak ibu rumah tangga yang semakin berat menghadapi kenaikan tarif air dan tarif dasar listrik yang melaju lebih kencang dibanding laju pertumbuhan pendapatan keluarga. Dengan paradigma pasar, pelayanan rumah sakit dan pendidikan juga bukan lagi hak dasar yang wajib untuk dapat diakses seluruh rakyat, tetapi sudah menjadi industri jasa yang memerlukan modal, kekuatan dalam persaingan untuk mengaksesnya. Menyadari hal tersebut Majelis Tablig menjalin kerjasama dengan semua pihak untuk mengatasi masalah ini. Berpedoman pada visi ''Aisyiyah terkait dengan paradigma ekonomi pasar, peran pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja secara aktif bagi rakyat juga telah bergeser. Paham bahwa pemerintah wajib untuk menyediakan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi rakyat sesuai amanah UUD 1945, tidak berlaku lagi. Menurut pemikiran ekonomi pasar bahwa pasarlah yang akan menyediakan lapangan kerja, karena diyakini akan lebih efisien dibanding pemerintah. Dalam paradigma ini, ''Aisyiyah memandang

bahwa masyarakat miskin dan penganggur yang memiliki berbagai keterbatasan tidak akan memiliki peluang yang sama. Keluarga miskin masuk dalam putaran lingkaran kemiskinan. Tingkat pendidikan yang rendah menjadikan posisi tawar kelompok miskin sangat lemah, sehingga peluang lapangan pekerjaan dan pendapatan juga akan sangat terbatas dan pada akhirnya tidak mungkin memberikan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik bagi generasi penerusnya. Masalah kemiskinan yang menjadi pusat perhatian 'Aisyiyah Kota Makassar bukan semata-mata masalah individual dan sosial, tetapi sudah menjadi masalah politik karena proses pemiskinan secara sistematis. Oleh karena itu, memerlukan paradigma dalam memandang kemiskinan. Paradigma yang berbeda terhadap kemiskinan akan berdampak pada strategi yang berbeda dalam menyelesaikannya. Masalah kemiskinan di Kota Makassar harus dipandang sebagai kemiskinan struktural sehingga strategi penanggulangan tidak semata-mata melakukan program-program *income generating*, karena itu harus dibarengi proses penyadaran kolektif terhadap kelompok miskin dan masyarakat penyandang masalah sosial melalui gerakan memperjuangkan perubahan kebijakan menghentikan kemiskinan dan kebijakan yang berpihak pada perempuan. Hal ini karena kemiskinan memiliki dampak yang sangat besar terhadap perempuan. Tidak sedikit saat ini dari persoalan ekonomi dan krisis global yang terjadi menyebabkan timbulnya persoalan bagi perempuan. Di antara persoalan yang timbul akibat kemiskinan adalah, tingginya angka kematian ibu; menurunnya anak perempuan yang mengikuti pendidikan formal tingkat sekolah lanjutan; terpusatnya pekerja perempuan di sektor yang rendah pendidikan, rendah keterampilan dan rendah upah, serta

mudah terjadi kekerasan terhadap perempuan. Masalah tersebut merupakan persoalan yang krusial bagi kehidupan manusia. Sebab kemiskinan bukan hanya dipandang sebatas bagian dari aspek ekonomi yang tidak terkait dengan aspek lain. Akan tetapi, problem kemiskinan membawa dampak terhadap aktivitas lain dan menghambat manusia untuk meraih kualitas hidup yang ideal. Karena itu, diperlukan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok bagi setiap individu agar tidak ada hambatan menjalankan kehidupan yang lebih baik dan terjamin setiap warga negara. Sudah selayaknya negara menjamin distribusi kekayaan (sumber daya) kepada seluruh rakyat, yaitu menjamin distribusi yang adil bagi pemenuhan kebutuhan pokok secara keseluruhan.

- b) Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen); berdasarkan visi organisasi sebagai medan yang mengikat dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengkajian terhadap ajaran Islam serta memperteguh iman, memperkuat dan mengembangkan ibadah, serta mempertinggi akhlak di dalam mengelola amal usaha di bidang pendidikan. Visi organisasi yang menjadi medan gerakan semua warga ‘Aisyiyah dalam mengelola amal usaha di bidang pendidikan. Kota Makassar termasuk salah satu kota di Sulawesi Selatan yang cukup baik dalam hal penyediaan layanan akses pendidikan dasar. Hal ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi pendidikan dasar mencapai lebih dari 70 persen baik untuk laki-laki maupun perempuan. Namun, pada jenjang pendidikan lanjutan terjadi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam menerima pendidikan, bahkan perempuan untuk dapat mengakses pendidikan semakin sulit. Karena itu, saya sebagai penanggung jawab di bidang pendidikan tetap mengarahkan semua warga untuk menjadikan visi

'Aisyiyah sebagai pedoman dalam mengelola amal usaha pendidikan mulai dari TK, SD/MI, SMP/MTs, dengan memberikan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan memperoleh pendidikan seperti yang diharapkan. Perbandingannya dengan laki-laki yang tidak mampu membaca, menulis dan/atau berhitung (tidak sekolah): 1 laki-laki buta huruf berbanding dengan 3 perempuan buta huruf. Data lain juga memperlihatkan kecenderungan yang sama, dimana perempuan sangat jauh ketertinggalan dalam mengakses pendidikan dibandingkan laki-laki. Upaya pengurangan angka buta huruf telah dilakukan. Namun diakui bahwa, representasi perempuan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi dibanding dengan laki-laki. Bagi perempuan buta huruf (tidak tamat SD), dalam hal kerja selain dibebani kendala gender (karena dia perempuan), maka pekerjaan yang cocok ialah pekerjaan perempuan seperti di bidang garmen, elektronik, pembantu rumah tangga, dan sebagainya. Pekerjaan yang dapat ia peroleh hanyalah pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kecekatan dan ketelitian, tanpa membutuhkan keahlian atau pendidikan formal. Meskipun UUD 1945 maupun UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional telah memberikan akses yang luas bagi kaum perempuan untuk menikmati pendidikan, namun nilai-nilai (budaya) masyarakat yang masih mendahulukan anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan telah berpengaruh sangat besar pada partisipasi perempuan di bidang pendidikan. Kurikulum, buku-buku teks pelajaran sekolah dan praktek pengajaran yang bias gender dan kebijakan umum negara tentang perempuan telah memperkuat prasangka dan stereotip gender dalam masyarakat. Hal ini berakibat pada terbatasnya akses kaum perempuan pada bidang-bidang pekerjaan yang ada. Untuk meningkatkan akses dan

partisipasi perempuan dalam pendidikan, diperlukan perubahan nilai-nilai budaya di tingkat masyarakat dan kebijakan yang mengarah pada hilangnya segala bentuk perbedaan peran dan fungsi jenis kelamin serta penstereotipan perempuan. Masalah pendidikan lainnya adalah mahalnya biaya pendidikan yang sangat variatif di masyarakat yang mengakibatkan masyarakat miskin dan tidak mampu semakin jauh untuk dapat mengakses pendidikan, sehingga tidak sedikit masyarakat yang tidak bisa melanjutkan pendidikan atau berhenti. Rendahnya persentase pendidikan perempuan, khususnya di Kota Makassar akan mudah terjadi ketimpangan sosial, dimana mereka yang rendah kualitas pendidikannya akan selalu menjadi subordinat atau menjadi sasaran persoalan sosial yang terjadi. Seperti kaum perempuan yang selama ini masih banyak yang sulit mengakses dunia pendidikan akibat berbagai faktor seperti ekonomi, budaya serta sosial. Munculnya ketimpangan perempuan dalam masalah pendidikan ini, sebagai akibat masih kuatnya budaya patriarkhi dalam masyarakat yang mendiskriminasi perempuan untuk mengakses pendidikan. Budaya yang dipahami bahwa perempuan bukan pencari nafkah utama dan perempuan sebagai penanggung jawab utama dalam urusan-urusan domestik, maka perempuan ditempatkan sebagai kelompok yang kurang penting mengakses pendidikan. Karena rendahnya tingkat pendidikan tersebut maka berdampak pada sebagian besar perempuan terserap dalam pekerjaan-pekerjaan di sektor informal seperti pembantu rumah tangga, TKW dengan upah rendah, pedagang kecil, industri rumah tangga, serta buruh rendahan lainnya. Di samping persoalan rendahnya SDM serta proses ketimpangan sosial yang mengiringinya, persoalan lain dalam dunia pendidikan yang memprihatinkan adalah

kurangnya korelasi antara sistem pendidikan dengan pembentukan karakter manusia. Dalam hal ini, untuk melahirkan SDM yang kuat, dimulai dari pembentukan karakter manusia yang utuh, sebagai basis pembentukan kepribadian, sikap, dan tindakan yang didasarkan pada nilai-nilai agama dan nilai-nilai yang utama dalam kehidupan. Kecenderungan yang berjalan selama ini, seakan-akan terjadi jarak antara pendidikan di satu sisi dengan karakter manusia pada sisi lain karena belum terintegrasinya proses dan sistem pendidikan ke dalam setiap aspek kehidupan. Proses dan sistem pendidikan yang dijalankan kemungkinan besar lebih ditekankan pada pembentukan kualitas kognisi dan psikomotorik, terbatas pada kemampuan yang bersifat instrumental. Pendidikan kurang memberikan perhatian terhadap pembentukan afeksi dan *life skill* yang utuh. Sebagai akibatnya subjek didik kurang dibentuk kapasitas dirinya selaku manusia yang berprinsip pada kebenaran, kebaikan, kepatutan, dan nilai-nilai utama dalam hidup.

- c) Majelis Kesejahteraan Sosial; fakta yang menunjukkan bahwa semua warga menjadikan visi organisasi sebagai medan yang menggerakkan berbagai aktivitas amal usaha termasuk bidang kesejahteraan sosial dan penyandang masalah sosial, seperti anak terlantar, anak jalanan, putus sekolah, dan lain-lain. ‘Aisyiyah mengelola beberapa Panti Asuhan, selain Panti Asuhan yang dibina oleh Muhammadiyah dalam merumuskan langkah-langkah pembinaan dengan mengarahkan semua warga tetap upaya mewujudkan visi di atas sebagai semua warga untuk mematuhi visi ‘Aisyiyah dalam membina anak-anak panti, meningkatkan semangat ibadah, jihad, zakat, infaq, shodaqoh, wakaf, hibah, serta membangun dan memelihara tempat ibadah, dan amal usaha yang lain.

d) Majelis Kesehatan; fakta yang menunjukkan bahwa visi organisasi yang menjadi medan magnet dalam mengelola amal usaha bidang kesehatan, untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan dalam bidang-bidang sosial, kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan lingkungan hidup. Ketua Majelis Kesehatan yang bertanggung jawab di bidang pelayanan kesehatan, mengarahkan semua pengelola Rumah Sakit, Rumah Bersalin, BKIA untuk berpegang teguh pada visi organisasi dalam memberikan pelayanan. Kualitas kesehatan masyarakat di Kota Makassar masih sangat memprihatinkan khususnya bagi masyarakat lapisan bawah dan kelompok marginal terutama perempuan. Rendahnya kualitas kesehatan masyarakat tidak terlepas dari kondisi kemiskinan, sehingga tidak dapat menikmati kesehatan yang seharusnya menjadi hak bagi setiap warga masyarakat. ‘Aisyiyah sebagai organisasi dakwah dan sosial, selain visi organisasi sebagai medan pelayanan juga berpegang pada prinsip dasar, yaitu “amar makmuf hani munkar”. Permasalahan dan rendahnya derajat kesehatan perempuan. Akses perempuan terhadap pelayanan reproduksi yang bermutu belum sepenuhnya menjadi prioritas pembangunan selama ini. Akibatnya, angka kematian ibu (AKI) yang disebabkan oleh kehamilan dan persalinan masih tinggi di Kota Makassar, secara medis penyebab kematian ibu di Kota Makassar pada umumnya adalah perdarahan (terutama pasca persalinan), eklampsia, dan pre-eklampsia (tekanan darah tinggi yang terjadi pada kehamilan), Infeksi, serta persalinan macet. Secara fisik, hal ini terjadi karena masih banyak ibu yang terlalu muda melahirkan, terlalu singkat jarak antara persalinan, terlalu sering melahirkan, serta masih melahirkan pada usia yang sudah terlalu tua. Selain peningkatan angka kematian ibu (AKI) saat melahirkan yang

disebabkan minimnya anggaran yang diperuntukkan untuk penurunan AKI ini masih di bawah satu persen dari APBN dan APBD Kota Makassar. Karena 'Aisyiyah sebagai komponen perempuan Muhammadiyah tetap memiliki komitmen mewujudkan visi organisasi sebagai medan gerakan yang memberi semangat pengelola Rumah Sakit, Rumah Bersalin, dan BKIA. Persoalan tingginya AKI melahirkan tersebut semakin diperparah oleh kuatnya pengaruh budaya patriarki yang melingkupi kehidupan masyarakat. Masyarakat termasuk warga 'Aisyiyah masih menganut pandangan bahwa hamil dan melahirkan merupakan kodrat perempuan. Oleh karena itu, penderitaan dan kesakitan, bahkan kematian yang dialami perempuan sebagai akibat (resiko) dari fungsi reproduksi juga merupakan "kodrat" yang sudah seharusnya ditanggung oleh kaum perempuan. Sebagai akibatnya, penanganan kesakitan dan penderitaan selama hamil dan penurunan AKI bersalin sangat lambat dan kurang mendapat perhatian masyarakat, termasuk perempuan sendiri. Problem kesehatan lainnya yang kini menjadi fenomena ;'Aisyiyah di Kota ialah menyangkut persoalan Epidemii HIV/AIDS di masyarakat. HIV adalah virus yang ditemukan pada tubuh manusia yang menyebabkan AIDS. HIV merupakan singkatan dari *Human Immunodeficiency Virus* (virus defisiensi imun manusia). Lebih umum dikenal sebagai virus penyebab menurunnya sistem kekebalan manusia. Sedangkan kata AIDS merupakan singkatan dari *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* atau *Acquired Immune Deficiency Syndrome*. Secara medis AIDS berarti sindrom kumpulan dari berbagai gejala dan infeksi sebagai akibat dari kerusakan spesifik sistem kekebalan tubuh karena infeksi virus HIV pada tubuh manusia. Para ahli menyebutkan bahwa dibanding laki-laki, risiko

terkena HIV pada perempuan jauh lebih besar, terutama apabila berhubungan seks tanpa memakai kondom. Organ-organ reproduksi pada diri perempuan lebih rentan dibanding dengan organ reproduksi laki-laki. Kerentanan ini lebih tinggi terjadi pada perempuan remaja, karena perempuan terhadap virus ini tampak dalam banyak aspek. Perempuan dalam kehidupan sosial sering dinomorduakan dan didiskriminasi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksinya. Akibat budaya yang menciptakan ketertutupan perempuan untuk mengungkapkan fakta-fakta biologisnya, berbagai penyakit yang berkaitan dengan organ-organ reproduksinya sering tidak terdeteksi. Mencermati masalah ini, dalam ranah domestik perempuan rentan terhadap pemaksaan hubungan seks, termasuk dalam banyak kasus oleh suaminya. Perempuan seringkali tidak bisa menolak hubungan suami istri, meski mengetahui suami telah terinfeksi HIV. Karena di ruang publik, perempuan juga seringkali mengalami pelecehan dan kekerasan seksual. Apabila pola hubungan laki-laki dan perempuan masih seperti ini, maka masuk akal kalau banyak perempuan terkena virus HIV. Hal ini lebih membahayakan pada saat hamil. Virus yang ada dalam tubuhnya dapat menular kepada bayinya. Selain itu, anak dan remaja juga sangat mudah terserang penyakit HIV/AIDS ini, sebagaimana diberitakan oleh salah satu media nasional, hanya dalam tempo empat bulan terakhir ini, terdapat 60 bayi yang positif mengidap virus HIV/AIDS.

- e) Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan, dalam merealisasikan program kerja tetap berpedoman pada visi organisasi sebagai medan perjuangan dalam memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah peraikan hidup yang berkualitas. Upaya mewujudkan visi organisasi sesuai dengan permasalahan ekonomi selain masalah

kemiskinan yang berdampak luas dalam kehidupan, terkait dengan usaha mikro dan kecil di Kota Makassar, khususnya yang dihadapi oleh perempuan yang mengelola usaha (Amal Usaha 'Aisyiyah). Sektor ekonomi mikro dan kecil merupakan tumpuan kehidupan bagi banyak keluarga lapis bawah dan miskin. Ketua Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan sebagai penanggung jawab Majelis Ekonomi mengarahkan semua warga untuk mematuhi visi organisasi. Ketika krisis ekonomi tahun 1998 diikuti dengan pemutusan hubungan kerja (PHK), ratusan ribu orang menggantungkan hidupnya pada sektor ekonomi mikro yang kebanyakan dikelola oleh kaum perempuan. 'Aisyiyah Kota Makassar dengan usaha mikro kecil mampu bertahan pada situasi krisis ekonomi dan berperan sebagai penyangga perekonomian masyarakat bawah yang sebagian besar pelakunya adalah perempuan. Walaupun usaha mikro kecil (UMK) menjadi tumpuan masyarakat lapisan bawah, nampaknya kebijakan pemerintah dan implementasi kebijakan belum menyentuh akar persoalan agar benar-benar berpihak pada mereka. Salah satu contoh kebijakan pemerintah yang berdampak pada UMK adalah pemberlakuan perjanjian perdagangan bebas. Permasalahan lainnya yang dihadapi oleh perempuan yang mengelola usaha mikro (amal usaha) 'Aisyiyah adalah terkait dengan ketidakadilan gender yang terjadi di masyarakat pada umumnya maupun kebijakan-kebijakan pemerintah yang bias gender. Hambatan tersebut antara lain akses memperoleh kredit dari lembaga keuangan formal (perbankan). Ini terjadi dikarenakan berbagai kendala dan keterbatasannya, seperti lokasi kelompok-kelompok perempuan pengusaha mikro yang sangat jauh dari lembaga formal, kegiatan usaha yang masih kecil, sehingga dana tambahan yang dibutuhkan sangat kecil maka tidak akan

dilayani oleh lembaga formal, karena tidak efisien. Selain itu, usaha mikro belum memiliki administrasi keuangan yang dikelola dengan baik, sehingga tidak memenuhi standar pembukuan yang disyaratkan oleh lembaga keuangan formal. Persoalan ekonomi dan ketenagakerjaan merupakan rangkaian masalah yang tidak terpisahkan. Persoalan ekonomi juga berkaitan sangat erat dengan kemiskinan. Problem ekonomi yang menimpa suatu kelompok keluarga, mendorong setiap keluarga untuk mencari berbagai pilihan yang bisa dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Ketika krisis ekonomi keluarga terjadi, seperti pemutusan hubungan kerja yang dialami oleh suami, atau pengangguran, maka inisiatif kerja diambil oleh seorang ibu/perempuan untuk menempuh usaha yang mudah dilakukan. Salah satunya adalah menjadi tenaga kerja di luar negeri atau lebih dikenal dengan sebutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Mereka biasanya bekerja di sektor informal dengan gaji yang sangat rendah, seperti pembantu rumah tangga, buruh bangunan, penjaga toko dan sebagainya. Upaya tersebut sebagai bentuk pemahaman visi 'Aisyiyah. Sehubungan dengan itu berbagai masalah pun tidak bisa dihindari, terutama pekerja perempuan, seperti kekerasan fisik, pelecehan seksual, penganiyaan, dan sebagainya. Meskipun demikian halnya yang terjadi, tidak menyurutkan para pekerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Bahkan angka migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri ini semakin meningkat. Hal ini karena problem ketenagakerjaan dalam negeri belum terpecahkan dengan baik khususnya di Kota Makassar. Sebagian besar tenaga kerja (buruh migran) berada pada usia produktif (di atas 18 - 35 tahun), namun banyak yang berada pada usia anak-anak. Kenyataan ini terjadi karena banyak yang memalsukan identitas yang

sebenarnya. Oleh karena itu, kekerasan dalam proses migrasi mendapat perhatian serius pemerintah termasuk ‘Aisyiyah terutama perempuan sebagai tenaga kerja di luar negeri dengan membuat target jumlah pengiriman tenaga kerja tanpa diikuti dengan perbaikan perlindungan. Sementara keluarga menjadikan perempuan sebagai tumpuan untuk menyelamatkan kebutuhan ekonomi keluarga, sebagian masyarakat melalui calo yang mengambil manfaat atas proses pengiriman tenaga kerja secara illegal dan tidak bertanggung jawab. Di satu sisi buruh migran adalah penyumbang devisa yang sangat besar, tapi tidak diperlakukan sebagaimana layaknya warga Negara. Mereka sering sekali menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Mulai dari penipuan upah, pelecehan seksual, penganiayaan, hingga pembunuhan. Semakin jelaslah bahwa proses migrasi ini rentan dengan eksploitasi, kekerasan, dan perdagangan perempuan. Lemahnya perlindungan dan penanganan bagi perempuan yang bermigrasi yang menjadi korban eksploitasi, kekerasan dan perdagangan menjadi siklus kekerasan yang sistematis. Arus migrasi perempuan ke luar negeri sebagai akibat program pembangunan yang dilakukan pemerintah masih mengabaikan kontribusi ekonomi perempuan.

- f) Majelis Pembinaan Kader, sebagai bukti bahwa visi organisasi sebagai medan yang memberi arahan dan semangat untuk membina Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Puteri untuk menjadi pelopor, pelangsup, dan penyempurna gerakan ‘Aisyiyah. Masyarakat Kota Makassar pada dasarnya adalah masyarakat yang religius dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Masyarakat religius, nilai-nilai agama terpancar dalam kehidupan sehari-hari dan mempengaruhi kehidupan dalam keluarga, masyarakat, bahkan dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, misi organisasi kehidupan masyarakat menunjukkan kecenderungan yang menggembirakan. Hal ini ditunjukkan dengan maraknya kegiatan-kegiatan yang berdimensi ibadah di masyarakat seperti kegiatan-kegiatan pengajian, majelis taklim, membangun musholla, masjid, hari-hari besar Islam dan lain-lain. Beberapa permasalahan dalam praktek kehidupan beragama yang memerlukan perhatian AMM Puteri sebagai bentuk atas pemahaman visi organisasi, oleh Ketua Majelis Pembinaan Kader sebagai penanggung jawab bidang pengkaderan 'Aisyiyah, selalu menekankan visi organisasi sebagai medan pergerakan semua warga AMM Puteri dalam mengatasi:

- (1) Lahirnya kelompok-kelompok sempalan, aliran keagamaan yang berbeda dari arus besar Islam yang berkembang di Indonesia pada umumnya dan Kota Makassar pada khususnya yang membelokkan paham keagamaan yang bersumber dari al-Qur'an dan jauh dari prinsip-prinsip aqidah Islam;
- (2) Konflik-konflik kelompok keagamaan yang berbeda paham secara tajam dan menimbulkan perpecahan dalam tubuh umat Islam;
- (3) Penyalahgunaan agama yang mendorong dan membawa kepada banyak penyimpangan, kekerasan, dan menjadikan agama sebagai komoditas politik, ekonomi untuk kepentingan individu, kelompok, dan golongan;
- (4) Pandangan keagamaan yang menimbulkan bias gender serta berbaur dengan budaya masyarakat, sehingga melahirkan diskriminasi dan ketidakadilan perempuan;
- (5) Pandangan keagamaan yang cenderung radikal, karena radikalisme keagamaan yang sering bersikap eksklusif,

mengklaim pandangannya yang paling benar dan membawa muatan konflik dengan pihak lain yang sebenarnya bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Bahwa, nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber dari Qur'an dan Sunnah adalah membawa perdamaian, toleransi, dan ukhuwah Islamiyah;

- (6) Praktek keagamaan yang penuh simbol-simbol dan semarak secara ritual, tidak dibarengi dengan pemaknaan secara substantif, sehingga membawa kesalehan sosial dan amal yang bersifat mencerahkan;
- (7) Pemahaman dan pengamalan keagamaan yang kurang peduli dengan masalah-masalah kemasyarakatan dalam menghadapi kemiskinan, kekerasan, persoalan perempuan dan anak, serta masalah sosial lainnya.

Menghadapi berbagai persoalan tersebut, diperlukan pendekatan yang komprehensif. Di satu pihak diperlukan penanaman pemahaman keislaman yang mendalam, luas, dan menyeluruh sehingga ajaran agama Islam tidak dipahami secara parsial. Di pihak lain diperlukan pemecahan berbagai persoalan secara bijak baik sosial, ekonomi, dan politik terkait dengan keberagaman umat yang berpengaruh satu sama lain.

- g) Majelis Hukun dan HAM (Hak Azasi Manusia), menjadikan visi sebagai medan pergerakan dalam meningkatkan dan mengupayakan penegakan hukum, keadilan, dan kebenaran, serta memupuk semangat kesatuan dan persatuan bangsa. Indonesia sebagai negara sedang berkembang, persoalan perempuan dan anak ialah persoalan yang selalu muncul. Salah satunya adalah masalah kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak. Perkembangan terkini kekerasan terhadap perempuan penting sebagai sebuah ukuran kemajuan

pemenuhan HAM. 'Aisyiyah sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah juga memiliki perhatian terhadap kekerasan berbasis gender telah diakui sebagai bagian dari pelanggaran HAM serta melanggar nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Diantara masalah yang sering muncul dan mendapat perhatian dari 'Aisyiyah. Majelis Hukum dan HAM dibentuk di era reformasi sebagai wujud kepedulian 'Aisyiyah terhadap masalah yang berkembang terkait dengan masalah hukum dan HAM, terutama kekerasan yang dialami perempuan dan anak. Intensitas kekerasan terhadap perempuan dinilai sangat tinggi. Fakta menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan perwujudan ketimpangan historis dari hubungan-hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan mengakibatkan dominasi dan diskriminasi laki-laki terhadap perempuan. Bentuk kekerasan terhadap perempuan secara umum dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu: (1) kekerasan dalam rumah tangga (ranah domestik), dan (2) kekerasan di luar rumah tangga (ranah publik). Dengan demikian, kekerasan dalam rumah tangga (domestik), adalah salah satu bentuk ketidakadilan jender (*gender inequalities*). Ketidakadilan jender dalam realitas sehari-hari melahirkan pelbagai bentuk, seperti pemiskinan ekonomi, perkosaan, prostitusi, penyunatan anak wanita, kekerasan dalam bentuk pornografi, kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi keluarga berencana, dan dalam bentuk pelecehan seksual yang banyak terjadi akhir-akhir ini. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah sosial yang rumit dan kompleks. Banyak kasus tentang KDRT, tetapi hanya sedikit yang terungkap. Berbagai alasan mengapa sulit memperoleh data: (1) terjadi dalam rumah tangga sehingga sulit dipantau dan terabaikan; (2) masyarakat memandang

persoalan ini sebagai masalah internal keluarga (persoalan privat) sehingga tidak perlu campur tangan dari pihak lain; dan (3) sebagian besar masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung membenarkan adanya pertengkaran dalam rumah tangga, sebagai bunga-bunga hidup berumah tangga. Fenomena lain terkait dengan kekerasan dalam ranah publik adalah pelecehan seksual, pemerkosaan, penjualan anak perempuan untuk pekerja seks komersial (PSK), eksploitasi, dan sebagainya. Fenomena kedua ini semakin meningkat, bahkan persoalan kekerasan dalam ranah publik banyak terjadi di lembaga pendidikan, kantor dan lebih ironisnya terjadi dalam lembaga perwakilan rakyat. Tentu saja jika dilihat fenomena tersebut sangat banyak dan terjadi dimana-mana. Namun, pertanyaan yang muncul adalah mengapa kekerasan terhadap perempuan sering terjadi. Setidaknya ada beberapa faktor, yaitu: (1) ketimpangan jender; (2) pemahaman terhadap ajaran Islam yang bias; (3) tatanan hukum yang belum memadai; dan (4) nilai-nilai patriarki yang begitu dominan. Dalam konteks ini ''Aisyiyah memberi apresiasi atas perkembangan yang signifikan terkait kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penegakan hak-hak perempuan termasuk penanganan dan penghapusan kekerasan atas perempuan, baik di tingkat nasional maupun lokal. Setidaknya ada beberapa kebijakan telah dihasilkan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Kebijakan tersebut, antara lain UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan UU No 44 Tahun 2008 tentang Anti Pornografi. Bentuk kekerasan lain yang sering terjadi dan mendapat perhatian dari 'Aisyiyah adalah fenomena kekerasan terhadap anak. Kekerasan yang

dilakukan kepada anak biasanya dalam berbagai bentuk, antara lain kekerasan seksual yang meliputi sodomi, pemerkosaan, pencabulan atau hubungan seksual sedarah. Bentuk kekerasan lainnya meliputi kekerasan fisik seperti pekerja anak, pemukulan, penganiyaan, dan lain-lain. Selain itu, kekerasan dalam bentuk psikis, ialah dipermalukan, dihina, dikucilkan, diancam (ditolak), selanjutnya kekerasan dalam bentuk penggunaan narkoba dan tindak kriminal lainnya. Semua fenomena ini menjadi bagian dari bentuk kekerasan terhadap anak yang sering muncul kepermukaan. Bentuk kekerasan terhadap anak selain terjadi dalam lingkungan keluarga, juga terjadi di lingkungan sosial atau ranah publik. Di Kota Makassar, bentuk kekerasan terhadap anak ini selalu menjadi isu utama yang muncul dalam masyarakat. Hampir tiap tahun, jumlah kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan. Maraknya peristiwa kekerasan yang terjadi pada anak sesuai pengalaman saya sebagai pengurus yang sering menangani kasus kekerasan yang dialami anak terutama yang ditangani 'Aisyiyah disebabkan oleh beberapa faktor antara lain ada kultur kekerasan yang sangat kuat di sebagian masyarakat, dimana anak dilihat sebagai milik mutlak yang harus takluk untuk *menggayuh* keinginan orang dewasa. Anak menjadi target dalam rangka memenuhi ambisi orang dewasa, dan ketika tidak bisa memenuhi anak akan diperlakukan dengan kekerasan. Tindakan kekerasan terhadap anak ini tidak hanya di dalam rumah, atau komunitas tertentu saja, bahkan di sekolah, dimana anak mestinya memperoleh jaminan rasa aman, terjadi juga praktek kekerasan. Selain itu, masih banyak guru yang menganggap, kekerasan adalah bagian dari proses pendidikan. Mereka lupa, atau mungkin tidak memahami bahwa dasar pendidikan adalah cinta. Olek

karena itu, dalam konteks pendidikan komitmen yang dibangun pemimpin dan pengelola amal usaha 'Aisyiyah sejak usia dini (PAUD dan TK), dengan simbol-simbol: Jangan mendidik, jangan mengajar, bila gelora hatinya bukan gelora cinta, sebaliknya gelora dendam dan kebencian. Terkait dengan latar belakang munculnya perilaku represif terhadap anak, faktor lain yang juga turut mendukung terjadi kekerasan terhadap anak antara lain: immaturitas/ketidakmatangan orang tua, kurangnya pengetahuan bagaimana menjadi orang tua, harapan yang tidak realistis pada kemampuan dan perilaku anak, pengalaman negatif masa kecil orang tua, isolasi sosial, problem rumah tangga, serta problem obat-obat terlarang dan alkohol. Ada orang tua yang tidak menyukai peran sebagai orang tua sehingga sering terlibat pertentangan dengan pasangan dan yang menjadi sasaran amarah dan kebencian.

- h) Lembaga Penelitian dan Pengembangan, bahwa visi organisasi sebagai medan pergerakan dalam melakukan tindakan meningkatkan pendidikan, mengembangkan kebudayaan, memperluas ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menggairahkan penelitian. Realitas yang menunjukkan bahwa, semua warga termasuk Lembaga Penelitian dan Pengembangan 'Aisyiyah Kota Makassar menjadikan visi organisasi sebagai medan yang mengikat dalam melaksanakan setiap aktivitas penelitian, pengkajian dan pengembangan terhadap isu-isu yang berkembang, seperti perdagangan manusia (*trafficking*) merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan melanggar nilai-nilai agama. Masalah perdagangan manusia menjadi permasalahan yang sangat memprihatinkan dan kompleks. Hal ini sebenarnya menjadi tugas Majelis Hukum dan HAM, tetapi saya sebagai penanggung jawab lembaga yang membidangi penelitian dan

pengembangan merasa perlu dan terpanggil untuk melakukan kajian terhadap masalah ini. Hal ini karena tidak mudah mengidentifikasi kegiatan perdagangan perempuan, sebab pelakunya seringkali merupakan sindikat yang terorganisir rapi dan berkedok sebagai pencari tenaga kerja legal. Umumnya, mereka datang untuk menawarkan pekerjaan, seperti menjadi TKW di luar negeri (sebagai *migrant worker*), pekerja industri dan pekerjaan lainnya. Mereka melakukan operasinya dengan cara merayu, membujuk, dan janji-janji muluk yang menggiurkan, gaji besar, hidup senang, dan sebagainya namun kenyataan sebaliknya. Perdagangan perempuan dan anak jelas adalah tragedi kemanusiaan yang berlangsung rapi dan terorganisir, namun persoalan ini tidak mendapat perhatian serius, terutama dari kalangan pemerintah, sehingga upaya untuk menghentikan perilaku biadab ini masih menjadi impian kosong. Demikian, 'Aisyiyah sebagai organisasi perempuan yang memiliki komitmen, visi, dan tujuan yang jelas dapat memahami bahwa perdagangan perempuan dan anak seringkali melibatkan sejumlah orang, mulai dari perekrut yang datang ke desa mencari perempuan dan anak-anak sampai kepada orang terakhir yang membeli atau menerima korban, seperti pemilik tempat kerja paksa, atau orang yang menahan orang tersebut dalam kondisi seperti perbudakan. Umumnya mereka ditempatkan atau diperdagangkan dalam kondisi yang sangat eksploitatif dan kejam, seperti dalam industri garmen, pertanian, perikanan, perkebunan, mengemis, dan seks, termasuk dalam bentuk kerja domestik sebagai pembantu rumah tangga. Timbulnya bentuk kejahatan *trafficking* ini kebanyakan akibat kaum perempuan memilih meninggalkan rumah dan keluarganya untuk bermigrasi dengan alasan ekonomi, untuk meningkatkan pendapatan

bagi keluarga, membayar uang sekolah anaknya, membayar hutang, membayar biaya perawatan orang tua yang sakit berkepanjangan, membeli sebidang tanah untuk digarap sebagai sumber kehidupan, dan membangun rumah tempat tinggal yang lebih layak. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa umumnya perempuan bermigrasi dengan harapan dapat memperbaiki kondisi hidup, khususnya untuk masa depan anak-anak mereka. Selain itu, globalisasi dalam bidang ekonomi telah mengubah pola perburuhan di seluruh dunia. Kini peluang lebih terbuka untuk lalu lintas arus barang dan produk, dan lebih terbuka peluang bagi buruh untuk bermigrasi kerja ke negara dengan ekonomi yang lebih maju. Sayangnya, hal ini dapat menciptakan situasi dimana majikan memperoleh keuntungan lebih besar dengan mempekerjakan buruh migran dari negara lebih miskin. Karena itu, berbagai persoalan yang dihadapi oleh perempuan baik dalam lingkup lokal, nasional, maupun global seperti telah diuraikan di atas. Wujud kepedulian dan komitmen 'Aisyiyah terhadap visi organisasi sebagai medan yang menggerakkan semua warga tidak terlepas dari latar belakang lahirnya 'Aisyiyah adalah untuk keselamatan umta terutama kaum wanita sebagai masyarakat utama tiang Negara. Seperti diketahui bahwa kaum wanita rusak maka rusaklah Negara. Keadaan masyarakat menjelang abad ke XX yang percaya tahyul, bid'ah dan khurafat, sehingga jauh dari tuntunan ajaran Islam yang sebenarnya.

Sejak lahirnya 'Aisyiyah dengan visi organisasi yang lebih domain dalam bidang sosial dan keagamaan mengingatkan kepada semua warga agar tidak membawa nama organisasi dalam kegiatan politik praktis. Hal ini karena di khawatirkan menimbulkan perpecahan umat. Warga 'Aisyiyah bebas memilih orang yang sesuai dengan hati nurani.

Terkait dengan hak politik 'Aisyiyah beliau mengingatkan semua warga untuk menggunakan hak pilihnya sebagai simbol tanggung jawab terhadap perubahan bangsa dan negara. Sebagai warga Negara yang baik perlu menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya karena merupakan sarana untuk mencari pemimpin yang baik. Salah satu pengurus 'Aisyiyah Kota Makassar mencalonkan diri sebagai DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dalam Pemilu Legislatif Tahun 2004 dan 2009, namun belum berhasil. Hal ini perlu ditegaskan sebagai bentuk partisipasi 'Aisyiyah dalam mendorong anggota dan/atau pengurus yang berkiprah dalam dunia politik agar tetap istiqamah bahwa setelah duduk dalam legislatif harus memperjuangkan kepentingan masyarakat dan tetap dalam koridor visi 'Aisyiyah. Dengan demikian simbol yang digunakan dalam hal politik warga 'Aisyiyah, adalah "Sukseskan pemilu legislatif dan jadilah warga Negara yang baik dan bertanggung jawab". Seiring dengan perkembangan dan perubahan yang dialami 'Aisyiyah Kota Makassar dilihat dari sisi kemandirian melalui visi organisasi sebagai medan pergerakan yang mengikat semua warga, juga dijelaskan oleh Ketua Lembaga Kebudayaan, yang merupakan salah satu lembaga yang dibentuk seiring dengan perkembangan dan perubahan tersebut, Lembaga Kebudayaan, seperti halnya majelis dan lembaga "Aisyiyah lainnya dalam merealisasikan program kerja dan kegiatan-kegiatan yang telah disepakati, saya selalu mengarahkan semua anggota untuk tetap menjadikan visi organisasi sebagai medan yang memberi semangat bagi warga untuk meningkatkan pendidikan, mengembangkan kebudayaan, memperluas ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan komunikasi, ukhuwah Islamiah, kerjasama berbagai bidang dan kalangan masyarakat dalam dan luar negeri.

Semua anggota dan elemen dalam organisasi ‘Aisyiyah menjadikan perinsip dasar, “amar makruf nahi munkar”, dan visi utama “terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya” sebagai medan pergerakan, perjuangan, serta tujuan bersama demi tercapainya perinsip dasar dan visi utama yang dimaksud. Dengan demikian, kemandirian ‘Aisyiyah dilihat dari visi organisasi sejak awal hingga sekarang karena adanya perinsip dasar organisasi dan visi utama yang telah dipahami bersama oleh semua anggota, serta dapat mengilhami setiap gerakan, tindakan, dan usaha yang dilakukan pimpinan, pengurus, dan pengelola amal usaha ‘Aisyiyah Kota Makassar sehingga terus bertahan dan mandiri sebagaimana yang diharapkan. Fakta yang dapat ditunjukkan sesuai hasil penelitian, yaitu antara lain: setelah berdiri Tahun 1926, ‘Aisyiyah Kota Makiassar terus berjuang untuk kemajuan perempuan khususnya dan masyarakat pada umumnya, sehingga menjadi saksi sejarah bagi perkembangan umat manusia dengan berkiprah amaliah di berbagai bidang kehidupan. Setelah kemerdekaan, ‘Aisyiyah Kota Makassar memasuki babak baru dalam perjalanan dan perjuangan yang penuh dinamika sejak masa Orde Lama, Orde Baru, dan reformasi. Gerakan ‘Aisyiyah dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan fungsi dan peran serta memperluas jaringan kerja dalam meningkatkan harkat dan martabat perempuan Indonesia, khususnya di Kota Makassar. Realitas lain terkait dengan visi organisasi yang dapat direalisasikan di dalam mengelola amal usaha ‘Aisyiyah, sebagaimana dikemukakan salah seorang pengurus yang juga sebagai Wakil Ketua PDA Kota Makassar, yang memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap pembinaan Panti Asuhan (PA), mengkoordinir pelaksanaan program kerja Majelis Dikdasmen dan Lembaga

Kebudayaan sebagai penanggung jawab dalam pembinaan PA dimana ‘Aisyiyah membina beberapa panti, antara lain: Panti Asuhan Ummu Aiman di jalan Beruang, dan Panti Asuhan Sejati di jalan Cakalang Kota Makassar, mengarahkan semua warga agar dalam membina dan mengasuh anak-anak panti tetap berpedoman pada visi ‘Aisyiyah sesuai ajaran al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah, dalam hal ini tegaknya agama Islam dan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar- benarnya. Semua pengurus dan anggota ‘Aisyiyah Kota Makassar dalam merealisasikan program kerja yang telah ditentukan tetap dalam satu komitmen, satu perinsip, dan satu tujuan yang dirangkul dalam satu visi bersama sehingga menuntun semua unsur dalam bergerak dan bertindak bersama di bidang pendidikan dan kesehatan guna mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Selain itu, gerakan dakwah yang dilakukannya telah membentuk akhlak, keperibadian, dan kecerdasan masyarakat sebagai bagian dari visi ideal membentuk masyarakat madani, yakni masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Namun demikian masih terdapat berbagai masalah yang perlu dihadapi dan dijawab dengan langkah-langkah kegiatan yang sistematis sehingga ‘Aisyiyah dalam melangsungkan gerakannya tetap menjadi pembawa risalah *rahmatan lil-‘alamin* dengan berpedoman kepada al-Qur’an dan as-Sunnah dalam kehidupan umat Islam khususnya dan masyarakat Kota Makassar umumnya. ‘Aisyiyah Kota Makassar sebagai salah satu ortom Muhammadiyah dalam mengelola amal usaha di bidang pendidikan mulai dari TK, SD/MI, SMP/MTs, sampai SMA/SMK dan Madrasah Aliyah (MA) tetap berpegang teguh visi organisasi sebagai medan yang memberi petunjuk dan arahan sehingga semua warga memahami dan mewujudkan visi tersebut dalam menggerakkan

sektor pendidikan yang dikelola ‘Aisyiyah sehingga akan tercipta tunas-tunas muda ‘Aisyiyah yang siap melanjutkan visi organisasi di masa mendatang.

Pernyataan di atas diperkuat oleh Ketua Lembaga Kebudayaan PDA Kota Makassar, bahwa peningkatan fungsi dan peran ‘Aisyiyah baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif selain didasarkan atas prinsip dasar dan visi ideal gerakan yang menjadi bingkai perjuangan, juga dikembangkan atas respon atauantisipasi terhadap berbagai masalah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, sehingga ‘Aisyiyah terus eksis, bertahan dan mandiri karena mampu memanfaatkan faktor-faktor yang menjadi kelebihan, kelemahan, peluang, dan tantangan dimana visi organisasi sebagai medan sekaligus acuan dalam menentukan langkah-langkah ‘Aisyiyah baik yang bersifat strategis maupun operasional.

Terkait dengan visi organisasi sebagai medan pergerakan pengurus dan anggota dalam mengelola amal usaha di bidang kesehatan, Ketua Majelis Kesehatan ‘Aisyiyah sebagai penanggung jawab Majelis Kesehatan ‘Aisyiyah dalam mengelola Rumah Sakit, Rumah Bersalin, dan BKIA yang dibina ‘Aisyiyah mengarahkan semua warga untuk mematuhi visi organisasi. Dalam hal ini, semua tindakan pelayanan yang dilakukan oleh petugas kesehatan harus sesuai dengan ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan Sunnah Rasul. Dengan demikian, upaya untuk mewujudkan visi tersebut, khususnya kesehatan ibu dan anak sebagai fungsi utama yang menjadi tugas pokok Majelis Kesehatan, yang harus diprioritaskan sehingga mengembangkan program kerjasama dengan berbagai pihak terkait, baik secara internal dengan Muhammadiyah maupun secara eksternal dengan Pemerintah (Dinas Kesehatan) sebagai medan pergerakan atau lingkup kerja yang tidak terpisahkan dalam upaya mewujudkan visi organisasi ‘Aisyiyah.

Keseluruhan tindakan, gerakan, dan dinamika organisasi yang berkembang didasarkan atas visi organisasi yang menjadi medan magnet yang mengikat semua warga sehingga tercipta medan visional ‘Aisyiyah Kota Makassar dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, keseluruhan penjelasan dari informan terkait dengan kemandirian ‘Aisyiyah dapat disimpulkan bahwa semua warga ‘Aisyiyah Kota Makassar menjadikan visi organisasi sebagai medan yang mengikat mereka dalam mengelola dan membina amal usaha, sehingga dari fase ke fase tercipta komitmen dan kerjasama semua warga tetap terpelihara dalam visi organisasi yang telah ditentukan.

B. Paradoks Independensi ‘Aisyiyah

‘Aisyiyah berada dalam posisi paradoks independensi, artinya di satu sisi ‘Aisyiyah adalah sistem yang otonom; yaitu sistem yang terdiri atas unit-unit atau bagian-bagian yang utuh dalam mengambil keputusan-keputusan secara otonom dan diaplikasikan secara otonom untuk mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi yang telah ditentukan melalui program-program kerja dan kegiatan-kegiatan bersama untuk mewujudkan visi tersebut. Namun, di sisi lain, ‘Aisyiyah merupakan bagian dari sistem yang lebih besar, yaitu Muhammadiyah terutama dalam merealisasikan nilai-nilai dan norma-norma yang telah digariskan visi organisasi.

Data dan informasi yang menunjukkan bahwa, ‘Aisyiyah adalah sistem yang otonom dalam mengambil keputusan-keputusan secara mandiri karena berada dalam posisi paradoks (mendua), terutama memiliki kewenangan, struktur, jaringan, dan unit-unit yang utuh dalam mengelola amal usaha secara otonom untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, khususnya terkait dengan prosedur dan mekanisme

kewenangan ‘Aisyiyah. Keputusan-keputusan yang diambil secara otonom terhadap prosedur dan mekanisme kewenangan ‘Aisyiyah tersebut, untuk :

- a. Memperkuat fungsi dan peran ‘Aisyiyah sebagai gerakan perempuan di bidang da’wah keagamaan, sosial, dan kemasyarakatan.
- b. Memperkuat posisi dan peran ‘Aisyiyah sebagai kekuatan strategi di dalam memberi kontribusi dinamika pencegahan dan pemberdayaan.
- c. Mengembangkan sistem kepemimpinan kolektif, kolejal, visioner, efektif, dan responsif.
- d. Mengembangkan manajemen organisasi yang baik dan dinamis, sehingga mampu mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi.
- e. Mengembangkan sistem koordinasi dan komunikasi efektif antar pimpinan dan jajarannya secara kontinyu dan dinamis.
- f. Mengembangkan komunikasi dan kerjasama organisasi yang semakin luas dengan berbagai pihak terkait.
- g. Mengembangkan jumlah cabang dan ranting sesuai pengembangan kecamatan sehingga berdiri cabang-cabang dan ranting-ranting baru sebagai basis gerakan di tingkat akar rumput.

Penjelasan di atas dapat dipertegas pula oleh Ketua dan Sekretaris ‘Aisyiyah Kota Makassar bahwa, dalam posisi yang paradoks ‘Aisyiyah tetap memiliki kewenangan dalam merealisasikan program kerja 5 (lima) tahunan (2010 – 2015) sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing unit (amal usaha), bertujuan untuk “Meningkatkan kualitas pimpinan dalam mengelola dan mengarahkan organisasi serta kualitas, komitmen, wawasan, visi dan misi kemampuan operasional kader sebagai gerakan”. Kegiatan yang dapat dilakukan

meliputi: (1) mendata dan memberdayakan potensi yang dimiliki pimpinan dan anggota; (2) seminar pemberdayaan perempuan, dan (3) pelatihan kepemimpinan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa, 'Aisyiyah sebagai sistem yang otonom dalam menjalankan keputusan di atas adalah bertujuan untuk "Meningkatkan kualitas pimpinan dalam mengelola, mengarahkan, dan menggerakkan organisasi, serta meningkatkan komitmen, wawasan, dan kemampuan operasional kader 'Aisyiyah terhadap visi organisasi". Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung posisi 'Aisyiyah sebagai sistem yang otonom adalah: (1) menyusun wilayah pembinaan cabang-cabang; (2) kunjungan pimpinan, pembinaan, dan supervise; dan (3) mendorong berdirinya cabang-cabang dan ranting-ranting dalam wilayah kewenangan 'Aisyiyah Kota Makassar.

Selanjutnya contoh lain tentang keputusan-keputusan yang diambil menunjukkan bahwa posisi 'Aisyiyah adalah paradoks seperti pengurus di masing-masing majelis dalam menentukan langkah-langkah pengembangan organisasi, terutama terkait dengan majelis yang dipimpin misalnya; Majelis Dikdasmen mengambil keputusan tentang pengembangan TK Bustanul Atfal, keputusan tentang kurikulum SD, MI, SMP, dan MTs yang dibina 'Aisyiyah secara otonom dan diaplikasikan secara otonom oleh pengelola amal usaha tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Ketua Majelis Dikdasmen bahwa:

Majelis Dikdasmen memiliki kewenangan seperti halnya majelis lain, dalam mengambil keputusan tentang pengembangan pendidikan yang akan diaplikasikan secara otonom. Namun demikian, tetap mengacu pada sistem yang berlaku secara nasional terutama sistem pendidikan di Muhammadiyah. Demikian pula tentang kurikulum, Majelis Dikdasmen mengambil keputusan secara otonom dalam menyusun kurikulum SD,

MI, SMP, dan MTs sesuai dengan tingkat jenjang pendidikan yang dibina ‘Aisyiyah dan menjadikan KBK dan KTSP sebagai dasar penyusunan kurikulum, serta ketentuan yang digariskan oleh Muhammadiyah.

‘Aisyiyah menyadari bahwa, posisi paradoks dalam kemandirian bidang pendidikan adalah suatu proses panjang bukan bawaan atau sesuatu yang datang secara simultan. Ada peroses yang dibutuhkan yaitu di satu sisi dia otonom, namun di sisi yang lain tetap mempertimbangkan kekuatan (sistem) yang lebih besar (Muhammadiyah dan Pemerintah). Proses ini berlangsung secara terus menerus, konsisten, dan tetap dalam kolidor organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Demikian halnya, Majelis Kesehatan dalam mengambil keputusan-keputusan tentang pengelolaan dan pengembangan Rumah Sakit, Rumah Bersalin, dan BKIA terutama langkah-langkah yang diambil agar pasien dan warga yang berobat mendapat pelayanan seperti yang diharapkan, semua keputusan ditentukan secara otonom untuk dilaksanakan secara otonom. Namun, tidak berarti mengabaikan kebijakan-kebijakan yang berlaku umum baik oleh Muhammadiyah maupun Pemerintah. Dalam hal pengabilan keputusan tentang pelayanan kesehatan yang akan diterapkan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki ‘Aisyiyah adalah secara otonom, karena yang paling memahami proses pelayanan adalah pengurus dan anggota yang memiliki latar belakang pendidikan serta pengalaman bidang kesehatan, termasuk Rumah Sakit dan Rumah Bersalin yang dikelola oleh Muhammadiyah, seperti Rumah Sakit Ibu dan Anak Sitti Khadidjah di Jalan Kartini, dan Rumah Sakit Sitti Khadidjah III di Jalan Veteran Selatan. Dalam hal ini, segala keputusan dan kebijakan tentang pelayanan ditentukan oleh ‘Aisyiyah dengan tetap berkoordinasi dengan Muhammadiyah.

‘Aisyiyah merupakan bahagian dari Muhammadiyah dan keputusan-keputusan yang ditetapkan secara otonom, kemudian diintervensi oleh Muhammadiyah antara lain: (1) Keputusan tentang pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah. Dalam hal ini, Majelis Dikdasmen ‘Aisyiyah mengambil keputusan tentang pengelolaan pendidikan dengan tetap mengacu kepada stantar yang telah ditetapkan oleh Muhammadiyah, di samping Standar Nasional (SN) yang ditentukan oleh UU. Misalnya, standar penilaian, standar kelulusan, standar kurikulum, dan kompetensi guru. Apabila Majelis Dikdasmen ‘Aisyiyah menetapkan sebuah keputusan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan di atas, maka Muhammadiyah melakukan intervensi terhadap keputusan tersebut, agar ‘Aisyiyah tetap memelihara posisi paradoks.

‘Aisyiyah sebagai organisasi otonom Muhammadiyah tetap memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri pengelolaan amal usaha, namun tetap dalam koordinasi Muhammadiyah. Misalnya, dalam hal memberikan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan warga Muhammadiyah, tanpa menyalahi prosedur dan mekanisme yang telah ditentukan. Apabila ada keluhan dari warga bahwa keputusan yang diambil tidak sesuai dengan ketentuan yang disepakati, maka Muhammadiyah melakukan intervensi terhadap keputusan itu, agar ‘Aisyiyah lebih memperhatikan warga Muhammadiyah sebelum warga lain demi menjaga kemandirian dan keberlanjutan organisasi. Demikian, para pimpinan dan semua pengurus dalam menjalankan tugas dan fungsi setiap majelis sesuai dengan struktur di tingkat cabang dan ranting berhubungan satu sama lain, dimana ‘Aisyiyah sebagai organisasi otomom untuk mencapai tujuan organisasi tetap memelihara posisi paradoks dengan Muhammadiyah. ‘Aisyiyah sebagai bagian dari sistem

menciptakan sikap kemandirian dalam menjalankan roda organisasi, sehingga mampu menjaga dan memelihara posisi paradoks. Dengan kata lain, semua anggota dan pengurus ‘Aisyiyah dituntut untuk membangun kemandirian dengan memberikan kontrol secara berkala dan berkelanjutan.

Selanjutnya keputusan yang menunjukkan sebagai posisi paradoks, kapan ‘Aisyiyah otonom, dan kapan diintervensi oleh Muhammadiyah karena sebagai penanggung jawab Majelis Kesejahteraan Sosial di dalam mengelola amal usaha ‘Aisyiyah, khususnya Panti Asuhan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku termasuk kebijakan tentang pembinaan yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah bahwa, pembinaan yang dilakukan harus mengutamakan warga Muhammadiyah & ‘Aisyiyah (anak yatim, piatu, dan/atau yatim piatu, serta anak-anak yang kurang beruntung/tidak mampu karena sesuatu sebab (penyandang masalah sosial), sebelum warga lain (bukan Muhammadiyah). Apabila kebijakan atau ketentuan tersebut tidak diperhatikan atau diabaikan oleh pengelola panti, maka Muhammadiyah sewaktu-waktu mengintervensi atau tidak memberi dukungan terhadap ‘Aisyiyah. Dengan sendirinya kemandirian atau posisi paradoks ‘Aisyiyah akan terganggu. Demikian kondisi tersebut terus berjalan.

Kebijakan lain yang menunjukkan bahwa, ‘Aisyiyah sebagai bagian dari Muhammadiyah yang sewaktu-waktu dapat diintervensi apabila ‘Aisyiyah mengambil keputusan secara otonom yang tidak sesuai dengan kebijakan Muhammadiyah, adalah berkaitan dengan upaya mewujudkan masyarakat madani sebagai salah satu indikator untuk mengidentifikasi ada atau tidak adanya pengembangan program-program kerja setiap majelis. Dalam hal ini, relevansi indikatornya termanifestasi dalam amal usaha yang dibina ‘Aisyiyah ditinjau dari prinsip-prinsip

organisasi yang dianut oleh masyarakat madani sebagai perwujudan identitasnya secara material. Lebih lanjut dijelaskan bahwa realisasi program kerja ‘Aisyiyah Kota Makassar periode (2010 – 2015) melalui tujuh majelis dan dua lembaga yang telah disebutkan sebelumnya, terkait dengan masyarakat madani yang dicita-citakan dan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar- benarnya sebagai visi utama ‘Aisyiyah dan Muhammadiyah. Di samping itu, pelaksanaan nilai-nilai dan norma-norma yang partisipatif dan otonom oleh warga ‘Aisyiyah dan Muhammadiyah yang tergabung dalam asosiasi-asosiasi yang memiliki tatanan yang menjamin semua anggota untuk mampu mengekspresikan diri, mengembangkan minat, saling menukar informasi, memediasi perbedaan-perbedaan dan menciptakan pola-pola hubungan yang stabil. Oleh karena itu, warga juga tertata dalam organisasi modern yang mengembangkan nilai-nilainya sendiri secara konsisten.

Posisi ‘Aisyiyah dalam mengelola organisasi yang sewaktu-waktu di intervensi oleh Muhammadiyah untuk mewujudkan masyarakat madani serta memelihara otonomi sebagaimana dikemukakan oleh salah satu Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulawesi Selatan, membidangi dakwah dan kerjasama antar lembaga bahwa “tercapainya amal usaha ‘Aisyiyah yang mengarah pada penguatan dan pengembangan dakwah secara berkualitas menuju terciptanya masyarakat madani. Selanjutnya ditegaskan bahwa, ‘Aisyiyah sebagai bahagian dari Muhammadiyah dalam penjabaran secara berkesinambungan visi idealnya untuk tegaknya agama Islam berdasarkan al-Qur’an dan al-Hadist. Kemudian disebutkan bahwa ‘Aisyiyah dalam mengambil keputusan tentang pelaksanaan dakwah tetap mengikuti ketentuan dari Muhammadiyah, biasa disebut “Gerakan dakwah Islam amar makruf nahi munkar”. Dakwah Islam ialah mengajak, menyeru dan memanggil

manusia untuk memeluk, melaksanakan, dan menegakkan ajaran agama Islam. Amar makruf, adalah mengajak dan menunjukkan hal-hal yang baik, bermanfaat dan terpuji. Nahi munkar, artinya mencegah, melarang, menolak, mengikis, dan menjauhkan hal-hal yang buruk, kotor dan keji.

‘Aisyiyah sebagai bagian dari Muhammadiyah yang memiliki jaringan struktural yang sangat luas di dalam menunjang gerakan dakwah Islam. Jaringan struktural yang tersebar dan berjenjang dalam beberapa level yang mempunyai kewenangan dan wilayah kerja sesuai dengan kebijakan Muhammadiyah. Jaringan yang tersebar di seluruh daerah ini merupakan potensi yang sangat besar untuk membangun umat menuju masyarakat utama dalam bentuk sinergi dan jaringan yang kuat di beberapa bidang. Jaringan struktural merupakan kontribusi ‘Aisyiyah yang besar sebagai sistem yang otonom dalam mengakomodasikan warga dalam menyalurkan aspirasinya, sekaligus mengkoordinasikan gerakan Islamiyah di Kota Makassar melalui berbagai aktivitas dakwah, keagamaan, pendidikan, kesejahteraan, sosial, kesehatan dan sebagainya.

Contoh lain yang dapat dikemukakan hubungannya dengan posisi ‘Aisyiyah yang paradoks dalam mengambil keputusan secara otonom, serta diintervensi oleh Muhammadiyah dalam memelihara kemandirian, adalah kebijakan tentang struktur dan program-program pembinaan keluarga, yaitu “Terbina dan berkembangnya kualitas kehidupan keluarga yang meliputi semua aspek menuju terciptanya keluarga sakinah”. Kebijakan dan program tersebut sejalan dengan keputusan Muhammadiyah, sehingga didukung. Jika tidak sejalan akan diintervensi. Kebijakan dan program yang dimaksud ialah: (1) meningkatkan kelompok desa binaan karya tayyibah dengan keluarga sakinah; (2) sosialisasi tentang pendampingan anak dalam beradaptasi dengan media

dan informasi; (3) sosialisasi UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

‘Aisyiyah sebagai bagian dari Muhammadiyah tetap menjaga dan memelihara kemandirian dalam pengembangan dakwah Islam melalui dakwah jamaah dan dakwah kultural sebagai strategi dakwah masa kini. Hal ini mengingat ‘Aisyiyah sebagai sistem yang otonom di satu sisi, dan di sisi lain sebagai bagian dari kompleksitas sistem (Muhammadiyah), sehingga harus konsisten dalam menghadapi berbagai tantangan global, perkembangan teknologi, dan pola pikir umat manusia yang semakin kompleks. Karena itu, diwujudkan melalui gerakan Tajdidiyah, Islahiyah, dan Tabsyiriyah (TIT) melalui pendekatan sumber daya manusia (SDM), ekonomi dan kesejahteraan, pendekatan struktural serta pendekatan global”

‘Aisyiyah dalam pengembangan kualitas SDM melalui upaya mencerdaskan kehidupan umat. Pendekatan ekonomi dan kesejahteraan dilaksanakan untuk mengajarkan etos kerja. Pendekatan struktural dapat ditingkatkan dengan mewujudkan kegiatan politik dan birokrasi sebagai pendukung dakwah. Pendekatan global dilakukan dengan berpikir makro dan mikro secara seimbang, beraktivitas lintas sektoral, membangun kolektivitas dan individual, umum dan khusus, untuk kemaslahatan umat manusia. Dalam konteks ini posisi ‘Aisyiyah tetap menjadi bagian dari Muhammadiyah sebagai proses bimbingan.

Dalam konteks keputusan politik yang diambil secara otonomi, serta diintervensi oleh Muhammadiyah. Sebagai contoh; pada Pemilihan Umum (Pemilu Legislatif) Tahun 2004 dan 2009 ‘Aisyiyah mengambil keputusan mencalonkan salah satu pengurus (Ketua) untuk menjadi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sulawesi Selatan, dan menghimbau semua warga ‘Aisyiyah untuk mendukung. Keputusan tersebut

diintervensi (tidak didukung) oleh Muhammadiyah, karena mempunyai calon sendiri untuk maju sebagai DPD Pemilu 2004 dan 2009. Pada akhirnya baik calon dari 'Aisyiyah maupun Muhammadiyah gagal meloloskan wakilnya di DPD dalam dua kali Pemilu tersebut. Akibat dari keputusan yang tidak sejalan ini, sempat terganggu kemandirian 'Aisyiyah (posisi paradoks). Namun, seiring dengan berjalannya waktu posisi paradoks independensi dapat kembali normal. Dengan kata lain, 'Aisyiyah menyadari posisinya sebagai sistem yang otonom di satu sisi, tapi di sisi lain dia adalah bahagian dari Muhammadiyah, sehingga keputusan-keputusan yang diambil kapan-kapan dapat diintervensi.

Tidak mudah mengelola organisasi besar seperti 'Aisyiyah, terutama untuk menjaga dan memelihara kemandirian dalam mengambil sebuah keputusan secara otonom, dengan memperhatikan keputusan-keputusan dari sistem yang lebih besar (Muhammadiyah) sebagai induk organisasi. Oleh karena itu, baik pimpinan maupun semua anggota harus memahami posisi paradoks tersebut. Di satu sisi dia otonom di dalam menentukan kebijakan dan program kerja tsecara mandiri. Namun, di sisi lain 'Aisyiyah adalah bagian dari Muhammadiyah yang harus menerima konsekuensi-konsekuensi yang telah digariskan. Kematangan dan komitmen tersebut menjadi pegangan semua warga untuk menjalankan amanah organisasi dengan baik. Seluruh anggota dan pengurus 'Aisyiyah menyadari akan posisi dan kedudukan di atas, sehingga dalam merealisasikan program kerja dan kegiatan yang telah ditentukan, dengan tetap memperhatikan aspek-aspek yang menjadi otonom 'Aisyiyah dan aspek-aspek yang tidak boleh dilanggar sebagai bagian dari Muhammadiyah. Hal ini sudah menjadi komitmen dalam menyusun struktur organisasi sesuai dengan pedoman Persyarikatan Muhammadiyah.

Fakta yang menunjukkan bahwa ‘Aisyiyah Kota Makassar sebagai bagian dari Muhammadiyah, ialah perkembangan awal terdapat dua cabang sebagai pelopor dan merupakan cabang tertua yaitu: Cabang Makassar dan Bontoala. Berdirinya organisasi ‘Aisyiyah untuk membantu Muhammadiyah dalam pembinaan masyarakat, khususnya perempuan yang dalam banyak hal tertinggal bila dibandingkan dengan laki-laki. Namun, pada kenyatannya terutama dalam perkembangan selanjutnya; ‘Aisyiyah lebih agresip sehingga wilayah kerja ‘Aisyiyah lebih banyak dari pada Muhammadiyah. Hingga saat ini, ‘Aisyiyah telah memiliki 25 cabang dari 14 kecamatan di Makassar; dan 96 ranting di tingkat kelurahan. Dalam satu kecamatan terdapat lebih dari satu cabang. Bahkan ada kecamatan terdapat empat cabang. Demikian pula di tingkat ranting dimana dalam satu kelurahan terdapat beberapa ranting. Hal ini menunjukkan perkembangan ‘Aisyiyah lebih cepat dibanding dengan Muhammadiyah, terutama dalam hal pembinaan kader.

Kunci keberhasilan pengurus, pimpinan, dan anggota ‘Aisyiyah tidak dapat diukur dengan materi dalam memimpin. karena banyak para pemimpin organisasi ternyata mengecewakan anggotanya. Hal ini terutama disebabkan beberapa hal, antara lain: (1) tidak adanya komunikasi yang baik antara pemimpin dengan anggota. Seorang pemimpin lebih mengedepankan sikap otoriternya dan mengabaikan aspirasi anggota. Harus dipahami organisasi bukan milik individu, perorangan atau kelompok karena itu sikap individual harus dihindari, dan (2) setiap orang memiliki kepentingan dan penting bagi seorang pemimpin memahami kepentingan anggotanya. Hal ini tidak berarti pemimpin harus tunduk dan terkontaminasi oleh banyak kepentingan.

C. Autopoiesis ‘Aisyiyah

Sepanjang perjalanan ‘Aisyiyah menjelang satu abad dan ‘Aisyiyah Kota Makassar kurang lebih 86 tahun terus bertahan dan tetap eksis karena mampu mereproduksi dirinya. Dengan demikian, Autopoiesis adalah proses pembaharuan dari sistem dalam perjalanan panjang suatu organisasi. Dalam hal ini, ‘Aisyiyah Kota Makassar didirikan Tahun 1926 selalu memperbaharui dirinya, menyesuaikan dengan perkembangan serta perubahan-perubahan dari waktu ke waktu dengan hal-hal yang baru, sehingga ‘Aisyiyah terus bertahan dan berkembang menyesuaikan diri dengan segala tuntutan baik terhadap lingkungan internal (Muhammadiyah) maupun terhadap lingkungan eksternal (masyarakat dan pemerintah).

Secara etimologis, istilah “autopoiesis” terdiri dari dua kata yaitu *auto* artinya sendiri, dan *poiesis* artinya diri sendiri. Dengan demikian *autopoiesis* mengandung pengertian, selalu berusaha memperbaharui dan memproduksi diri sendiri. Autopoiesis ‘Aisyiyah Kota Makassar adalah sebuah organisasi yang terdiri dari unit-unit atau bagian-bagian yang utuh, dalam perjalanannya yang penuh dinamika selalu berusaha memperbaharui dan memproduksi hal-hal yang baru sesuai dengan tuntutan perubahan dan perkembangan, sehingga tidak ketinggal dalam memperjuangkan visi utama dan tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Data dan informasi yang menunjukkan bahwa, ‘Aisyiyah Kota Makassar melakukan autopoiesis (memperbaharui, mereproduksi diri) dari periode ke periode sesuai dengan pola perubahan yang berjalan terus menerus untuk menyesuaikan diri dengan pola perkembangan dalam lingkungan strategis terdekatnya (Muhammadiyah) dan lingkungan strategis yang lebih luas, yaitu masyarakat dan pemerintah. Sebagai contoh, perubahan struktural bidang pendidikan, sebelumnya

menggunakan Bagian Pendidikan dan Kebudayaan, sekarang Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasn). Demikian pula perubahan struktural bidang lain seperti, Pembinaan Kesejahteraan Umat (PKU); sekarang berubah Majelis Kesehatan dan Lingkungan Hidup, Majelis Kesejahteraan Sosial. Majelis Hukum dan HAM, sebelumnya hanya bagian dari majelis lain. Perubahan-perubahan tersebut, menunjukkan bahwa 'Aisyiyah selalu mereproduksi diri dan menghasilkan unit-unitnya sendiri untuk menyesuaikan dengan perkembangan di lingkungan internal dan eksternal, demi terwujudnya visi, misi, dan tujuan yang telah ditentukan.

Contoh yang dapat ditunjukkan bahwa, pola lama yang tidak sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ditinjau dari berbagai aspek. diganti dengan pola baru sesuai dengan tuntutan perubahan dalam konteks lokal, nasional, dan global untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita 'Aisyiyah Kota Makassar khususnya, dan Muhammadiyah pada umumnya. 'Aisyiyah dalam perjalanan panjang mampu bertahan dan mandiri, karena memiliki kekuatan dan daya autopoiesis, mereproduksi diri dalam berbagai bidang, khususnya bidang kaderisasi yang bertujuan untuk: (1) meningkatkan kualitas pimpinan dan kader sebagai penggerak organisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; (2) meningkatkan kualitas sumber daya pimpinan di setiap tingkatan dalam menjalankan fungsi-fungsinya; (3) optimalisasi fungsi dan peran amal usaha sebagai lembaga pendidikan dan pembinaan kader; (4) melibatkan Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Puteri setiap kegiatan sesuai tingkatan, dan (5) menyusun data base pimpinan dan kader untuk mengembangkan sumber daya yang dimiliki.

Dalam merealisasikan program-program kerja tersebut, majelis kader menjalin hubungan dan kerjasama secara internal dengan majelis

lainnya sesuai dengan bidang tugas, peran dan fungsi serta tujuan organisasi setiap bidang dalam organisasi 'Aisyiyah. Selain itu, menjalin hubungan eksternal dengan organisasi perempuan terutama pemerintah, untuk mengembangkan jejaring dengan organisasi keagamaan sosial dan kelompok strategis lainnya di setiap tingkatan. Selain itu, meningkatkan dan mengembangkan kemitraan yang harmonis dan saling memberi manfaat kepada organisasi sosial lainnya seperti LSM, Yayasan, Pemerintah, dan institusi swasta.

'Aisyiyah Kota Makassar melalui program kerjasama yang dikembangkan dari fase ke fase, dalam konteks memproduksi diri sendiri bertujuan, agar terus terjalin secara optimal hubungan organisasi dalam menjalankan misi serta memajukan dan memperluas gerakan organisasi secara internal maupun eksternal. Kegiatan-kegiatan yang dikembangkan untuk mendukung kelancaran program kerja tersebut, serta terwujudnya tujuan yang dimaksud adalah: (1) mengadakan Baitul Arqam dan Darul Arqam; (2) melaksanakan pembinaan langsung terhadap Amal Usaha; (3) menyusun data base organisasi, dan (4) menjalin kerjasama dengan organisasi keagamaan, organisasi sosial melalui diskusi dan temu wicara. Selanjutnya masih terkait dengan penerapan autopoiesis, 'Aisyiyah Kota Makassar di dalam merealisasikan program kerja melalui setiap majelis dan lembaga, termasuk dalam hal pembangunan masyarakat madani bukan saja penting, tetapi juga merupakan kondisi dan jaringan yang menyertai terbangun serta bekerjanya demokrasi, penegakan hukum, persamaan hak tanpa diskriminasi, keadilan sosial dan perdamaian. Gerakan 'Aisyiyah Kota Makassar sejak berdiri (1926) masih tetap eksis hingga sekarang. Salah satu hal yang mengikat semua anggota dan pimpinan, adalah berpegang teguh pada perinsip dasar, visi utama, dan tujuan bersama.

Dengan demikian kemandirian organisasi ‘Aisyiyah sangat bergantung pada kemampuan semua anggota pengurus dan pimpinan dalam meramu program kerja, baik program otonom ‘Aisyiyah maupun program dari sistem yang lebih besar Muhammadiyah termasuk pemahaman tentang masyarakat madani. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang diperoleh, yaitu kegiatan yang dikembangkan oleh masing-masing majelis secara garis besar dapat dikatakan bahwa pengembangan dan pembangunan masyarakat yang membangun komunitas yang tidak pecah secara eksklusif oleh perbedaan pandangan dan kepentingan. Perbedaan tersebut justru sebagai pentingnya komunitas masyarakat yang inklusif, toleran, terbuka dan berbudaya, serta harus terus dikembangkan dan dibangun. Bentuk nyata masyarakat madani dapat dilihat dari kemampuan masyarakat mengembangkan musyawarah dan toleransi. Dengan kata lain, masyarakat telah mampu mengembangkan budaya kebebasan berpendapat, menghormati perbedaan dan menghargai keberagaman. Upaya merealisasikan wacana masyarakat madani menjadi perhatian besar dari organisasi ‘Aisyiyah Kota Makassar.

Sebagai organisasi sosial keagamaan, ‘Aisyiyah Kota Makassar dapat merespon carut-marutnya peradaban masyarakat di era globalisasi dengan melakukan ijtihad untuk membangun peradaban yang luhur. Kenyataan menunjukkan bahwa upaya keterlibatan dan kepedulian ‘Aisyiyah terhadap problematika masyarakat khususnya di Kota Makassar semakin kompleks, tercermin dari pertumbuhan dan perkembangan kualitas serta kuantitas amal usaha yang dikelola masing-masing majelis dari tahun ke tahun mengalami perubahan yang positif.

Pelaksanaan gerakan terhadap masyarakat (umum) yang beragama Islam melalui TIT, yaitu Tajdidiyah, yang artinya

pembaharuan, peningkatan dalam pemahaman agama (mengembalikan) ajaran agama sesuai tuntunan al-Qur'an dan as-Sunnah. Islahiyah, yang artinya perdamaian, kerukunan, persaudaraan dalam masyarakat, dan Tabsyiriyah, artinya penghiburan, pembimbingan serta pemberian dorongan dalam beribadah dan beramal saleh. Bidang-bidang yang dapat di-TIT-kan adalah Ibadah, Akhlaq, Tauhid, Tabligh, Kegiatan Jihad, Persatuan, Syi'ar Islam, Pendidikan, Seni Budaya, Kesehatan, Ekonomi, serta amalan-amalan Islam lainnya dengan tujuan utama untuk mewujudkan pribadi muslim, mukmin dan mukhsin. 'Aisyiyah sebagai organisasi dakwah selalu memperbaharui dirinya, terutama dalam pengembangan dakwah keagamaan dan sosial, selalu menyesuaikan diri dengan perubahan baik struktur maupun materi yang akan disampaikan. Misalnya, "Misi Gerakan TIT diwujudkan dalam bentuk kegiatan dan program kerja yang bertujuan: menanamkan keyakinan, memperdalam, memperluas pemahaman, menambah pengalaman, dan menyebarkan ajaran agama Islam dalam segala aspek kehidupan; meningkatkan kualitas dan kuantitas pengkajian terhadap agama Islam; memperteguh iman, memperkuat dan menggemakan ibadah, serta mempertinggi akhlak".

Beberapa Amal Usaha 'Aisyiyah Kota Makassar, tampak bahwa gerakan tersebut dapat meningkatkan semangat ibadah, jihad, zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, serta membangun dan memelihara tempat ibadah, serta amal usaha yang lain; meningkatkan pendidikan, membangun kebudayaan, memperluas ilmu pengetahuan dan teknologi, menggairahkan penelitian; memajukan perekonomian, kewirausahaan, dan perbaikan hidup yang berkualitas; meningkatkan dan mengembangkan kegiatan di bidang sosial, kesejahteraan, kesehatan, serta lingkungan hidup; meningkatkan dan mengupayakan penegakan

hukum, keadilan, memupuk semangat kesatuan dan persatuan bangsa; meningkatkan komunikasi, ukhuwah, kerjasama di berbagai bidang baik dalam dan luar negeri serta usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi ‘Aisyiyah Kota Makassar.

Terkait dengan dinamika kemandirian ‘Aisyiyah Kota Makassar, serta fase-fase perkembangan organisasi sejak didirikan hingga sekarang, dalam era reformasi sejumlah kisah sukses di berbagai bidang kehidupan, seperti keberhasilan dalam demokrasi, pemulihan krisis ekonomi, resolusi konflik di beberapa daerah (Sulselbar), diakui bahwa hingga kini masih menghadapi berbagai masalah sosial keagamaan yang kompleks. Di antaranya masalah politik, ekonomi, dan sosial-budaya yang memerlukan prioritas dan perhatian untuk dipecahkan dalam perjalanan Kota Makassar ke depan.

Setelah reformasi (1998), peranan ‘Aisyiyah sebagai organisasi sosial keagamaan dan kemasyarakatan khususnya Kota Makassar menunjukkan dinamika antara keberhasilan dan permasalahan yang harus dihadapi, yang seringkali tidak mudah dikelola karena berbagai kendala dan kelemahan termasuk masalah kepemimpinan dan cara mengurus organisasi. Reformasi 1998 merupakan pilihan yang niscaya dan telah menjadi bagian penting dari sejarah ‘Aisyiyah sebagai jalan keluar dari kondisi dan era otoritarian rezim Orde Baru pada masa sebelumnya.

Peran dan tanggung jawab ‘Aisyiyah di era baru ini diharapkan dapat membawa perubahan ke arah perbaikan sistem politik dan ekonomi seperti tertuang dalam program kerja masing-masing majelis dan lembaga ‘Aisyiyah. Dalam sejumlah kasus telah menunjukkan prestasi atau perkembangan yang positif terutama dalam demokratisasi. Karena dengan reformasi ‘Aisyiyah tetap berada dalam posisi paradoks, yaitu di satu pihak menjadi organisasi yang otonom dalam mengelola amal

usaha, di sisi lain 'Aisyiyah merupakan bagi dari Muhammadiyah terutama dalam merealisasikan nilai dan norma yang telah digariskan sebagai wilayah perjuangan bersama dalam rangka mencapai visi dan tujuan bersama.

Penjelasan di atas menegaskan bahwa konsep kemandirian menjadi faktor sangat penting dalam sebuah organisasi termasuk 'Aisyiyah. Konsep ini tidak hanya mencakup pengertian kecukupan diri (*self-sufficiency*) bidang ekonomi, politik, sosial budaya tetapi juga faktor manusia secara pribadi, di dalamnya mengandung unsur penemuan diri (*self-discovery*) berdasarkan kepercayaan diri (*self-confidence*). Kemandirian adalah suatu sikap yang mengutamakan kemampuan diri sendiri dalam mengatasi pelbagai masalah demi mencapai tujuan, tanpa menutup diri terhadap pelbagai kemungkinan kerjasama yang saling menguntungkan.

Dalam pengertian sosial atau pergaulan antar manusia, kemandirian juga bermakna sebagai organisasi diri (*self-organization*) atau manajemen diri (*self-management*). Unsur-unsur tersebut saling berinteraksi dan melengkapi satu sama lain sehingga muncul suatu keseimbangan. Dewasa ini, pencarian pola yang tepat, agar interaksi antar unsur selalu mencapai keseimbangan, menjadi penting. Setiap keseimbangan yang dicapai akan menjadi landasan bagi perkembangan berikutnya. Dengan demikian, proses kemandirian yang dicapai 'Aisyiyah adalah proses yang berjalan tanpa ujung. Dalam konteks pembangunan, sikap mandiri harus dijadikan tolok ukur keberhasilan, yakni warga 'Aisyiyah atau masyarakat menjadi lebih mandiri atau malah semakin bergantung. Misalnya, pendiri dan pengelola amal usaha 'Aisyiyah; apakah lebih bebas atau malah semakin bergantung pada

organisasi ‘Aisyiyah atau Muhammadiyah, atau Pemerintah (Kota Makassar).

Implikasi dari saling bergantung dari unsur-unsur dalam kemandirian, khususnya ‘Aisyiyah Kota Makassar diwujudkan dalam program kerja majelis dan lembaga baik di tingkat daerah, cabang, dan ranting. Program-program kerja di bidang ekonomi bagi golongan miskin harus dirancang secara tepat, sesuai dengan tingkat keseimbangan yang ada pada mereka. Kemiskinan yang mereka tanggung tidak boleh dilihat semata-mata sebagai masalah fisik, melainkan harus dilihat sebagai tantangan atau dorongan bagi hadirnya harapan baru atau kondisi yang lebih baik. Dengan demikian program kerja masing-masing bidang (majelis dan lembaga), harus dapat dijangkau oleh kemampuan organisasi. Karena itu, program harus memungkinkan golongan miskin ikut berpartisipasi, mulai dari tahap implementasi sampai pada tingkat pengambilan keputusan sesuai dengan fakta yang dihadapi.

Dinamika kemandirian ‘Aisyiyah sebagai organisasi perempuan tetap eksis, sekaligus merupakan gerakan dakwah, sosial kemasyarakatan, dan keagamaan diharapkan interaksi unsur-unsur dalam kemandirian menjadi efektif dan perkembangan ke arah *selfish* bisa dihindari, perkembangan pribadi individu yang positif dibangun lewat Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang dibentuk dan diselenggarakan secara wajar secara bertahap. Dalam kelompok semacam inilah proses belajar-mengajar akan berlangsung, dimana kesenjangan antara penerima pelajaran dan pengajar disebabkan perbedaan latar belakang sosial-ekonomi, bisa dihindari.

Dengan demikian, kecenderungan ke arah *selfish* sebagai pola lama mulai terkikis karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan, akan diganti oleh pola baru yaitu *empati* yang dapat menumbuhkan rasa

kebersamaan. Bila kemampuan individu (anggota) ‘Aisyiyah yang bertindak sebagai murid dari proses perkembangan golongan miskin. Proses ini menuntut komitmen, dedikasi, dan pandangan hidup yang baik dari pendamping. Artinya, mereka harus memperhatikan proses kemandirian yang terjadi dalam KSM seperti yang terjadi pada dirinya sendiri.

Pengembangan organisasi ‘Aisyiyah menuju kemandirian melalui autopoiesis dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat, ialah “Para pengurus dan anggota bersama-sama membuat *work plan* (perencanaan kerja) yang terperinci dan detail dengan budget kegiatannya. Beberapa item yang menjadi titik sorot dalam perencanaan kerja adalah; kegiatan pendidikan dan penyadaran pro lingkungan dan pro rakyat terpinggir (*grassroot*), pemberdayaan pada petani di kampung, memperkuat tim dan jejaring (*net work*) serta kegiatan yang bersifat mendesak dan karitatif.

Perencanaan kerja yang dilakukan selama priode kepemimpinan lima tahun, khususnya wilayah kerja PDA Kota Makassar (2010 – 2015), kegiatan yang direncanakan merupakan hasil reproduksi dari periode sebelumnya. Kegiatan Lembaga Penelitian dan Pengembangan dalam merealisasikan program kerja yang telah ditentukan, namun para anggota memperhatikan hal-hal yang terkait dengan program kerja masing-masing majelis dan lembaga kebudayaan untuk mempertajam kegiatan tersebut dalam rentang waktu satu tahun sebagai langkah gerakan. Hal ini sebagai bentuk reproduksi diri pengurus dan anggota, menyadari bahwa setiap perencanaan mesti dibarengi dengan usaha dan kerja keras secara bersama-sama saling mengisi dan melengkapi.

Autopoiesis Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah (PDA) Kota Makassar, proses pembaharuan mencapai kemandirian seperti sekarang merupakan upaya yang berkesinambungan dalam melakukan kegiatan pemberdayaan

dan kesadaran terhadap semua pihak. Dalam hal ini, sebagai fasilitator untuk merumuskan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada kemandirian. Dengan kata lain, PDA Kota Makassar mengajak semua pengurus dan anggota untuk lebih mampu melakukan kegiatan pemberdayaan dengan metode inovatif dan kreatif melalui daya autopoiesis.

B. Keberlanjutan Organisasi ‘Aisyiyah dalam Merespons Dinamika Lingkungan Eksternalnya.

Prinsip dasar keberlanjutan sebuah organisasi adalah terletak pada sistem yang bersiklus melalui input dari lingkungan, kemudian memproses input tersebut sesuai dengan tuntutan kebutuhan dari lingkungan agar dapat menghasilkan output seperti yang diharapkan oleh lingkungan eksternalnya. Dalam hal ini, keberlanjutan organisasi ‘Aisyiyah seperti telah dijelaskan di atas bahwa, ‘Aisyiyah merupakan sistem yang otonom terdiri atas unit-unit yang utuh menerima input dalam merespon tuntutan dari lingkungan untuk memproses input tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga menghasilkan output yang diharapkan oleh lingkungan (masyarakat).

Dengan demikian, di balik kemandirian ‘Aisyiyah sebagai sistem yang otonom, juga dapat memelihara keberlanjutan organisasi karena komponen atau sistem yang dimiliki berkembang melalui ketiga aspek yang dimaksud, yaitu input, proses, dan output. Sebagai contoh, sistem atau unit-unit yang mengelola bidang pendidikan, mulai dari Taman Kanak-kanak (TK), SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK, dan Madrasah Aliyah (MA), yang di bawah koordinasi Majelis Dikdasmen melakukan perubahan-perubahan dalam menerima input berupa calon siswa dari lingkungan (masyarakat), kemudian diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu TK diproses selama 2 tahun untuk menghasilkan

output calon-calon siswa SD/MI. Kemudian diproses selama 6 tahun untuk menghasilkan output calon-calon siswa SMP/MTs, kemudian melalui proses selama 3 tahun dan menghasilkan output calon-calon siswa SMA/SMK dan MA untuk diproses sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku selama 3 tahun, sehingga menghasilkan output calon-calon mahasiswa sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Demikian pula sistem yang mengelola bidang kesehatan, menerima input berupa calon pasien di rumah sakit atau rumah bersalin, kemudian diproses dalam hal ini menjalani perawatan dan pengobatan kesehatan atau persalinan bagi, sehingga menghasilkan output yang diharapkan yaitu para pasien mendapat pelayanan yang baik dan memuaskan sehingga sembuh dari penyakit yang diderita, atau melahirkan dengan baik.

Sementara sistem yang menangani bidang dakwa keagamaan dapat menerima input berupa calon da'i baik di Pesantren maupun lembaga yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan dakwah, untuk diproses sesuai kebutuhan sehingga menghasilkan output yaitu para da'i atau ustadz yang handal yang mampu memberikan cemahan dan dakwah sebagaimana yang diharapkan masyarakat dan pemerintah (lingkungan eksternal). Dengan kata lain, input, proses dan output yang dilakukan oleh lembaga-lembaga dakwah adalah untuk merespon tuntutan perkembangan serta perubahan berbagai aspek, terutama metode, materi dan substansi dakwah yang terus berubah serta berkembang demikian kompleks agar tidak ketinggalan sebagaimana yang dijelaskan pada konteks autopoiesis hubungannya dengan kedudukan atau poisisi 'Aisyiyah yang paradoks agar tetap bertahan dan berlanjut.

Data dan informasi yang menunjukkan bahwa, 'Aisyiyah merespons dinamika lingkungan strategis, baik Muhammadiyah maupun

Pemerintah melalui daya kontigensi terhadap berbagai program kerja dan kegiatan yang diemban masing-masing majelis dan lembaga setiap periode. Selain itu, hal yang tidak kalah pentingnya adalah proses perkembangan dan perubahan yang dialami dari period eke periode khususnya operiode 2010/2015. keberkelanjutan ‘Aisyiyah sebagai salah satu ortom Muhammadiyah bergerak dan berkontribusi memajukan bidang pembinaan dan kaderisasi termasuk anak-anak yang sedang dan akan dibina di Panti Asuhan (PA). Melalui input anak-anak yatim, piatu, anak terlantar, dan anak-anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu atau biasa disebut penyandang masalah sosial untuk diproses atau dibina dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang dialami, serta menghasilkan output yaitu anak-anak yang mandiri dan berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara seperti yang diharapkan. Demikian pula halnya dengan penyandang masalah sosial lain seperti lanjut usia di Panti Jompo dengan input dari lingkungan para usia lanjut (lansia) yang tidak mampu dan terlantar.

Keberlanjutan ‘Aisyiyah karena mampu merespon lingkungan strategis terdekat terutama Muhammadiyah. Selain itu, keberlanjutan tersebut merupakan karunia Allah yang diraih atas kekuatan yang lahir dari keihlasan, komitmen, potensi, dan partisipasi semua warga sebagai gerakan dakwah amar makruf nahi munkar, serta tajdid sehingga selalu menunjukkan semangat tinggi untuk berkiprah konstruktif dalam kehidupan. Dengan demikian, keberlanjutan merupakan daya kontigensi dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan strategis serta kepercayaan dan dukungan berbagai pihak yang memiliki komitmen yang sama dalam mewujudkan visi dan tujuan organisasi.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa kemandirian ‘Aisyiyah Kota Makassar karena mampu mengelaborasi tiga aspek utama organisasi, yaitu medan visional yang telah dipahami oleh semua anggota serta menjadi pegangan dalam melaksanakan semua kegiatan dan program kerja ‘Aisyiyah dengan tetap memosisikan diri paradoks independensi, serta berautopoisis menyesuaikan diri dari fase ke fase; dari waktu ke waktu seiring perubahan dan perkembangan sejak didirikan hingga sekarang. Sementara ditinjau dari aspek keberlanjutan, ‘Aisyiyah terus berkembang dan berlanjut karena telah melakukan tiga hal penting dengan baik, yaitu input, proses, dan output yang diterima dari lingkungan strategis melalui program kerja setiap majelis dan lembaga seperti dalam periode (2010-2015).

Data dan informasi yang dapat ditunjukkan dalam disertasi ini, antara lain: Majelis Tabligh, program kerja yang direalisasikan sebagai respon dari lingkungan strategis meliputi: (a) mengintensifkan pembinaan aqidah, akhlak, dan ibadah di kalangan ‘Aisyiyah dan masyarakat melalui pengajian serta kajian-kajian; (b) mengintensifkan kajian tafsir al-Qur’an dan Hadist bagi anggota, kader dan pimpinan ‘Aisyiyah; (c) memasyarakatkan pelaksanaan kehidupan sehari-hari berdasarkan pedoman kehidupan Islam sesuai tuntunan tarjih Muhammadiyah; (d) meningkatkan dan mengembangkan kemampuan muballigh dalam berbagai aspek, seperti penguasaan metode, materi, serta strategi da’wah; (e) meningkatkan fungsi mesjid, mushallah dan sarana dakwah lainnya sebagai pusat kegiatan Tabligh (penyiaran Islam secara terprogram), dan (f) mengintensifkan program pembelajaran al-Qur’an bagi anggota ‘Aisyiyah.

Tujuan yang ingin diwujudkan melalui program-program di atas ialah ”Terbangunnya kualitas aqidah, akhlak, ibadah, dan muamalah

kalangan umat, atau masyarakat luas yang berlandaskan al-Qur'an dan as-Sunnah melalui pesan-pesan yang bersifat pencerahan dan kemajuan". Upaya untuk mencapai tujuan tersebut, maka proses kegiatan yang dilakukan meliputi: (1) Pengajian tentang aqidah, akhlak, dan ibadah; (2) Sosialisasi tentang pedoman kehidupan Islami sesuai HTP; (3) Pelatihan muballigh secara berkala, dan (4) Memfungsikan mesjid dan mushallah pada setiap kegiatan.

Dalam pembinaan keluarga ialah meliputi: (a) meningkatkan dan menguatkan pembinaan keluarga dengan basis nilai-nilai agama untuk membentuk manusia yang memiliki iman, mentalitas dan karakter yang kuat; (b) meningkatkan dan mengintensifkan peran keluarga (orang tua) sebagai pendamping anak dalam beradaptasi dengan media dan informasi, dan (c) sosialisasi Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak, dan UU tentang penghapusan KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga).

Keberlanjutan 'Aisyiyah melalui program kerja Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), yaitu: (a) meningkatkan kualitas dan kreativitas penyelenggaraan pendidikan dasar tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK) 'Aisyiyah dalam wilayah Kota Makassar; (b) menjadi lembaga pendidikan 'Aisyiyah sebagai basis kaderisasi yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan; (c) meningkatkan kualitas pendidikan melalui jenjang pendidikan, forum diskusi dan berbagai cara yang lain yang telah digariskan; (d) meningkatkan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan sesuai kemampuan organisasi berdasarkan kinerja, komitmen dan pengabdian terhadap 'Aisyiyah di Kota Makassar; (e) membuat data base sebagai pusat informasi dan basis pengembangan

pendidikan ‘Aisyiyah di Kota Makassar, dan (f) penggunaan administrasi anak didik dan organisasi.

Tujuan yang ingin dicapai melalui program kerja dan kegiatan di atas sebagai wujud keberlanjutan organisasi ialah untuk meningkatkan kualitas keunggulan ‘Aisyiyah sebagai strategi pembentukan manusia yang utuh, berilmu dan berkarakter sesuai tujuan pendidikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka kegiatan yang dilakukan meliputi: (1) kunjungan pembinaan dan supervise langsung terhadap amal usaha yang dibina oleh ‘Aisyiyah Kota Makassar; (2) mengikutsertakan pendidikan dan latihan kepada tenaga kependidikan terhadap setiap kegiatan yang dilakukan ‘Aisyiyah; (3) penataran/pelatihan kurikulum dan pembahasan ke ‘Aisyiyahan dan ke Muhammadiyah; (4) melaksanakan seminar tentang pendidikan pengurus dan guru-guru; (5) menetapkan kesejahteraan setiap pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kondisi lembaga (amal usaha) masing-masing; (6) memberikan penghargaan terhadap guru yang memiliki masa kerja 10 tahu ke atas; (7) membuat data base (anak didik, guru dan pengurus); (8) menggunakan administrasi anak (peserta) didik seperti: Ijazah, laporan pendidikan, buku induk; (9) membuat RAPBO/ RAPBS, dan (10) menetapkan uang infaq siswa Rp 3000/Tahun/Anak, dengan ketentuan sebagai berikut: (a) Pimpinan Cabang ‘Aisyiyah (PCA) = 40%; (b) Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah (PDA) = 35%; (c) Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah (PWA) = 15%, dan (d) PPA Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah = 10%; (11) menetapkan dana pembinaan organisasi tingkat daerah Rp. 5000/Tahun/Anak, dan (12) Zakat Profesi.

‘Aisyiyah sebagai salah satu organisasi dakwah keagamaan, sosial dan budaya dalam era reformasi tidak terlepas dari krisis multikompleks, dan multidimensional yang muncul antara lain dalam

bidang keuangan, politik, hukum yang dialami oleh masyarakat Sulawesi Selatan khususnya Kota Makassar dari hari ke hari terus berlangsung dan berkepanjangan. Namun, 'Aisyiyah telah menunjukkan kemampuannya dalam mengelola daya kontigensi amal usaha yang dikelola melalui program kerja secara berkelanjutan termasuk Lembaga Kebudayaan, sebagai salah satu dari dua lembaga 'Aisyiyah yang dibentuk seiring dengan perkembangan dan perubahan, merespon lingkungan strategis terutama untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi sehingga 'Aisyiyah terus berkembang dan berlanjut.

Keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah Kota Makassar dalam merespons lingkungan strategis serta persoalan yang dihadapi dengan langkah konkrit. Dalam Sidang Tanwir 'Aisyiyah 2010 mengimplementasikan semua program kerja masing-masing majelis dan lembaga serta membulatkan sikap dan tekad, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, dalam era yang penuh dengan kompetisi (persaingan) segenap komponen bangsa, terutama warga 'Aisyiyah, dituntut untuk lebih cerdas dalam menanggapi serta memecahkan persoalan-persoalan bangsa. Situasi krisis multidimensi yang dialami hubungannya dengan program kerja masing-masing majelis dan lembaga telah direspon sebagaimana yang diharapkan.

Data yang menunjukkan bahwa 'Aisyiyah tetap eksis karena mampu merespon perubahan lingkungan strategis, khususnya dalam satu dekade terakhir antara lain menangani berbagai persoalan yang dihadapi perempuan seperti kekerasan, diskriminasi termasuk KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) memberi kesempatan kepada semua majelis dan lembaga di bawah koordinasi Majelis Hukum dan HAM untuk menanggapi isu yang berkembang dengan langkah-langkah konkrit.

Misalnya, masalah gender hubungannya dengan kedudukan perempuan dalam Islam.

‘Aisyiyah sebagai organisasi perempuan pertama di Indonesia terus berbenah diri menyesuaikan dengan perkembangan, terutama masalah-masalah yang dihadapi dewasa ini semakin kompleks. Namun, ‘Aisyiyah tetap menyadari keberlanjutan organisasi ini prinsip dasar dan azas yang dikembangkan bersumber dari al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Karena itu, dalam mengatasi persoalan perempuan baik diskriminasi, KDRT atau bentuk kekerasan lain yang dialami perempuan apalagi dikaitkan dengan gender, maka ‘Aisyiyah perlu mengkaji ulang berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah tentang kedudukan, hak, dan kewajiban perempuan dalam Islam. Dengan demikian, ‘Aisyiyah merespon lingkungan strategis tidak hanya program rutinitas tetapi juga mengikuti perkembangan regional, nasional maupun global.

Konsekuensi dari pilihan gerakan ‘Aisyiyah Kota Makassar, terutama dilihat dari kualitas kegiatan bahwa peningkatan perhatian terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik pimpinan maupun segenap warganya, peningkatan kualitas kegiatan, dan kualitas organisasi. Kepedulian ‘Aisyiyah dan kepekaan terhadap isu-isu sosial dalam segenap aspek kehidupan. Isu-isu yang berkembang dalam masyarakat dari fenomena-fenomena sosial menjadi sasaran garapan ‘Aisyiyah, antara lain bidang ekonomi, bidang yang fenomenal (isu gender), dan bidang sosial dalam meningkatnya kualitas dan kuantitas yang berdampak pada kehidupan masyarakat.

Fakta lain yang menunjukkan bahwa, ‘Aisyiyah merespon berbagai persoalan dari lingkungan strategis juga dijelaskan oleh Sekretaris PDA Kota Makassar, bahwa seiring dengan perubahan bidang-bidang strategis, maka ‘Aisyiyah mengubah bidang kerja TKI/TKW dan

PRT menjadi tenaga ahli. Hal ini karena ‘Aisyiyah memiliki potensi untuk menyelenggarakannya. Demikian pula bidang pendidikan, seperti TK, SD dan pendidikan formal. ‘Aisyiyah menyelenggarakan sekolah unggulan, dengan program beasiswa menjadi hal yang penting. Program beasiswa dalam hal ini merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan, untuk merespon tuntutan kelompok masyarakat yang tidak mampu mendapatkan pendidikan yang layak.

Program kerja dalam Sidang Tanwir ‘Aisyiyah 2010-2015; yang memberikan beasiswa bagi anak-anak yang memerlukan keberlanjutan studi. Program ini ditindak lanjut oleh semua Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah sebanyak 33 PWA di seluruh Indonesia, disediakan beasiswa Rp. 300 ribu untuk siswa di tingkat cabang. Program ini kemudian direalisasikan PDA Kota Makassar dalam 25 cabang yang tersebar di 14 kecamatan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa:

Selain program-program kerja dalam bidang pendidikan ini, ‘Aisyiyah juga menyelenggarakan pendidikan luar sekolah, seperti Pendidikan Luar Sekolah (PLS). Program PLS yang dilaksanakan oleh Majelis Dikdasmen PDA Kota Makassar sebagai respon atas perkembangan dan tuntutan dari lingkungan strategis, sekaligus untuk menjawab besarnya jumlah drop out yang dialami anak-anak usia sekolah. Hal ini menunjukkan ‘Aisyiyah sebagai organisasi sosial budaya yang memiliki lembaga pendidikan yang tetap eksis dan mampu menyediakan paket-paket pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan kebutuhan anak-anak dari masyarakat yang tidak mampu (putus sekolah). Penyelenggaraan paket-paket semacam ini telah menjadi “profesi ‘Aisyiyah” selama ini. Tentu harus dijawab dengan langkah konkrit bagi ‘Aisyiyah.

Selain bidang pendidikan yang merupakan program andalan sejak organisasi ini didirikan di Kota Makassar, juga dalam bidang hukum yang fenomenal antara lain dipicu oleh hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pengadilan dengan tindak kekerasan, terutama kepada perempuan yang lepas dari tindakan hukum. Karena itu, 'Aisyiyah menyelenggarakan lembaga *Crisis Centre* untuk menghadapi berbagai macam kekerasan.

Selain masalah-masalah di atas yang bersifat lokal (Kota Makassar), masalah-masalah yang bersifat nasional, dan global/internasional, sebagai bentuk kepedulian (respons) 'Aisyiyah terhadap permasalahan di lingkungan eksternal (masyarakat dan bangsa). Dalam hal ini 'Aisyiyah Kota Makassar setelah reformasi (1998), meskipun secara relatif menunjukkan kemajuan demokrasi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas politik. Namun demikian, 'Aisyiyah sebagai ortom Muhammadiyah selama sepuluh tahun terakhir sejak Muktamar 2005 merespons berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, baik yang menyangkut politik, ekonomi, hukum, maupun sosial dan budaya yang krusial dan memerlukan pemecahan yang komprehensif.

Respons 'Aisyiyah sebagai organisasi modern yang tetap konsisten terhadap visi dan misi gerakan sosial keagamaan, terutama di tingkat pusat sekaligus sebagai bentuk kepatuhan 'Aisyiyah kepada Muhammadiyah yang direalisasikan di tingkat daerah, khususnya di Kota Makassar dalam rangka merespons perkembangan politik global menuju era dunia yang lebih adil dan damai, tetapi dalam praktik masih ditandai oleh hubungan antar negara terutama antar negara maju dengan sedang berkembang yang masih belum adil dan terjadi hegemoni kekuatan negara-negara besar yang merugikan masyarakat negara-negara sedang berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Globalisasi cenderung

menjadi alat kekuatan ekonomi dan politik internasional yang semakin memperluas cengkeraman kapitalisme global dan hadirnya neoliberal yang memporak-porandakan kekuatan nasional dan lokal di negara-negara sedang berkembang, terutama Indonesia.

Meluasnya gaya hidup global yang membawa sikap hidup bebas seperti pornografi, perilaku asusial, penghargaan yang berlebihan terhadap materi (materialisme) dan kesenangan duniawi (hedonisme), permisivisme, kebebasan tanpa batas nilai (liberalisme/nihilisme), dan budaya populer yang bertentangan dengan norma-norma agama, moral, dan budaya Indonesia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di satu sisi memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, namun di sisi lain juga membawa dampak negatif terhadap masyarakat dan mempengaruhi perkembangan kebudayaan nasional maupun lokal Indonesia. Dampak negatif yang dimaksud, adalah terbukanya kecenderungan materialisme (faham kebendaan), sekularisme (memisahkan urusan dunia dengan nilai-nilai agama), hedonisme (memuja kesenangan duniawi), dan pragmatisme (mementingkan nilai kegunaan) yang meminimalisasikan, serta menihilkan nilai-nilai luhur, moral spiritual, dan norma-norma agama.

Berikut ini sekilas tentang fase-fase perkembangan 'Aisyiyah sebagai organisasi perempuan di Indonesia, termasuk Kota Makassar. Sebagaimana diketahui bahwa 'Aisyiyah Kota Makassar didirikan tahun 1926, tepatnya 9 tahun setelah 'Aisyiyah Pusat didirikan (1917) di Yogyakarta. Pertumbuhan yang demikian cepat ini tidak terlepas dari kerja keras para pengurus dan pimpinannya yang tanpa pamrih kecuali hanya mengharap ridha Allah swt., dan meyakini bahwa mengurus organisasi 'Aisyiyah merupakan pekerjaan mulia. Hal ini diperkuat beberapa informan, bahwa perkembangan 'Aisyiyah yang demikian cepat

merupakan penanam pendidikan yang baik. Organisasi ini diminati para anggota karena gerak langkahnya merupakan amal ibadah kepada Allah. Azas maupun tujuannya jelas. Melalui organisasi ‘Aisyiyah, para remaja perempuan dan ibu-ibu yang telah berumah tangga berbuat dan berkarya dimana organisasi ini berakidah Islam.

Organisasi ini bagi umat Islam bukanlah tempat berjuang yang sia-sia, tetapi dijadikan media untuk beramal. Azas dan tujuan organisasi didasarkan prinsip bahwa Islam itu harus dikembangkan. Pendidikan untuk menghadapi masa depan perempuan harus diperluas. Dalam hal ini, Nyai Ahmad Dahlan sebagai pendiri ‘Aisyiyah pertama bersama-sama dengan Muhammadiyah telah berkembang lebih maju dalam berbagai aspek. Pondok atau asrama yang hanya untuk mendidik wanita-wanita terus dikembangkan. Pendidikan yang dirintis Nyai Ahmad Dahlan benar-benar telah tampak hasilnya. Mereka yang telah digembleng dalam ‘Aisyiyah bangkit sebagai generasi penerus yang percaya pada kemampuan sendiri. Selanjutnya mereka mengamalkan pendidikan yang telah diperoleh dalam mengembangkan ‘Aisyiyah. Dalam hal ini, fase-fase perkembangan ‘Aisyiyah secara dibagi dalam tiga fase.

1. Fase Pra Kemerdekaan (17 Agustus 1945)

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa ‘Aisyiyah Kota Makassar didirikan pada Tahun 1926 (sebelum kemerdekaan 17 Agustus 1945), yaitu 9 tahun setelah ‘Aisyiyah Pusat diresmikan (1917) di Yogyakarta. Amal Usaha ‘Aisyiyah dijadikan modal dan diteruskan sebagai pedoman gerak langkah organisasi. Hal ini telah mendorong ‘Aisyiyah untuk lebih memperhatikan pendidikan kaum wanita. Tiap-tiap cabang ‘Aisyiyah dalam wilayah Makassar diharapkan dapat mengurus anak-anak di wilayahnya, seperti asrama dan lain-lain. Kesempatan untuk

anak-anak perempuan bersekolah sekarang ini menumbuhkan kesyukuran ‘Aisyiyah bahwa rintisan Nyai Ahmad Dahlan dahulu diteruskan dan dikembangkan hingga menjelang satu abad, tetap eksis dan terus berlanjut.

Perkembangan selanjutnya, amal usaha rintisan K.H. Ahmad Dahlan dan Nyai Ahmad Dahlan baik di pusat maupun di daerah, khususnya di Kota Makassar telah menjadi keputusan Mukhtamar dengan dibukanya sekolah-sekolah kejuruan, antara lain: Sekolah Bidan, Sekolah Perawat, Sekolah Kepandaian Puteri, Sekolah Guru Kepandaian Puteri, Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak, dan lain-lain. Usaha ini merupakan dorongan dan semangat ‘Aisyiyah untuk memperhatikan kemajuan puteri-puteri pada umumnya dan gadis-gadis khususnya agar kelak mengganti meneruskan amal usaha yang telah didirikan. Generasi muda inilah yang diharapkan mengemudikan gerak langkah organisasi ‘Aisyiyah dengan sebaik-baiknya.

Keberlanjutan ‘Aisyiyah Kota Makassar dalam merespon lingkungan strategis dengan memperluas amal usaha yang ada, antara lain membuka Rumah Sakit Bersalin. Program ini bersifat pendidikan atau kemasyarakatan sebagai wujud semakin majunya pemikiran, pengetahuan dan pengalaman maka dalam penyampaian agama Islam bukan hanya melalui pengajian, tetapi juga melalui pendirian panti-panti asuhan, sekaligus dapat dijadikan media dakwah untuk membantu bidang sosial dan kemasyarakatan sehingga tercapai sasaran organisasi yang lebih baik.

Terkait dengan perkembangan ‘Aisyiyah pada masa penjajahan, maka dibentuk gerakan kepanduan, yaitu Padvinders Muhammadiyah. Kemudian atas usul Hajid nama pandu itu diganti menjadi Hizbul Wathon. Pembentukan organisasi siswa praja sebagai wadah kegiatan ekstra kurikuler bagi seluruh siswa sekolah Muhammadiyah.

Terbentuknya kelompok-kelompok pengajian remaja putri, orang dewasa, dan ibu-ibu rumah tangga sehingga mendorong perkembangan dan kemajuan 'Aisyiyah termasuk di Kota Makassar. Selain itu, setelah berdiri secara resmi 'Aisyiyah di Kota Makassar, remaja putri lulusan sekolah Muhammadiyah dikirim ke seluruh pelosok Sulawesi Selatan dalam upaya mengembangkan visi dan misi 'Aisyiyah.

Fase perkembangan 'Aisyiyah Kota Makassar semakin pesat setelah Kongres Muhammadiyah ke-21 (1935) diselenggarakan di Makasar, yang memutuskan supaya Muhammadiyah menerbitkan surat kabar (*dagblaad*). Pelaksanaannya diserahkan kepada Pengurus Muhammadiyah dan 'Aisyiyah Cabang Solo. Kemudian sekolah lima tahun yang akan menyambung ke MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs yang setingkat SLTP saat ini) bagi murid tamatan *vervolg*school atau *standaardschool* kelas V. Dalam sekolah-sekolah Muhammadiyah ini juga dipakai bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Sekolah-sekolah Muhammadiyah saat itu merupakan salah satu lembaga pendidikan yang didirikan pribumi yang dapat menyamai kemajuan pendidikan sekolah Belanda, sekolah Katolik, dan sekolah Protestan. Dalam hal ini, lembaga-lembaga pendidikan forma ya ng dirintis oleh 'Aisyiyah dan Muhammadiyah pada masa penjajahan (pra kemerdekaan) merupakan satu-satunya lembaga pendidikan bagi pribumi, untuk semua lapisan masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang diharapkan.

2. Fase Kemerdekaan (17 Agustus 1945)

Fase perkembangan 'Aisyiyah sebagai ortom Muhammadiyah pasca kemerdekaan (17 Agustus 1945), memberikan perhatian dan pembinaan sehingga konsep kemandirian organisasi ini masih dalam proses perjuangan. Sidang darurat Muhammadiyah pada tahun **1947**,

‘Aisyiyah belum memiliki status otonom tetapi garis perjuangan ‘Aisyiyah tetap konsisten mendukung perjuangan Muhammadiyah hingga tahun 1950, Majelis ‘Aisyiyah diganti menjadi Pimpinan Pusat (PP) ‘Aisyiyah, tepatnya tanggal 21 – 26 Desember 1950 dalam Kongres XXXI atau Mukhtamar I yang berlangsung di Yogyakarta. Beberapa keputusan penting yang dihasilkan dalam Mukhtamar ini, yaitu:

- a. Mendorong dan bekerjasama dengan pemerintah untuk memperbaiki kerusakan akhlak.
- b. Bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, terutama pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan kesehatan rakyat.
- c. Menyediakan *studiefonds* untuk membiayai para pelajar yang sekolah di luar negeri, dan mendirikan Universitas Muhammadiyah.
- d. Menghormati organisasi lain yang non-Islam selama tidak merugikan dan bersedia bekerjasama, saling menghargai agar tidak terjadi salah paham yang dapat merugikan perjuangan pokok Islam.
- e. Muhammadiyah dan/atau ‘Aisyiyah, baik sebagai organisasi maupun perorangan diperkenankan menjadi anggota DPR.

Tahun 1963 Nasyyiatul ‘Aisyiyah (NA) diberi status otonom lepas dari ‘Aisyiyah. Ahmad Badawi diangkat menjadi Penasehat Pribadi Presiden di bidang agama. Berbagai gerakan dan aksi perjuangan yang dilakukan K.H. Fakhruddin adalah dalam rangka memperbaiki nasib dan kondisi umat serta bangsa Indonesia dari lumpur kebodohan, kehinaan dan ketertindasan di tangan penjajahan kolonial Belanda. Atas jasa-jasanya dalam perjuangan, Pemerintah RI memberinya penghargaan sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional berdasarkan keputusan Presiden RI Nomor 162/1964. Kemudian penangkapan dan penahanan

HAMKA hingga 1966, Hamka dipenjarakan oleh Presiden Soekarno karena dituduh pro-Malaysia. Dalam penjara beliau menulis Tafsir al-Azhar yang merupakan karya terbesarnya.

Fase perkembangan 'Aisyiyah dalam masa pemerintahan Orde Baru (1966 – 1998), mengalami dinamika perkembangan yang ditandai dengan pasang surut perubahan dan kemajuan, antara lain tanggal 16 Agustus 1966 Badan Koordinasi Amal (Muslimin) terbentuk. Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi pendukung utama dari 16 organisasi yang tergabung dalam badan ini. Dengan demikian 'Aisyiyah sebagai ortom Muhammadiyah menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan yang dilakukan Muhammadiyah sebagai induk organisasi.

Perubahan mendasar yang pernah dialami 'Aisyiyah semasa rezim pemerintahan Orde Baru, adalah perubahan azas organisasi yang dilakukan Muhammadiyah, yang sebelumnya berazaskan agama Islam; berpedoman pada al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw, berubah menjadi azas tunggal yaitu Pancasila dan UUD 1945 sesuai dengan UU yang berlaku. Perubahan yang dilakukan 'Aisyiyah sebagai wujud respon atas lingkungan strategis dalam memelihara keberlanjutan organisasi.

Fase selanjutnya Ahmad Badawi diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung. Faqih Usman bersama Hasan Basri, mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Anwar Haryono, mantan Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia mengirim nota politik kepada pemerintah Orde Baru, yang dikenal dengan Nota KH. Faqih Usman; isinya permintaan agar Pemerintah Orde Baru merehabilitasi Masyumi sebagai partai terlarang. Hal ini terkait dengan "medan visional" yang ditulis para tokoh Muhammadiyah, terutama Ustadz K.H. Ahmad Azhar Basyir, MA Ketua PP Muhammadiyah (1990-1995), secara khusus

menulis Misi Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam. Mukhtamar Muhammadiyah di Banda Aceh (1995), terpilihnya Prof. DR. H. M. Amien Rais, MA sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah. Wilayah kerja Majelis Tarjih tidak saja di bidang fikih, namun juga pengembangan pemikiran Islam. Karena itu, majelis ini sejak Mukhtamar Aceh berganti nama menjadi Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (MTPPI).

3. Fase Reformasi (1998)

Fase reformasi (1998), adalah fase dimana berakhirnya kekuasaan rezim Orde Baru yang ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Setelah mundurnya Presiden Soeharto Wakil Presiden BJ. Habibie, menerima mandat sebagai Presidensi RI keempat menggantikan Soeharto. Sejumlah agenda reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, terutama kehidupan politik, ekonomi, hukum, dan sosial budaya mewarnai perjalanan reformasi yang kini memasuki kurang lebih 15 tahun. Fase ini bagi 'Aisyiyah sebagai ortom Muhammadiyah cukup penting, karena sejumlah petinggi Muhammadiyah merupakan penggerak reformasi sehingga perubahan yang terjadi sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah. Sebagaimana diketahui bahwa, Prof. Dr. H.M. Amien Rais, MA merupakan tokoh utama reformasi, ketika itu sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.

Fase reformasi yang terkait dengan keberlanjutan 'Aisyiyah, seperti dijelaskan di atas bahwa tokoh utama reformasi Amien Rais sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah mengambil langkah untuk terlibat langsung dalam politik praktis. Maka Prof. Dr. H. Ahmad Syafii Maarif sebagai Ketua Umum menggantikan Prof. Dr. H.M. Amien Rais,

MA yang meletakkan jabatan karena memimpin Partai Amanah Nasional (PAN), sebagai lanjutan dari amanat reformasi. Kemudian Tahun **2000** Muktamar XLIV Muhammadiyah di Jakarta, terpilih kembali Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif sebagai Ketua Umum. Kemudian Tahun **2002** Tanwir Muhammadiyah di Denpasar Bali, tanggal 24 s/d 27 Januari 2002 menyepakati perlunya Muhammadiyah menyiapkan kader terbaiknya sebagai pemimpin nasional (Khittah Kehidupan Berbangsa dan Bernegara). Sidang Tanwir membahas Khittah Muhammadiyah dalam berbagai persoalan, termasuk rekomendasi Muhammadiyah bagi kemajuan bangsa dan negara. Masalah lainnya, adalah pembahasan tentang Bank Persyarikatan, di mana akan diputuskan apakah manajemen perbankan dapat diselenggarakan secara syariah atau secara konfesional.

‘Aisyiyah sebagai ortom Muhammadiyah melakukan perubahan dan penyesuaian baik struktur maupun program. Sidang Tanwir 2009, di Bandar Lampung merupakan Sidang Tanwir kedua di era reformasi jelang Muktamar yang ke-46 di Yogyakarta pertengahan tahun 2010. Sidang Tanwir 2009 memiliki tujuan antara lain dihasilkannya keputusan untuk meningkatkan peran Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah sebagai Gerakan Islam, Dakwah Amar Makruf Nahi Munkar dalam membangun kembali visi dan karakter bangsa, di tengah pergulatan bangsa-bangsa lain yang semakin maju. Sidang Tanwir 2009 dilaksanakan menjelang Pemilu 2009 dimana suasana politik Indonesia menghangat. Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah memberikan rekomendasi terkait Pemilu 2009, antara lain:

- a. Mendesak partai politik dan seluruh komponen untuk tidak menjadikan Pemilu 2009 sebagai ajang perebutan kursi kekuasaan yang menjurus pragmatisme dan menghalalkan segala cara. Pemilu harus dijadikan momentum untuk menghasilkan anggota legislatif,

presiden dan wakil presiden yang bertanggung jawab dalam menjalankan amanat rakyat, mengurus pemerintahan dengan benar, menghasilkan kebijakan yang pro-rakyat kecil, menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan dan etika publik, membangun kepercayaan, tidak menggunakan aji mumpung dalam melaksanakan kekuasaan yang dimilikinya.

- b. Muhammadiyah menyerukan kepada segenap komponen untuk memilih pemimpin nasional yang memiliki: (1) visi, misi dan karakter yang kuat sebagai negarawan yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan; (2) berani mengambil berbagai keputusan penting dan strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak (umat), mampu menyelesaikan persoalan-persoalan krusial bangsa secara tegas, serta melakukan penyelamatan aset dan kekayaan negara, dan (3) mampu menjaga kewibawaan dan kedaulatan nasional dari berbagai ancaman baik di dalam maupun di luar negeri, serta mampu mewujudkan *good governance* termasuk melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu; dan (4) melepaskan jabatan di partai politik apapun dan berkonsentrasi dalam memimpin bangsa dan negara.

Banyak perubahan yang harus dilakukan 'Aisyiyah dalam reformasi, baik struktur organisasi maupun program-program kerja terutama dalam bidang politik. Langkah perubahan perlu dilakukan merespon lingkungan strategis khususnya Muhammadiyah termasuk keterlibatan kader-kader terbaik 'Aisyiyah dalam politik praktis, dengan catatan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan organisasi, diantaranya melepaskan jabatan di 'Aisyiyah jika mengambil keputusan untuk terlibat dalam politik praktis seperti pengurus partai, dan lain-lain sebagaimana langkah yang diambil oleh Amien Rais. Selain itu, quota

30% perempuan dalam legislatif perlu dipertimbangan pengurus, dengan ketentuan tidak membawa nama organisasi karena kader-kader ‘Aisyiyah harus tetap konsisten menjaga dan memelihara kemandirian dan keberlanjutan organisasi.

Selain masalah politik praktis yang menjadi isu hangat awal reformasi, juga masalah yang terkait dengan responsif gender sebagai kebutuhan yang tidak bisa dikesampingkan. Dalam hal ini, konsep gender sebagai konstruksi peran sosial ditinjau dari sosiologis. Reformasi pemikiran di berbagai bidang khususnya peran perempuan merupakan ciri gerakan pembaruan. Demikian dapat ditegaskan bahwa "Kita tidak melupakan kodrat perempuan atau ingin mendominasi laki-laki, tapi yang kita minta adalah dilibatkan dalam peran kebangsaan, yakni ‘Aisyiyah memainkan peran bagi seluruh bangsa. Kalau perempuan dilibatkan, akan lebih sempurna". Penegasan ini menunjukkan bahwa, budaya global dan Ideologi globalisasi yang semakin meluas ditandai dengan paham dan sikap hidup masyarakat yang sangat mengagungkan materi dan kesenangan inderawi.

Perlu dipahami bahwa, respon ‘Aisyiyah dalam aplikasinya terhadap globalisasi lebih cenderung melahirkan manusia-manusia yang berwatak materialis, individualis, egois, hedonis dan bahkan materialis. Pengagungan manusia terhadap nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan bergeser menjadi pengagungan manusia terhadap nilai-nilai materi dan kekayaan. Watak dan karakter manusia yang demikian, jauh sebelumnya sudah ditantang dan dikritik keras oleh Aristoteles. Menurut Filusuf ternama ini, “Bahwa semakin tinggi penghargaan manusia terhadap kekayaan dan materi, maka semakin rendahlah penghargaan manusia terhadap nilai-nilai kemanusiaan, kesusilaan, kebenaran, kejujuran, dan keadilan”.

Sikap individualisme secara diam-diam akan menyertai paham yang memutlakkan materialisme. Karena itu tidak heran jika penyebaran ideologi globalisasi ke dalam struktur sosial masyarakat, beriringan dengan retaknya etika, moralitas serta ikatan sosial yang sudah lama terbangun dalam kultur sosial masyarakat. Dasar-dasar, nilai-nilai keagamaan, kultural lambat laun namun pasti mulai terkikis seiring kuatnya hegemoni ideologi globalisasi dalam seluruh struktur sosial yang ada, mulai dari level negara, organisasi sosial keagamaan dan kemasyarakatan, hingga pada level keluarga. Bahkan tidak asing lagi, jika ideologi yang sangat menganut paham materialisme dan rasionalisme mutlak ini, juga mendorong terjadinya proses liberalisasi agama sebagai komoditas pasar yang diperjualbelikan, diiklankan dan dicitrakan dalam berbagai bentuk demi kepentingan ekonomis dan status sosial.

Masalah lain yang tidak luput dari respons "Aisyiyah Kota Makassar, karena sangat memprihatinkan adalah praktek pornografi yang tersebar di ruang publik yang diproduksi dan tersebar secara meluas di media masa dan dunia maya yang vulgar dan menjadi komoditi.

Masalah-masalah yang dihadapi dalam resformasi sangat kompleks sehingga "Aisyiyah sebagai organisasi sosial keagamaan, merasa perlu untuk melakukan gerakan dan tindakan nyata melalui program-program kerja sebagai bentuk kepedulian dan respon terhadap masalah-masalah tersebut, agar tidak menimbulkan pengaruh negatif terhadap masyarakat khususnya generasi muda. Masalah ini diperparah oleh makin terbukanya sajian-sajian televisi, media cetak dan media lainnya yang menampilkan sikap kekerasan, perilaku permisif, serta hal-hal yang dapat melemahkan mental dan nilai budaya lokal maupun nasional. Permasalahan tersebut akan merusak nilai-nilai yang substansi dari ajaran agama sekaligus menjauhkan fungsi sosial dan kemanusiaan

yang sesungguhnya. Oleh karena itu, peran dan fungsi "Aisyiyah dalam memberdayakan masing-masing majelis dan lembaga untuk mengatasi berbagai persoalan dalam reformasi sangat diperlukan.

Pola kehidupan masyarakat yang demikian harus dibendung melalui kegiatan-kegiatan pendidikan rohani dan religius dengan pendekatan baru sehingga dapat membangkitkan dan menampilkan kesalehan manusia secara individual dan kolektif, serta tercipta peradaban yang Islami dan mengontrol peradaban seiring dengan dinamika kehidupan manusia. Agama dalam hal ini harus mampu menawarkan ajaran yang dapat menyembuhkan masalah sosial, kultural sekaligus menjadi landasan moral dan spiritual bagi terbentuknya kebudayaan dan peradaban yang membawa keselamatan hidup umat manusia. Masalah budaya lainnya yang masih menjadi kendala khususnya dalam pemberdayaan perempuan adalah masih kuatnya budaya patriarki dalam masyarakat. Budaya ini cenderung menegaskan posisi perempuan, melahirkan diskriminasi, dan relasi-relasi bias gender, yang bertentangan dengan peradaban mulia umat manusia dan ajaran agama Islam.

Kehidupan demokrasi mengalami kemajuan yang pesat, tetapi terjadi kecenderungan demokrasi prosedural yang tidak diimbangi dengan bentuk demokrasi substantif, sehingga kualitas dan perilaku berdemokrasi cenderung pragmatis serta mengalami penurunan terutama nilai-nilai moral. Respons 'Aisyiyah dalam menjaga keberlanjutan terhadap dinamika organisasi internal (lingkungan strategis Muhammadiyah) dan organisasi eksternal (lingkungan strategis Pemerintah) dalam kehidupan berdemokrasi cenderung menganut paham demokrasi liberal, sehingga dalam jangka panjang akan menimbulkan persoalan termasuk dalam hubungan moral dan agama. Dalam konteks ini, 'Aisyiyah yang sebelumnya berlandaskan agama Islam dan berpedoman kepada al-

Qur'an menerima Pancasila sebagai azas tunggal sesuai dengan UU yang berlaku seolah kehilangan dasar orientasi nilai-nilai moral dalam membingkai demokrasi. Demikian halnya kecenderungan demokrasi liberal yang tampak menguat dalam mengembangkan otonomi dan melaksanakan pemilihan kepala daerah.

Respons 'Aisyiyah terhadap masalah-masalah yang berskala nasional maupun lokal tersebut, sebagai wujud keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah di dalam merespon lingkungan strategis secara internal dan secara eksternal. Dalam hal sistem politik multipartai di Kota Makassar semakin menunjukkan kerancuan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, disertai dengan perilaku elite politik dan parpol yang pragmatis, yakni orientasi politik yang berpusat pada kekuasaan semata sehingga menghalalkan segala cara juga menjadi sorotan 'Aisyiyah dalam Pemilu Legislatif maupun Pilkada.

Keberlanjutan 'Aisyiyah dalam reformasi selama kurang lebih 15 tahun juga direalisasikan melalui program kerja Majelis Kesehatan, meliputi: (a) meningkatkan kualitas SDM dalam bidang kesehatan melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan; (b) upaya penurunan angka kematian bayi dan balita melalui imunisasi ASI Eksklusif dan pemberian gizi seimbang; (c) meningkatkan pemberdayaan masyarakat, perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan keluarga, amal usaha, tempat umum, dan tempat ibadah; (d) promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit menular seperti malaria, TB dan penyakit lainnya, dan (e) meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam peningkatan peran 'Aisyiyah terhadap kualitas kesehatan masyarakat.

Meningkatkan kualitas pembinaan dan pemberdayaan masyarakat luas secara khusus bagi perempuan dan anak berbasis pada al-Qur'an

Surat Al-Ma'un. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan meliputi: (1) senam lansia (lanjut usia); (2) pelatihan perawatan kulit bayi; (3) seminar kesehatan lanjut usia; (4) pelatihan kesehatan gizi anak; (5) penyuluhan sosialisasi pemberian makanan tambahan; (6) pelatihan kader deteksi dini kelainan tumbuh kembang bayi dan anak; (7) penyuluhan pembinaan dan sosialisasi PHBS; (8) bakti sosial, pengobatan gratis, pembinaan kelompok lansia; (9) penyuluhan tentang bahasa NAPZA; (10) deteksi dini penyakit menular; dan (11) seminar kanker serviks.

Pembangunan di bidang ekonomi banyak kemajuan yang telah diraih, yaitu pertumbuhan dan pendapatan perkapita penduduk terus meningkat. Namun, perhatian pemerintah terhadap ekonomi masyarakat semakin nyata dengan banyak dan beragamnya skema program ekonomi yang ditujukan pada masyarakat golongan menengah-bawah masih kurang. Karena itu, tidak bisa dipungkiri bahwa berbagai kemajuan ekonomi yang tercermin dari pertumbuhan dan stabilitas makro ekonomi masih jauh dari memadai, serta bias terhadap fakta-fakta ekonomi yang ada.

Sebagai penanggung jawab Majelis Ekonomi, melihat fondasi dan ketahanan ekonomi Kota Makassar masih lemah, hal ini disebabkan oleh orientasi pembangunan ekonomi yang lebih menekankan kepada aspek pertumbuhan bertumpu pada investasi asing, utang luar negeri, dan konglomerasi. Kondisi ini mengakibatkan hasil pembangunan hanya dikuasai dan dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat, kesenjangan melebar, dan sendi-sendi kehidupan sosial-ekonomi tumbuh tanpa akar yang kuat. Beberapa persoalan ekonomi nasional yang mendasar dan bersifat struktural adalah paradigma ekonomi yang tidak konsisten dan dualistik, di satu pihak kebijakan fiskal belum mandiri, sistem keuangan

dan perbankan yang tidak memihak kepada rakyat, dan kebijakan industri yang liberal.

Kegiatan di bidang pendidikan terdapat peningkatan secara kualitas dan kuantitas pendidikan, pemerataan kesempatan belajar, peningkatan prestasi belajar anak-anak khususnya siswa yang dibina sekolah-sekolah 'Aisyiyah tingkat regional dan internasional. Di bidang penegakan hukum terdapat keseriusan 'Aisyiyah Kota Makassar di dalam pemberantasan korupsi yang membawa implikasi pada moralitas publik, disertai lahirnya produk perundang-undangan yang berpihak pada hak asasi manusia, perlindungan perempuan dan anak, serta penegakan moral. Di bidang kehidupan beragama semakin meluas iklim dan kesadaran untuk hidup rukun dalam kemajemukan.

Dalam hubungan sosial masih cukup kuat budaya gotong royong dan semangat kebersamaan yang ditunjukkan ketika menghadapi bencana alam. Namun demikian, masih terdapat permasalahan sosial-budaya yang perlu mendapatkan pemecahan yang serius, di antaranya memudarnya rasa dan ikatan kebangsaan, disorientasi nilai keagamaan, memudarnya kohesi sosial, dan melemahnya mentalitas yang positif. Menyadari hal tersebut, 'Aisyiyah Kota Makassar melalui program-program kerja yang dicanangkan Lembaga Penelitian dan Pengembangan, serta Lembaga Kebudayaan dalam upaya mencegah dan menanggulangi masalah-masalah yang dimaksud. Masalah lain yang kecenderungan melemahkan karakter bangsa adalah kekerasan yang terorganisir termasuk kekerasan terhadap anak-anak dan perempuan, kriminalitas, perjudian, pornografi dan perilaku-perilaku menyimpang lainnya serta merusak nilai-nilai agama dan moral.

Realisasi program kerja Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Periode (2010 – 2015), yaitu: (1) mengembangkan penelitian dan

pengkajian masalah keorganisasian untuk mendukung kebijakan dan pengembangan organisasi; (2) meningkatkan dan mengembangkan fungsi data dan informasi sebagai salah satu sumber penting dalam pengambilan kebijakan organisasi dan pengembangan gerakan, dan (3) mengembangkan publikasi hasil kajian dan penelitian secara luas melalui media, baik cetak maupun elektronik. Di samping itu, tujuan yang hendak diwujudkan melalui program kerja tersebut di atas, adalah terbangunnya kesadaran dan perilaku ramah lingkungan bagi anggota dan pimpinan di setiap tingkatan dan amal usaha.

Realitas yang menunjukkan bahwa, dalam upaya mencapai tujuan tersebut sebagai wujud keberlanjutan organisasi, seperti disampaikan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan, meliputi: (1) membuat peta wilayah untuk mengadakan survey untuk mengetahui jumlah cabang ‘Aisyiyah yang aktif; (2) mengumpulkan data atau informasi terkait dengan sasaran obyek kajian, dan (3) mempublikasikan kegiatan penelitian melalui media.

Realisasi program kerja Lembaga Penelitian dan Pengembangan, kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan hasil positif, maka program kerja lima sampai sepuluh tahun ke depan harus mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi dengan merespon lingkungan strategis secara berkelanjutan. Secara politik, respons ‘Aisyiyah terhadap perubahan-perubahan yang dilakukan Muhammadiyah, baik struktural maupun program kerja, meskipun belum mencapai stabilitas politik yang permanen. Secara ekonomi, ‘Aisyiyah mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil, tetapi belum menjamin adanya pemerataan dan keadilan untuk kemakmuran semua warga. Selain itu, ‘Aisyiyah juga menghadapi berbagai masalah sosial yang tidak mudah untuk diselesaikan di bidang sosial keagamaan dan kemasyarakatan,

mengatasi kerusakan lingkungan, dan menjaga martabat serta kedaulatan bangsa dan negara. Oleh karena itu, 'Aisyiyah tetap konsisten menjaga, memelihara, dan mempertahankan keberlanjutan organisasi.

Sementara budaya populer akan semakin menjadi kecenderungan yang luas dalam masyarakat seiring dengan perkembangan media elektronik yang sangat pesat, memungkinkan kebudayaan nasional dan daerah berada di persimpangan jalan dalam dinamika globalisasi yang semakin kompleks. Karena itu, 'Aisyiyah Kota Makassar memerlukan strategi dalam menghadapi globalisasi maupun dinamika masyarakat majemuk yang sering mengalami konflik sosial. Selain itu, keragaman bahasa, sistem ekonomi, politik, strata sosial, religi, dan kesenian, cenderung menguat dengan semakin efektifnya proses demokrasi dan otonomi daerah, yang dapat membawa konsekuensi luas dalam sistem kebudayaan masyarakat Kota Makassar dan Indonesia. Hal tersebut akan menjadi tantangan besar bagi organisasi Muhammadiyah yang telah berkembang semakin besar dan kompleks, dengan jangkauan wilayah yang sangat luas untuk menghadirkan gerakan Islam berwawasan kebangsaan dan kebudayaan yang mampu memberikan alternatif jawaban mencerahkan, membebaskan, dan memberdayakan kepentingan kejayaan masa depan umat dan bangsa.

Menghadapi situasi dan kondisi yang demikian, segenap Pengurus dan Pimpinan 'Aisyiyah Kota Makassar, lima sampai sepuluh tahun ke depan memerlukan revitalisasi visi, misi dan karakter organisasi sebagai tolok ukur melakukan konsolidasi internal dan eksternal reformasi. Dengan menyadari nilai positif yang dihasilkan reformasi dan kesadaran adanya masalah yang kompleks tersebut, maka kini diperlukan penajaman-penajaman terhadap visi dan misi 'Aisyiyah secara berkelanjutan. Reformasi 'Aisyiyah perlu dirancang ulang yang

diintegrasikan ke dalam pembangunan yang bersifat menyeluruh dan berkesinambungan, sehingga reformasi berada dalam arah dan jalur yang benar. Pembangunan nasional dalam berbagai bidang kehidupan perlu dikembangkan dalam bingkai paradigma pembangunan berkelanjutan yang bermakna (*sustainable development with meaning*).

Paradigma ini bertumpu pada prinsip pengembangan sumber daya manusia sebagai subjek pembangunan, pemanfaatan sumberdaya alam secara produktif dengan menjaga kelestarian, kebijakan ekonomi dan politik yang berpihak kepada kepentingan rakyat, menjunjung tinggi moralitas dan menjaga martabat bangsa. Pada dasarnya pembangunan berkelanjutan dan bermakna sebagai upaya perbaikan dalam kehidupan manusia dengan menjaga keseimbangan material dan spiritual, individu dan masyarakat. Cara untuk meningkatkan martabat bangsa melalui rekonstruksi.

Sejak awal berdirinya ‘Aisyiyah berada *on the track* untuk menjawab problem mentalitas ini, karena ‘Aisyiyah merupakan *jam’iyah* (organisasi massa) dan gerakan yang dinamis membentuk bangsa yang bermartabat. Salah satu hal yang penting dalam memperkuat pemahaman mengenai *jihad* dalam arti luas. Hal ini disebabkan lemahnya karakter dan martabat manusia dapat menimbulkan banyak masalah di bidang agama, politik, sosial, ekonomi, hukum dan pendidikan. Masalah-masalah tersebut yang menjadi perhatian dan komitmen ‘Aisyiyah dalam melahirkan berbagai rekomendasi dalam upaya membangun kemandirian dan keberlanjutan organisasi.

Lebih jauh dijelaskan bahwa, ‘Aisyiyah sebagai organisasi massa dan memiliki komitmen sejak awal didirikan hingga sekarang terus diperjuangkan secara berkesinambungan, khususnya di Kota Makassar dalam merespons berbagai persoalan termasuk kasus tenaga kerja wanita

asal Indonesia yang teraniaya di Malaysia dan Arab Saudi sebagai wujud kepedulian masalah-masalah sosial yang menjadi perhatian pemerintah. Oleh sebab itu 'Aisyiyah mendesak pemerintah dan lembaga-lembaga terkait baik di dalam maupun di luar negeri untuk lebih serius dan selektif dalam pengiriman Tenaga Kerja Wanita. Selanjutnya pemerintah wajib memberi perlindungan serta advokasi terhadap para TKI khususnya TKW yang sering menjadi korban kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi melalui langkah-langkah yang lebih tegas dan optimal. Selain itu 'Aisyiyah juga mendesak pemerintah agar menindak tegas pihak-pihak yang melakukan perdagangan manusia (*trafficking*) dan mengefektifkan pelaksanaannya.

Perkembangan 'Aisyiyah lebih cepat dibanding dengan pemerintah sejak didirikan, karena kemampuan dalam mengelola daya kontigensi, ketekunan, dan kesungguhan semua warga dan para pengurus. Saya juga tidak tahu persis mengapa kondisi itu bisa terjadi, padahal kalau dilihat dari segi tanggung jawab terutama para pengurus yang pada umumnya berkeluarga, selain mengurus rumah tangga dan profesinya (pekerjaannya) sebagai PNS (umumnya adalah guru), tetap menyisihkan waktunya untuk mengurus 'Aisyiyah sehingga dalam perkembangannya sebagai organisasi perempuan pertama di Indonesia, hingga saat tetap berlanjut dan bertahan dalam goncangan serta desakan arus globalisasi dan modernisasi yang demikian kompleks, dan ke depan 'Aisyiyah tetap menunjukkan jati dirinya sebagai organisasi perempuan modern di dalam membina ummat (masyarakat) sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.

Dinamika keberlanjutan 'Aisyiyah Kota Makassar dilihat dari realisasi program-program kerja yang telah dirancang secara sistematis, kemudian diimplementasikan sesuai dengan kondisi masing-masing

majelis di tingkat cabang dan ranting secara berkeberlanjutan. Sebagai contoh, pemahaman ‘Aisyiyah tentang bidang kesejahteraan sosial yang diperjuangkan adalah terciptanya suatu kondisi ideal dari tata kehidupan masyarakat yang *baldatun thayyibatun wa rabbun ghaffur*, yaitu suatu kehidupan bahagia sejahtera penuh limpahan rahmat dan nikmat Allah swt. di dunia dan akhirat. Dengan demikian, tercipta suatu titik keseimbangan antara aspek jasmaniah dan rohaniah ataupun aspek material dan spiritual.

Sejak berdirinya ‘Aisyiyah Kota Makassar kegiatan kesejahteraan sosial telah dimulai dalam bentuk membantu kaum miskin dan anak yatim. Dalam perkembangan saat ini, program kesejahteraan sosial tersistem ke dalam unit-unit kegiatan sosial antara lain: (1) kepedulian dan usaha-usaha pelayanan terhadap kelompok dhuafa; (2) pengembangan dan pemberdayaan lembaga-lembaga sosial yang dikelola oleh ‘Aisyiyah seperti panti asuhan, panti jompo, balai latihan, dan rumah singgah; (3) peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di perkotaan dan pedesaan; (4) pelayanan korban dan penanggulangan bencana atau musibah; (5) advokasi publik yang menyangkut masalah-masalah sosial di berbagai lapisan masyarakat, dan (6) mengembangkan pola pencegahan dan pemberian bantuan terhadap korban trafficking dan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan lain-lain.

Jenis dan bentuk program Dakwah Terpadu terkait dengan dinamika keberlanjutan ‘Aisyiyah Kota Makassar, adalah:

- a) Tabligh Bina Ummat, yaitu bentuk penyiaran Islam (dakwah bil-lisan) yang diprogram secara intensif dan berkelanjutan. Tabligh ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pemahaman dan pengamalan. Tabligh ini mengarah pada pembinaan yang dilakukan secara dialogis, intensif, dan berkelanjutan meningkatkan

pemahaman, kesadaran, dan pengamalan Islam secara kaffah. Tabligh Bina Umat berbentuk kelompok kajian, dan konsultasi keagamaan tentang persoalan keseharian, dan lain-lain.

- b) Tabligh Media, yakni dakwah bil lisan dengan melalui media masa. Dakwah ini berbentuk penyebaran informasi keagamaan dengan melalui tulisan (brusur, pamflet, bulletin) dan kaset, dengan sasaran kelompok-kelompok kajian yang anggotanya masih awam dalam pemahaman, kesadaran, dan pengamalan ajaran Islam.
- c) Bina Remaja Putri, yaitu pembinaan yang khusus diberikan kepada para remaja putri Islam di semua lapisan masyarakat: bimbingan keagamaan, kesadaran hukum, partisipasi politik, dan ketrampilan wanita dalam rangka pengembangan potensi dan sumber daya remaja putri Islam.
- d) Bina Keluarga Dhu'afa, yaitu kegiatan dakwah yang khusus bertujuan untuk membantu memecahkan masalah dan peningkatan taraf hidup kehidupan masyarakat yang lemah ekonominya. Bentuk dakwah ini meliputi membuka lapangan kerja, pendidikan ketrampilan wirausaha, pelayanan kesehatan, pembinaan keluarga sakinah.
- e) Kesehatan bagi Wanita, yakni program dakwah yang khusus untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, baik secara individu, jamaah, ataupun kesehatan masyarakat. Jenis kegiatan yang dikembangkan adalah penyuluhan dan pelayanan kesehatan, apotik hidup, kesehatan mental, kesehatan ibu dan anak, dan kegiatan lain yang menuju pada perilaku hidup sehat. Sebagai sasarnya yaitu kelompok kaum wanita, baik remaja maupun ibu rumah tangga.

Program Kerja Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan terkait dengan dinamika keberlanjutan 'Aisyiyah Kota Makassar, meliputi: (1)

kewirausahaan melalui penguatan dan pengembangan usaha makro, menengah yang dikelola oleh perempuan agar memperjuangkan hak dan kepentingannya; (2) optimalisasi pembinaan ekonomi melalui BUEKA, dan (3) mengadakan berbagai macam pelatihan dan keterampilan.

Ketiga program kerja di atas bertujuan agar “Terbangunnya kesadaran dan perilaku ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan warga, umat dan masyarakat”. Untuk mencapai tujuan ini, Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan melakukan kegiatan: (1) Membuat home industry; (2) Mengaktifkan BUEKA di setiap cabang ‘Aisyiyah; (3) Pendataan pengusaha ‘Aisyiyah di cabang-cabang; (4) Mengadakan kursus kue dan makanan, (5) Pameran dan Bazaar d. Mengadakan bazaar

Program kerja Majelis Pengkaderan (Pembinaan Kader), meliputi: (a) mengembangkan dan mengoptimalkan pelaksanaan pengkaderan di tingkat cabang dan ranting secara terencana dan berkelanjutan; (b) optimalisasi fungsi dalam peran amal usaha sebagai pendidikan dan pembinaan kader; (c) mengoptimalkan pembinaan kader melalui keluarga, amal usaha, AMM, untuk menjadi pelopor dan pelangsupenggerak.

Tujuan yang hendak diwujudkan dalam merealisasikan program kerja Majelis Pengkaderan (Pembinaan Kader), ialah meningkatkan kuantitas dan kualitas kader yang memiliki integritas, kompetensi, keagamaan, keilmuan, sikap dan tindakan yang berpegang pada nilai-nilai Islam. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, maka kegiatan yang dilakukan adalah : (a) Penataran pimpinan; (b) Job Training kesekretariatan dan kebidayagaraan; (c) Pelatihan kepemimpinan dan keprotokuleran; (d) Cerdas cermat tentang ke ‘Aisyiyahan dan ke Muhammadiyah.

Program kerja Majelis Hukum dan HAM, meliputi: (a) berpartisipasi aktif dalam upaya penegakan hukum dan HAM, sehingga terwujud rasa keadilan bagi setiap warga Negara; (b) meningkatkan pemahaman tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan upaya pencegahannya; (c) meningkatkan pengawasan dan pencegahan perdagangan manusia.

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program kerja Majelis Hukum dan HAM, adalah terbangunnya kesadaran perilaku hukum dan HAM dalam menciptakan keadilan, ketertiban dan kebaikan hidup bersama yang berbasis pada norma-norma hukum, agama, dan budaya bangsa. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang dilakukan meliputi: (1) Penataran pimpinan; (2) Job Training kesekretariatan dan kebidharaan; (3) Pelatihan kepemimpinan dan keprotokuleran; (4) Cerdas cermat tentang ke ‘Aisyiyahan dan ke Muhammadiyah.

Program Nasional yang bersifat umum, terkait dengan keberlanjutan ‘Aisyiyah Kota Makassar, ialah: (a) mengembangkan pedoman atau tuntunan dan materi tabligh dalam berbagai aspek kehidupan untuk pembinaan masyarakat yang bersifat peneguhan dan pencerahan; (b) mengembangkan peta dakwah sebagai panduan pelaksanaan tabligh di seluruh tingkatan dari tingkat pusat sampai tingkat ranting; (c) mengintensifkan pembinaan aqidah, akhlak, ibadah, dikalangan warga ‘Aisyiyah dan masyarakat luas melalui pengajian, kajian, publikasi dan media lainnya secara terprogram sesuai faham agama dalam Muhammadiyah yakni Islam yang berkemajuan; (d) mengintensifkan pembinaan dhuafa’, muallaf dan masyarakat khusus (suku terasing, nelayan, petani, jermal, dan lain sebagainya); (e) mengintensifkan kajian tafsir Al Qur’an dan hadits bagi anggota, kader,

dan pimpinan untuk meningkatkan pemahaman Islam yang benar; (f) pelaksanaan kehidupan sehari-hari berdasarkan pedoman kehidupan Islami; (g) mengintensifkan pembinaan keluarga yang berpedoman pada tuntunan keluarga sakinah serta mengembangkan media konsultasi keluarga.

Selanjutnya dipertegas oleh salah satu Wakil Ketua PWM Sulawesi Selatan, bahwa 'Aisyiyah Kota Makassar memelihara keberlanjutan dengan melaksanakan kegiatan Dakwah Islamiah, meliputi:

- (1) Gerakan jamaah pengajian dan kajian-kajian keagamaan di tingkat komunitas sebagai basis perintisan program Qaryah Thayibah.
- (2) Pembinaan paham agama sesuai dengan tuntutan Muhammadiyah bagi kelompok-kelompok bimbingan haji 'Aisyiyah.
- (3) Meningkatkan penyiapan ulama tarjih perempuan yang memahami dan mampu menguasai perkembangan fiqh dan masalah-masalah Islam sebagaimana faham agama di Muhammadiyah.
- (4) Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan mubalighot dalam berbagai aspek seperti penguasaan metode, materi, strategi dakwah serta penguasaan IT (*information technology*).
- (5) Mengembangkan media tabligh sebagai sarana pembinaan umat melalui media cetak dan elektronik untuk memperluas jaringan dan jangkauan dakwah yang bersifat peneguhan dan pencerahan.
- (6) Melaksanakan tuntunan dakwah kultural melalui kegiatan tabligh dalam berbagai aspek kehidupan bagi masyarakat yang majemuk sesuai dengan paham agama dalam Muhammadiyah.

- (7) Meningkatkan fungsi masjid, mushalla, dan sarana-sarana dakwah sebagai pusat kegiatan penyiaran Islam secara terprogram.
- (8) Mengembangkan tabligh dengan pemahaman Islam secara benar yang mendorong pencapaian ketaqwaan tinggi, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, mencegah berbagai bentuk radikalisasi, kekerasan, dan ketidakadilan sejalan dengan misi Islam rahmatan lil-alamin yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

Program Khusus Pembinaan Keluarga, dengan tujuan: Terbina dan berkembangnya kualitas kehidupan keluarga dalam seluruh aspek secara berkeadilan dan berkemakmuran menuju terciptanya keluarga sakinah. Hal ini dapat direalisasikan melalui program-program sebagai berikut:

- 1) Menguatkan pembinaan keluarga dengan basis nilai-nilai agama, untuk membentuk manusia yang memiliki kekokohan iman, mentalitas dan karakter yang kuat agar mampu mengembangkan potensi dan kapasitas diri yang berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat dan bangsa.
- 2) Memperluas sosialisasi dan peningkatan kualitas pembinaan keluarga berpedoman pada tuntunan keluarga Sakinah bagi masyarakat luas melalui berbagai model yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat.
- 3) Mengintensifkan pembinaan keluarga khususnya bagi anak-anak dan remaja yang berpedoman pada tuntunan keluarga Sakinah.
- 4) Meningkatkan kesadaran tentang hak-hak dan kewajiban dalam keluarga serta kesadaran tentang kesetaraan relasi laki-laki dan

perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

- 5) Meningkatkan peran keluarga (orang tua dan orang dewasa) sebagai pendamping anak dalam beradaptasi dengan dunia media dan informasi yang sangat berpengaruh pada perkembangan kejiwaan dan kehidupan anak-anak melalui pendidikan media literasi.
- 6) Mengembangkan pendekatan, model-model perlindungan dan bantuan hukum bagi para perempuan korban kekerasan dan anak-anak korban berlandaskan pendekatan agama dan hukum.
- 7) Memasyarakatkan usaha pencegahan dini terhadap bahaya-bahaya miras, napza, demoralisasi, seks bebas, kriminalitas, dan bentuk-bentuk penyakit social lainnya melalui pembinaan keluarga secara langsung, penyebaran leaflet, booklet, dan publikasi media cetak dan elektronik.
- 8) Mengembangkan model pendidikan bagi orang tua (parenting) dalam pembinaan karakter anak di keluarga melalui berbagai model sesuai dengan tuntunan keluarga sakinah.

Program Bidang Pengkaderan, bertujuan Meningkatkan kuantitas kader yang memiliki integritas, kompetensi keagamaan dan keilmuan, serta sikap dan tindakan yang berpegang pada nilai-nilai Islam, meliputi:

- a) Sistem perkaderan yang mampu mentransformasikan nilai-nilai Islam yang berkemajuan, nilai-nilai ideologi Muhammadiyah dan nilai-nilai ‘Aisyiyah untuk mewujudkan kader-kader yang berkualitas, memiliki mentalitas tangguh, kesadaran, keyakinan, perilaku, dan komitmen dalam perjuangan.
- b) Mengembangkan pelaksanaan perkaderan dari tingkat pusat sampai tingkat ranting secara terencana, periodik dan berkelanjutan melalui Darul Arqam, Baitul Arqam, kajian intensif, dan model kajian lainnya agar mampu berperan sebagai kader umat, dan kader bangsa.
- c) Optimalisasi fungsi dan peran amal usaha ‘Aisyiyah sebagai lembaga pembibitan dan pembinaan kader ‘Aisyiyah, termasuk pada lembaga pendidikan tinggi.
- d) Mengoptimalkan pembinaan kader melalui keluarga, amal usaha, dan transformasi AMM putri untuk memperkokoh kelangsungan gerakan.
- e) Mengembangkan pembinaan kader ulama perempuan sesuai dengan pemahaman Islam dalam Muhammadiyah.
- f) Mengembangkan model perkaderan untuk pendidikan kader bangsa dalam rangka meningkatkan peran ‘Aisyiyah dalam melaksanakan misi dakwah kebangsaan.
- g) Mengembangkan model pembinaan kader lintas ilmu-profesi baik di amal usaha ‘Aisyiyah maupun melalui kelompok di masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan lintas majelis/lembaga.

- h) Pemetaan potensi, kebutuhan, dan distribusi kader baik yang ada dalam struktur maupun di luar struktur untuk mendukung proses kaderisasi sistemik dengan menggunakan strategi pengembangan *interest group* (kelompok minat) di masyarakat.
- i) Mengembangkan dan memobilisasi transformasi kader AMM putri sebagai pelopor dan pelangsupng gerakan ‘Aisyiyah.

Bidang Pendidikan, dengan tujuan meningkatnya kualitas keunggulan pendidikan ‘Aisyiyah sebagai strategi pembentukan manusia yang utuh, berilmu dan berkarakter sesuai dengan tujuan pendidikan.

- a) Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sampai Perguruan Tinggi baik jumlah maupun kualitas yang diarahkan kepada pencerahan, pencerdasan, dan pemberdayaan agar menjadi manusia yang taqwa, berilmu, terampil, berkepribadian, mandiri dan bertanggung jawab dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan ummat manusia.
- b) Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tingkat perguruan tinggi baik kuantitas maupun kualitas yang mencakup berbagai bidang ilmu untuk pengembangan dakwah.
- c) Meningkatkan mutu pendidikan ‘Aisyiyah termasuk kurikulum sesuai UU yang berlaku, sehingga mampu memenuhi standart pendidikan nasional dan mengembangkan lembaga pendidikan ‘Aisyiyah yang memiliki keunggulan khusus dan ciri khas ‘Aisyiyah.
- d) Mengembangkan jenis, jenjang dan jalur pendidikan baru seperti pendidikan kejuruan, Pendidikan Luar Sekolah, Pendidikan anak yang berkebutuhan khusus, dan model-model pendidikan informal sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat luas.

- e) Meningkatkan kualitas pendidik, peningkatan jenjang pendidikan, pelatihan kependidikan, pelatihan penguasaan IT, forum seminar dan diskusi, berbagai cara lain yang pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan berbagai pihak termasuk perguruan tinggi Muhammadiyah.
- f) Meningkatkan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kemampuan organisasi berdasarkan sistem kinerja disertai dengan pembinaan komitmen dan pengabdian terhadap 'Aisyiyah.
- g) Revitalisasi TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal dalam berbagai aspek agar mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lain.
- h) Meningkatkan peran lembaga pendidikan sebagai basis kaderisasi yang dilaksanakan masing-masing lembaga pendidikan 'Aisyiyah.
- i) Mengembangkan data base lembaga pendidikan 'Aisyiyah sebagai pusat informasi dan basis pengembangan pendidikan.
- j) Meningkatkan program keaksaraan fungsional dengan life skill yang dikembangkan melalui berbagai kegiatan bersinergi dengan majelis dan lembaga (lintas majelis/lembaga).

Program kerja bidang kesehatan, bertujuan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, khususnya kaum perempuan, bayi dan anak yang berbasis pelayanan kesehatan dan komunitas, dengan kegiatan:

- a) Menyusun dan mengembangkan pedoman dan tuntunan manajemen amal usaha di bidang kesehatan yang berorientasi pada mutu dan profesionalisme serta berbasis pada nilai-nilai a-Qur'an, sehingga mampu bersaing dengan lembaga kesehatan lain di masyarakat.

- b) Mengembangkan panduan pengelolaan kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan untuk menjadi acuan bagi para penggerak/penggiat kesehatan di masyarakat.
- c) Meningkatkan kualitas sumberdaya di bidang kesehatan melalui berbagai upaya seperti peningkatan pendidikan, pelatihan, magang, dan kegiatan lainnya untuk peningkatan kapasitas.
- d) Meningkatkan upaya penurunan angka kematian ibu yang melahirkan melalui berbagai kegiatan.
- e) Meningkatkan upaya penurunan angka kematian bayi dan balita dengan prioritas program seperti Imunisasi, ASI eksklusif dan Inisiasi Menyusui Dini (IMD), pemberian gizi seimbang dan tumbuh kembang anak, dan program lainnya.
- f) Meningkatkan kualitas Kesehatan Reproduksi, Keluarga Berencana (KB) yang berkeadilan dan berbasis nilai-nilai Islam.
- g) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di lingkungan keluarga, lingkungan amal usaha 'Aisyiyah, tempat umum, tempat ibadah dan di lingkungan komunitas masyarakat luas.
- h) Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian penyakit menular (malaria, TBC, dan penyakit lainnya seperti diabetes millitus, kanker, stroke, dan HIV/AIDS).
- i) Meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan melalui implementasi konsep Keluarga sakinah dan Qaryah Thayyibah di bidang kesehatan atau Desa Siaga (Pengembangan Taman Obat Keluarga, dan Posyandu Balita).

- j) Meningkatkan kuantitas dan kualitas motivator kesehatan masyarakat yang siap sebagai penggerak perilaku hidup sehat.
- k) Meningkatkan kerjasama di bidang kesehatan dengan pemerintah dan berbagai pihak secara lebih aktif untuk memperluas peran ‘Aisyiyah dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
- l) Revitalisasi amal usaha kesehatan ‘Aisyiyah antara lain Rumah Sakit (RS), Rumah Bersalin (RB), Balai Pengobatan (BP), dan Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) secara profesional dan berorientasi al Ma’un sehingga lembaga-lembaga pelayanan kesehatan ‘Aisyiyah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.
- m) Memperkuat sinergi Amal Usaha Pendidikan Kesehatan ‘Aisyiyah dan Muhammadiyah dalam program magang kerja, pelatihan, penempatan tenaga kesehatan baik dalam maupun luar negeri.
- n) Mengembangkan data base Amal Usaha Kesehatan ‘Aisyiyah sebagai pusat informasi dan basis peningkatan kualitas layanan maupun pengembangan amal usaha kesehatan.

Bidang Kesejahteraan Sosial, bertujuan agar berkembangnya atau meningkatnya pemberdayaan, pelayanan dan penyantunan masyarakat dhuafa dan berbagai kelompok yang termarginalkan melalui kegiatan:

- a) Menyusun dan mengembangkan pedoman dan tuntunan maajemen amal usaha di bidang kesejahteraan sosial antara lain panti asuhan, rumah singgah, dan amal usaha lainnya yang berorientasi pada mutu dan profesionalisme sehingga mampu bersaing dengan lembaga layanan sosial yang berkembang di masyarakat.

- b) Meningkatkan usaha pemberdayaan, pelayanan, dan penyantunan melalui berbagai model aksi bagi kelompok masyarakat miskin, anak-anak terlantar, anak jermal, Lansia, penyandang cacat atau orang yang memiliki kebutuhan khusus, korban narkoba, serta kelompok lain yang termarjinalkan.
- c) Meningkatkan fungsi dan peran panti asuhan sebagai wadah untuk menggali dan mengembangkan potensi anak asuh yang berbakat serta menjadi pusat perlindungan anak.
- d) Meningkatkan sosialisasi pemahaman dan pendampingan bagi warga masyarakat lansia untuk menjalani kehidupan yang wajar sebagai warga masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- e) Mengembangkan sistem dan implementasi konsep asuhan keluarga sebagai bagian dakwah dalam bidang sosial.
- f) Pendampingan pemberdayaan masyarakat miskin di perkotaan dan pedesaan dalam berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan hukum, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi dengan menggunakan berbagai model dan pendekatan yang pelaksanaannya dilakukan dengan lintas majelis maupun lembaga.
- g) Meningkatkan sosialisasi untuk penghapusan berbagai kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta melakukan pendampingan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- h) Meningkatkan sosialisasi tindakan preventif terhadap perdagangan manusia serta pendampingan terhadap korban *trafficking*.
- i) Merintis program pelayanan anak dengan kebutuhan khusus dan layanan khusus lainnya sesuai kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat dhu'afa.

- j) Melakukan Advokasi publik yang menyangkut kebijakan masalah-masalah sosial khususnya bagi masyarakat yang termarginalkan dan dhuafa untuk mendapatkan rasa keadilan.
- k) Meningkatkan usaha-usaha dan kualitas penanggulangan bencana antara lain pada tahap tanggap darurat, manajemen bencana, kesiapan SDM, yang pelaksanaannya bersinergi dengan amal usaha.
- l) Mengintensifkan sosialisasi model kesiapsiagaan perempuan dalam menghadapi yang berbasis pada masyarakat baik melalui lembaga pendidikan maupun komunitas masyarakat.

Keberlanjutan organisasi ‘Aisyiyah juga dilihat dari implementasi program kerja bidang Ekonomi dan ketenagakerjaan, yang bertujuan agar: terbangunnya kesadaran dan perilaku ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan warga ‘Aisyiyah khususnya dan warga masyarakat pada umumnya, meliputi:

- a) Mengembangkan pedoman dan tuntunan pelaksanaan amal usaha di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan dengan berorientasi kepada profesionalisme serta berbasis pada nilai-nilai Islam, sehingga mampu bersaing dengan lembaga ekonomi lain.
- b) Menumbuhkan semangat kewirausahaan melalui pengembangan dan penguatan usaha kecil dan menengah yang dikelola oleh perempuan untuk memperjuangkan hak dan kepentingannya sebagai gerakan pemberdayaan ekonomi umat.
- c) Optimalisasi pendampingan dan pembinaan ekonomi melalui Bina Usaha Ekonomi Keluarga ‘Aisyiyah (BUEKA).
- d) Memperkuat posisi dan kondisi usaha kecil yang dikelola perempuan dalam hal akses dan kontrol terhadap sumberdaya ekonomi.

- e) Membangun solidaritas dengan berbagai pihak dalam melakukan advokasi atas bentuk-bentuk ketidakadilan serta advokasi kebijakan yang berpihak pada kepentingan usaha mikro-kecil.
- f) Melakukan pendampingan terhadap tenaga kerja wanita (buruh) baik buruh migran (bekerja di luar negeri) maupun buruh yang bekerja di dalam negeri seperti pemahaman tentang hak, perlindungan hukum, dan kondisi budaya di tempat kerja maupun pendampingan.

Bidang Pendidikan Politik, bertujuan agar terbangunnya kesadaran perilaku warga negara akan hak dan kewajibannya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mengembangkan pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran masyarakat tentang hak-hak warga negara melalui pengajian, pelatihan, diskusi, kegiatan forum warga, dan media kegiatan lainnya sebagai perwujudan penguatan masyarakat sipil (*civil society*)/masyarakat madani, yaitu: (a) meningkatkan peran kontrol sosial masyarakat terhadap proses pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan secara bijak melalui berbagai saluran; (b) meningkatkan partisipasi politik warga **negara** dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik oleh pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya sesuai dengan hak-hak politik warga, dan (c) mengembangkan jaringan sinergis dengan kader dan simpatisan ‘Aisyiyah yang berada di lembaga pemerintahan, legislatif, yudikatif, dan lembaga negara lainnya untuk meningkatkan peran dakwah ‘Aisyiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

KEBERLANJUTAN ORGANISASI ‘Aisyiyah

Prinsip dasar keberlanjutan sebuah organisasi adalah terletak pada sistem yang bersiklus melalui input dari lingkungan, kemudian memproses input tersebut sesuai dengan tuntutan kebutuhan dari lingkungan agar dapat menghasilkan output seperti yang diharapkan oleh lingkungan eksternalnya. Dalam hal ini, keberlanjutan organisasi ‘Aisyiyah seperti telah dijelaskan di atas bahwa, ‘Aisyiyah merupakan sistem yang otonom terdiri atas unit-unit yang utuh menerima input dalam merespon tuntutan dari lingkungan untuk memproses input tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga menghasilkan output yang diharapkan oleh lingkungan (masyarakat).

Dengan demikian, di balik kemandirian ‘Aisyiyah sebagai sistem yang otonom, juga dapat memelihara keberlanjutan organisasi karena komponen atau sistem yang dimiliki berkembang melalui ketiga aspek yang dimaksud, yaitu input, proses, dan output. Sebagai contoh, sistem atau unit-unit yang mengelola bidang pendidikan, mulai dari Taman Kanak-kanak (TK), SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK, dan Madrasah Aliyah (MA), yang di bawah koordinasi Majelis Dikdasmen melakukan perubahan-perubahan dalam menerima input berupa calon siswa dari lingkungan (masyarakat), kemudian diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu TK diproses selama 2 tahun untuk menghasilkan output calon-calon siswa SD/MI. Kemudian diproses selama 6 tahun untuk menghasilkan output calon-calon siswa SMP/MTs, kemudian melalui proses selama 3 tahun dan menghasilkan output calon-calon siswa SMA/SMK dan MA untuk diproses sesuai dengan mekanisme dan

ketentuan yang berlaku selama 3 tahun, sehingga menghasilkan output calon-calon mahasiswa sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Demikian pula sistem yang mengelola bidang kesehatan, menerima input berupa calon pasien di rumah sakit atau rumah bersalin, kemudian diproses dalam hal ini menjalani perawatan dan pengobatan kesehatan atau persalinan bagi, sehingga menghasilkan output yang diharapkan yaitu para pasien mendapat pelayanan yang baik dan memuaskan sehingga sembuh dari penyakit yang diderita, atau melahirkan dengan baik.

Sementara sistem yang menangani bidang dakwa keagamaan dapat menerima input berupa calon da'i baik di Pesantren maupun lembaga yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan dakwah, untuk diproses sesuai kebutuhan sehingga menghasilkan output yaitu para da'i atau ustadz yang handal yang mampu memberikan cemahan dan dakwah sebagaimana yang diharapkan masyarakat dan pemerintah (lingkungan eksternal). Dengan kata lain, input, proses dan output yang dilakukan oleh lembaga-lembaga dakwah adalah untuk merespon tuntutan perkembangan serta perubahan berbagai aspek, terutama metode, materi dan substansi dakwah yang terus berubah serta berkembang demikian kompleks agar tidak ketinggalan sebagaimana yang dijelaskan pada konteks autopoiesis hubungannya dengan kedudukan atau poisisi 'Aisyiyah yang paradoks agar tetap bertahan dan berlanjut.

'Aisyiyah merespons dinamika lingkungan strategis, baik Muhammadiyah maupun Pemerintah melalui daya kontigensi terhadap berbagai program kerja dan kegiatan yang diemban masing-masing majelis dan lembaga setiap periode. Selain itu, hal yang tidak kalah pentingnya adalah proses perkembangan dan perubahan yang dialami dari period eke periode khususnya operiode 2010/2015. Keberkelanjutan

‘Aisyiyah sebagai salah satu ortom Muhammadiyah bergerak dan berkontribusi memajukan bidang pembinaan dan kaderisasi termasuk anak-anak yang sedang dan akan dibina di Panti Asuhan (PA). Melalui input anak-anak yatim, piatu, anak terlantar, dan anak-anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu atau biasa disebut penyandang masalah sosial untuk diproses atau dibina dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang dialami, serta menghasilkan output yaitu anak-anak yang mandiri dan berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara seperti yang diharapkan. Demikian pula halnya dengan penyandang masalah sosial lain seperti lanjut usia di Panti Jompo dengan input dari lingkungan para usia lanjut (lansia) yang tidak mampu dan terlantar.

Keberlanjutan ‘Aisyiyah karena mampu merespon lingkungan strategis terdekat terutama Muhammadiyah. Selain itu, keberlanjutan tersebut merupakan karunia Allah yang diraih atas kekuatan yang lahir dari keihlasan, komitmen, potensi, dan partisipasi semua warga sebagai gerakan dakwah amar makruf nahi munkar, serta tajdid sehingga selalu menunjukkan semangat tinggi untuk berkiprah konstruktif dalam kehidupan. Dengan demikian, keberlanjutan merupakan daya kontigensi dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan strategis serta kepercayaan dan dukungan berbagai pihak yang memiliki komitmen yang sama dalam mewujudkan visi dan tujuan organisasi.

Kemandirian ‘Aisyiyah Kota Makassar karena mampu mengelaborasi tiga aspek utama organisasi, yaitu medan visional yang telah dipahami oleh semua anggota serta menjadi pegangan dalam melaksanakan semua kegiatan dan program kerja ‘Aisyiyah dengan tetap memposisikan diri paradoks independensi, serta berautoposis menyesuaikan diri dari fase ke fase; dari waktu ke waktu seiring

perubahan dan perkembangan sejak didirikan hingga sekarang. Sementara ditinjau dari aspek keberlanjutan, 'Aisyiyah terus berkembang dan berlanjut karena telah melakukan tiga hal penting dengan baik, yaitu input, proses, dan output yang diterima dari lingkungan strategis melalui program kerja setiap majelis dan lembaga seperti dalam periode (2010-2015).

Majelis Tabligh, program kerja yang direalisasikan sebagai respon dari lingkungan strategis meliputi: (a) mengintensifkan pembinaan aqidah, akhlak, dan ibadah di kalangan 'Aisyiyah dan masyarakat melalui pengajian serta kajian-kajian; (b) mengintensifkan kajian tafsir al-Qur'an dan Hadist bagi anggota, kader dan pimpinan 'Aisyiyah; (c) memasyarakatkan pelaksanaan kehidupan sehari-hari berdasarkan pedoman kehidupan Islam sesuai tuntunan tarjih Muhammadiyah; (d) meningkatkan dan mengembangkan kemampuan muballigh dalam berbagai aspek, seperti penguasaan metode, materi, serta strategi da'wah; (e) meningkatkan fungsi mesjid, mushallah dan sarana dakwah lainnya sebagai pusat kegiatan Tabligh (penyiaran Islam secara terprogram), dan (f) mengintensifkan program pembelajaran al-Qur'an bagi anggota 'Aisyiyah.

Tujuan yang ingin diwujudkan melalui program-program di atas ialah "Terbangunnya kualitas aqidah, akhlak, ibadah, dan muamalah kalangan umat, atau masyarakat luas yang berlandaskan al-Qur'an dan as-Sunnah melalui pesan-pesan yang bersifat pencerahan dan kemajuan". Upaya untuk mencapai tujuan tersebut, maka proses kegiatan yang dilakukan meliputi: (1) Pengajian tentang aqidah, akhlak, dan ibadah; (2) Sosialisasi tentang pedoman kehidupan Islami sesuai HTP; (3) Pelatihan muballigh secara berkala, dan (4) Memfungsikan mesjid dan mushallah pada setiap kegiatan.

Terkait dengan program kerja Majelis Tabligh PDA Kota Makassar, dalam pembinaan keluarga ialah meliputi: (a) meningkatkan dan menguatkan pembinaan keluarga dengan basis nilai-nilai agama untuk membentuk manusia yang memiliki iman, mentalitas dan karakter yang kuat; (b) meningkatkan dan mengintensifkan peran keluarga (orang tua) sebagai pendamping anak dalam beradaptasi dengan media dan informasi, dan (c) sosialisasi Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak, dan UU tentang penghapusan KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga).

‘Aisyiyah melalui program kerja Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), yaitu: (a) meningkatkan kualitas dan kreativitas penyelenggaraan pendidikan dasar tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK) ‘Aisyiyah dalam wilayah Kota Makassar; (b) menjadi lembaga pendidikan ‘Aisyiyah sebagai basis kaderisasi yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan; (c) meningkatkan kualitas pendidikan melalui jenjang pendidikan, forum diskusi dan berbagai cara yang lain yang telah digariskan; (d) meningkatkan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan sesuai kemampuan organisasi berdasarkan kinerja, komitmen dan pengabdian terhadap ‘Aisyiyah di Kota Makassar; (e) membuat data base sebagai pusat informasi dan basis pengembangan pendidikan ‘Aisyiyah di Kota Makassar, dan (f) penggunaan administrasi anak didik dan organisasi.

Tujuan yang ingin dicapai melalui program kerja dan kegiatan di atas sebagai wujud keberlanjutan organisasi ialah untuk meningkatkan kualitas keunggulan ‘Aisyiyah sebagai strategi pembentukan manusia yang utuh, berilmu dan berkarakter sesuai tujuan pendidikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka kegiatan yang dilakukan meliputi: (1) kunjungan pembinaan dan supervise langsung terhadap amal usaha yang

dibina oleh 'Aisyiyah Kota Makassar; (2) mengikutsertakan pendidikan dan latihan kepada tenaga kependidikan terhadap setiap kegiatan yang dilakukan 'Aisyiyah; (3) penataran/pelatihan kurikulum dan pembahasan ke 'Aisyiyahan dan ke Muhammadiyah; (4) melaksanakan seminar tentang pendidikan pengurus dan guru-guru; (5) menetapkan kesejahteraan setiap pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kondisi lembaga (amal usaha) masing-masing; (6) memberikan penghargaan terhadap guru yang memiliki masa kerja 10 tahu ke atas; (7) membuat data base (anak didik, guru dan pengurus); (8) menggunakan administrasi anak (peserta) didik seperti: Ijazah, laporan pendidikan, buku induk; (9) membuat RAPBO/ RAPBS, dan (10) menetapkan uang infaq siswa Rp 3000/Tahun/Anak, dengan ketentuan sebagai berikut: (a) Pimpinan Cabang 'Aisyiyah (PCA) = 40%; (b) Pimpinan Daerah 'Aisyiyah (PDA) = 35%; (c) Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah (PWA) = 15%, dan (d) PPA Pimpinan Pusat 'Aisyiyah = 10%; (11) menetapkan dana pembinaan organisasi tingkat daerah Rp. 5000/Tahun/Anak, dan (12) Zakat Profesi.

'Aisyiyah sebagai salah satu organisasi dakwah keagamaan, sosial dan budaya dalam era reformasi tidak terlepas dari krisis multikompleks, dan multidimensional yang muncul antara lain dalam bidang keuangan, politik, hukum yang dialami oleh masyarakat Sulawesi Selatan khususnya Kota Makassar dari hari ke hari terus berlangsung dan berkepanjangan. Namun, 'Aisyiyah telah menunjukkan kemampuannya dalam mengelola daya kontigensi amal usaha yang dikelola melalui program kerja secara berkelanjutan termasuk Lembaga Kebudayaan, sebagai salah satu dari dua lembaga 'Aisyiyah yang dibentuk seiring dengan perkembangan dan perubahan, merespon lingkungan strategis

terutama untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi sehingga ‘Aisyiyah terus berkembang dan berlanjut.

Keberlanjutan organisasi ‘Aisyiyah Kota Makassar dalam merespons lingkungan strategis serta persoalan yang dihadapi dengan langkah konkrit. Dalam Sidang Tanwir ‘Aisyiyah 2010 mengimplementasikan semua program kerja masing-masing majelis dan lembaga serta membulatkan sikap dan tekad, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, dalam era yang penuh dengan kompetisi (persaingan) segenap komponen bangsa, terutama warga ‘Aisyiyah, dituntut untuk lebih cerdas dalam menanggapi serta memecahkan persoalan-persoalan bangsa. Situasi krisis multidimensi yang dialami hubungannya dengan program kerja masing-masing majelis dan lembaga telah direspon sebagaimana yang diharapkan.

‘Aisyiyah tetap eksis karena mampu merespon perubahan lingkungan strategis, khususnya dalam satu dekade terakhir antara lain menangani berbagai persoalan yang dihadapi perempuan seperti kekerasan, diskriminasi termasuk KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) memberi kesempatan kepada semua majelis dan lembaga di bawah koordinasi Majelis Hukum dan HAM untuk menanggapi isu yang berkembang dengan langkah-langkah konkrit. Misalnya, masalah gender hubungannya dengan kedudukan perempuan dalam Islam.

‘Aisyiyah sebagai organisasi perempuan pertama di Indonesia terus berbenah diri menyesuaikan dengan perkembangan, terutama masalah-masalah yang dihadapi dewasa ini semakin kompleks. Namun, ‘Aisyiyah tetap menyadari keberlanjutan organisasi ini prinsip dasar dan azas yang dikembangkan bersumber dari al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Karena itu, dalam mengatasi persoalan perempuan baik diskriminasi, KDRT atau bentuk kekerasan lain yang dialami perempuan

apalagi dikaitkan dengan gender, maka ‘Aisyiyah perlu mengkaji ulang berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah tentang kedudukan, hak, dan kewajiban perempuan dalam Islam. Dengan demikian, ‘Aisyiyah merespon lingkungan strategis tidak hanya program rutinitas tetapi juga mengikuti perkembangan regional, nasional maupun global.

Konsekuensi dari pilihan gerakan ‘Aisyiyah Kota Makassar, terutama dilihat dari kualitas kegiatan bahwa peningkatan perhatian terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik pimpinan maupun segenap warganya, peningkatan kualitas kegiatan, dan kualitas organisasi. Kepedulian ‘Aisyiyah dan kepekaan terhadap isu-isu sosial dalam segenap aspek kehidupan. Isu-isu yang berkembang dalam masyarakat dari fenomena-fenomena sosial menjadi sasaran garapan ‘Aisyiyah, antara lain bidang ekonomi, bidang yang fenomenal (isu gender), dan bidang sosial dalam meningkatnya kualitas dan kuantitas yang berdampak pada kehidupan masyarakat.

Fakta lain yang menunjukkan bahwa, ‘Aisyiyah merespon berbagai persoalan dari lingkungan strategis juga dijelaskan oleh Sekretaris PDA Kota Makassar, bahwa seiring dengan perubahan bidang-bidang strategis, maka ‘Aisyiyah mengubah bidang kerja TKI/TKW dan PRT menjadi tenaga ahli. Hal ini karena ‘Aisyiyah memiliki potensi untuk menyelenggarakannya. Demikian pula bidang pendidikan, seperti TK, SD dan pendidikan formal. ‘Aisyiyah menyelenggarakan sekolah unggulan, dengan program beasiswa menjadi hal yang penting. Program beasiswa dalam hal ini merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan, untuk merespon tuntutan kelompok masyarakat yang tidak mampu mendapatkan pendidikan yang layak. Program kerja dalam Sidang Tanwir ‘Aisyiyah 2010-2015; yang memberikan beasiswa bagi anak-anak yang memerlukan keberlanjutan studi. Program ini ditindak lanjut oleh

semua Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah sebanyak 33 PWA di seluruh Indonesia, disediakan beasiswa Rp. 300 ribu untuk siswa di tingkat cabang. Program ini kemudian direalisasikan PDA Kota Makassar dalam 25 cabang yang tersebar di 14 kecamatan. Selain program-program kerja dalam bidang pendidikan ini, ‘Aisyiyah juga menyelenggarakan pendidikan luar sekolah, seperti Pendidikan Luar Sekolah (PLS). Program PLS yang dilaksanakan oleh Majelis Dikdasmen PDA Kota Makassar sebagai respon atas perkembangan dan tuntutan dari lingkungan strategis, sekaligus untuk menjawab besarnya jumlah drop out yang dialami anak-anak usia sekolah. Hal ini menunjukkan ‘Aisyiyah sebagai organisasi sosial budaya yang memiliki lembaga pendidikan yang tetap eksis dan mampu menyediakan paket-paket pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan kebutuhan anak-anak dari masyarakat yang tidak mampu (putus sekolah). Penyelenggaraan paket-paket semacam ini telah menjadi “profesi ‘Aisyiyah” selama ini. Tentu harus dijawab dengan langkah konkrit bagi ‘Aisyiyah.

Selain bidang pendidikan yang merupakan program andalan sejak organisasi ini didirikan di Kota Makassar, juga dalam bidang hukum yang fenomenal antara lain dipicu oleh hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pengadilan dengan tindak kekerasan, terutama kepada perempuan yang lepas dari tindakan hukum. Karena itu, ‘Aisyiyah menyelenggarakan lembaga *Crisis Centre* untuk menghadapi berbagai macam kekerasan. Selain masalah-masalah di atas yang bersifat lokal (Kota Makassar), masalah-masalah yang bersifat nasional, dan global/internasional, sebagai bentuk kepedulian (respons) ‘Aisyiyah terhadap permasalahan di lingkungan eksternal (masyarakat dan bangsa). Dalam hal ini ‘Aisyiyah Kota Makassar setelah reformasi (1998), meskipun secara relatif menunjukkan kemajuan demokrasi, pertumbuhan

ekonomi, dan stabilitas politik. Namun demikian, ‘Aisyiyah sebagai ortom Muhammadiyah selama sepuluh tahun terakhir sejak Mukhtamar 2005 merespons berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, baik yang menyangkut politik, ekonomi, hukum, maupun sosial dan budaya yang krusial dan memerlukan pemecahan yang komprehensif.

Respons ‘Aisyiyah sebagai organisasi modern yang tetap konsisten terhadap visi dan misi gerakan sosial keagamaan, terutama di tingkat pusat sekaligus sebagai bentuk kepatuhan ‘Aisyiyah kepada Muhammadiyah yang direalisasikan di tingkat daerah, khususnya di Kota Makassar dalam rangka merespons perkembangan politik global menuju era dunia yang lebih adil dan damai, tetapi dalam praktik masih ditandai oleh hubungan antar negara terutama antar negara maju dengan sedang berkembang yang masih belum adil dan terjadi hegemoni kekuatan negara-negara besar yang merugikan masyarakat negara-negara sedang berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Globalisasi cenderung menjadi alat kekuatan ekonomi dan politik internasional yang semakin memperluas cengkeraman kapitalisme global dan hadirnya neoliberal yang memporak-porandakan kekuatan nasional dan lokal di negara-negara sedang berkembang, terutama Indonesia.

Meluasnya gaya hidup global yang membawa sikap hidup bebas seperti pornografi, perilaku asusial, penghargaan yang berlebihan terhadap materi (materialisme) dan kesenangan duniawi (hedonisme), permisivisme, kebebasan tanpa batas nilai (liberalisme/nihilisme), dan budaya populer yang bertentangan dengan norma-norma agama, moral, dan budaya Indonesia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di satu sisi memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, namun di sisi lain juga membawa dampak negatif terhadap masyarakat dan mempengaruhi perkembangan kebudayaan nasional maupun lokal Indonesia. Dampak

negatif yang dimaksud, adalah terbukanya kecenderungan materialisme (faham kebendaan), sekularisme (memisahkan urusan dunia dengan nilai-nilai agama), hedonisme (memuja kesenangan duniawi), dan pragmatisme (mementingkan nilai kegunaan) yang meminimalisasikan, serta menihilkan nilai-nilai luhur, moral spiritual, dan norma-norma agama.

Berikut ini sekilas tentang fase-fase perkembangan 'Aisyiyah sebagai organisasi perempuan di Indonesia, termasuk Kota Makassar. Sebagaimana diketahui bahwa 'Aisyiyah Kota Makassar didirikan tahun 1926, tepatnya 9 tahun setelah 'Aisyiyah Pusat didirikan (1917) di Yogyakarta. Pertumbuhan yang demikian cepat ini tidak terlepas dari kerja keras para pengurus dan pimpinannya yang tanpa pamrih kecuali hanya mengharap ridha Allah swt., dan meyakini bahwa mengurus organisasi 'Aisyiyah merupakan pekerjaan mulia. Hal ini diperkuat beberapa informan, bahwa perkembangan 'Aisyiyah yang demikian cepat merupakan penanam pendidikan yang baik. Organisasi ini diminati para anggota karena gerak langkahnya merupakan amal ibadah kepada Allah. Azas maupun tujuannya jelas. Melalui organisasi 'Aisyiyah, para remaja perempuan dan ibu-ibu yang telah berumah tangga berbuat dan berkarya dimana organisasi ini berakidah Islam.

Organisasi ini bagi umat Islam bukanlah tempat berjuang yang sia-sia, tetapi dijadikan media untuk beramal. Azas dan tujuan organisasi didasarkan prinsip bahwa Islam itu harus dikembangkan. Pendidikan untuk menghadapi masa depan perempuan harus diperluas. Dalam hal ini, Nyai Ahmad Dahlan sebagai pendiri 'Aisyiyah pertama bersama-sama dengan Muhammadiyah telah berkembang lebih maju dalam berbagai aspek. Pondok atau asrama yang hanya untuk mendidik wanita-wanita terus dikembangkan. Pendidikan yang dirintis Nyai Ahmad Dahlan

benar-benar telah tampak hasilnya. Mereka yang telah digembleng dalam ‘Aisyiyah bangkit sebagai generasi penerus yang percaya pada kemampuan sendiri. Selanjutnya mereka mengamalkan pendidikan yang telah diperoleh dalam mengembangkan ‘Aisyiyah. Dalam hal ini, fase-fase perkembangan ‘Aisyiyah secara dibagi dalam tiga fase.

A. Fase Pra Kemerdekaan (17 Agustus 1945)

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa ‘Aisyiyah Kota Makassar didirikan pada Tahun 1926 (sebelum kemerdekaan 17 Agustus 1945), yaitu 9 tahun setelah ‘Aisyiyah Pusat diresmikan (1917) di Yogyakarta. Amal Usaha ‘Aisyiyah dijadikan modal dan diteruskan sebagai pedoman gerak langkah organisasi. Hal ini telah mendorong ‘Aisyiyah untuk lebih memperhatikan pendidikan kaum wanita. Tiap-tiap cabang ‘Aisyiyah dalam wilayah Makassar diharapkan dapat mengurus anak-anak di wilayahnya, seperti asrama dan lain-lain. Kesempatan untuk anak-anak perempuan bersekolah sekarang ini menumbuhkan kesyukuran ‘Aisyiyah bahwa rintisan Nyai Ahmad Dahlan dahulu diteruskan dan dikembangkan hingga menjelang satu abad, tetap eksis dan terus berlanjut.

Perkembangan selanjutnya, amal usaha rintisan K.H. Ahmad Dahlan dan Nyai Ahmad Dahlan baik di pusat maupun di daerah, khususnya di Kota Makassar telah menjadi keputusan Mukhtar dengan dibukanya sekolah-sekolah kejuruan, antara lain: Sekolah Bidan, Sekolah Perawat, Sekolah Kepandaian Puteri, Sekolah Guru Kepandaian Puteri, Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak, dan lain-lain. Usaha ini merupakan dorongan dan semangat ‘Aisyiyah untuk memperhatikan kemajuan puteri-puteri pada umumnya dan gadis-gadis khususnya agar kelak mengganti meneruskan amal usaha yang telah didirikan. Generasi muda

inilah yang diharapkan mengemudikan gerak langkah organisasi ‘Aisyiyah dengan sebaik-baiknya.

Keberlanjutan ‘Aisyiyah Kota Makassar dalam merespon lingkungan strategis dengan memperluas amal usaha yang ada, antara lain membuka Rumah Sakit Bersalin. Program ini bersifat pendidikan atau kemasyarakatan sebagai wujud semakin majunya pemikiran, pengetahuan dan pengalaman maka dalam penyampaian agama Islam bukan hanya melalui pengajian, tetapi juga melalui pendirian panti-panti asuhan, sekaligus dapat dijadikan media dakwah untuk membantu bidang sosial dan kemasyarakatan sehingga tercapai sasaran organisasi yang lebih baik.

Terkait dengan perkembangan ‘Aisyiyah pada masa penjajahan, maka dibentuk gerakan kepanduan, yaitu Padvinders Muhammadiyah. Kemudian atas usul Hajid nama pandu itu diganti menjadi Hizbul Wathon. Pembentukan organisasi siswa praja sebagai wadah kegiatan ekstra kurikuler bagi seluruh siswa sekolah Muhammadiyah. Terbentuknya kelompok-kelompok pengajian remaja putri, orang dewasa, dan ibu-ibu rumah tangga sehingga mendorong perkembangan dan kemajuan ‘Aisyiyah termasuk di Kota Makassar. Selain itu, setelah berdiri secara resmi ‘Aisyiyah di Kota Makassar, remaja putri lulusan sekolah Muhammadiyah dikirim ke seluruh pelosok Sulawesi Selatan dalam upaya mengembangkan visi dan misi ‘Aisyiyah.

Fase perkembangan ‘Aisyiyah Kota Makassar semakin pesat setelah Kongres Muhammadiyah ke-21 (1935) diselenggarakan di Makasar, yang memutuskan supaya Muhammadiyah menerbitkan surat kabar (*dagblaad*). Pelaksanaannya diserahkan kepada Pengurus Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah Cabang Solo. Kemudian sekolah lima tahun yang akan menyambung ke MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs yang setingkat SLTP saat ini) bagi murid tamatan

vervolgsschool atau standaardschool kelas V. Dalam sekolah-sekolah Muhammadiyah ini juga dipakai bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Sekolah-sekolah Muhammadiyah saat itu merupakan salah satu lembaga pendidikan yang didirikan pribumi yang dapat menyamai kemajuan pendidikan sekolah Belanda, sekolah Katolik, dan sekolah Protestan. Dalam hal ini, lembaga-lembaga pendidikan formasi yang dirintis oleh 'Aisyiyah dan Muhammadiyah pada masa penjajahan (pra kemerdekaan) merupakan satu-satunya lembaga pendidikan bagi pribumi, untuk semua lapisan masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang diharapkan.

B. Fase Kemerdekaan (17 Agustus 1945)

Fase perkembangan 'Aisyiyah sebagai orotom Muhammadiyah pasca kemerdekaan (17 Agustus 1945), memberikan perhatian dan pembinaan sehingga konsep kemandirian organisasi ini masih dalam proses perjuangan. Sidang darurat Muhammadiyah pada tahun **1947**, 'Aisyiyah belum memiliki status otonom tetapi garis perjuangan 'Aisyiyah tetap konsisten mendukung perjuangan Muhammadiyah hingga tahun 1950, Majelis 'Aisyiyah diganti menjadi Pimpinan Pusat (PP) 'Aisyiyah, tepatnya tanggal 21 – 26 Desember 1950 dalam Kongres XXXI atau Muktamar I yang berlangsung di Yogyakarta. Beberapa keputusan penting yang dihasilkan dalam Muktamar ini, yaitu:

- a. Mendorong dan bekerjasama dengan pemerintah untuk memperbaiki kerusakan akhlak.
- b. Bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, terutama pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan kesehatan rakyat.

- c. Menyediakan *studiefonds* untuk membiayai para pelajar yang sekolah di luar negeri, dan mendirikan Universitas Muhammadiyah.
- d. Menghormati organisasi lain yang non-Islam selama tidak merugikan dan bersedia bekerjasama, saling menghargai agar tidak terjadi salah paham yang dapat merugikan perjuangan pokok Islam.
- e. Muhammadiyah dan/atau 'Aisyiyah, baik sebagai organisasi maupun perorangan diperkenankan menjadi anggota DPR.

Tahun 1963 Nasyyatul 'Aisyiyah (NA) diberi status otonom lepas dari 'Aisyiyah. Ahmad Badawi diangkat menjadi Penasehat Pribadi Presiden di bidang agama. Berbagai gerakan dan aksi perjuangan yang dilakukan K.H. Fakhruddin adalah dalam rangka memperbaiki nasib dan kondisi umat serta bangsa Indonesia dari lumpur kebodohan, kehinaan dan ketertindasan di tangan penjajahan kolonial Belanda. Atas jasanya dalam perjuangan, Pemerintah RI memberinya penghargaan sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional berdasarkan keputusan Presiden RI Nomor 162/1964. Kemudian penangkapan dan penahanan HAMKA hingga 1966, Hamka dipenjarakan oleh Presiden Soekarno karena dituduh pro-Malaysia. Dalam penjara beliau menulis Tafsir al-Azhar yang merupakan karya terbesarnya.

Fase perkembangan 'Aisyiyah dalam masa pemerintahan Orde Baru (1966 – 1998), mengalami dinamika perkembangan yang ditandai dengan pasang surut perubahan dan kemajuan, antara lain tanggal 16 Agustus 1966 Badan Koordinasi Amal (Muslimin) terbentuk. Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi pendukung utama dari 16 organisasi yang tergabung dalam badan ini. Dengan demikian 'Aisyiyah sebagai ortom Muhammadiyah menyesuaikan diri dengan

perkembangan dan perubahan yang dilakukan Muhammadiyah sebagai induk organisasi.

Perubahan mendasar yang pernah dialami 'Aisyiyah semasa rezim pemerintahan Orde Baru, adalah perubahan azas organisasi yang dilakukan Muhammadiyah, yang sebelumnya berazaskan agama Islam; berpedoman pada al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw, berubah menjadi azas tunggal yaitu Pancasila dan UUD 1945 sesuai dengan UU yang berlaku. Perubahan yang dilakukan 'Aisyiyah sebagai wujud respon atas lingkungan strategis dalam memelihara keberlanjutan organisasi.

Fase selanjutnya Ahmad Badawi diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung. Faqih Usman bersama Hasan Basri, mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Anwar Haryono, mantan Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia mengirim nota politik kepada pemerintah Orde Baru, yang dikenal dengan Nota KH. Faqih Usman; isinya permintaan agar Pemerintah Orde Baru merehabilitasi Masyumi sebagai partai terlarang. Hal ini terkait dengan "medan visional" yang ditulis para tokoh Muhammadiyah, terutama Ustadz K.H. Ahmad Azhar Basyir, MA Ketua PP Muhammadiyah (1990-1995), secara khusus menulis Misi Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam. Muktamar Muhammadiyah di Banda Aceh (**1995**), terpilihnya Prof. DR. H. M. Amien Rais, MA sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah. Wilayah kerja Majelis Tarjih tidak saja di bidang fikih, namun juga pengembangan pemikiran Islam. Karena itu, majelis ini sejak Muktamar Aceh berganti nama menjadi Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (MTPPI).

C. Fase Reformasi (1998)

Fase reformasi (1998), adalah fase dimana berakhirnya kekuasaan rezim Orde Baru yang ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Setelah mundurnya Presiden Soeharto Wakil Presiden BJ. Habibie, menerima mandat sebagai Presidensi RI keempat menggantikan Soeharto. Sejumlah agenda reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, terutama kehidupan politik, ekonomi, hukum, dan sosial budaya mewarnai perjalanan reformasi yang kini memasuki kurang lebih 15 tahun. Fase ini bagi 'Aisyiyah sebagai ortom Muhammadiyah cukup penting, karena sejumlah petinggi Muhammadiyah merupakan penggerak reformasi sehingga perubahan yang terjadi sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah. Sebagaimana diketahui bahwa, Prof. Dr. H.M. Amien Rais, MA merupakan tokoh utama reformasi, ketika itu sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.

Fase reformasi yang terkait dengan keberlanjutan 'Aisyiyah, seperti dijelaskan di atas bahwa tokoh utama reformasi Amien Rais sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah mengambil langkah untuk terlibat langsung dalam politik praktis. Maka Prof. Dr. H. Ahmad Syafii Maarif sebagai Ketua Umum menggantikan Prof. Dr. H.M. Amien Rais, MA yang meletakkan jabatan karena memimpin Partai Amanah Nasional (PAN), sebagai lanjutan dari amanat reformasi. Kemudian Tahun **2000** Mukhtar XLIV Muhammadiyah di Jakarta, terpilih kembali Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif sebagai Ketua Umum. Kemudian Tahun **2002** Tanwir Muhammadiyah di Denpasar Bali, tanggal 24 s/d 27 Januari 2002 menyepakati perlunya Muhammadiyah menyiapkan kader terbaiknya sebagai pemimpin nasional (Khittah Kehidupan Berbangsa dan Bernegara). Sidang Tanwir membahas Khittah Muhammadiyah dalam

berbagai persoalan, termasuk rekomendasi Muhammadiyah bagi kemajuan bangsa dan negara. Masalah lainnya, adalah pembahasan tentang Bank Persyarikatan, di mana akan diputuskan apakah manajemen perbankan dapat diselenggarakan secara syariah atau secara konfesional.

‘Aisyiyah sebagai ortom Muhammadiyah melakukan perubahan dan penyesuaian baik struktur maupun program. Sidang Tanwir 2009, di Bandar Lampung merupakan Sidang Tanwir kedua di era reformasi jelang Muktamar yang ke-46 di Yogyakarta pertengahan tahun 2010. Sidang Tanwir 2009 memiliki tujuan antara lain dihasilkannya keputusan untuk meningkatkan peran Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah sebagai Gerakan Islam, Dakwah Amar Makruf Nahi Munkar dalam membangun kembali visi dan karakter bangsa, di tengah pergulatan bangsa-bangsa lain yang semakin maju. Sidang Tanwir 2009 dilaksanakan menjelang Pemilu 2009 dimana suasana politik Indonesia menghangat. Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah memberikan rekomendasi terkait Pemilu 2009, antara lain:

- a. Mendesak partai politik dan seluruh komponen untuk tidak menjadikan Pemilu 2009 sebagai ajang perebutan kursi kekuasaan yang menjurus pragmatisme dan menghalalkan segala cara. Pemilu harus dijadikan momentum untuk menghasilkan anggota legislatif, presiden dan wakil presiden yang bertanggung jawab dalam menjalankan amanat rakyat, mengurus pemerintahan dengan benar, menghasilkan kebijakan yang pro-rakyat kecil, menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan dan etika publik, membangun kepercayaan, tidak menggunakan aji mumpung dalam melaksanakan kekuasaan yang dimilikinya.
- b. Muhammadiyah menyerukan kepada segenap komponen untuk memilih pemimpin nasional yang memiliki: (1) visi, misi dan

karakter yang kuat sebagai negarawan yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan; (2) berani mengambil berbagai keputusan penting dan strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak (umat), mampu menyelesaikan persoalan-persoalan krusial bangsa secara tegas, serta melakukan penyelamatan aset dan kekayaan negara, dan (3) mampu menjaga kewibawaan dan kedaulatan nasional dari berbagai ancaman baik di dalam maupun di luar negeri, serta mampu mewujudkan *good governance* termasuk melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu; dan (4) melepaskan jabatan di partai politik apapun dan berkonsentrasi dalam memimpin bangsa dan negara.

Banyak perubahan yang harus dilakukan ‘Aisyiyah dalam reformasi, baik struktur organisasi maupun program-program kerja terutama dalam bidang politik. Langkah perubahan perlu dilakukan merespon lingkungan strategis khususnya Muhammadiyah termasuk keterlibatan kader-kader terbaik ‘Aisyiyah dalam politik praktis. Dengan catatan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan organisasi, diantaranya melepaskan jabatan di ‘Aisyiyah jika mengambil keputusan untuk terlibat dalam politik praktis seperti pengurus partai, dan lain-lain sebagaimana langkah yang diambil oleh Amien Rais. Selain itu, quota 30% perempuan dalam legislatif perlu dipertimbangan pengurus, dengan ketentuan tidak membawa nama organisasi karena kader-kader ‘Aisyiyah harus tetap konsisten menjaga dan memelihara kemandirian dan keberlanjutan organisasi.

Selain masalah politik praktis yang menjadi isu hangat awal reformasi, juga masalah yang terkait dengan responsif gender sebagai kebutuhan yang tidak bisa dikesampingkan. Dalam hal ini, konsep gender sebagai konstruksi peran sosial ditinjau dari sosiologis. Reformasi

pemikiran di berbagai bidang khususnya peran perempuan merupakan ciri gerakan pembaruan. Demikian dapat ditegaskan bahwa "Kita tidak melupakan kodrat perempuan atau ingin mendominasi laki-laki, tapi yang kita minta adalah dilibatkan dalam peran kebangsaan, yakni 'Aisyiyah memainkan peran bagi seluruh bangsa. Kalau perempuan dilibatkan, akan lebih sempurna". Penegasan ini menunjukkan bahwa, budaya global dan Ideologi globalisasi yang semakin meluas ditandai dengan paham dan sikap hidup masyarakat yang sangat mengagungkan materi dan kesenangan inderawi.

Perlu dipahami bahwa, respon 'Aisyiyah dalam aplikasinya terhadap globalisasi lebih cenderung melahirkan manusia-manusia yang berwatak materialis, individualis, egois, hedonis dan bahkan materialis. Pengagungan manusia terhadap nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan bergeser menjadi pengagungan manusia terhadap nilai-nilai materi dan kekayaan. Watak dan karakter manusia yang demikian, jauh sebelumnya sudah ditantang dan dikritik keras oleh Aristoteles. Menurut Filusuf ternama ini, "Bahwa semakin tinggi penghargaan manusia terhadap kekayaan dan materi, maka semakin rendahlah penghargaan manusia terhadap nilai-nilai kemanusiaan, kesusilaan, kebenaran, kejujuran, dan keadilan".

Sikap individualisme secara diam-diam akan menyertai paham yang memutlakkan materialisme. Karena itu tidak heran jika penyebaran ideologi globalisasi ke dalam struktur sosial masyarakat, beriringan dengan retaknya etika, moralitas serta ikatan sosial yang sudah lama terbangun dalam kultur sosial masyarakat. Dasar-dasar, nilai-nilai keagamaan, kultural lambat laun namun pasti mulai terkikis seiring kuatnya hegemoni ideologi globalisasi dalam seluruh struktur sosial yang ada, mulai dari level negara, organisasi sosial keagamaan dan

kemasyarakatan, hingga pada level keluarga. Bahkan tidak asing lagi, jika ideologi yang sangat menganut paham materialisme dan rasionalisme mutlak ini, juga mendorong terjadinya proses liberalisasi agama sebagai komoditas pasar yang diperjualbelikan, diiklankan dan dicitrakan dalam berbagai bentuk demi kepentingan ekonomis dan status sosial.

Masalah lain yang tidak luput dari respons ''Aisyiyah Kota Makassar, karena sangat memprihatinkan adalah praktek pornografi yang tersebar di ruang publik yang diproduksi dan tersebar secara meluas di media masa dan dunia maya yang vulgar dan menjadi komoditi.

Masalah-masalah yang dihadapi dalam reformasi sangat kompleks sehingga ''Aisyiyah sebagai organisasi sosial keagamaan, merasa perlu untuk melakukan gerakan dan tindakan nyata melalui program-program kerja sebagai bentuk kepedulian dan respon terhadap masalah-masalah tersebut, agar tidak menimbulkan pengaruh negatif terhadap masyarakat khususnya generasi muda. Masalah ini diperparah oleh makin terbukanya sajian-sajian televisi, media cetak dan media lainnya yang menampilkan sikap kekerasan, perilaku permisif, serta hal-hal yang dapat melemahkan mental dan nilai budaya lokal maupun nasional. Permasalahan tersebut akan merusak nilai-nilai yang substansi dari ajaran agama sekaligus menjauhkan fungsi sosial dan kemanusiaan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, peran dan fungsi ''Aisyiyah dalam memberdayakan masing-masing majelis dan lembaga untuk mengatasi berbagai persoalan dalam reformasi sangat diperlukan.

Pola kehidupan masyarakat yang demikian harus dibendung melalui kegiatan-kegiatan pendidikan rohani dan religius dengan pendekatan baru sehingga dapat membangkitkan dan menampilkan kesalehan manusia secara individual dan kolektif, serta tercipta peradaban yang Islami dan mengontrol peradaban seiring dengan dinamika

kehidupan manusia. Agama dalam hal ini harus mampu menawarkan ajaran yang dapat menyembuhkan masalah sosial, kultural sekaligus menjadi landasan moral dan spiritual bagi terbentuknya kebudayaan dan peradaban yang membawa keselamatan hidup umat manusia. Masalah budaya lainnya yang masih menjadi kendala khususnya dalam pemberdayaan perempuan adalah masih kuatnya budaya patriarki dalam masyarakat. Budaya ini cenderung menegaskan posisi perempuan, melahirkan diskriminasi, dan relasi-relasi bias gender, yang bertentangan dengan peradaban mulia umat manusia dan ajaran agama Islam.

Kehidupan demokrasi mengalami kemajuan yang pesat, tetapi terjadi kecenderungan demokrasi prosedural yang tidak diimbangi dengan bentuk demokrasi substantif, sehingga kualitas dan perilaku berdemokrasi cenderung pragmatis serta mengalami penurunan terutama nilai-nilai moral. Respons 'Aisyiyah dalam menjaga keberlanjutan terhadap dinamika organisasi internal (lingkungan strategis Muhammadiyah) dan organisasi eksternal (lingkungan strategis Pemerintah) dalam kehidupan berdemokrasi cenderung menganut paham demokrasi liberal, sehingga dalam jangka panjang akan menimbulkan persoalan termasuk dalam hubungan moral dan agama. Dalam konteks ini, 'Aisyiyah yang sebelumnya berlandaskan agama Islam dan berpedoman kepada al-Qur'an menerima Pancasila sebagai azas tunggal sesuai dengan UU yang berlaku seolah kehilangan dasar orientasi nilai-nilai moral dalam membingkai demokrasi. Demikian halnya kecenderungan demokrasi liberal yang tampak menguat dalam mengembangkan otonomi dan melaksanakan pemilihan kepala daerah.

Respons 'Aisyiyah terhadap masalah-masalah yang berskala nasional maupun lokal tersebut, sebagai wujud keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah di dalam merespon lingkungan strategis secara internal dan

secara eksternal. Dalam hal sistem politik multipartai di Kota Makassar semakin menunjukkan kerancuan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, disertai dengan perilaku elite politik dan parpol yang pragmatis, yakni orientasi politik yang berpusat pada kekuasaan semata sehingga menghalalkan segala cara juga menjadi sorotan ‘Aisyiyah dalam Pemilu Legislatif maupun Pilkada.

Keberlanjutan ‘Aisyiyah dalam reformasi selama kurang lebih 15 tahun juga direalisasikan melalui program kerja Majelis Kesehatan, meliputi: (a) meningkatkan kualitas SDM dalam bidang kesehatan melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan; (b) upaya penurunan angka kematian bayi dan balita melalui imunisasi ASI Eksklusif dan pemberian gizi seimbang; (c) meningkatkan pemberdayaan masyarakat, perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan keluarga, amal usaha, tempat umum, dan tempat ibadah; (d) promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit menular seperti malaria, TB dan penyakit lainnya, dan (e) meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam peningkatan peran ‘Aisyiyah terhadap kualitas kesehatan masyarakat.

Meningkatkan kualitas pembinaan dan pemberdayaan masyarakat luas secara khusus bagi perempuan dan anak berbasis pada al-Qur’an Surat Al-Ma’un. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan meliputi: (1) senam lansia (lanjut usia); (2) pelatihan perawatan kulit bayi; (3) seminar kesehatan lanjut usia; (4) pelatihan kesehatan gizi anak; (5) penyuluhan sosialisasi pemberian makanan tambahan; (6) pelatihan kader deteksi dini kelainan tumbuh kembang bayi dan anak; (7) penyuluhan pembinaan dan sosialisasi PHBS; (8) bakti sosial, pengobatan gratis, pembinaan kelompok lansia;

(9) penyuluhan tentang bahasa NAPZA; (10) deteksi dini penyakit menular; dan (11) seminar kanker serviks .

Pembangunan di bidang ekonomi banyak kemajuan yang telah diraih, yaitu pertumbuhan dan pendapatan perkapita penduduk terus meningkat. Namun, perhatian pemerintah terhadap ekonomi masyarakat semakin nyata dengan banyak dan beragamnya skema program ekonomi yang ditujukan pada masyarakat golongan menengah-bawah masih kurang. Karena itu, tidak bisa dipungkiri bahwa berbagai kemajuan ekonomi yang tercermin dari pertumbuhan dan stabilitas makro ekonomi masih jauh dari memadai, serta bias terhadap fakta-fakta ekonomi yang ada. Ketua Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan melihat fondasi dan ketahanan ekonomi Kota Makassar masih lemah, hal ini disebabkan oleh orientasi pembangunan ekonomi yang lebih menekankan kepada aspek pertumbuhan bertumpu pada investasi asing, utang luar negeri, dan konglomerasi. Kondisi ini mengakibatkan hasil pembangunan hanya dikuasai dan dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat, kesenjangan melebar, dan sendi-sendi kehidupan sosial-ekonomi tumbuh tanpa akar yang kuat. Beberapa persoalan ekonomi nasional yang mendasar dan bersifat struktural adalah paradigma ekonomi yang tidak konsisten dan dualistik, di satu pihak kebijakan fiskal belum mandiri, sistem keuangan dan perbankan yang tidak memihak kepada rakyat, dan kebijakan industri yang liberal.

Keberlanjutan ‘Aisyiyah dalam bidang sosial-budaya terutama di Kota Makassar telah mencapai berbagai keberhasilan di bidang pendidikan terdapat peningkatan secara kualitas dan kuantitas pendidikan, pemerataan kesempatan belajar, peningkatan prestasi belajar anak-anak khususnya siswa yang dibina sekolah-sekolah ‘Aisyiyah tingkat regional dan internasional. Di bidang penegakan hukum terdapat

keseriusan ‘Aisyiyah Kota Makassar di dalam pemberantasan korupsi yang membawa implikasi pada moralitas publik, disertai lahirnya produk perundang-undangan yang berpihak pada hak asasi manusia, perlindungan perempuan dan anak, serta penegakan moral. Di bidang kehidupan beragama semakin meluas iklim dan kesadaran untuk hidup rukun dalam kemajemukan.

Dalam hubungan sosial masih cukup kuat budaya gotong royong dan semangat kebersamaan yang ditunjukkan ketika menghadapi bencana alam. Namun demikian, masih terdapat permasalahan sosial-budaya yang perlu mendapatkan pemecahan yang serius, di antaranya memudarnya rasa dan ikatan kebangsaan, disorientasi nilai keagamaan, memudarnya kohesi sosial, dan melemahnya mentalitas yang positif. Menyadari hal tersebut, ‘Aisyiyah Kota Makassar melalui program-program kerja yang dicanangkan Lembaga Penelitian dan Pengembangan, serta Lembaga Kebudayaan dalam upaya mencegah dan menanggulangi masalah-masalah yang dimaksud. Masalah lain yang kecenderungan melemahkan karakter bangsa adalah kekerasan yang terorganisir termasuk kekerasan terhadap anak-anak dan perempuan, kriminalitas, perjudian, pornografi dan perilaku-perilaku menyimpang lainnya serta merusak nilai-nilai agama dan moral.

Realisasi program kerja Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Periode (2010 – 2015), yaitu: (1) mengembangkan penelitian dan pengkajian masalah keorganisasian untuk mendukung kebijakan dan pengembangan organisasi; (2) meningkatkan dan mengembangkan fungsi data dan informasi sebagai salah satu sumber penting dalam pengambilan kebijakan organisasi dan pengembangan gerakan, dan (3) mengembangkan publikasi hasil kajian dan penelitian secara luas melalui media, baik cetak maupun elektronik. Di samping itu, tujuan yang hendak

diwujudkan melalui program kerja tersebut di atas, adalah terbangunnya kesadaran dan perilaku ramah lingkungan bagi anggota dan pimpinan di setiap tingkatan dan amal usaha.

Realitas yang menunjukkan bahwa, dalam upaya mencapai tujuan tersebut sebagai wujud keberlanjutan organisasi, seperti disampaikan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan, meliputi: (1) membuat peta wilayah untuk mengadakan survey untuk mengetahui jumlah cabang 'Aisyiyah yang aktif; (2) mengumpulkan data atau informasi terkait dengan sasaran obyek kajian, dan (3) mempublikasikan kegiatan penelitian melalui media. Realisasi program kerja Lembaga Penelitian dan Pengembangan, kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan hasil positif, maka program kerja lima sampai sepuluh tahun ke depan harus mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi dengan merespon lingkungan strategis secara berkelanjutan. Secara politik, respons 'Aisyiyah terhadap perubahan-perubahan yang dilakukan Muhammadiyah, baik struktural maupun program kerja, meskipun belum mencapai stabilitas politik yang permanen. Secara ekonomi, 'Aisyiyah mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil, tetapi belum menjamin adanya pemerataan dan keadilan untuk kemakmuran semua warga. Selain itu, 'Aisyiyah juga menghadapi berbagai masalah sosial yang tidak mudah untuk diselesaikan di bidang sosial keagamaan dan kemasyarakatan, mengatasi kerusakan lingkungan, dan menjaga martabat serta kedaulatan bangsa dan negara. Oleh karena itu, 'Aisyiyah tetap konsisten menjaga, memelihara, dan mempertahankan keberlanjutan organisasi.

Sementara budaya populer akan semakin menjadi kecenderungan yang luas dalam masyarakat seiring dengan perkembangan media elektronik yang sangat pesat, memungkinkan kebudayaan nasional dan

daerah berada di persimpangan jalan dalam dinamika globalisasi yang semakin kompleks. Karena itu, 'Aisyiyah Kota Makassar memerlukan strategi dalam menghadapi globalisasi maupun dinamika masyarakat majemuk yang sering mengalami konflik sosial. Selain itu, keragaman bahasa, sistem ekonomi, politik, strata sosial, religi, dan kesenian, cenderung menguat dengan semakin efektifnya proses demokrasi dan otonomi daerah, yang dapat membawa konsekuensi luas dalam sistem kebudayaan masyarakat Kota Makassar dan Indonesia. Hal tersebut akan menjadi tantangan besar bagi organisasi Muhammadiyah yang telah berkembang semakin besar dan kompleks, dengan jangkauan wilayah yang sangat luas untuk menghadirkan gerakan Islam berwawasan kebangsaan dan kebudayaan yang mampu memberikan alternatif jawaban mencerahkan, membebaskan, dan memberdayakan kepentingan kejayaan masa depan umat dan bangsa.

Menghadapi situasi dan kondisi yang demikian, segenap Pengurus dan Pimpinan 'Aisyiyah Kota Makassar, lima sampai sepuluh tahun ke depan memerlukan revitalisasi visi, misi dan karakter organisasi sebagai tolok ukur melakukan konsolidasi internal dan eksternal reformasi. Dengan menyadari nilai positif yang dihasilkan reformasi dan kesadaran adanya masalah yang kompleks tersebut, maka kini diperlukan penajaman-penajaman terhadap visi dan misi 'Aisyiyah secara berkelanjutan. Reformasi 'Aisyiyah perlu dirancang ulang yang diintegrasikan ke dalam pembangunan yang bersifat menyeluruh dan berkesinambungan, sehingga reformasi berada dalam arah dan jalur yang benar. Pembangunan nasional dalam berbagai bidang kehidupan perlu dikembangkan dalam bingkai paradigma pembangunan berkelanjutan yang bermakna (*sustainable development with meaning*).

Paradigma ini bertumpu pada prinsip pengembangan sumber daya manusia sebagai subjek pembangunan, pemanfaatan sumberdaya alam secara produktif dengan menjaga kelestarian, kebijakan ekonomi dan politik yang berpihak kepada kepentingan rakyat, menjunjung tinggi moralitas dan menjaga martabat bangsa. Pada dasarnya pembangunan berkelanjutan dan bermakna sebagai upaya perbaikan dalam kehidupan manusia dengan menjaga keseimbangan material dan spiritual, individu dan masyarakat. Cara untuk meningkatkan martabat bangsa melalui rekonstruksi.

Sejak awal berdirinya 'Aisyiyah berada *on the track* untuk menjawab problem mentalitas ini, karena 'Aisyiyah merupakan *jam'iyah* (organisasi massa) dan gerakan yang dinamis membentuk bangsa yang bermartabat. Salah satu hal yang penting dalam memperkuat pemahaman mengenai *jihād* dalam arti luas. Hal ini disebabkan lemahnya karakter dan martabat manusia dapat menimbulkan banyak masalah di bidang agama, politik, sosial, ekonomi, hukum dan pendidikan. Masalah-masalah tersebut yang menjadi perhatian dan komitmen 'Aisyiyah dalam melahirkan berbagai rekomendasi dalam upaya membangun kemandirian dan keberlanjutan organisasi. 'Aisyiyah sebagai organisasi massa dan memiliki komitmen sejak awal didirikan hingga sekarang terus diperjuangkan secara berkesinambungan, khususnya di Kota Makassar dalam merespons berbagai persoalan termasuk kasus tenaga kerja wanita asal Indonesia yang teraniaya di Malaysia dan Arab Saudi sebagai wujud kepedulian masalah-masalah sosial yang menjadi perhatian pemerintah. Oleh sebab itu 'Aisyiyah mendesak pemerintah dan lembaga-lembaga terkait baik di dalam maupun di luar negeri untuk lebih serius dan selektif dalam pengiriman Tenaga Kerja Wanita. Selanjutnya pemerintah wajib memberi perlindungan serta advokasi terhadap para TKI khususnya TKW

yang sering menjadi korban kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi melalui langkah-langkah yang lebih tegas dan optimal. Selain itu ‘Aisyiyah juga mendesak pemerintah agar menindak tegas pihak-pihak yang melakukan perdagangan manusia (*trafficking*) dan mengefektifkan pelaksanaannya.

Perkembangan ‘Aisyiyah lebih cepat dibanding dengan pemerintah sejak didirikan, karena kemampuan dalam mengelola daya kontingensi, ketekunan, dan kesungguhan semua warga dan para pengurus. Saya juga tidak tahu persis mengapa kondisi itu bisa terjadi, padahal kalau dilihat dari segi tanggung jawab terutama para pengurus yang pada umumnya berkeluarga, selain mengurus rumah tangga dan profesinya (pekerjaannya) sebagai PNS (umumnya adalah guru), tetap menyisihkan waktunya untuk mengurus ‘Aisyiyah sehingga dalam perkembangannya sebagai organisasi perempuan pertama di Indonesia, hingga saat tetap berlanjut dan bertahan dalam goncangan serta desakan arus globalisasi dan modernisasi yang demikian kompleks, dan ke depan ‘Aisyiyah tetap menunjukkan jati dirinya sebagai organisasi perempuan modern di dalam membina ummat (masyarakat) sesuai dengan al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW.

Dinamika keberlanjutan ‘Aisyiyah Kota Makassar dilihat dari realisasi program-program kerja yang telah dirancang secara sistematis, kemudian diimplementasikan sesuai dengan kondisi masing-masing majelis di tingkat cabang dan ranting secara berkeberlanjutan. Sebagai contoh, pemahaman ‘Aisyiyah tentang bidang kesejahteraan sosial yang diperjuangkan adalah terciptanya suatu kondisi ideal dari tata kehidupan masyarakat yang *baladun thayyibatun wa rabbun ghaffur*, yaitu suatu kehidupan bahagia sejahtera penuh limpahan rahmat dan nikmat Allah swt. di dunia dan akhirat. Dengan demikian, tercipta suatu titik

keseimbangan antara aspek jasmaniah dan rohaniyah ataupun aspek material dan spiritual.

Sejak berdirinya ‘Aisyiyah Kota Makassar kegiatan kesejahteraan sosial telah dimulai dalam bentuk membantu kaum miskin dan anak yatim. Dalam perkembangan saat ini, program kesejahteraan sosial tersistem ke dalam unit-unit kegiatan sosial antara lain: (1) kepedulian dan usaha-usaha pelayanan terhadap kelompok dhuafa; (2) pengembangan dan pemberdayaan lembaga-tembaga sosial yang dikelola oleh ‘Aisyiyah seperti panti asuhan, panti jompo, balai latihan, dan rumah singgah; (3) peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di perkotaan dan pedesaan; (4) pelayanan korban dan penanggulangan bencana atau musibah; (5) advokasi publik yang menyangkut masalah- masalah sosial di berbagai lapisan masyarakat, dan (6) mengembangkan pola pencegahan dan pemberian bantuan terhadap korban trafficking dan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan lain-lain.

Jenis dan bentuk program Dakwah Terpadu terkait dengan dinamika keberlanjutan ‘Aisyiyah Kota Makassar, adalah:

- a) Tabligh Bina Ummat, yaitu bentuk penyiaran Islam (dakwah bil-lisan) yang diprogram secara intensif dan berkelanjutan. Tabligh ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pemahaman dan pengamalan. Tabligh ini mengarah pada pembinaan yang dilakukan secara dialogis, intensif, dan berkelanjutan meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan pengamalan Islam secara kaffah. Tabligh Bina Umat berbentuk kelompok kajian, dan konsultasi keagamaan tentang persoalan keseharian, dan lain-lain.
- b) Tabligh Media, yakni dakwah bil lisan dengan melalui media masa. Dakwah ini berbentuk penyebaran informasi keagamaan dengan melalui tulisan (brusur, pamflet, bulletin) dan kaset, dengan sasaran

kelompok-kelompok kajian yang anggotanya masih awam dalam pemahaman, kesadaran, dan pengamalan ajaran Islam.

- c) Bina Remaja Putri, yaitu pembinaan yang khusus diberikan kepada para remaja putri Islam di semua lapisan masyarakat: bimbingan keagamaan, kesadaran hukum, partisipasi politik, dan ketrampilan wanita dalam rangka pengembangan potensi dan sumber daya remaja putri Islam.
- d) Bina Keluarga Dhu'afa, yaitu kegiatan dakwah yang khusus bertujuan untuk membantu memecahkan masalah dan peningkatan taraf hidup kehidupan masyarakat yang lemah ekonominya. Bentuk dakwah ini meliputi membuka lapangan kerja, pendidikan ketrampilan wirausaha, pelayanan kesehatan, pembinaan keluarga sakinah.
- e) Kesehatan bagi Wanita, yakni program dakwah yang khusus untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, baik secara individu, jamaah, ataupun kesehatan masyarakat. Jenis kegiatan yang dikembangkan adalah penyuluhan dan pelayanan kesehatan, apotik hidup, kesehatan mental, kesehatan ibu dan anak, dan kegiatan lain yang menuju pada perilaku hidup sehat. Sebagai sarasannya yaitu kelompok kaum wanita, baik remaja maupun ibu rumah tangga.

Program Kerja Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan terkait dengan dinamika keberlanjutan 'Aisyiyah Kota Makassar, meliputi: (1) kewirausahaan melalui penguatan dan pengembangan usaha makro, menengah yang dikelola oleh perempuan agar memperjuangkan hak dan kepentingannya; (2) optimalisasi pembinaan ekonomi melalui BUEKA, dan (3) mengadakan berbagai macam pelatihan dan keterampilan.

Ketiga program kerja di atas bertujuan agar "Terbangunnya kesadaran dan perilaku ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup dan

kesejahteraan warga, umat dan masyarakat”. Untuk mencapai tujuan ini, Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan melakukan kegiatan: (1) Membuat home industry; (2) Mengaktifkan BUEKA di setiap cabang ‘Aisyiyah; (3) Pendataan pengusaha ‘Aisyiyah di cabang-cabang; (4) Mengadakan kursus kue dan makanan, (5) Pameran dan Bazaar d. Mengadakan bazaar

Program kerja Majelis Pengkaderan (Pembinaan Kader), meliputi: (a) mengembangkan dan mengoptimalkan pelaksanaan pengkaderan di tingkat cabang dan ranting secara terencana dan berkelanjutan; (b) optimalisasi fungsi dalam peran amal usaha sebagai pendidikan dan pembinaan kader; (c) mengoptimalkan pembinaan kader melalui keluarga, amal usaha, AMM, untuk menjadi pelopor dan pelangsupng gerakan.

Tujuan yang hendak diwujudkan dalam merealisasikan program kerja Majelis Pengkaderan (Pembinaan Kader), ialah meningkatkan kuantitas dan kualitas kader yang memiliki integritas, kompetensi, keagamaan, keilmuan, sikap dan tindakan yang berpegang pada nilai-nilai Islam. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, maka kegiatan yang dilakukan adalah : (a) Penataran pimpinan; (b) Job Training kesekretariatan dan kebidharaan; (c) Pelatihan kepemimpinan dan keprotokuleran; (d) Cerdas cermat tentang ke ‘Aisyiyahan dan ke Muhammadiyah.

Program kerja Majelis Hukum dan HAM, meliputi: (a) berpartisipasi aktif dalam upaya penegakan hukum dan HAM, sehingga terwujud rasa keadilan bagi setiap warga Negara; (b) meningkatkan pemahaman tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan upaya pencegahannya; (c) meningkatkan pengawasan dan pencegahan perdagangan manusia.

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program kerja Majelis Hukum dan HAM, adalah terbangunnya kesadaran perilaku hukum dan HAM dalam menciptakan keadilan, ketertiban dan kebaikan hidup bersama yang berbasis pada norma-norma hukum, agama, dan budaya bangsa. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang dilakukan meliputi: (1) Penataran pimpinan; (2) Job Training kesekretariatan dan kebidayaaan; (3) Pelatihan kepemimpinan dan keprotokuleran; (4) Cerdas cermat tentang ke 'Aisyiyahan dan ke Muhammadiyah.

Program Nasional yang bersifat umum, terkait dengan keberlanjutan 'Aisyiyah Kota Makassar, ialah: (a) mengembangkan pedoman atau tuntunan dan materi tabligh dalam berbagai aspek kehidupan untuk pembinaan masyarakat yang bersifat peneguhan dan pencerahan; (b) mengembangkan peta dakwah sebagai panduan pelaksanaan tabligh di seluruh tingkatan dari tingkat pusat sampai tingkat ranting; (c) mengintensifkan pembinaan aqidah, akhlak, ibadah, dikalangan warga 'Aisyiyah dan masyarakat luas melalui pengajian, kajian, publikasi dan media lainnya secara terprogram sesuai faham agama dalam Muhammadiyah yakni Islam yang berkemajuan; (d) mengintensifkan pembinaan dhuafa', muallaf dan masyarakat khusus (suku terasing, nelayan, petani, jermal, dan lain sebagainya); (e) mengintensifkan kajian tafsir Al Qur'an dan hadits bagi anggota, kader, dan pimpinan untuk meningkatkan pemahaman Islam yang benar; (f) pelaksanaan kehidupan sehari-hari berdasarkan pedoman kehidupan Islami; (g) mengintensifkan pembinaan keluarga yang berpedoman pada tuntunan keluarga sakinah serta mengembangkan media konsultasi keluarga.

‘Aisyiyah Kota Makassar memelihara keberlanjutan dengan melaksanakan kegiatan Dakwah Islamiah, meliputi:

- (1) Gerakan jamaah pengajian dan kajian-kajian keagamaan di tingkat komunitas sebagai basis perintisan program Qaryah Thayibah.
- (2) Pembinaan paham agama sesuai dengan tuntutan Muhammadiyah bagi kelompok-kelompok bimbingan haji ‘Aisyiyah.
- (3) Meningkatkan penyiapan ulama tarjih perempuan yang memahami dan mampu menguasai perkembangan fiqh dan masalah-masalah Islam sebagaimana paham agama di Muhammadiyah.
- (4) Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan mubalighot dalam berbagai aspek seperti penguasaan metode, materi, strategi dakwah serta penguasaan IT (*information technology*).
- (5) Mengembangkan media tabligh sebagai sarana pembinaan umat melalui media cetak dan elektronik untuk memperluas jaringan dan jangkauan dakwah yang bersifat peneguhan dan pencerahan.
- (6) Melaksanakan tuntunan dakwah kultural melalui kegiatan tabligh dalam berbagai aspek kehidupan bagi masyarakat yang majemuk sesuai dengan paham agama dalam Muhammadiyah.
- (7) Meningkatkan fungsi masjid, mushalla, dan sarana-sarana dakwah sebagai pusat kegiatan penyiaran Islam secara terprogram.
- (8) Mengembangkan tabligh dengan pemahaman Islam secara benar yang mendorong pencapaian ketaqwaan tinggi, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, mencegah berbagai bentuk radikalisasi, kekerasan, dan ketidakadilan sejalan dengan misi Islam

rahmatan lil-alamin yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

Program Khusus Pembinaan Keluarga, dengan tujuan: Terbina dan berkembangnya kualitas kehidupan keluarga dalam seluruh aspek secara berkeadilan dan berkemakmuran menuju terciptanya keluarga sakinah. Hal ini dapat direalisasikan melalui program-program sebagai berikut:

- 1) Menguatkan pembinaan keluarga dengan basis nilai-nilai agama, untuk membentuk manusia yang memiliki kekokohan iman, mentalitas dan karakter yang kuat agar mampu mengembangkan potensi dan kapasitas diri yang berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat dan bangsa.
- 2) Memperluas sosialisasi dan peningkatan kualitas pembinaan keluarga berpedoman pada tuntunan keluarga Sakinah bagi masyarakat luas melalui berbagai model yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat.
- 3) Mengintensifkan pembinaan keluarga khususnya bagi anak-anak dan remaja yang berpedoman pada tuntunan keluarga Sakinah.
- 4) Meningkatkan kesadaran tentang hak-hak dan kewajiban dalam keluarga serta kesadaran tentang kesetaraan relasi laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.
- 5) Meningkatkan peran keluarga (orang tua dan orang dewasa) sebagai pendamping anak dalam beradaptasi dengan dunia media dan informasi yang sangat berpengaruh pada perkembangan kejiwaan dan kehidupan anak-anak melalui pendidikan media literasi.

- 6) Mengembangkan pendekatan, model-model perlindungan dan bantuan hukum bagi para perempuan korban kekerasan dan anak-anak korban berlandaskan pendekatan agama dan hukum.
- 7) Memasyarakatkan usaha pencegahan dini terhadap bahaya-bahaya miras, napza, demoralisasi, seks bebas, kriminalitas, dan bentuk-bentuk penyakit social lainnya melalui pembinaan keluarga secara langsung, penyebaran leaflet, booklet, dan publikasi media cetak dan elektronik.
- 8) Mengembangkan model pendidikan bagi orang tua (parenting) dalam pembinaan karakter anak di keluarga melalui berbagai model sesuai dengan tuntunan keluarga sakinah.

Program Bidang Pengkaderan, bertujuan Meningkatnya kuantitas kader yang memiliki integritas, kompetensi keagamaan dan keilmuan, serta sikap dan tindakan yang berpegang pada nilai-nilai Islam, meliputi:

- a. Sistem perkaderan yang mampu mentransformasikan nilai-nilai Islam yang berkemajuan, nilai-nilai ideologi Muhammadiyah dan nilai-nilai ‘Aisyiyah untuk mewujudkan kader-kader yang berkualitas, memiliki mentalitas tangguh, kesadaran, keyakinan, perilaku, dan komitmen dalam perjuangan.
- b. Mengembangkan pelaksanaan perkaderan dari tingkat pusat sampai tingkat ranting secara terencana, periodik dan berkelanjutan melalui Darul Arqam, Baitul Arqam, kajian intensif, dan model kajian lainnya agar mampu berperan sebagai kader umat, dan kader bangsa.
- c. Optimalisasi fungsi dan peran amal usaha ‘Aisyiyah sebagai lembaga pembibitan dan pembinaan kader ‘Aisyiyah, termasuk pada lembaga pendidikan tinggi.
- d. Mengoptimalkan pembinaan kader melalui keluarga, amal usaha, dan transformasi AMM putri untuk memperkokoh kelangsungan gerakan.

- e. Mengembangkan pembinaan kader ulama perempuan sesuai dengan pemahaman Islam dalam Muhammadiyah.
- f. Mengembangkan model perkaderan untuk pendidikan kader bangsa dalam rangka meningkatkan peran ‘Aisyiyah dalam melaksanakan misi dakwah kebangsaan.
- g. Mengembangkan model pembinaan kader lintas ilmu-profesi baik di amal usaha ‘Aisyiyah maupun melalui kelompok di masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan lintas majelis/lembaga.
- h. Pemetaan potensi, kebutuhan, dan distribusi kader baik yang ada dalam struktur maupun di luar struktur untuk mendukung proses kaderisasi sistemik dengan menggunakan strategi pengembangan *interest group* (kelompok minat) di masyarakat.
- i. Mengembangkan dan memobilisasi transformasi kader AMM putri sebagai pelopor dan pelangsup gerakan ‘Aisyiyah.

Bidang Pendidikan, dengan tujuan meningkatnya kualitas keunggulan pendidikan ‘Aisyiyah sebagai strategi pembentukan manusia yang utuh, berilmu dan berkarakter sesuai dengan tujuan pendidikan.

- a) Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sampai Perguruan Tinggi baik jumlah maupun kualitas yang diarahkan kepada pencerahan, pencerdasan, dan pemberdayaan agar menjadi manusia yang taqwa, berilmu, terampil, berkepribadian, mandiri dan bertanggung jawab dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan ummat manusia.
- b) Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tingkat perguruan tinggi baik kuantitas maupun kualitas yang mencakup berbagai bidang ilmu untuk pengembangan dakwah.

- c) Meningkatkan mutu pendidikan ‘Aisyiyah termasuk kurikulum sesuai UU yang berlaku, sehingga mampu memenuhi standart pendidikan nasional dan mengembangkan lembaga pendidikan ‘Aisyiyah yang memiliki keunggulan khusus dan ciri khas ‘Aisyiyah.
- d) Mengembangkan jenis, jenjang dan jalur pendidikan baru seperti pendidikan kejuruan, Pendidikan Luar Sekolah, Pendidikan anak yang berkebutuhan khusus, dan model-model pendidikan informal sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat luas.
- e) Meningkatkan kualitas pendidik, peningkatan jenjang pendidikan, pelatihan kependidikan, pelatihan penguasaan IT, forum seminar dan diskusi, berbagai cara lain yang pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan berbagai pihak termasuk perguruan tinggi Muhammadiyah.
- f) Meningkatkan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kemampuan organisasi berdasarkan sistem kinerja disertai dengan pembinaan komitmen dan pengabdian terhadap ‘Aisyiyah.
- g) Revitalisasi TK ‘Aisyiyah Bustanul Athfal dalam berbagai aspek agar mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lain.
- h) Meningkatkan peran lembaga pendidikan sebagai basis kaderisasi yang dilaksanakan masing-masing lembaga pendidikan ‘Aisyiyah.
- i) Mengembangkan data base lembaga pendidikan ‘Aisyiyah sebagai pusat informasi dan basis pengembangan pendidikan.
- j) Meningkatkan program keaksaraan fungsional dengan life skill yang dikembangkan melalui berbagai kegiatan bersinergi dengan majelis dan lembaga (lintas majelis/lembaga).

Program kerja bidang kesehatan, bertujuan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, khususnya kaum perempuan, bayi dan anak yang berbasis pelayanan kesehatan dan komunitas, dengan kegiatan:

- a) Menyusun dan mengembangkan pedoman dan tuntunan manajemen amal usaha di bidang kesehatan yang berorientasi pada mutu dan profesionalisme serta berbasis pada nilai-nilai Al-Qur'an, sehingga mampu bersaing dengan lembaga kesehatan lain di masyarakat.
- b) Mengembangkan panduan pengelolaan kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan untuk menjadi acuan bagi para penggerak/penggiat kesehatan di masyarakat.
- c) Meningkatkan kualitas sumberdaya di bidang kesehatan melalui berbagai upaya seperti peningkatan pendidikan, pelatihan, magang, dan kegiatan lainnya untuk peningkatan kapasitas.
- d) Meningkatkan upaya penurunan angka kematian ibu yang melahirkan melalui berbagai kegiatan.
- e) Meningkatkan upaya penurunan angka kematian bayi dan balita dengan prioritas program seperti Imunisasi, ASI eksklusif dan Inisiasi Menyusui Dini (IMD), pemberian gizi seimbang dan tumbuh kembang anak, dan program lainnya.
- f) Meningkatkan kualitas Kesehatan Reproduksi, Keluarga Berencana (KB) yang berkeadilan dan berbasis nilai-nilai Islam.
- g) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di lingkungan keluarga, lingkungan amal usaha 'Aisyiyah, tempat umum, tempat ibadah dan di lingkungan komunitas masyarakat luas.
- h) Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian penyakit menular (malaria, TBC, dan

penyakit lainnya seperti diabetes millitus, kanker, stroke, dan HIV/AIDS).

- i) Meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan melalui implementasi konsep Keluarga sakinah dan Qaryah Thayyibah di bidang kesehatan atau Desa Siaga (Pengembangan Taman Obat Keluarga, dan Posyandu Balita).
- j) Meningkatkan kuantitas dan kualitas motivator kesehatan masyarakat yang siap sebagai penggerak perilaku hidup sehat.
- k) Meningkatkan kerjasama di bidang kesehatan dengan pemerintah dan berbagai pihak secara lebih aktif untuk memperluas peran ‘Aisyiyah dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
- l) Revitalisasi amal usaha kesehatan ‘Aisyiyah antara lain Rumah Sakit (RS), Rumah Bersalin (RB), Balai Pengobatan (BP), dan Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) secara profesional dan berorientasi al Ma’un sehingga lembaga-lembaga pelayanan kesehatan ‘Aisyiyah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.
- m) Memperkuat sinergi Amal Usaha Pendidikan Kesehatan ‘Aisyiyah dan Muhammadiyah dalam program magang kerja, pelatihan, penempatan tenaga kesehatan baik dalam maupun luar negeri.
- n) Mengembangkan data base Amal Usaha Kesehatan ‘Aisyiyah sebagai pusat informasi dan basis peningkatan kualitas layanan maupun pengembangan amal usaha kesehatan.

Bidang Kesejahteraan Sosial, bertujuan agar berkembangnya atau meningkatnya pemberdayaan, pelayanan dan penyantunan masyarakat dhuafa dan berbagai kelompok yang termarjinalkan melalui kegiatan:

- a) Menyusun dan mengembangkan pedoman dan tuntunan manajemen amal usaha di bidang kesejahteraan sosial antara lain panti asuhan, rumah singgah, dan amal usaha lainnya yang berorientasi pada mutu dan profesionalisme sehingga mampu bersaing dengan lembaga layanan sosial yang berkembang di masyarakat.
- b) Meningkatkan usaha pemberdayaan, pelayanan, dan penyantunan melalui berbagai model aksi bagi kelompok masyarakat miskin, anak-anak terlantar, anak jermal, Lansia, penyandang cacat atau orang yang memiliki kebutuhan khusus, korban narkoba, serta kelompok lain yang termarginalkan.
- c) Meningkatkan fungsi dan peran panti asuhan sebagai wadah untuk menggali dan mengembangkan potensi anak asuh yang berbakat serta menjadi pusat perlindungan anak.
- d) Meningkatkan sosialisasi pemahaman dan pendampingan bagi warga masyarakat lansia untuk menjalani kehidupan yang wajar sebagai warga masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- e) Mengembangkan sistem dan implementasi konsep asuhan keluarga sebagai bagian dakwah dalam bidang sosial.
- f) Pendampingan pemberdayaan masyarakat miskin di perkotaan dan pedesaan dalam berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan hukum, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi dengan menggunakan berbagai model dan pendekatan yang pelaksanaannya dilakukan dengan lintas majelis maupun lembaga.
- g) Meningkatkan sosialisasi untuk penghapusan berbagai kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta melakukan pendampingan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

- h) Meningkatkan sosialisasi tindakan preventif terhadap perdagangan manusia serta pendampingan terhadap korban *trafficking*.
- i) Merintis program pelayanan anak dengan kebutuhan khusus dan layanan khusus lainnya sesuai kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat dhu'afa.
- j) Melakukan Advokasi publik yang menyangkut kebijakan masalah-masalah sosial khususnya bagi masyarakat yang termarginalkan dan dhuafa untuk mendapatkan rasa keadilan.
- k) Meningkatkan usaha-usaha dan kualitas penanggulangan bencana antara lain pada tahap tanggap darurat, manajemen bencana, kesiapan SDM, yang pelaksanaannya bersinergi dengan amal usaha.
- l) Mengintensifkan sosialisasi model kesiapsiagaan perempuan dalam menghadapi yang berbasis pada masyarakat baik melalui lembaga pendidikan maupun komunitas masyarakat.

Keberlanjutan organisasi 'Aisyiyah juga dilihat dari implementasi program kerja bidang Ekonomi dan ketenagakerjaan, yang bertujuan agar: terbangunnya kesadaran dan perilaku ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan warga 'Aisyiyah khususnya dan warga masyarakat pada umumnya, meliputi:

1. Mengembangkan pedoman dan tuntunan pelaksanaan amal usaha di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan dengan berorientasi kepada profesionalisme serta berbasis pada nilai-nilai Islam, sehingga mampu bersaing dengan lembaga ekonomi lain.
2. Menumbuhkan semangat kewirausahaan melalui pengembangan dan penguatan usaha kecil dan menengah yang dikelola oleh

perempuan untuk memperjuangkan hak dan kepentingannya sebagai gerakan pemberdayaan ekonomi umat.

3. Optimalisasi pendampingan dan pembinaan ekonomi melalui Bina Usaha Ekonomi Keluarga 'Aisyiyah (BUEKA).
4. Memperkuat posisi dan kondisi usaha kecil yang dikelola perempuan dalam hal akses dan kontrol terhadap sumberdaya ekonomi.
5. Membangun solidaritas dengan berbagai pihak dalam melakukan advokasi atas bentuk-bentuk ketidakadilan serta advokasi kebijakan yang berpihak pada kepentingan usaha mikro-kecil.
6. Melakukan pendampingan terhadap tenaga kerja wanita (buruh) baik buruh migran (bekerja di luar negeri) maupun buruh yang bekerja di dalam negeri seperti pemahaman tentang hak, perlindungan hukum, dan kondisi budaya di tempat kerja maupun pendampingan.

Bidang Pendidikan Politik, bertujuan agar terbangunnya kesadaran perilaku warga negara akan hak dan kewajibannya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mengembangkan pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran masyarakat tentang hak-hak warga negara melalui pengajian, pelatihan, diskusi, kegiatan forum warga, dan media kegiatan lainnya sebagai perwujudan penguatan masyarakat sipil (*civil society*)/masyarakat madani, yaitu: (a) meningkatkan peran kontrol sosial masyarakat terhadap proses pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan secara bijak melalui berbagai saluran; (b) meningkatkan partisipasi politik warga negara dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik oleh pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya sesuai dengan hak-hak politik warga, dan (c) mengembangkan jaringan sinergis dengan kader dan simpatisan

‘Aisyiyah yang berada di lembaga pemerintahan, legislatif, yudikatif, dan lembaga negara lainnya untuk meningkatkan peran dakwah ‘Aisyiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

BAB V

DINAMIKA KEPATUHAN ORGANISASI ‘Aisyiyah

A. Prinsip Organisasi ‘Aisyiyah

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa setelah terbentuk ‘Aisyiyah Kota Makassar sebagai organisasi otonom dalam Persyarikatan Muhammadiyah, maka perkembangannya menghadapi berbagai dinamika dengan tetap berpegang teguh prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Dengan keikhlasan hati menunaikan tugasnya sebagai wanita Islam sesuai dengan bakat dan percakapannya, tidak menghendaki sanjung puji dan tidak mundur selangkah karena dicela.
2. Penuh keinsyafan, bahwa beramal itu harus berilmu.
3. Jangan mengadakan alasan yang tidak dianggap sah oleh Tuhan Allah, hanya untuk menghindari suatu tugas yang diserahkan.
4. Membulatkan tekad untuk membela kesucian agama Islam.
5. Menjaga persaudaraan dan kesatuan kawan sekerja dan seperjuangan.

Bertitik tolak dari prinsip tersebut, maka pada tahun 1926 bersamaan dengan berdirinya ‘Aisyiyah Kota Makassar merintis pendidikan dini untuk anak-anak dengan nama *Frobel*, ialah Taman Kanan-Kanak pertama yang didirikan di Kota Makassar. Kemudian taman kanak-kanak ini diseragamkan namanya menjadi TK ‘Aisyiyah Bustanul Athfal yang saat ini telah mencapai 54 TK yang dikelola ‘Aisyiyah di Kota Makassar, di mana setiap TK terdapat Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA), dan 2 PAUD.

Gerakan pemberantasan kebodohan yang menjadi salah satu pilar perjuangan ‘Aisyiyah di Kota Makassar dicanangkan dengan mengadakan pemberantasan buta huruf pertama kali, baik buta huruf arab

maupun latin pada tahun 1926. Dalam kegiatan ini peserta yang terdiri dari gadis-gadis dan ibu-ibu rumah tangga belajar bersama, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan partisipasi perempuan dalam dunia publik. Kemudian dalam tahun yang sama (1926), 'Aisyiyah Pusat mulai menerbitkan majalah yang diberi nama Suara 'Aisyiyah. Melalui majalah bulanan inilah 'Aisyiyah, mengkomunikasikan semua program dan kegiatannya termasuk konsolidasi internal organisasi.

B. Dinamika Organisasi 'Aisyiyah

Dinamika kepatuhan anggota 'Aisyiyah terhadap organisasi adalah sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip yang telah digariskan dalam Persyarikatan Muhammadiyah, terutama untuk memprakarsai berdirinya organisasi wanita di Indonesia. Dalam hal ini, 'Aisyiyah bersama dengan organisasi wanita lainnya bangkit berjuang untuk membebaskan bangsa dan negara dari belenggu penjajahan dan kebodohan. Badan federasi ini adalah Kongres Perempuan Indonesia yang sekarang menjadi KOWANI (Kongres Wanita Indonesia). Lewat federasi ini berbagai usaha dan bentuk perjuangan bangsa dapat dilakukan secara terpadu.

'Aisyiyah Kota Makassar berkembang pesat seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat dalam menemukan bentuknya sebagai organisasi wanita modern. 'Aisyiyah Kota Makassar dalam mengembangkan berbagai program untuk pembinaan dan pendidikan kaum wanita. Diantara program-program 'Aisyiyah yang mendapat sambutan positif untuk mengembangkan kemampuan wanita ialah kegiatan di luar sekolah sebagai kader 'Aisyiyah. Selanjutnya Kongres Muhammadiyah ke-20 tahun 1931 Siswa Praja Wanita menjadi Nasyi'atul 'Aisyiyah (NA). Di samping itu, 'Aisyiyah juga mendirikan Urusan

Madrasah yang bertugas mengurus madrasah khusus puteri, Urusan Tabligh yang mengurus penyiaran agama lewat pengajian, kursus dan asrama, serta Urusan Wal'asri yang mengusahakan beasiswa untuk siswa yang kurang mampu. Selain itu 'Aisyiyah pada tahun 1935 juga mendirikan Urusan Adz-Dzakhirat yang bertugas mencari dana untuk membangun Gedung 'Aisyiyah dan modal mendirikan koperasi.

Perkembangan 'Aisyiyah selanjutnya pada tahun 1939 mengalami titik kemajuan yang sangat pesat, dengan menambah Urusan Pertolongan (PKU) yang bertugas menolong kesengsaraan umum. Karena sekolah-sekolah putri yang didirikan 'Aisyiyah sudah semakin banyak, maka Urusan Pengajaran didirikan di 'Aisyiyah. Di samping itu 'Aisyiyah juga mendirikan Biro Konsultasi Keluarga, yang menjadi gerakan wanita Islam yang mendobrak kebekuan feodalisme dan ketidaksetaraan gender dalam masyarakat pada masa itu, serta sekaligus melakukan advokasi pemberdayaan kaum perempuan.

Berbagai upaya yang telah dilakukan secara berkesinambungan di atas, merupakan bentuk kepatuhan anggota organisasi kepada 'Aisyiyah, termasuk membentuk Nasyiatul 'Aisyiyah (NA) sebagai organisasi otonom yang tunduk dan patuh kepada 'Aisyiyah bergerak di bidang keagamaan, kemasyarakatan, dan keputrian. NA tetap mengedepankan gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar seperti yang diamanatkan oleh Muhammadiyah. Tugas luhur ini dilakukan baik secara kolektif organisasional maupun secara individu oleh personil-personil anggota organisasi.

Nasyiatul 'Aisyiyah (NA) hadir berkat adanya suatu kesadaran religius yang positif tentang masa depan dan kelangsungan 'Aisyiyah. Kesadaran ini menjadi wacana organisasi untuk membangun generasi muda Islam untuk tetap eksis dan memegang peran penting dalam

perjuangan bangsa. Upaya ini sangat bermanfaat bagi bangsa Indonesia yang sedang menapaki tahap kebangkitan bangsa pada awal abad XX. Tuntutan sejarah inilah yang melatarbelakangi kelahiran NA sebagai wadah pembinaan dan pendidikan generasi muda putri Islam. Bangsa Indonesia sedang dihadapkan adanya upaya mempersatukan visi anak bangsa. Kondisi ini telah dibaca para pemuka Muhammadiyah. Siswa Praja Wanita yang merupakan embrio NA merupakan wadah dan wahana untuk menjalin persatuan di antara anak bangsa. Nilai-nilai kejuangan dan kebersamaan selalu ditanamkan kepada para anggota Siswa Praja Wanita sejak dini.

Ukhuwah Islamiyah diimplentasikan dalam kehidupan berbangsa agar jalinan persatuan lebih erat, disamping kesamaan dalam penderitaan yang juga menjadi tali pemersatu. Terkait dengan keberadaan NA sebagai organisasi yang dilahirkan ‘Aisyiyah. Persyarikatan Muhammadiyah memiliki beberapa organisasi otonom, seperti: ‘Aisyiyah, Nasyiatul ‘Aisyiyah (NA), Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Pemuda Muhammadiyah, dan lain-lain. Khusus NA sebagai ortom Muhammadiyah tetapi di bawah binaan ‘Aisyiyah, karena latar belakang lahirnya NA sebagai anak kandung ‘Aisyiyah tidak terlepas dari perjuangan pendiri Muhammadiyah berkat adanya suatu kesadaran religius yang positif tentang masa depan dan demi kelangsungan cita-cita Muhammadiyah.

Kesadaran ini menjadi wacana organisasi dalam upaya membangun generasi muda Islam untuk tetap eksis dan memegang peran penting dalam perjuangan bangsa. Upaya ini amat penting dan bermanfaat bagi bangsa Indonesia yang sedang menapaki tahap kebangkitan bangsa di awal abad ke-20. Tuntutan sejarah inilah yang melatarbelakangi kelahiran NA sebagai wadah pembinaan dan

pendidikan generasi muda putri Islam umumnya dan Muhammadiyah pada khususnya. Kemandirian organisasi ‘Aisyiyah dalam mengelola amal usaha, memang betul-betul swadaya. Hal ini tidak berarti tanpa bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat baik internal Muhammadiyah maupun eksternal Pemerintah. Hal ini karena mengingat proses perjalanan panjang yang ditempuh ‘Aisyiyah terutama yang berhubungan dengan pencarian dana untuk mengelola atau mendirikan amal usaha; saya sebagai ketua betul-betul merasakan jerih-payah, susah-senang, jatuh-bangun para pengurus dan anggota untuk mewujudkan impian menjadi kenyataan.

‘Aisyiyah Kota Makassar lainnya bahwa, sebagai anggota maupun pengurus merasakan suka-duka, dalam mengelola amal usaha khususnya di Makassar. Sampai saat ini, ‘Aisyiyah Kota Makassar memiliki amal usaha di bidang pendidikan, antara lain: Taman Kanak-kanak (TK) ‘Aisyiyah sebanyak 54, selain TK yang dibina oleh Muhammadiyah tetapi dikelola ‘Aisyiyah. Selain itu, ‘Aisyiyah memiliki satu buah Sekolah Dasar (SD ‘Aisyiyah) di Jl. Muhammadiyah. Memang ‘Aisyiyah baru memiliki satu buah SD, tetapi betul-betuk baik dan diandalkan.

Kemudian amal usaha sosial kemasyarakatan ‘Aisyiyah membina dua Panti Suhan (PA), yaitu PA Ummu Aiman di Jl. Beruang, dan PA Sejati di Jl. Cakalang. Selain itu, Panti Asuhan Bahagia di Jl. Muhammadiyah milik Muhammadiyah dan dikelola oleh ‘Aisyiyah tapi tidak pernah mengklain PA Bahagia sebagai milik ‘Aisyiyah. Amal usaha di bidang kesehatan, sejauh ini ‘Aisyiyah membina empat BKIA bekerjasama dengan Muhammadiyah. Khusus di bidang kesehatan, ‘Aisyiyah belum memiliki Rumah Sakit (RS) maupun Rumah Bersalin

(RB), tetapi kebanyakan pengurus serta anggota berpartisipasi dalam membina RS dan/atau RB milik Muhammadiyah.

‘Aisyiyah Kota Makassar memiliki TK sebanyak 54, tapi SD yang benar-benar milik ‘Aisyiyah hanya satu. Kondisi yang betul-betul sulit dipahami oleh masyarakat. Semestinya agar pembinaan dapat berkelanjutan di mana TK sebanyak 54, maka SD yang dibina ‘Aisyiyah paling sedikit 10 – 15 SD agar mampu menampung tamatan (lulusan) TK ‘Aisyiyah tersebut. Namun, penjelasan selanjutnya dikaitkan dengan kedudukan ‘Aisyiyah sebagai ortom Muhammadiyah yang memiliki misi perjuangan mendukung terciptanya “masyarakat utama”, yaitu masyarakat yang sehat sejahtera jasmani dan rohani. Dengan kata lain, ‘Aisyiyah telah meletakkan dasar-dasar pendidikan Islam melalui Taman Kanak-kanak, kemudian tersebar di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA yang dibina oleh Muhammadiyah, bahkan sampai Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang tersebar di seluruh Indonesia. Hubungan ‘Aisyiyah dengan NA sebagai ortom Muhammadiyah dijelaskan oleh ketua PDA bahwa, antara “Aisyiyah dengan NA mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sebagai organisasi otonom Muhammadiyah. Artinya “Aisyiyah dan NA mempunyai tugas yang sama, yaitu membantu, membina dan mengembangkan cita-cita Muhammadiyah, hanya bidang garapannya yang berbeda. NA mempunyai bidang sasaran pada generasi muda wanita untuk dibina agar menjadi pelopor, pelangsup, penyempurna, dan pembaharu usaha cita-cita Muhammadiyah. Meskipun antara “Aisyiyah dan NA memiliki status yang sama di Muhammadiyah, namun secara informal “Aisyiyah mempunyai posisi yang lebih tinggi dibanding NA. Fakta menunjukkan bahwa NA merupakan kader utama dari “Aisyiyah. Karena itu, “Aisyiyah sebagai ibu kandung NA turut bertanggung jawab membina dan membimbing NA (SK Muhammadiyah No.3/1987 dan

Keputusan Munas NA II, 1995, p.41-43), melalui dari tingkat pusat, wilayah, daerah, cabang, dan ranting. Sedang bagi Muhammadiyah, NA merupakan kader yang akan meneruskan dan mengembangkan gerakan Islam yang telah ditentukan Muhammadiyah. Karena itu Muhammadiyah berkewajiban untuk memberikan bekal agama yang cukup kepada NA, menentukan arah pembinaan dengan membekali kemuhammadiyah, ilmu pengetahuan dan ketrampilan, serta kemampuan manajemen.

Kepatuhan ‘Aisyiyah kepada Muhammadiyah dapat dilihat melalui berbagai gerakan sejak Siswa Praja Wanita, Muhammadiyah juga berusaha untuk menanamkan dan mensosialisasikan gerakan amar ma'ruf dan nahi munkar; memberantas Tahayul, Bid'ah, Churafat (TBC); dan membangun akhlakul karimah di kalangan generasi muda putri Islam. Kesadaran sosio-kultural para pemuka Muhammadiyah ini didasari oleh fenomena masyarakat Indonesia, yang cenderung memelihara TBC. Marginalisasi ajaran Islam ini dikarenakan oleh proses akulturasi Islam dengan budaya setempat yang tidak segera direformasi. Akibatnya, tata kehidupan yang religius masyarakat tidak menampakkan ciri kehidupan yang Islami.

Wujud kepatuhan ‘Aisyiyah kepada Muhammadiyah dapat dilihat pada program kerja Majelis Kesejahteraan Sosial dan Majelis Kesehatan PDA Kota Makassar, Periode 2010 – 2015 sebagai berikut :

- a. Pendataan amal usaha.
- b. Konsolidasi dan penguatan organisasi.
- c. Meningkatkan usaha-usaha dan kualitas penanggulangan bencana, antara lain pada tanggap darurat, kesiapan SDM ‘Aisyiyah dan sinergi dengan amal usaha.
- d. Pelatihan perawatan jenazah.
- e. Membantu masyarakat dhuafa (fakir miskin).

f. Meningkatkan sosialisasi penghapusan berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dinamika kepatuhan anggota 'Aisyiyah dan kepada 'Aisyiyah kepada Muhammadiyah di balik kemandirian dan keberlanjutannya mengalami pasang surut. Secara garis besar dijelaskan bahwa, pada masa pendudukan Jepang sampai masa revolusi kemerdekaan, organisasi 'Aisyiyah mengalami stagnasi. Pada tahun 1950, suhu politik Indonesia mulai menurun, sehingga 'Aisyiyah sebagai ortom Muhammadiyah mampu mengadakan muktamar di Yogyakarta. Muktamar ini bertujuan untuk mempercepat langkah 'Aisyiyah. Muktamar ini ada beberapa perubahan yang fundamental, yaitu NA dijadikan bagian yang diistimewakan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, sehingga NA diberi wewenang untuk mengelola organisasinya sendiri.

Proses otonomi NA dimulai pada Muktamar 'Aisyiyah di Palembang tahun 1956, dimana NA dimunculkan suatu pemikiran bahwa NA sebaiknya diberi hak otonom untuk mengelola, memenej, dan membentuk jati dirinya. Prasaran dari Dra. Baroroh Baried ini belum mendapat respon yang serius. Kemudian Muktamar 'Aisyiyah pada tahun 1959 di Yogyakarta, Bagian NA yang dipegang oleh Zuhra Daris belum juga diberi hak otonom (Ibid). Ketika itu NA hanya diberi keleluasaan oleh PP. 'Aisyiyah untuk mengembangkan kegiatannya. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh NA mengembangkan diri guna menuju kedewasaannya.

Iktikad ini disambut baik oleh PP. 'Aisyiyah dengan dibuktikan oleh diberinya kesempatan bermusyawaran tersendiri. Pada Muktamar 'Aisyiyah di Jakarta tahun 1962 merupakan sinyalemen bahwa NA harus dituntut untuk mulai memikirkan kebutuhan dan pengembangan dirinya. Untuk itu pada kesempatan ini Bagian NA di bawah kepemimpinan Siti

Karimah membuat rencana kerja baru yang meliputi: kaderisasi, popularisasi NA, pembinaan, dan lain-lain. Semangat Jakarta ini betul-betul menjadi motivasi bagi NA untuk membenahi diri dan membina rumah tangganya. Semangat Jakarta ini betul-betul telah menjadi Nasyyiatul "Aisyiyah dewasa.

Sidang Tanwir 1963 telah disepakat bahwa NA diberi status otonom. Siti Karimah dan kawan-kawan mulai mengadakan persiapan-persiapan untuk mengadakan musyawarah pertamanya di Bandung. Persiapan ini mendapat bimbingan dari majlis bimbingan pemuda. Sebelum muktamar, terlebih dahulu diadakan konferensi NA di Solo. Konferensi ini bertujuan untuk menyamakan visi dan misi NA; mempersiapkan program-program kerja, penyusunan AD, berbagai hal yang berkaitan dengan keorganisasian, Berbekal hasil konferensi Solo, NA berhasil menggelar Muktamar NA yang perdana di Bandung tahun 1965, bersamaan Muktamar Muhammadiyah. Dari muktamar ini ternyata menjadi suatu hal yang surprise bagi NA, karena muktamar ini dihadiri oleh 66 daerah dan 166 cabang. Kehadiran sejumlah muktamirin NA ini menjadikan Muhammadiyah bangga, sehingga pada Muktamar Muhammadiyah berikutnya secara resmi NA mendapat status otonom dari Muhammadiyah. Secara organisatoris, NA telah terlepas dari "Aisyiyah dan mendapat pengawasan langsung dari Muhammadiyah.

Sebagai organisasi otonom Muhammadiyah yang bergerak di bidang pembinaan generasi muda wanita Islam, NA mempunyai struktur organisasi yang sama dengan Muhammadiyah, mulai dari ranting yang bertempat di kalurahan/desa, cabang pada tingkat kecamatan, daerah yang bertempat di kabupaten/ kota madya, wilayah untuk tingkat propinsi, dan tingkat pusat (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nasyyiatul "Aisyiyah, 1996). Struktur organisasi Nasyyiatul

"Aisyiyah, menurut Anggaran Dasar Pasal 14 dinyatakan bahwa Pimpinan Pusat/Pimpinan Wilayah/Pimpinan Daerah NA membentuk Departemen sebagai badan pembantu pimpinan (ayat 1). Pimpinan Cabang, Pimpinan Ranting dapat membentuk Seksi-seksi sebagai pembantu untuk melaksanakan dan memelihara usaha-usaha organisasi (ayat 2). Rincian struktur ini lebih diperjelas pada pasal 16 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga Nasyyiatul "Aisyiyah, yaitu Departemen/Seksi dalam NA, meliputi: (1) Departemen/ Seksi Kader; (2) Departemen/ Seksi Dakwah; (3) Departemen/Seksi Dokumentasi dan Informasi, dan (4) Departemen/Seksi Khusus dan Biro. Selanjutnya pada ayat 2 disebutkan bahwa usaha/kegiatan yang tidak dapat dimasukkan dalam salah satu Departemen/Seksi, dibentuk Lembaga Khusus atau Biro (AD/ART, 1996, p.34).

NA sebagai gerakan putri Islam dalam mencapai tujuannya melalui dengan beberapa periodisasi. Masing-masing periode memiliki prioritas dan spesialisasi program yang berbentuk program jangka pendek. Sedang untuk program jangka panjang NA berjangka waktu 25 tahun, dan telah dipahami bahwa masing-masing periode waktu mempunyai prioritas program yang berkaitan dan saling tergantung (interdependensi program). Program jangka panjang NA bertujuan untuk". membentuk pribadi putri Islam yang berarti bagi agama, bangsa, dan negara menuju terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi Allah swt" (Keputusan Musyawarah Nasional Pimpinan Pusat (PP) Nasyyiatul "Aisyiyah (NA) II, bulan April 1995, telah mengambil keputusan mengenai prioritas periode untuk program jangka panjang NA, meliputi : (1) Prioritas periode 1 : Kaderisasi (1985 - 1990); (2) Prioritas periode 2 : Kemubalighatan (1990 - 1995); (3) Prioritas periode 3 : Kemasyarakatan (1995 - 2000); (4) Prioritas periode 4 :

Kebangsaan (2000 - 2005); dan (5) Prioritas periode 5 : Internasionalisasi (2005 - 2010).

Implementasi program NA di atas dapat diartikan bahwa jika terdapat kekurangan dalam periode yang satu, maka akan mewarnai pada periode selanjutnya. Pelaksanaan program jangka panjang ini bersifat akumulatif (menumpuk), namun frekunsinya akan semakin berkurang. Yang menjadi stressing program adalah prioritas program pada masing-masing periode. Adapun yang dimaksud program jangka pendek NA, adalah program yang dilaksanakan untuk satu periode dengan memprioritaskan program-program yang dicanangkan dalam program jangka panjang.

Program kerja NA yang sinergi dengan ‘Aisyiyah sebagai organisasi induk merupakan kelanjutan dan rangkaian program periode sebelumnya, dan program ini yang menjadi dasar bagi pembuatan program selanjutnya setelah diadakan evaluasi dan revisi. Secara garis besar program NA yang terkait dengan kepatuhan adalah : (a) Bidang Konsolidasi Organisasi; (b) Bidang Kaderisasi; (c) Bidang Dakwah; (d) Bidang Kemasyarakatan; (e) Bidang Pengkajian. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan dunia yang semakin mengglobal, satu sisi telah mempermudah kiprah manusia dalam memahami dan menguasai dunia. Namun di sisi lain, perkembangan itu telah merusak sendi-sendi peradaban manusia dan tatanan moral agama. Budaya primordial dan hedonistis seakan menjadi idola kehidupan. Batas ruang dan waktu tidak lagi menjadi penghalang bagi transfer of technology and communication. Sehubungan dengan ini, segala macam bentuk budaya yang menyebar ke segala penjuru. Iklim keterbukaan ini perlu adanya kendali moral agar bangsa Indonesia tetap pada bingkai budayanya.

Upaya ini hanya dapat dilakukan melalui implementasi akhlak agama dalam kehidupan sehari-hari dengan melalui pembentukan sikap dan perilaku bangsa ini. Inilah yang mendasari NA untuk menyusun Matan Kepribadian. Perjuangan ini memerlukan waktu yang panjang, tidak dibatasi umur manusia. Untuk itu diperlukan generasi penerus untuk meneruskan dan menyempurnakan cita-cita NA. Penyempurnaan matan Kepribadian NA mutlak diperlukan, karena semenjak gagasan Dra. Chamamah Suratno, PP NA periode 1965 - 1968, dalam perjalanan waktu senantiasa menghadapi tantangan yang berfariatif.

Mengingat tantangan yang semakin kompleks, maka rumusan matan Kepribadian NA perlu mendapat perhatian selaras dengan tantangan yang dihadapi. Rumusan pertama Matan Kepribadian disahkan pada Muktamar NA ke-2 di Yogyakarta tahun 1968, dan sebagai tim perumusny adalah Muslimah Humam, BA. Rumusan ini ditinjau ulang dan direvisi pada Rapim PP NA 1986 kemudian disahkan pada Sidang Pleno III pada 5 September 1986, dan kemudian dikukuhkan dalam Munas tahun 1987. Penyempurnaan itu meliputi sistematika, redaksi, dan penyajiannya. Rumusan ini pada sidang Tanwir 'Aisyiyah Tahun 2005 – 2010 mengikaji ulang dan mengadakan penyempurnaan pada segi metodologi, materi, sistematika.

Kepribadian merupakan suatu keadaan jiwa yang terpancar pada sikap dan perilaku seseorang. Karena itu, sebagai ruh; kepribadian mampu membedakan antara orang yang satu dengan yang lain. Demikain pula halnya dengan NA, Kepribadian NA menjadi jati dirinya untuk membedakan antara organisasi ini dengan organisasi yang lain. Kepribadian NA, menurut Tanwir NA 1996, adalah “keseluruhan proses dan keadaan yang melekat pada gerakan NA yang meliputi hakekat dan missinya dalam berkiprah di tengah-tengah masyarakat, sehingga berbeda

dengan organisasi lainnya". Kepribadian NA bercirikan akhlakul karimah sesuai AD/ART NA.

Bagi NA, kepribadian yang dimilikinya tidak sekedar ruh organisasi saja, tetapi juga melekat pada segenap anggotanya. Karena itu kepribadian NA merupakan keseluruhan jiwa raga yang dimiliki oleh setiap anggota NA, baik sebagai kader umat, kader organisasi maupun kader bangsa, yang dimanifestasikan dalam sikap dan perilakunya. Dengan demikian sikap dan perilaku anggota NA tidak sekedar membangun citra dan cita-cita, tapi juga harus mampu membangun moralitas bangsa. Secara integral, upaya ini sangat berarti bagi Indonesia untuk membangun moralitas bangsa ini.

Sebagai ruh organisasi dan sikap serta perilaku anggota NA, Matan Kepribadian NA disusun dan dirumuskan atas dasar: (a) Muqaddimah Anggaran Dasar NA, memuat prinsip-prinsip dasar usaha dan perjuangan NA; (b) Anggaran Dasar Bab I Pasal 1 tentang nama, identitas dan kedudukan yang mencerminkan hakekat dan misi NA, sebagai organisasi otonom dan kader Persyarikatan Muhammadiyah/'Aisyiyah, serta sebagai kader umat dan bangsa; (c) Anggaran Dasar Bab II Pasal 3 tentang maksud dan tujuan NA, dan (d) Anggaran Dasar Bab II Pasal 4 tentang usaha yang harus dilakukan NA untuk mencapai tujuannya.

Dasar usaha dan perjuangan di atas dapat diartikan bahwa, NA memiliki prinsip : (1) hidup manusia harus berdasar tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah SWT; (2) menunaikan segala kewajiban agama, negara, dan bangsa untuk menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang diridhoi Allah SWT; (3) menjunjung tinggi nilai-nilai agama, ikhlas dalam beramal shalih, dan memiliki akhlakul karimah. Menegakkan

gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, seperti dicita-citakan Persyarikatan Muhammadiyah.

Secara esensi, dasar perjuangan matan Kepribadian NA merupakan upaya untuk membentuk anggota NA dan organisasi sebagai pelopor dan penerus perjuangan Persyarikatan. Inilah yang menjadi hakekat dan missi NA yang memperjuangkan dan membina putri Islam. Artinya NA berusaha menggerakkan putri-putri Islam untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam, serta mengajak dan mengarahkan orang lain sesuai dengan kehendak al-Qur'an dan as-Sunnah, yaitu terciptanya masyarakat putri Islam yang mampu mengimplementasikan akhlakul karimah.

NA sebagai organisasi kader 'Aisyiyah mempunyai tanggung jawab dalam merealisasikan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Hal ini sesuai visi dan tujuan 'Aisyiyah/Muhammadiyah. Dalam upaya merealisasikan tanggung jawab ini, NA mengambil terobosan penyiaran ajaran Islam, yaitu Dakwah Terpadu, yaitu gerakan dakwah NA yang meliputi segala aspek kehidupan dengan menggunakan metode pendekatan integratif, antara gerakan dakwah bil-lisan dengan dakwah bil-hal. Hal ini dapat diartikan bahwa, Dakwah Terpadu meliputi gerakan dakwah yang bersifat penyebaran informasi dan gerakan dakwah yang bersifat amal shalih. Upaya ini memerlukan perangkat manajemen dan sumber daya manusia yang terlatih. Karena di dalam Dakwah Terpadu meliputi beberapa program untuk mempersiapkan *software* dan *hardware* pelaksanaan Dakwah Terpadu NA. Program ini sangat berarti bagi NA dalam rangka mendinamisasikan NA di dalam mengantisipasi tuntutan dan permasalahan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks.

Program Dakwah Terpadu NA dilatarbelakangi oleh :

- 1) Faktor internal, meliputi : (1) peran NA di bidang kemasyarakatan yang terkesan belum menonjol, baik dari kuantitas maupun kualitasnya; (2) masih adanya perbedaan visi di kalangan pimpinan NA di dalam mensikapi pengembangan dan liberasi sosial kemasyarakatan; (3) masih sedikitnya tenaga penggerak (motivator) dakwah NA di bidang kemasyarakatan yang berperan ganda, yaitu sebagai mubalighot dan pengembang masyarakat, dan (4) belum adanya tanggapan (respon) yang serius dari NA mengenai kondisi sosio-kultural dan sosio-ekonomi sebagai sasaran dakwah yang tepat.
- 2) Faktor Ekternal, yaitu : (1) kondisi sosio-ekonomi masyarakat menuntut adanya model dakwah inplementatif dalam kehidupan sosio-ekonomi sehari-hari. Hal ini menjadi modal Dakwah Terpadu NA yang strategis dan praktis untuk membentuk kultur sosio-ekonomi masyarakat yang Islami; (2) perkembangan daya nalar dan tingkat pendidikan masyarakat yang semakin meningkat sangat membutuhkan model dakwah yang aplikatif, yaitu dakwah kemasyarakatan yang menggabungkan antara teori ajaran Islam yang diaplikasikan dengan kondisi dan perkembangan masyarakat, dan (3) perubahan beberapa aspek kehidupan yang makin cepat telah menimbulkan polarisasi kebudayaan dan bermacam-macam kecenderungan.

Menghadapi fenomena ini, NA tetap mendapat arahan dari ‘Aisyiyah sebagai wujud kepatuhan organisasi dan masyarakat perlu diberi penjelasan secara dini. Berbagai trend sosio-kultural yang ditandai oleh peningkatan peran wanita di dalam berbagai aspek kehidupan (sosil, ekonomi, politik, budaya) yang menuju pada kemandirian wanita. Sinyalemen ini bagi NA harus dimanfaatkan secara oprimal, terutama dalam mempersiapkan sumber daya putri Islam. NA menjadi sarana yang

strategis dalam membina dan mendidik sumber daya putri Islam agar memiliki kredibilitas, kapabilitas, profesionalisme, dan mencerminkan ahlakul karimah. Dakwah Terpadu yang dijalankan ‘Aisyiyah bertujuan :

- a) Dakwah yang memadukan antara dakwah bil-lisan dengan dakwah bil hal mampu menjawab tantangan dan perkembangan zaman dengan pemenuhan tuntutan dan menjawab permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian dalam jangka panjang, eksistensi dan peran ‘Aisyiyah di masyarakat akan dirasakan kehadirannya, baik secara kuantitas maupun kualitasnya.
- b) Program Dakwah Terpadu akan mampu menjawab permasalahan socio-kultural dan socio-ekonomi dengan menegakkan gerakan amar ma'ruf nahi munkar di kalangan putri Islam. Tujuan ini dapat dilaksanakan jika didukung oleh pemahaman kaidah Islam, baik secara integral maupun diferensiasi ajaran.
- c) Dakwah aplikatif diharapkan mampu menyamakan visi – misi ‘Aisyiyah. Mengingat kesatuan pandangan organisasi sangat bermanfaat untuk mengefektifkan gerakan yang dijalankan oleh NA. Dan pada akhirnya, program ini mampu menambah tenaga penggerak yang berperan ganda, yaitu sebagai mubalighot dan pengembang kemasyarakatan.
- d) Dakwah Terpadu ‘Aisyiyah menelaraskan aspek kehidupan masyarakat dengan perkembangan IPTEK. Hal ini sangat berguna bagi kebangkitan dunia wanita, mengingat dakwah ini mengangkat dan membina peran wanita secara Islami.

“Aisyiyah merupakan salah satu organisasi otonom Muhammadiyah. Dengan demikian “Aisyiyah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan cita-cita Muhammadiyah, hanya bidang garapannya yang berbeda. NA mempunyai bidang sasaran pada

generasi muda wanita untuk dibina agar menjadi pelopor, pelangsong, penyempurna, dan pembaharu usaha dan cita-cita Muhammadiyah. Antara "Aisyiyah dan NA memiliki status yang sama di Muhammadiyah, namun secara informal "Aisyiyah mempunyai posisi lebih tinggi dibanding NA. Fakta menunjukkan bahwa NA merupakan kader utama "Aisyiyah. Karena itu, "Aisyiyah sebagai ibu kandung dari NA, ikut bertanggung jawab membina dan membimbing NA (SK Muhammadiyah No.3/1987 dan Keputusan Munas NA II, 1995, p.41-43), melalui dari tingkat pusat, wilayah, daerah, cabang, dan ranting. Sedang bagi Muhammadiyah, NA merupakan kader yang akan meneruskan dan mengembangkan gerakan Islam dan gerakan dakwah Muhammadiyah. Karena itu, Muhammadiyah berkewajiban memberikan bekal agama kepada NA, serta menentukan arah pembinaan (Dokumentasi PPA, Yogyakarta, Maret 2012).

Kecenderungan awal abad ke-21 akan diwarnai berbagai perubahan, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Perspektif ini ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat, sehingga telah mempermudah umat manusia di dalam mengembangkan jati dirinya. Kondisi ini telah merubah sikap manusia di dalam berkompetisi menguasainya. Karena itu bagi yang menguasainya, maka dunia akan mudah ditaklukkan. Namun itu sulit dilakukan, karena masing-masing bangsa memiliki motivasi untuk berkompetisi. Akibatnya adalah memasuki millenium III akan diwarnai interdependensi global dalam segala bidang.

Potret manusia abad ke-21 akan diwarnai berbagai bentuk dinamika dan perubahan. Menurut Toeffler (dalam Sztompka, 2004), perkembangan teknologi, komunikasi, komputerisasi, dan bio-teknologi telah menyebabkan perubahan masyarakat sedemikian cepat. Penemuan

dan pengembangan teknologi informasi telah menyebabkan terjadinya globalisasi informasi dan budaya. Ruang dan waktu tidak lagi menjadi batas untuk pertukaran arus informasi. Bahkan masyarakat sangat dipengaruhi dan bergantung pada informasi. Artinya setiap orang yang ingin survive, maju, dan memiliki kualitas tertentu selalu membutuhkan informasi. Tanpa memiliki informasi, orang akan terlindas dan tertinggal.

Seorang pelaku bisnis akan menguasai pasar, jika dia menguasai informasi pasar, konsumen, moneter, manajemen, dan teknologi. Demikian pula halnya seorang pemimpin akan memiliki kualitas, jika dia didukung oleh kapabilitas informasi yang dimilikinya, seperti pranata sosial, perundang-undangan, peraturan, dan perangkat lunak lainnya. Demikian pentingnya informasi bagi manusia ternyata telah menggeser nilai-nilai dan tatanan masyarakat. Pola hidup dan budaya asing lambat laun telah memarginalkan nilai-nilai dan tatanan agama.

Manusia secara formal menganut suatu agama, namun keberadaan Tuhan merupakan Dzat yang "sangat jauh" di sana. Tuhan tidak menyatu dan mewarnai perilaku manusia. Masyarakat cenderung dipengaruhi oleh nilai-nilai sekularisme, pesimisme, materialisme, hedonisme, serta nativisme, bahkan primordialisme dan anarkhisme. Kondisi ini diperparah lagi dengan timbulnya masyarakat saintifik, yaitu masyarakat yang lebih menitikberatkan pada logika, rasionalitas dan objektivitas, sementara faktor relijiusitas dapat dikesampingkan. Menghadapi kenyataan ini, Muhammadiyah mempunyai peran yang sangat strategis di dalam menyikapinya.

Muhammadiyah bertanggung jawab untuk membina generasi muda melalui Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) agar AMM turut memikul penyebaran ajaran Islam dan moralitas agama kepada masyarakat. Karena itu, NA secara struktural merupakan salah satu

bagian dari AMM yang turut bertanggung jawab atas cita-cita Muhammadiyah. Dengan kata lain, NA dan 'Aisyiyah dituntut untuk kreatif dan inovatif di dalam memainkan perannya dalam masyarakat sesuai wilayah otonom yang dimiliki, namun tetap dalam koridor kepatuhan organisasi yang telah ditentukan. Kemajuan IPTEK harus dimanfaatkan untuk kemajuan NA di dalam bermain dakwah. Artinya, NA secara bijak harus bersatu dengan IPTEK, serta IPTEK dimanfaatkan untuk sarana dakwah secara ilmiah.

Globalisasi informasi membantu penyebaran informasi keagamaan (dakwah bil-lisan) lewat media masa. Derasnya informasi dapat menambah khasanah pemberdayaan sumber daya putri Islam. Di pihak lain, NA dituntut melakukan dakwah interaktif-dialogis di dalam mensikapi proses pergeseran nilai-nilai. Menurut salah seorang informan yang banyak membina NA, juga sebagai pengurus 'Aisyiyah menjelaskan bahwa NA sebagai kader utama 'Aisyiyah dan Muhammadiyah perlu terlibat dalam mengenal seluk beluk dan memahami berbagai persoalan moralitas terutama nilai-nilai dan norma-norma Islam kontemporer. Keterlibatan NA ini secara aktif melalui telaah historis-problematika dan telaah sosiologis. Hal ini merupakan agenda yang sangat urgen untuk menentukan kebijakan program Dakwah Terpadunya. Tanpa adanya sikap peduli terhadap masalah moralitas yang kontemporer, niscaya posisi NA akan terlibas dalam percaturan informasi global. Karena itu, NA sejak dini telah memiliki jati diri, terutama sebagai gerakan moralitas keagamaan yang dibangun berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah.

Dalam bahasa yang sederhana, NA harus kreatif dan inovatif di dalam membumikan semangat dan pesan al-Qur'an dan as-Sunnah guna membangun moralitas generasi muda yang berlandaskan keagamaan dalam mensikapi perkembangan dunia yang semakin pesat. Semangat

keagamaan harus menjadi modal utama bagi NA di dalam percaturan informasi global. Senada dengan itu, penjelasan ketua PDA Kota Makassar bahwa kedudukan ‘Aisyiyah sebagai system yang otonom tetap patuh kepada Muhammadiyah, dan NA sebagai organisasi kader tetap dalam kolidor dan kendali ‘Aisyiyah dalam mengelola dan mengembangkan amal usaha.

Pertimbangan yang perlu diklarifikasi terkait dengan kepatuhan dan keberlanjutan ‘Aisyiyah agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, Hal ini telah lama dipikirkan semua pengurus dan anggota ‘Aisyiyah Kota Makassar. Apabila dicermati berbagai pertanyaan selama ini muncul tentang “mengapa ‘Aisyiyah belum melaksanakan Mukttamar sendiri?. Jawabnya jelas, ‘Aisyiyah telah melaksanakan Mukttamar sendiri terpisah dari Muhammadiyah, hanya waktunya yang bersamaan demikian juga tempat (daerah/kota yang sama) sehingga terkesan ‘Aisyiyah selalu bergantung kepada Muhammadiyah.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa, pelaksanaan Mukttamar ‘Aisyiyah yang terpisah dengan Mukttamar Muhammadiyah. Namun, waktu dan kota tempat pelaksanaan Mukttamar tetap sama adalah salah satu bentuk kepatuhan ‘Aisyiyah kepada Muhammadiyah yang tetap terjaga dan terpelihara. Hal ini seperti dijelaskan oleh Ketua PDA Kota Makassar tentang wujud realisasi kepatuhan anggota organisasi kepada ‘Aisyiyah sebagai berikut :

- 1) Hal tersebut telah menjadi pertimbangan semua pengurus dan anggota ‘Aisyiyah bahwa berkaitan dengan kepatuhan melalui pembinaan kader dari usia dini (TK – SD) bahkan perguruan tinggi. Namun, alasan-alasan rasional terkait dengan posisi ‘Aisyiyah yang paradoks, yaitu di satu sisi sebagai sistem yang otonom; namun di sisi

lain ‘Aisyiyah sebagai bagian dari Muhammadiyah sehingga menjadi pertimbangan utama.

- 2) Meskipun ‘Aisyiyah baru membina satu SD, tetapi pengelolaannya cukup permanen dan layak dibanding SD yang dibina Muhammadiyah. Karena itu, ke depan ‘Aisyiyah sudah memikirkan untuk menambah SD sebagai jawaban atas pertanyaan dan desakan berbagai kebutuhan, terutama di kalangan ‘Aisyiyah sendiri. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan ialah “aspek kemandirian”. Harus dipahami bahwa, kemandirian ‘Aisyiyah dalam mengelola amal usaha adalah betul-betul swadaya.
- 3) Sekali lagi saya tekankan, bukan berarti kami tidak menerima bantuan dari pihak lain (terutama Muhammadiyah dan Pemerintah). Tapi kami mengelola dan mengembangkan amal ‘Aisyiyah usaha atas prakarsa dan swadaya murni dari segenap pengurus dan anggota. Dengan kata lain, ada atau tidak ada bantuan amal usaha ‘Aisyiyah harus berjalan. Fakta menunjukkan, setelah berkembang baru berdatangan bantuan sebagai keberlanjutan dari amal usaha tersebut, karena semua amal usaha yang dikelola ‘Aisyiyah adalah milik ummat untuk membantu mencerdaskan kehidupan dan keterbelakangan masyarakat.
- 4) Khusus di bidang kesehatan, amal usaha yang di bawah koordinasi Majelis Kesehatan sudah banyak melakukan berbagai kegiatan, seperti pengobatan gratis, dan lain-lain. Sebagai contoh, cabang Bontoala sudah memiliki jadwal dan nama-nama pasien (keluarga) yang akan dibantu. Oleh karena itu, Majelis Kesehatan sudah mempunyai jadwal tetap pengobatan gratis yang akan dilaksanakan.

Selain berbagai kegiatan yang telah dikemukakan di atas sebagai wujud kepatuhan anggota organisasi kepada ‘Aisyiyah, juga program

yang merupakan cita-cita bersama organisasi ‘Aisyiyah dan Muhammadiyah yang direalisasikan secara mandiri dan berkesinambungan hingga saat ini, yaitu: “Terbangunnya kualitas aqidah, akhlak, ibadah, dan muammalah di kalangan umat yang berlandaskan nilai-nilai Qur’an dan Sunnah melalui pesan-pesan yang bersifat pencerahan dan berkemajuan”.

Kajian sosiologi tentang kemandirian sebuah organisasi, khususnya ‘Aisyiyah Kota Makassar yang dibahas dalam penelitian ini ditinjau dari tiga aspek, yaitu medan visional, paradoks independensi, dan autopoiesis. Dalam hubungan dengan sosiologi, ketiga aspek tersebut dapat dijelaskan melalui pandangan teoritis sistem terkemuka dalam sosiologi yaitu Niklas Luhmann, mengembangkan suatu pendekatan sosiologis yang mengombinasikan elemen dalam fungsionalisme struktural Talcott Parsons dengan teori sistem umum serta memperkenalkan konsep dari biologi kognitif, sibernetika dan fenomenologi. Luhmann memandang ide-ide Parsons yang belakangan sebagai satu-satunya teori umum yang cukup kompleks untuk membentuk basis bagi pendekatan sosiologi baru yang merefleksikan temuan terakhir dalam sistem biologi dan sibernetik.

Lebih lanjut Luhmann menjelaskan bahwa, *Social Systems* tidak bertujuan untuk melakukan analisis sosiologis ataupun merumuskan teori tentang masyarakat, tetapi hendak mengelaborasi kerangka konseptual atas teori-teori masyarakat tersebut. Dalam hal ini, *Social Systems* menyediakan suatu instrumen konseptual untuk mengamati berbagai gejala yang ada di dalam realitas sosial, seperti masyarakat, organisasi, dan interaksi-interaksi yang terjadi di dalamnya. Teori sistem hendak mempertanyakan kondisi-kondisi kemungkinan bagi analisis tentang dunia sosial. Akan tetapi, tidak seperti yang dilakukan oleh Kant, teori

sistem Luhmann tidak menganalisis subyek yang mengetahui, melainkan berpaling kepada realitas sosial yang memiliki karakter penentuan dan pengaturan dirinya sendiri yang dapat diamati secara inderawi. Fokus dari seluruh analisis teori sistem adalah problematika kompleksitas sosial sebagai subsistem yang bersifat partikular, yakni dari ilmu-ilmu sosial dengan analisis kualitatif.

Dalam konteks ini, kemandirian 'Aisyiyah ditinjau dari sudut pandang sosiologi terkait dengan pandangan Luhmann di atas, 'Aisyiyah merupakan subsistem dari kompleksitas sosial yang lebih besar, yaitu Muhammadiyah yang dibangun di atas pondasi "amar makruf nahi munkar" (medan visional) yang sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan demikian, 'Aisyiyah Kota Makassar didirikan jauh sebelum Indonesia merdeka (1926), terus berkembang dan mandiri karena medan visional yang mengikat para anggota untuk bergerak bersama, serta berkontribusi mewujudkan visi dan tujuan organisasi, yaitu "tegaknya agama Islam dan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya".

Terkait dengan paradoks independensi tentang kemandirian 'Aisyiyah dalam kajian sosiologi, sebagaimana Luhmann mendefinisikan apa yang dimaksud kompleksitas (*complexity*) dengan dua konsep, yakni antara sistem yang saling terkait dengan elemen-elemen atau sistem-sistem di sekitarnya, dan keterkaitan tersebut tidak lagi menjadi signifikan. Dalam kajian teori-teori informatika, kompleksitas sistem tidak lagi diteropong melalui keterkaitannya dengan sistem ataupun dengan lingkungan (sesuatu yang di luar sistem), melainkan dengan keseluruhan sistem itu sendiri. Dalam posisi paradoks (mendua), di satu sisi 'Aisyiyah adalah sistem otonom dalam mengelola amal usaha, namun

di sisi lain, ‘Aisyiyah merupakan bagian dari Muhammadiyah dari waktu ke waktu sehingga tetap eksis dan mandiri.

Kompleksitas selalu membutuhkan pemilahan untuk dapat dimengerti, dan pemilahan seringkali menciptakan reduksi, yaitu reduksi kompleksitas melalui pembedaan. Dalam hal ini, Luhmann menyebut pembedaan tersebut sebagai ‘pembedaan kompleksitas’ antara sistem di satu sisi, dan lingkungan di sisi lain. Dengan demikian, kemampuan untuk mereduksi kompleksitas dapat dianggap sebagai mekanisme perlindungan diri (*defense mechanism*) dari sistem tersebut. Reduksi juga memungkinkan sistem untuk mengatur dimensi internalnya sendiri, sehingga kompleksitas yang tidak tertata dapat diubah menjadi kompleksitas yang tertata (*organized complexity*). Seperti telah disinggung sebelumnya, kompleksitas membutuhkan pemilahan, dan pemilahan tentu menyediakan kemungkinan-kemungkinan pembedaan, dan kemungkinan itu tentunya mengandaikan adanya resiko.

Dengan demikian, realitas yang berlangsung di ‘Aisyiyah sejak awal didirikan hingga sekarang ternyata relevan dengan apa yang dijelaskan oleh Luhmann tentang kompleksitas sebuah sistem dalam kondisi paradoks, yaitu kemungkinan selalu mengandaikan adanya resiko (*risk*). Pilihan yang tidak tepat dari berbagai kemungkinan akan membuat sistem hancur. Tantangan terberatnya tentu saja adalah sulitnya memberikan definisi-definisi yang koheren terhadap kompleksitas sistem tersebut. Kompleksitas tidak pernah sungguh-sungguh dapat diamati dan dipilah-pilah. Setiap upaya memahami kompleksitas selalu mengikutsertakan proses reduksi, yakni mengubah kompleksitas yang tidak terorganisir menjadi terorganisir.

Proses reduksi yang dimaksud Luhmann dalam kompleksitas sistem relevan dengan proses perubahan yang dilakukan ‘Aisyiyah, yaitu

dengan perhitungan-perhitungan yang bersifat strategis. Dalam hal ini, organisasi 'Aisyiyah adalah subsistem yang otonom melihat potensi perkembangan dari kompleksitas sistem yang lebih besar, yaitu Muhammadiyah. Artinya, semua anggota dan pengurus harus siap menerima bahwa, 'Aisyiyah adalah bagian dari Muhammadiyah, karena terikat oleh visi dan tujuan bersama.

Dalam kemandirian ''Aisyiyah terkait dengan autopoiesis ditinjau dari aspek sosiologis Luhmann banyak dipengaruhi oleh Humberto Maturana, terutama pada tesisnya bahwa sistem memiliki ciri yang bersifat autopoiesis. Suatu sistem, demikian Maturana, terdiri dari jaringan-jaringan produksi dari komponen-komponen, yang melalui interaksinya, membentuk dan menyadari jaringan yang memproduksi mereka, di dalam ruang dimana mereka ada, batas-batas jaringan sebagai komponen yang berpartisipasi di dalam perwujudan jaringan tersebut. Yang membedakan sistem yang bersifat autopoiesis dengan sistem tertutup adalah karakter rekursifitasnya, yakni bahwa mereka tidak hanya memproduksi dan mengganti sendiri struktur-struktur mereka, tetapi semua yang digunakan sebagai unit di dalam sistem diproduksi juga sebagai unit di dalam sistem itu sendiri. Demikian 'Aisyiyah Kota Makassar terus berkembang dan mandiri karena sistem autopoiesis yang dilakukan dari waktu ke waktu, dari fase ke fase selalu memproduksi dirinya sendiri seiring dengan tuntutan perubahan dan kebutuhan lingkungan eksternalnya, yaitu masyarakat, bangsa, dan negara.

Refleksi tentang teori sistem sebenarnya dapat dirunut dalam sejarah filsafat itu sendiri. Ide tentang adanya sistem yang mampu mengatur dan mereproduksi dirinya sendiri memiliki logika internal, bahwa adanya tujuan final dari seluruh gerak alam. Semua refleksi semacam ini dapat ditemukan di dalam metafisika Aristoteles,

Monadology tulisan Leibniz, dan *Critique of Judgment*-nya Immanuel Kant. Dengan munculnya dominasi kaum borjuis pada abad ke-18, hampir semua teori politik, ekonomi, dan etika mulai untuk menyelidiki bagaimana relasi antara bagian dengan keseluruhan, yakni tentang bagaimana individu-individu sebagai bagian dari komunitas akhirnya dapat membentuk komunitas bersama tanpa saling menghancurkan. Refleksi ini banyak dikenal sebagai problem tatanan. Sampai sekarang, problematika tatanan tetap berada di dalam selubung misteri yang hanya dapat dipikirkan secara spekulatif dalam perdebatan panjang, dan tidak pernah berakhir.

Dalam kerangka perdebatan serupa, teori sistem banyak dipengaruhi terjadinya dua perubahan paradigma yang membuat problematika tatanan tidak lagi sekedar spekulasi metafisika, tetapi menjadi bagian dari penelitian saintifik. *Pertama*, perubahan paradigma yang dimotori oleh Ludwig von Bertalanffy, seorang biofisiolog dari Jerman pada pertengahan dekade 1950-an. Dalam hal ini, mengganti pembedaan antara bagian dan keseluruhan dengan pembedaan antara sistem dan lingkungan. Dengan pembedaan ini memungkinkan refleksi problematika tatanan berelasi dengan analisis dari disiplin ilmu lainnya. Misalnya; sibernetik, teori informasi, dan ilmu komputer. *Kedua*, perubahan paradigma ditandai dengan perubahan distingsi antara sistem dengan lingkungan menjadi suatu teori tentang sistem yang dapat membentuk dan mereproduksi dirinya sendiri.

Prinsip pengaturan diri ini disebut oleh Heinz von Foerster sebagai tatanan yang muncul dari kekaduhan. Penelitian tentang hal ini berkembang menjadi sebuah kajian multidisipliner yang melibatkan fisika, sibernetika, dan biologi. Jika para ahli dapat menemukan kesamaan pola di dalam gerakan atom-atom yang berkumpul, sel-sel biologis, pola

pergantian cuaca, terciptanya koloni-koloni serangga, serta pergerakan pasar, maka mereka dapat merumuskan sebuah teori yang mampu mengkonseptualisasi semua kesamaan itu tanpa menghilangkan perbedaan antara fenomena yang beragam tersebut.

Luhmann ikut ambil bagian di dalam proyek multidisipliner ini, tetapi setelah melalui penelitian yang terus menerus, proyek ini pun mengalami halangan yang besar, terutama dari argumen yang menyatakan bahwa ada perbedaan yang bersifat ontologis antara realitas kehidupan sosial manusia dengan realitas non sosialitas manusia. Oleh karena itu, pendekatan untuk memahaminya pun juga berbeda. Setiap upaya mereduksi realitas sosial ke dalam sistem dan fungsi selalu dicurigai sebagai timpang baik etis maupun politis. Pendekatan yang bersifat autopoiesis terhadap masyarakat mendapat tantangan baru. Di satu sisi, pertanyaan tentang pelestarian dan reproduksi sistem beralih menjadi pertanyaan tentang bagaimana struktur sistemik dapat digambarkan sebagai tatanan yang timbul dari kekacauan.

Bertitik tolak dari perkembangan ini, Luhmann menolak teori Parsons yang bersifat fungsionalis. Hal ini karena konsep autopoiesis tidak dapat diterapkan untuk menganalisis realitas sosial. Alasannya, jika sudah sepakat bahwa masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang dibentuk oleh elemen-elemen organisme yang hidup (manusia), maka tidak mungkin menjelaskan proses reproduksi sistem sosial tersebut tanpa menjelaskan elemen-elemen pembentuknya. Dengan manuver teoritis yang brilian, Luhmann mengajukan solusi atas dilema ini dengan mengkonseptualisasi ulang realitas sosial yang sedemikian rupa, sehingga memungkinkan penerapan konsep autopoiesis. Ia berpendapat bahwa premis Aristoteles yang menyatakan bahwa sistem sosial analog dengan organisme hidup (*living organism*) haruslah dilepaskan. Sistem sosial

jangan dipikirkan sebagai sebuah organisme hidup, melainkan sebagai sistem yang terdiri dari komunikasi-komunikasi elemen terdasarnya, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam waktu, dan membentuk tatanan yang muncul dari kompleksitas masyarakat yang bersifat temporal.

Karakter temporalitas tidak hanya dapat diterapkan di dalam analisis tentang sistem sosial, tetapi juga dapat diobservasi pada proses reproduksi sel-sel tubuh, sel-sel otak, serta perkembangan sistem psikis manusia. Akan tetapi, pola autopoiesis, temporalitas, dan kompleksitas sistem sosial tentu berbeda dengan sistem-sistem biologis. Proses reproduksi sel terjadi pada proses-proses kimia. Otak berfungsi juga dengan berdasarkan impuls-impuls neurofisiologis, sedangkan sistem sosial berfungsi dan berkembang dengan menjadikan kesadaran sebagai elemen dasarnya. Kesadaran itu terlihat di dalam proses komunikasi (*Social Systems Communications*), dan proses komunikasi membutuhkan makna untuk proses reproduksinya.

Konsep makna memiliki peranan sentral dalam teori sistem Luhmann. Konsep ini digunakan tidak dalam oposisi dengan “ketidakbermaknaaan” (*meaninglessness*), seperti dalam tradisi-tradisi hermeneutika, melainkan dalam arti fenomenologis (*phenomenological sense*). Artinya, konsep makna merupakan sebuah kerangka kemungkinan yang hadir dalam semua bentuk sistem sosial. Dengan kata lain, makna merupakan kondisi-kondisi yang memungkinkan sistem sosial terbentuk dan beroperasi. Luhmann tidak dapat memaksudkan hal ini sebagai kesadaran diri transcendental, yang menurut Kant, menjadi kondisi yang paling mendasar bagi terciptanya pengetahuan, melainkan sebagai kondisi kemungkinan yang terlebih dahulu harus dipenuhi bagi gerak empiris dari sistem sosial yang memiliki karakter autopoiesis.

Dengan demikian, memandang 'Aisyiyah sebagai sistem berarti sama halnya memandang masyarakat sebagai proses-proses komunikasi makna yang membentuk sebuah realitas sosial yang bersifat kompleks, temporal, dan autopoiesis. Tesis ini tentunya mengubah seluruh konsepsi mengenai hakekat dari tindakan sosial individu, peran bahasa, dan status subyek di dalam analisis sosiologi. Dalam hal ini, Luhmann menggabungkan analisis fungsionalis di dalam sosiologi dengan pendekatan fenomenologis di dalam filsafat yang dirumuskan oleh Husserl, untuk mendekatkan dua tradisi ini membuka ruang dimana berbagai disiplin tradisional dapat dipikirkan kembali dengan cara yang dapat membawa tradisi berpikir humaniora melampaui hermeneutika, dan menuju era informasi.

Dalam hal keberlanjutan organisasi ''Aisyiyah Kota Makassar ditinjau dari sudut pandang sosiologi terkait dengan pandangan, sebagaimana telah dijelaskan oleh Brinkerhoff dan Goldsmith, bahwa keberlanjutan organisasi atau lembaga oleh para analis sering kali mengungkapkan alasan tertentu. Lembaga merupakan sistem yang dibangun dari sebuah ide. Ada beberapa alasan yang dimaksud, antara lain: (1) bahwa teori sistem merupakan hal yang cukup umum untuk menutupi keberlanjutan permasalahan dalam lembaga pada semua jenis, mulai dari tanda atau kode yang formal sampai kepada yang tidak formal untuk dilakukan; (2) bahwa teori sistem secara simultan ditentukan oleh proses internal dan hubungan diantara sistem dan lingkungannya sendiri. Hal inilah kemudian mendorong untuk memandang secara luas berbagai faktor sosial, ekonomi, politik, teknis dan lainnya yang mempengaruhi keberlanjutan, dan (3) bahwa teori sistem menekankan pada hubungan diantara unsur-unsur yang terpisahkan, dan memungkinkan untuk

memunculkan aspek-aspek agro lingkungan, ekonomi dan aspek manajerial dari keberlanjutan tersebut.

Lebih lanjut Brinkerhoff & Goldsmith menjelaskan bahwa, teori sistem menyajikan pedoman tentang bagaimana menggambarkan hubungan antara proses sistem internal dan eksternal. Teori kemungkinan menjadi pengganti kesenjangan ini. Penyajian teori ini agar lembaga-lembaga dapat mencapai hubungan yang lebih baik. Selain itu, alasan penggunaan teori kemungkinan adalah untuk menghindari tendensi, perluasan referensi pada keberlanjutan lembaga yang direkomendasikan secara luas. Dengan demikian penjelasan ini relevan dengan pola keberlanjutan yang dikembangkan oleh "Aisyiyah dalam mengelola unit-unit organisasi (amal usaha) sebagai suatu kesatuan (subsistem) dalam keberagaman dan kompleksitas sistem untuk memenuhi tuntutan kebutuhan lingkungan eksternalnya, sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku melalui input, proses, dan output.

Konsep keberlanjutan yang dikembangkan dalam organisasi 'Aisyiyah, ternyata relevan dengan pandangan para ahli sosiologi terkait dengan upaya mendeskripsikan dan menjelaskan perilaku organisasi umumnya berasal dari teori sistem. Sebagai contoh, ahli biolog Ludwig von Bertalanffy menyatakan bahwa teori sistem dianalogikan dengan sistem yang ada pada organisme. Organisme sel itu terdiri atas sel-sel, dan sel-sel membentuk suatu molekul. Tiap bagian yang ada membentuk sistem terintegrasi dan terdiri dari struktur yang saling terkait dan bekerja secara harmonis. Tiap molekul tahu tugasnya masing-masing dan bekerjasama serta memenuhi aturan yang ada.

Hukum keteraturan merupakan konsep yang bersifat menyeluruh. Ide tentang keteraturan adalah ide dasar dalam memahami dan menganalisis situasi yang kompleks. Dengan demikian, teori sistem

memiliki dua konsep dasar yaitu: pertama, konsep subsistem yang melihat hubungan antar bagian sebagai hubungan sebab akibat. Konsep kedua memandang bahwa sebab jamak sebagai hubungan yang saling berkaitan yakni tiap bagian merupakan kompleks (kumpulan) yang tiap faktornya saling berkaitan.

Dalam konteks keberlanjutan, ada dua pola sistem yakni *open system* (sistem terbuka) dan *closed system* (sistem tertutup) dalam hubungan organisasi dengan lingkungan eksternal. Suatu sistem adalah “terbuka”, jika mempunyai transaksi dengan lingkungan mana ia berada. Transaksi antara suatu organisasi dengan lingkungannya mencakup “input” dan “output”. Input biasanya dalam bentuk informasi, energi, uang, pegawai, material dan perlengkapan yang diterima organisasi dari lingkungannya. Output organisasi pada lingkungannya dapat berbentuk macam-macam tergantung pada sifat organisasi. Demikian halnya yang dikembangkan ‘Aisyiyah adalah sistem terbuka (*open system*) dalam mengelola unit-unit (amal usaha).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa, hubungan pada tiap aspek input, proses, dan output yang ada di tiap-tiap unit dengan lingkungan yang lebih luas (masyarakat dan pemerintah) merupakan suatu interaksi yang membentuk siklus yang tiada akhir. Konsep input, proses, dan output sering kali disebut sebagai model linear, yaitu teori yang menjelaskan bagaimana sistem dapat dijelaskan dalam konteks dunia nyata. Dalam hal ini, suatu teori yang beranjak dari konsep umum ke khusus yang tampak logis, rasional dan teratur berupaya untuk mencari jawaban terhadap upaya menghubungkan nilai input, proses, dan nilai output sehingga menghasilkan efisiensi biaya. Dalam konteks ‘Aisyiyah sebagai organisasi sosial yang bergerak di bidang dakwah keagamaan dan kemasyarakatan, seperti sekolah, rumah sakit, dan panti

asuhan, berupaya mewujudkan visi dan tujuan yang telah ditentukan dengan keyakinan, komitmen, dan prinsip yang dipahami bersama.

Sejalan dengan penjelasan di atas, bahwa keberlanjutan organisasi ''Aisyiyah terkait dengan teori sistem dalam menganalisis program kerja dan kebijakan organisasi sesuai dengan pandangan Brinkerhoff dan Goldsmith, antara lain: (1) sistem teori diciptakan dan berlanjut untuk mencapai tujuan umum yang lebih baik daripada tindakan individu; (2) sistem teori dapat mengembangkan subsistem, mencapai tujuan organisasi, dan peningkatan efisiensi; (3) sistem teori menganut pola otoritas dan hubungan komunikasi untuk terhubung dan terintegrasi secara khusus dari kegiatan subsistem, dan (4) sistem teori tergantung pada transaksi dengan unsur luar dan lingkungan untuk menyiapkan input, memahami proses, dan mendapatkan output yang diperlukan untuk mempertahankan dan mengembangkan sistem.

Berdasarkan uraian di atas terkait dengan keberlanjutan organisasi sebagai sistem, ada beberapa definisi kunci yang perlu dipahami sebagai berikut: (a) Input ialah berupa sumberdaya, bahan mentah, uang, manusia, informasi dan pengetahuan yang dimiliki organisasi dan lingkungannya, serta kontribusi untuk menciptakan output; (b) proses adalah rangkaian kegiatan atau program sesuai dengan kebutuhan input yang diterima dari lingkungan, dan (c) output adalah berupa produk atau jasa, layanan, program, dan ide yang dihasilkan dari tindakan organisasi. Selain itu, keberlanjutan sebuah organisasi juga ditentukan teknologi meliputi mental, fisik dan mekanis untuk mentransformasikan sumberdaya ke dalam output.

Lingkungan, terdiri dari lingkungan pekerjaan yang meliputi organisasi eksternal dan kondisi yang mempengaruhi suatu operasi utama dari organisasi dan teknologi, seperti klien, pesaing, pasar dan lingkungan

umum meliputi lembaga dan kondisi yang mempengaruhi keberlanjutan organisasi. Kemudian maksud-strategi, yakni tujuan, rencana dari pembuat keputusan untuk dominasi organisasi, dan yang tidak kalah pentingnya ialah memahami budaya, norma, kepercayaan, nilai kehidupan berorganisasi, dan struktur hubungan semua anggota dan unit-unit yang lebih besar.

Mengenai kepatuhan "Aisyiyah sebagai organisasi yang berkembang dan berkelanjutan sebagaimana dijelaskan oleh Etzioni dalam Liliweri bahwa, sebuah organisasi dapat berjalan karena di dalamnya ada kepatuhan, baik oleh pengurus maupun anggota. Kepatuhan dalam organisasi dapat diukur dari power dan keterlibatan. Power pada pengurus dan keterlibatan pada anggota. Sehubungan dengan hal itu, Etzioni menyusun skema klasifikasi organisasi berdasarkan sifat-sifat perilaku (*compliance*). Etzioni memasukkan *compliance* sebagai sikap yang umumnya dimiliki sebagian besar unit-unit sosial bahkan masyarakat. Menurutnya, perilaku (*compliance*) adalah unsur utama yang menata hubungan antara mereka yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan dengan pihak yang dikuasai dan diwenangi.

Dalam konteks sosiologi, power yang dimaksud adalah berdasarkan koersif, remuneratif, dan normatif, sedangkan keterlibatan ialah berdasarkan prinsip alienatif, kalkulatif, dan moral. Karena itu, Etzioni menjelaskan bahwa, dalam semua organisasi, para anggota selalu dihubungkan dengan anggota lain melalui hubungan hierarki yang menyebabkan para anggota mempunyai kedudukan lebih tinggi diberi kekuasaan dan kewenangan yang lebih besar. Kekuasaan dan kewenangan tersebut diatur dan dilegitimasi. Demikian pula, kedudukan selalu memiliki kuasa dan wewenang dalam menata hubungan atasan dengan bawahan.

Apabila para anggota (bawahan) tetap bertindak sebagai partisipan yang rendah, maka anggota tersebut akan merasa terasing atau diasingkan. Selaliknya, jika para anggota merasa tidak diasingkan maka akan terlibat di dalam organisasi, sekaligus merasa memiliki organisasi. Dengan demikian, setiap bawahan selalu memperhitungkan keuntungan dan kerugian yang dapat diperoleh melalui hubungan yang tercipta dalam organisasi. Kondisi ini tidak ditemui dalam organisasi ‘Aisyiyah, karena kepatuhan yang tercipta dan berkembang dalam organisasi ini ialah atas dasar moral, bukan remunerasi, honor (insentif), atau paksaan, tetapi rasa memiliki bersama semua amal usaha dalam berkontribusi dengan prinsip “amar makruf nahi munkar”.

Secara umum dapat ditegaskan bahwa, realitas kepatuhan anggota kepada ‘Aisyiyah dan kepatuhan ‘Aisyiyah kepada Muhammadiyah adalah relevan dengan penjelasan teori kepatuhan oleh Etzioni yang menawarkan sintesis sistem organisasi untuk mengamankan kepatuhan anggota. Hal ini, sesuai dengan persyaratan dan mengikuti standar perilaku yang ditetapkan, berorientasi pada tujuan, diarahkan kinerja memerlukan kepatuhan anggota. Namun, fakta menunjukkan bahwa penyimpangan dari standar terjadi karena kelemahan dalam komitmen anggota. Sistem kontrol yang diberikan anggota organisasi, baik manajer maupun anggota lain. Dalam kepatuhan dipastikan dengan struktur kontrol dan wewenang organisasi, hierarki formal otoritas, pengawasan, definisi pekerjaan, dan prosedur kebijakan yang ditetapkan.

Selain itu, sistem koersif ialah mencerminkan kemampuan organisasi menerapkan fisik, kekuatan menghambat dan sakit untuk non-compliance. Misalnya organisasi kustodian, sistem kontrol memungkinkan penarikan anggota dan hak kebebasan. Keterlibatan dengan organisasi yang berasal dari sistem kontrol koersif mungkin

terasing, paling pasif dengan perasaan negatif dan disassociation. Sistem ini menawarkan berbagai macam imbalan material atau non-material untuk mengamankan kepatuhan anggota. Dalam hal ini, keanggotaan didasarkan pada kontrak dengan organisasi dan tawar-menawar atas hadiah yang diinginkan dengan imbalan kepatuhan, loyalitas, dan kinerja semua unit-unit yang saling terkait.

Selanjutnya Istilah *Compliance* yang di-Indonesiakan dalam penelitian ini adalah “Kepatuhan”, hingga sekarang belum ditemukan makna yang lebih tepat (bervariasi). Istilah kepatuhan sering diasumsikan dengan perawatan yang direkomendasikan (diresepkan) seorang dokter kepada pasien, untuk selalu patuh terhadap nasehat dokter. Dengan kata lain, konsep kepatuhan lebih mungkin ketika ada kesepakatan dan kepercayaan mengenai diagnosa dan prognosis. Penelitian di psikiatri, psikologi, dan sosiologi menyediakan banyak penjelasan untuk variasi yang sesuai. Dalam psikiatri, masalah klinis seperti penyalahgunaan obat-obatan atau alkohol kadang-kadang digunakan untuk menjelaskan ketidakpatuhan. Pasien juga dapat menghentikan minum obat karena efek samping yang tidak diinginkan. Demikian kepatuhan dalam ‘Aisyiyah terus berlangsung karena berdasarkan “normatif moral”.

Dalam psikologi dan sosiologi, kesehatan, kepercayaan, dan perilaku terkait dengan keluarga dan pekerjaan, dapat meningkatkan atau membatasi kepatuhan. Jika anggota keluarga mendukung kepatuhan pengobatan, dan individu percaya manfaat obat itu, maka kepatuhan dapat ditingkatkan. Jika seseorang tidak melanjutkan pengobatan akan membuat dia mengantuk dan mempengaruhi karya, maka kepatuhan dapat dikurangi. Orang-orang yang memiliki akses terbatas atau kepercayaan pada dokter, ilmu kedokteran, dan orang yang menghalangi

mereka dari beberapa perawatan medis, cenderung untuk mematuhi rekomendasi pengobatan.

Sejumlah teori yang mencoba untuk menangkap jenis atau sumber motivasi mempengaruhi anggota organisasi. Misalnya; dalam membahas penyebab internal dan eksternal perilaku, deCharms menyarankan dikotomi ekstrinsik motivasi intrinsik dibandingkan untuk mengkarakterisasi lokus yang berbeda dari kausalitas. Perilaku intrinsik termotivasi dan mewakili kausalitas internal, sedangkan perilaku yang disebabkan kekuatan eksternal dikatakan mewakili kausalitas eksternal. Kemudian dijelaskan efek imbalan ekstrinsik pada motivasi intrinsik dan dalam melakukannya, mencoba menumpahkan beberapa lampu pada arti motivasi intrinsik. Perilaku intrinsik termotivasi jatuh ke dalam dua kategori, yaitu: (a) meliputi perilaku yang individu terlibat dalam mencari situasi yang menantang. Tantangan-tantangan ini merupakan keganjilan antara stimuli dan standar perbandingan; (b) mencakup perilaku yang bertujuan mengurangi keganjilan ini, yaitu mengatasi tantangan.

Kemandirian dan keberlanjutan organisasi ‘Aisyiyah Kota Makassar, dalam konteks sosiologi terkait dengan teori-teori dan konsep-konsep yang dikembangkan penelitian ini, maka beberapa dalil atau teori substantif yang ditarik dari fakta empiris (fenomena sosial) yang dibahas. Dalil atau teori substantif yang dimaksud, secara kasuistik mungkin hanya berlaku di wilayah ‘Aisyiyah Kota Makassar. Namun, dalam pengembangan ilmu khususnya perspektif sosiologi tentang kemandirian dan keberlanjutan sebuah organisasi, yaitu :

1. Kemandirian ‘Aisyiyah Kota Makassar sebagai organisasi otonom, adalah terdiri atas unit-unit yang utuh sekaligus sebagai subsistem dari kompleksitas sistem yang lebih besar, yaitu Muhammadiyah.

Dalam hal ini, ‘Aisyiyah terus bertahan, berkembang, dan mandiri

sejak awal didirikan hingga sekarang karena memiliki komitmen dan perinsip dasar yang kuat untuk mewujudkan visi dan tujuan organisasi melalui :

- a. Medan Visional, ialah lingkup kegiatan, program kerja, dan/atau aktivitas yang mengikat semua anggota dan pengurus ‘Aisyiyah dalam bergerak dan berkontribusi bersama untuk mewujudkan visi dan tujuan organisasi, yaitu “tegaknya agama Islam dan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya”.
 - b. Paradoks Independensi, adalah posisi atau kedudukan ‘Aisyiyah sebagai organisasi otonom senantiasa berada dalam kondisi paradoks (mendua). Di satu sisi, ‘Aisyiyah merupakan sistem yang utuh dalam merealisasikan program kerja dan kebijakan-kebijakan secara mandiri untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Namun, di sisi lain ‘Aisyiyah adalah bagian dari sistem yang lebih besar (subsistem) dari Muhammadiyah.
 - c. Autopoiesis, adalah sistem yang selalu memperbaharui dan memproduksi diri serta menghasilkan unsur-unsurnya sendiri sehingga terus bertahan, dan mandiri. Dalam hal ini, ‘Aisyiyah sebagai subsistem yang terdiri dari unsur-unsur yang utuh senantiasa memproduksi dirinya seiring dengan tuntutan perubahan dan perkembangan dalam kompleksitas sistem untuk memenuhi dan merespon dinamika lingkungan sekitarnya.
2. Keberlanjutan organisasi ‘Aisyiyah sebagai sistem yang utuh, terdiri dari unsur-unsur dan/atau unit-unit yang saling terkait satu sama lain dalam merealisasikan program-program kerja serta kebijakan-kebijakan organisasi secara sistematis dan berkesinambungan dari waktu ke waktu, untuk mencapai visi dan tujuan yang telah ditentukan, melalui :

- a. Input, adalah potensi atau sumber daya yang diterima dari lingkungan eksternal (masyarakat), berupa murid atau siswa untuk unit atau amal usaha di bidang pendidikan, mulai dari Taman Kanak-kanak (TK), SD/MI (Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah), SMP/MTs (Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah), SMA/SMK (Sekolah Menengah Atas/Kejuruan), MA (Madrasah Aliyah) yang dikelola 'Aisyiyah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan.
 - b. Proses, adalah rangkaian kegiatan, program, tindakan, dan langkah yang ditempuh oleh semua unsur atau pihak-pihak terkait (pimpinan, pengurus dan anggota) organisasi ('Aisyiyah) terhadap input yang telah diterima dari lingkungan (masyarakat) sesuai dengan keinginan atau harapan dari input tersebut, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
 - c. Output, adalah hasil yang diharapkan (prodak) dari sebuah proses atau rangkaian kegiatan, program, langkah, dan tindakan yang telah diatur sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku. Dengan demikian, input, proses, dan output adalah rangkaian kegiatan dari sebuah sistem yang saling terkait, sistematis, dan berkelanjutan.
3. Kepatuhan yang dikembangkan dalam 'Aisyiyah sebagai subsistem yang otonom dalam kompleksitas sosial dan lingkungan, ditinjau dari kajian sosiologi adalah sintesis sistem bahwa organisasi mengadopsi untuk mengamankan kepatuhan anggota. Dalam hal ini, kepatuhan anggota organisasi sesuai dengan persyaratan dan mengikuti standar perilaku yang ditetapkan, berorientasi pada tujuan, berkomitmen moral, dan berkontribusi sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dengan demikian, kepatuhan anggota kepada 'Aisyiyah dan kepatuhan

‘Aisyiyah kepada Muhammadiyah, adalah “normatif moral”, bukan remuneratif, bukan insentif, dan bukan paksaan.

- a. Power, adalah berdasarkan koersif, remuneratif, dan normatif. Dalam hal ini, power sebuah organisasi selalu dihubungkan dengan anggota lain melalui hubungan hierarki yang menyebabkan para anggota mempunyai kedudukan lebih tinggi diberi kekuasaan dan kewenangan yang lebih besar, kekuasaan dan kewenangan tersebut diatur dan dilegitimasi. Oleh karena itu, power dalam ‘Aisyiyah memiliki kuasa dan wewenang dalam menata hubungan anggota dengan pengurus.
- b. Keterlibatan, adalah berdasarkan prinsip alienatif, kalkulatif, dan moral. Apabila para anggota bertindak sebagai partisipan yang rendah, maka anggota tersebut merasa terasing atau diasingkan organisasi. Namun, sebaliknya apabila anggota tidak diasingkan maka akan merasa dilibatkan dalam organisasi, dan merasa memiliki organisasi. Dengan demikian, di dalam ‘Aisyiyah adalah keterlibatan berdasarkan “moral”.
- c. Kepatuhan, adalah hubungan yang bersifat *kongruen*, hubungan yang demikian dipandang lebih efektif untuk diterapkan dalam setiap organisasi termasuk ‘Aisyiyah. Dalam hal ini, kepatuhan hubungan yang kongruen akan mengakibatkan organisasi sebagai unit sosial (amal usaha) dapat mempertahankan diri dari tekanan internal maupun eksternal, dalam hal ini adalah Muhammadiyah dan Pemerintah, sehingga ‘Aisyiyah tetap eksis (bertahan), komitmen, mandiri, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, A.G., 2001. *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual ESQ Berdasarkan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam*, Jakarta: Penerbit Arga.
- Ahmadi, Rulam, 2005. *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*. Malang: Universitas Negeri Malang (UM Press).
- Ali, Fachri, dan Bahtiar Effendy. 1986. *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Masa Orde Baru*. Jakarta: Mizan.
- Amien, A. Mappadjantji, 2005. *Kemandirian Lokal: Konsepsi Pembangunan, Organisasi, dan Pendidikan dari Perspektif Sains Baru*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum.
- Amirin, Tatang M. 1984. *Pokok-pokok Teori Sistem*. Jakarta: Rajawali Press.
- Anwar, Dewi Fortuna, (et.al) (ed) 2005. *Konflik Kekerasan Internal: Tinjauan Sejarah, Ekonomi-Politik, dan Kebijakan di Asia Pasifik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, LIPI, (LESMA – CNRS), KITLV.
- Arifin, M. 1991. *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. 1986. *Prosedur Penelitian – Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: CV. Bina Aksara.
- Artir, Mustafa O. (et.al) (ed) 1989. *Sosiologi Modernisasi: Telaah Kritis Tentang Teori, Riset, dan Realitas*. Terj. Hartono Hadikusumo. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Awang, San Afri, 2006. *Sosiologi Pengetahuan Deforestasi: Konstruksi Sosial dan Perlawanan*. Yogyakarta: Debut Press.
- Azhar, Muhammad. 1997. *Filsafat Politik – Perbandingan Antara Islam dan Barat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Barry, John, 1999. *Environment and Social Theory*. New York: Routledge.
- Berger, Peter L., dan Hansfried Kellner, 1985. *Sosiologi Ditafsirkan Kembali: Esei tentang Metode dan Bidang Kerja*. Terj. Herry Joediono. Jakarta: LP3ES.

- Berger, Peter L., dan Thomas Luckmann, 1990. *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. Terj. Hasan Basari. Jakarta: LP3ES.
- Berger, Peter L., 1994. *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial*. Terj. Hartono. Jakarta: LP3ES.
- Bertens, K., 1990. *Filsafat Barat Abad XX: Inggris-Jerman*. Jakarta: Gramedia.
- Bobbi Deporter & Mieke Hernachi, 2002. *Quantum Learning Membiasakan Belajar Nyaman dan Menyenangkan*, Bandung: Kaifa.
- Bodine, Richard J., 1998. *The Handbook of Conflict Resolution Education: a Guide to Building Quality Programs in Schools*. Josse Bass USA.
- Bogdan, Robert, dan Steven J. Taylor, 1993. *Kualitatif: Dasar-dasar Penelitian*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Borgatta, Edgar F., dan Marie L. Borgatta, 1992. *Encyclopedia of Sociology*. Volume 1,2,3,4. New York: Macmillan Publishing Company.
- Brannen, Julia. 1999. *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Terj. H. Nukthah Arfawie Kurde, Imam Safe'i, dan Noorhaedi, H.A. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Brinkerhoff, Derick W., and Goldsmith, Arthur A., 1990. *Institutional Sustainability in Agriculture and Rural Development A Global Perspective*. New York: Westport, Connecticut London.
- Brojonegoro, Arjuno. 2000. *Indonesia Menapak Abad 21-Kajian Ekonomi Politik*. Jakarta: LPSK – LIPI.
- Budiman, Arief, 1996. *Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Idiologi*. Jakarta: Gramedia.
- Budiyanto, 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA Kelas XI*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- _____, 2008. *Majalah Suara 'Aisyiyah No. 11 Tahun ke-85*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Pers 'Aisyiyah.
- Bungin, Burhan, 2001. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.

- Bungin, Burhan (ed.). 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Campbell, Tom. 1994. *Tujuh Teori Sosial; Sketsa Penilaian Perbandingan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Coser, Lewis A., 1966. *The Functions of Social Conflict*. New York: The Free Press-London: Collier-McMillan Limited.
- Criblin, J., 1982. *Leadership Strategies for Organizations Effectiveness*. New York: Amacom.
- Creswell, John W., 1994. *Research Design Qualitative and Quantitative Approaches*. Delhi: SAGE Publication.
- _____, 1997. *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing Among Five Traditions*. India: SAGE Publication.
- Culla, Adi Suryadi, 1999. *Masyarakat Madani, Pemikiran, Teori dan Relevansinya dengan Cita-cita Reformasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Davis & Newstrom, 1981. *Human Behavior at Work: Organizational Behavior*. New York: McGraw-Hill International Editions.
- Djohar, 2003. *Pendidikan Strategik Alternatif Untuk Pendidikan Masa Depan*. Yogyakarta: LESFI.
- Donald P. Kauchosck And Paul D. Eggen, 1998. *Learning And Teaching Research Basid Methods*. Baston: Allya And Baron.
- DuBrin, A.J., 1984. *Foundation of Organizational Behavior an Applied Perspective*. London: Prentice-Hall International Inc.
- Durkheim, Emile. 1984. *The Devision of Labor in Society*. Introduction: Lewis A. Coser. New York: The Free Press.
- Fauzi, Noer, 2005. *Memahami Gerakan-gerakan Rakyat Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Insist Press.
- Feldman, D.C. dan Arnold, H.J., 1983. *Managing Individual and Group Behavior in Organizations*. London: McGraw-Hill International Book Company.
- Fisher, Simon, dkk., 2001. *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Terj. S.N. Karikasari, dkk. Jakarta: The British Council Indonesia.

- Gibson, Ivancevich, Donnelly, 1996. *Organization: Structure, Processes, Behavior*. Dallas: Business Publications Inc.
- Giddens, Anthony. 1981. *Perbedaan Klasik dan Kontemporer Mengenai Kelompok, Kekuasaan dan Konflik*. Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 1984. *The Constitution of Society-Teori Struktural untuk Analisis Sosial*. Pasuruan: Pedati.
- _____, 1986. *Kapitalisme dan Sosial Modern: Suatu Analisis Karya Marx, Durkheim dan Max Weber*. Terj. Soeheba Kramadibrata. Jakarta: UI Press.
- _____, 2004. *Teori Strukturasi Untuk Analisis Sosial*. Terj. Dari judul aslinya: *The Constitution of Society*. Pasuruan: Pedati.
- Giddens, A., (et.al). 2004. *Sosiologi: Sejarah dan Berbagai Pemikirannya*. Terj. Ninik Rochani Sjams, Editor: Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Gilbert H. Hunt, et al., 1999. *Efectie Teaching, Preparation And Implementation*. Illinois: Charless C. Thomas Publiesher.
- Ginting, C., 2003. *Kiat Belajar di Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT Gramedia.
- Goldschider, Calvin. 1985. *Populasi, Modernisasi, dan Struktur Sosial*. Terj. Nin Bakdi Sumanto. Jakarta: CV. Rajawali.
- Greenberg, Edward S., 1990. *State Changes: Approaches and Concept*, dalam Edward S. Greenberg dan Thomas F. Mayer (eds), 1990. *Changes in the State: Causes and Consequences*. Newbury Park California: Sage Publication.
- Hamid, Abu, 1994. *Syeh Yusuf: Seorang Ulama, Sufi dan Pejuang*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hardiman, Fransisco Budi, 2004. *Kritik Ideologi: Menyingkap Kepentingan Pengetahuan Bersama Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Penerbit Buku Baik.
- Harris, Marvin. 1979. *Cultural Materialism: The Struggle for a Science of Culture*. New York: Random House.
- Henslim, James M. 2007. *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi, Edisi 6, Jilid 1*. Terj. Kamanto Sunarto. Jakarta: Erlangga.
- Hunsaker, Phillip L., 2001. *Training in Management Skills*. New Jersey: Prentice Hall.

- Jerry Aldridge, and Renetta Soldman, 2002. *Current Issues And Trends In Education*. Boston, USA: Allya And Baron.
- Johnson, Doyle Paul, 1990. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern (2)*. Terj. Robert M.Z. Lawang. Jakarta: Gramedia.
- _____, 1994. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern (1)*. Terj. Robert M.Z. Lawang. Jakarta: Gramedia.
- Juwono, Sudarmawan. 2009. *Teori Tindakan Rasional dan Moral. Online* (<http://sukawayang.wordpress.com/2009/02/03>).
- Kartodirdjo, Sartono, 1982. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Kerlinger, Fred N. 2002. *Asas-asas Penelitian Behavioral*. Terj. Landung R. Simatupang. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Koentjaraningrat (ed). 1990. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Kuntowijoyo, 2000. *Kesadaran dan Perilaku dalam Menuju Tata Indonesia Baru*. Editor: Selo Sumardjan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kuper, Adam & Jasica Kuper. 2000. *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*. Terj. Haris Munandar (et.al), dari judul aslinya: *The Social Sciences Encyclopedia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Laeyendecker, L., 1983. *Tata, Perubahan, dan Ketimpangan: Suatu Pengantar Sejarah Sosiologi*. Terj. Samekto. Jakarta: Gramedia.
- Liliweri, Alo. 1997. *Sosiologi Organisasi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Lauer, Robert H. 1993. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. Terj. Alimandan. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Lederach, J, Building Oeace: 1997. *Sustainable Reconciliation in Diveded Societies*. Washington .D.C: USIP Press.
- Luthans, F., 1985. *Organizational Behavior*. New York: McGraw-Hill Bokk Company.
- Magnis Suseno, Frans, 1999. *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: Gramedia.
- Maksum A., dan Ruhendi, L.Y., 2004. *Paradigma Pendidikan Universal di Era Modern dan Post-Modern Mencari Visi*

- Baru' atas 3Realitas Baru' Pendidikan Kita*. Yogyakarta: Penerbit IRCiSoD.
- Merton, Robert King, 1968. *Social Theory and Social Structure*. Edition. New York: Enlarged Free Press.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J. 1995. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, Noeng H. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metafisik, Telaah Studi Teks & Penelitian Agama*. Yogyakarta: Rakesarasin.
- Muhadjir, Noeng, 2007. *Metodologi Keilmuan*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Mulkham, Abdul Munir. 1989. *Perubahan Perilaku Politik dan Polarisasi Ummat Islam 1965 – 1987 dalam Perspektif Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mulwoso, E., 2002. *Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsp, Karakteristik dan Implementas*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa. E. 2004. *Menjadi Kepala Sekolah yang Profesional*. Banaung: PT Remaja Rosdakarya.
- Munandar, AS., 1987. *Manajemen Konflik dalam Organisasi, Seminar Strategi Pengendalian Konflik dalam Organisasi*. Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Narwoko, J. Dwi, dan Bagong Suyanto (ed.). 2006. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana.
- Nasikun, 2000. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nasir, Moh. 1985. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nashir, Haedar. 1999. *Pragmatisme Politik Kaum Elit*. Pustaka Yogyakarta: Pelajar.
- _____ 2000. *Perilaku Politik Elit Muhammadiyah*. Yogyakarta: Tarawang.
- Nattingham, Elizabeth K. 1997. *Agama dan Masyarakat: Suatu Pengantar Sosiologi Agama*. Terj. Abdul Muis Naharong, dari judul aslinya: *Religion and Society*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Nawawi, H. Hadari. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ndraha, Taliziduhu. 1990. *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- North, Douglass C., 2007. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. New York: Cambridge University Press.
- Owens, R.G., 1991. *Organization Behavior in Education*. Boston: Allyn and Bacon.
- Paloma, Margaret M., 2004. *Sosiologi Kontemporer*. Terj. Tim Yasogama. Jakarta: Rajawali Pers.
- Parsons, Talcott. 1969. *Political and Social Structure*. New York: The Free Press.
- Papayungan, M.M. 1992, *Metode Penelitian Ilmu Sosial (Teori & Praktek)*. Ujung Pandang: Pusat Studi Kependudukan UNHAS.
- Philipus, Ng dan Nurul Aini. 2004. *Sosiologi dan Politik*. Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Punch, Keith F. 1998. *Introduction to Social Research Quantitative and Qualitative Approaches*. New Delhi: SAGE Publication.
- Paulo Freire, 2002. *Politik Pendidikan dan Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan*. Yogyakarta: Kerjasama Pustaka Pelajar dan ead.
- Polak, M., 1982. *Sosiologi: Suatu Buku Pengantar Ringkas*. Jakarta: PT Ictiar Baru.
- Prabu-Mangkunegara A., 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Rosdakarya.
- Priyono, B. Herry, 2003. *Anthony Giddens Suatu Pengantar*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).
- Rahardjo, M. Dawan. 1993. *Intelektual Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa*. Bandung: Mizan.
- Raho, Bernard, 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

- Ritzer, George, 1992. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Terj. Alimandan. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____, 1992. *Sociological Theory*. Third Edition. Singapore: McGraw-Hill Co-International Edition.
- Ritzer, George, dan Douglas J. Goodman. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Terj. Alimandan. Jakarta: Kencana.
- Robbins, Stephen P., 1990. *Organization Theory: Structure, Design and Applications*. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
- , 2003. *Organizational Behavior*. Diterjemahkan oleh Indeks. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Rosyada, Dede, 2004. *Paradigma Pendidikan Demokratis Sebuah Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media.
- Rusmadi. 2008. *Krisis Lingkungan Dalam Bingkai Teori Strukturasi: Antara Governance dan Governmentality Lingkungan*. (online), (http://rusmadi-rusmadi.blogspot.com/2008/02/artikel_1848.html, diakses 01 Maret 2008)
- Salim, Agus, 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Buku untuk Penelitian Kualitatif*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sanderson, Stephen K., 2003. *Sosiologi Makro; Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas*. Terj. Farid Wajidi dan S. Menno. Jakarta: PT. Raja grafindo Persada.
- Sanit, Arbi. 1985. *Swadaya Politik Masyarakat: Telaah Tentang Keterkaitan Organisasi Masyarakat, Partisipasi Politik, Pertumbuhan Hukum, dan Hak Asasi*. Jakarta: CV. Rajawali.
- _____. 2000. *Badai Revolusi: Sketsa Kekuasaan Politik PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Schermerhorn, R. A., 1987. *Masyarakat dan Kekuasaan*. Terj. Soerjono Soekanto & Agus Brotosusilo. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santoso, Priyo Budi. 1993. *Birokrasi Pemerintah Orde Baru : Perspektif Cultural dan Struktural*. Jakarta: Rajawali Perss.

- Sedarmayanti, 2000. *Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan Ditinjau dari Beberapa Aspek Esensial dan Aktual*. Bandung: CV Mandar Maju.
- _____, 2001. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Siahaan, Hotman M., 1997. *Dinamika Politik Kelompok Marginal, dalam Basis Susilo* (ed). *Masyarakat dan Negara*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Simmel, Georg, 1995. *Conflict and the Web of Group-Affiliations*. New York: The Free Press.
- Siswanto, Sastrohadiwiryono B., 2002. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia: Pendekatan Administratif dan Operasional*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Smith, Eugene D., 1985. *Agama dan Modernisasi Politik – Suatu Kajian Analitis*. Terj. Mahnun Husein. Jakarta: CV. Rajawali.
- Soekanto, Soerjono, dan Winarno Yudho. 1986. *Georg Simmel: Beberapa Teori Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sodiq. A. Kuntoro., 1985. *Dimensi Manusia dalam Pemikiran Indonesia*. Yogyakarta: CV Bur Cahaya.
- Soekanto, Soerjono, 1991. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Spradley, James P. 1997. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Strike, K.A dan Soltis, J.F., 2003. *Etika Profesi Kependidikan, Alih Bahasa F. Sinaradi*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma.
- Subuki, Makyun. 2006. *Komunikasi dalam Interaksionisme Simbolis, Strukturasi, dan Konvergensi*. (online), <http://tulisanmakyun.blogspot.com/2008/02/teori-komunikasi-29.html>, diakses 01 Maret 2008)
- Sudarwan, Danim, 2003. *Agenda Pemabruan Sistem Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susan, Novri. 2009. *Sosiologi Konflik: Isu-isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

- Susetiawan, 1999. *Harmoni, Stabilitas Politik dan Kritik Sosial : Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan*. Yogyakarta: UII Press.
- _____ 2000. *Konflik Sosial: Kajian Sosiologis Hubungan Buruh, Perusahaan dan Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syahatah, H., 2004. *Kiat Islami Meraih Prestasi*. Jakarta: Gema Insani.
- Syamsuddin, Din. 2000. *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*. Jakarta: Logos.
- Sztompka, Piotr. 2004. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Terj. Alimandan, Editor: Triwibowo Budi Santoso, dari judul aslinya: *The Sociology of Social Change*. Jakarta: Prenada.
- Tahel, Elza Peldi (ed). 1994. *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi: Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru*. Jakarta: Paramadina.
- Taneko, Soleman B. 1996. *Konsepsi Sistem Sosial dan Sistem Sosial Indonesia*. Bandar Lampung: Fajar Agung.
- Tilaar, H.A R., 2004. *Manajemen Pendidikan Nasional Kajian Pendidikan Masa Depan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Tosi, H.L., Rizzo, J.R. & Carrol, S.J., 1990. *Managing Organizational Behavior*. (2nd Edition). New York: Harper Collins Publihsers.
- Turner, Bryan S. 1984. *Sosiologi Islam: Suatu Telaah Analitis atas Tesa Sosiologi Weber*. Terj. G.A. Ticoalu, dari judul aslinya: *Weber and Islam*. Jakarta: CV. Rajwali.
- _____ 1994. *Runtuhnya Universalitas Sosiologi Barat*. Terj. Sirojuddin (et.al), dari judul aslinya: *Orientalism, Postmodernism and Globalism*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Press.
- Turner, Jonathan H., 1991. *The Structure Of Sociological Theory*. Belmont California: Wodsworth Inc.
- Veeger, K.J. 1993. *Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Wahyudi, Akdam H. 2005. *Manajemen Konflik dalam Organisasi: Pedoman Praktis bagi Pemimpin Efektif*. Bandung: Alfabeta.
- Wallace, Walter L. 1994. *Metode Logika Ilmu Sosial*. Terj. Yayasan Solidaritas Gajah Mada. Jakarta: Bumi Aksara.
- Warsito, Tulus. 1999. *Pembangunan Politik: Refleksi Atas Krisis*. Jakarta: Bigraf Publishing.
- Warnaen, Suwarsih. 2002. *Stereotip Etnis Dalam Masyarakat Multietnis*. Yogyakarta: Mata Bangsa.
- Walton, R.E., 1987. *Managing Conflict: Interpersonal Dialogue and Third-Party Roles*. (2nd Edition). Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company.
- Weber, Max, 1964. *The Theory of Social and Economic Organization*. New York: The Free Press.
- _____ 2000. *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*. Terjemahan Yusup Priyasudiarja. Surabaya: Pustaka Prometheus.
- _____ 2002. *Sosiologi Agama*. Terj. Muhammad Yamin, dari judul asli: *The Sociology of Religion*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- _____ 2009. *Sosiologi From Max Weber: Essays in Sociology*. Terj. Noorkholis dan Tim Penerjemah Prometheus. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widyanta, A. B., 2002. *Problem Modernitas dalam Kerangka Sosiologi Kebudayaan Georg Simmel*. Yogyakarta: Cindélaras.
- Weilenman, Alexander. 1994. *Riset Evaluasi dan Perubahan Sosial*. Terj. H. Soenarwan. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Wertheim, W. F., 1999. *Masyarakat Indonesia Dalam Transisi Studi Perubahan Sosial*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Winardi, 1994. *Manajemen Konflik: Konflik Perubahan dan Perbandingan*. Bandung: Mandar Mamuju.
- Windhu, Marsana I. 1992. *Kekuasaan dan Kekerasan : Menurut Johan Galtung*. Jakarta: Kanisius.
- Worsley, Peter, (et.al). 1992. *Introducing Sociology*. Diterjemahkan oleh Hartono Hadikusumo, dengan judul: *Pengantar*

- Sosiologi-Sebuah Pembandingan*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Wuisman, J.J.J.M. 1996. *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Yin, Robert K. 1997. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yusup, Yusmar. 1988. *Dinamika Kelompok: Kerangka Studi dalam Perspektif Psikologi Sosial*. Bandung: Armico.
- Zeitlin, Irving M. 1998. *Memahami Kembali Sosiologi (Kritik Terhadap Sosiologi Kontemporer)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

<i>Abnormal</i>	:	Kehidupan diluar kebiasaan normal.
<i>Actor Network Theory</i>	:	Teori jaringan actor
<i>Alienasi</i>	:	Proses keterasingan manusia terhadap hasil produksi atau manusia.
<i>Altruistis</i>	:	Bunuh diri akibat integrasi kuat.
<i>Anarkisme Epistemologi</i>	:	Kritik terhadap metode.
<i>Anomie</i>	:	Bunuh diri akibat regulasi rendah
<i>Auschwitz</i>	:	Manusia diambang kehidupan dan kematian
<i>Back Stage</i>	:	Panggung bagian belakang tempat individu mempersiapkan perannya.
<i>Banking Education</i>	:	Proses pendidikan transfer ilmu pengetahuan
<i>Borjuis</i>	:	Kaum kelas atas atau bangsawan.
<i>Dekonstruksi</i>	:	Pembongkaran atau anti metode
<i>Dialektika</i>	:	Mempersatukan hal-hal yang bertentangan.
<i>Diferensiasi Kultural</i>	:	Pembedaan budaya di dalam dunia.
<i>Domestifikasi</i>	:	Proses pendidikan yang menjinakkan.
<i>Dramaturgi</i>	:	Dunia sebagai panggung sandiwaranya.
<i>Egaliter</i>	:	Persamaan hak antara kaum borjuis dan ploretar
<i>Egoistis</i>	:	Bunuh diri akibat integrasi lemah.
<i>Ethnoscape</i>	:	Penyebaran manusia.
<i>Fatalistis</i>	:	Bunuh diri akibat regulasi tinggi.
<i>Financescape</i>	:	Penyebaran uang
<i>Fordisme</i>	:	Istilah untuk ciri-ciri masyarakat modern
<i>Fristspace</i>	:	Ruang kota sebagai ruang fisik.
<i>Front Stage</i>	:	Panggung bagian depan yang memungkinkan setiap individu memainkan perannya.
<i>Gesture</i>	:	Bahasa isyarat dengan menggunakan bahasa tubuh.
<i>Globalisasi</i>	:	Proses homogenisasi.
<i>Glokalisasi</i>	:	Proses heterogenisasi
<i>Grobalisasi</i>	:	Penyebaran bentuk-budaya yang

	:	kosong.
Hegemoni	:	Pengaruh kekuasaan dan struktur budaya.
Hibridasi Budaya	:	Percampuran budaya lokal dan budaya global
<i>Hiperrealitas</i>	:	Pembentukan realitas baru diatas realitas.
Hukum Refresif	:	Adalah hokum yang diterapkan pada masyarakat tradisional/ mekanik.
Hukum Restitutif	:	Hokum yang diterapkan pada masyarakat modern/ organic.
<i>Holocaust</i>	:	Pembantaian manusia melalui sistem birokrasi makanan siap saji.
<i>Hyperscape</i>	:	Ruang yang kurang memberikan petunjuk.
Kapital Monopolitik	:	Segelintir orang yang mengendalikan sektor ekonomi.
Kapitalisme Informasional	:	Pemilik modal jaringan informasi.
<i>Kemp</i>	:	Zona abu-abu
Konfusianisme	:	Paham yang mementingkan pendidikan kesastraan
Kontigensi Rangkap	:	Pertimbangan komunikasi diterima atau tidak diterima.
Konvergensi Budaya	:	Proses penyatuan budaya-budaya global.
<i>Landscape</i>	:	Proses penyebaran.
Logosenterisme	:	Pembenaran terhadap sesuatu.
Lubang Hitam	:	Media massa yang menyerap semua makna informasi menjadi tidak bermakna.
Marxian	:	Penganut teori konflik Karl Marx
<i>Mediascape</i>	:	Penyebaran media
<i>Mind</i>	:	Konsep pikiran
<i>Mode Economizing</i>	:	Kepentingan ekonomi
<i>Mode Sociologizing</i>	:	Kepentingan umum
Nagasi Dialektika	:	Penciptaan teknologi yang menghancurkan manusia.
Pencerahan	:	
<i>Off Stage</i>	:	Panggung individu memainkan peranan sesuai dengan dirinya sendiri.

Pemadatan Ruang-Waktu	:	Era posmodern yang memusnakan ruang melalui waktu yang efisien.
Perang Ruang		Perang untuk mendapatkan akses dalam mencapai semua ruang di seluruh dunia.
<i>Ploretar</i>		Kaum kelas bawah atau buruh.
<i>Posfordisme</i>		Istilah untuk masyarakat posmodern.
Produksi Ruang	:	Penciptaan ruang-ruang baru.
<i>Queer</i>	:	Gagasan tentang identitas yang tidak tetap dan stabil.
<i>Reifikasi</i>	:	Proses percaya bahwa bentuk-bentuk social yang diciptakan secara manusiawi.
Rekonstruksi Akal	:	Membangun kembali pemikiran.
Ruang Harapan	:	Perlawanan terhadap ruang geografis dan pasar yang tereksplorasi.
<i>Self</i>	:	Bentuk kedirian yang memiliki dimensi <i>I</i> dan <i>Me</i> .
<i>Simulacrum</i>	:	Salinan dari salinan
Sistem Otopoietik	:	Keragaman sistem mulai dari biologis sampai sistem seluruh masyarakat.
<i>Social Dynamic</i>	:	Perkembangan dan kemajuan masyarakat
Solidaritas Mekanik	:	Solidaritas yang berdasarkan kekerabatan atau emosional.
Solidaritas Organic	:	Solidaritas berdasarkan kepentingan dan hubungan kerja
Strukturasi	:	Gabungan struktur dan aktor
<i>Suicide</i>	:	Fenomena bunuh diri.
<i>Taoisme</i>	:	Paham yang anti inovasi.
<i>Technoscape</i>	:	Penyebaran teknologi
Teologi Pembebasan	:	Perjuangan terhadap segala bentuk ketidakadilan.
Totemisme	:	Kepercayaan kepada kekuatan atau pemujaan terhadap binatang
Tragedi Kebudayaan	:	Jurang antara kebudayaan objektif dengan subjektif.
<i>Verstehem</i>	:	Memahami penomena social.
Virus Rasionalitas	:	Virus gerakan pencerahan.



Nursalam, lahir di Enrekang pada tahun 1960 oleh pasangan Katanni, dan Hj. Sariba, sebagai anak terakhir dari tiga orang bersaudara. menamatkan Pendidikan Dasar di SDN 2 Enrekang Kabupaten Enrekang 1972, Tingkat Menengah Pertama PGAN 4 tahun di Kabupaten Enrekang 1975, dan sekolah menengah atas di PGAN 6 tahun di Kabupaten pada tahun 1979, kemudian melanjutkan di Universitas Veteran RI ujung Pandang Jurusan Pendidikan Umum, dan tamat pada tahun 1986. Tahun 1988 di angkat menjadi Dosen Kopertis wilayah IX di pekerjaan di Universitas Muhammadiyah Makassar, tahun 1999 melanjutkan pendidikan pada Program Megister di Universitas Hasanuddin Bidang Kajian Komunikasi Pendidikan, dan menyelesaikan studi pada tahun 2003. Tahun 2004 diangkat menjadi Sekretaris Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, dan menjadi Ketua Jurusan Pendidikan Sosiologi pada tahun 2006 sampai sekarang. Tahun 2008 melanjutkan pendidikan pada Program Doktor di Universitas Negeri Makassar bidang kajian Sosiologi. Buku-buku yang perna ditulis seperti Strategi Pembelajaran Suatu Ide Pembelajaran Inovatif di Sekolah, Evaluasi Pembelajaran Sosiologi, Teori Sosiologi Klasik, Modern, Postmoden, Saintifik, Hermenetik, Kritis, Evaluatif dan Integratif, dan Sosiologi Pengantar Masyarakat Indonesia.



Suardi. Lahir di Bantaeng, pada tanggal 5 Mei 1986. Anak pertama dari tiga bersaudara dan merupakan buah kasih sayang dari pasangan Bahrin dan Husnia. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SD 34 Bungung Katammu mulai tahun 1994 sampai tahun 1999. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Mts Muhammadiyah Panaikang dan tamat pada tahun 2002. Kemudian pada tahun 2003 penulis melanjutkan pendidikan di MA.Muhammadiyah Panaikang dan tamat tahun 2005. Kemudian pada tahun 2007 penulis berhasil lulus pada jurusan pendidikan Sosiologi, Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar program strata 1 (S1) kependidikan. Dalam organisasi intra kampus penulis pernah menjadi pengurus HMJ sebagai wakil bidang tahun 2008-2009, dan menyelesaikan studi pada tahun 2011 dengan gelar serjana pendidikan. Selanjutnya pada tahun 2012 melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Makassar pada Program Studi Pendidikan Ilmu Sosial Kekhususan Pendidikan Sosiologi, dan menyelesaikan studi pada tahun 2014. Aktivitas sehari-hari memfokuskan diri untuk mengajar, mendidik dan mencoba membuat buku, yang akan dijadikan sebagai bahan ajar atau buku referensi di Universitas Muhammadiyah Makassar, terkhusus pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Buku-buku yang pernah ditulis seperti Strategi Pembelajaran Suatu Ide Pembelajaran Inovatif di Sekolah, Evaluasi Pembelajaran Sosiologi, Teori Sosiologi Klasik, Modern, Postmodern, Saintifik, Hermenetik, Kritis, Evaluatif dan Integratif, Sosiologi Pengantar Masyarakat Indonesia, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Sosiologi Komunitas Menyimpang. Sedangkan buku “Sosiologi Organisasi” merupakan buku ketujuh yang dibuat untuk dijadikan referensi bagi yang ingin memperdalam kajian tentang Organisasi dari sudut pandang sosiologi dan lebih khusus lagi pada organisasi ‘Aisyiyah.

'Aisyiyah lahir pada tahun 1917 saat situasi dan kondisi masyarakat Indonesia dalam keterbelakangan, kemiskinan, tidak terdidik, awam dalam pemahaman keagamaan, dan berada dalam zaman penjajahan belanda. Kondisi perempuan semakin memprihatinkan ketika pada saat yang sama dibalut dengan budaya masyarakat yang bersifat patriarki, menempatkan perempuan tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam yang memuliakan dan menjunjung tinggi martabat kaum perempuan. KH. Ahmad Dahlan bersama Nyai Siti Walidah menaruh perhatian besar dan memberikan jalan keluar yang berjangka panjang dalam bentuk usaha terobosan atas kondisi kaum perempuan yang tidak beruntung dari berbagai aspek kehidupan tersebut. Dengan spirit dan pandangan agama berwawasan tajdid (pembaruan), menjadi keyakinan dan pandangan Kyai Dahlan terhadap kaum perempuan dan umat Islam umumnya, maka diadakan kegiatan-kegiatan pencerahan bagi kaum perempuan muda yang disebut *Sopo Tresno* dan selanjutnya disebut *gerakan 'Aisyiyah*.

Buku ini terdiri dari lima pembahasan, yaitu BAB I, membahas tentang "Perkembangan 'Aisyiyah". BAB II, membahas tentang "Organisasi 'Aisyiyah". BAB III, membahas tentang "Dinamika Kemandirian Organisasi 'Aisyiyah". BAB IV membahas tentang "Keberlanjutan Organisasi 'Aisyiyah". BAB V, membahas tentang "Dinamika Kepatuhan Organisasi 'Aisyiyah". Selama penyusunan buku ini, penulis mendapatkan berbagai dukungan dari berbagai pihak seperti dari Sekretaris Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Dr. Muhammad Akhir, S.Pd., M.Pd, Ketua Program Studi Pendidikan Sosiologi Drs. H. Nurdin, M.Pd, Dekan Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan Erwin Akib, M.Pd.,Ph.D, dan dari bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Prof. Dr. Rahman Rahim, M.M, dan dosen-dosen se-Universitas Muhammadiyah Makassar, terkhusus pada Program Studi Pendidikan Sosiologi.



ISBN 978-623-7200-62-8

